



KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA



2019

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

AUDITED



**Bagian Anggaran 013
Kementerian Hukum Dan HAM RI**



Laporan Keuangan

**Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

**Semester II
Tahun Anggaran 2019
*(Audited)***

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan
Jakarta Selatan



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 20 April 2020
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	xi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	2
II. NERACA	3
III. LAPORAN OPERASIONAL	4
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	5
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6
A. PENJELASAN UMUM	6
A.1. DASAR HUKUM	6
A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	6
A.2.1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	6
A.2.2. VISI, MISI, NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	7
A.2.3. ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9
A.2.4. RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN	10
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	12
A.4. BASIS AKUNTANSI	13
A.5. DASAR PENGUKURAN	13
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	31
B.1. PENDAPATAN	31
B.2. BELANJA	41
B.2.1. BELANJA PEGAWAI	43
B.2.2. BELANJA BARANG	46
B.3. BELANJA MODAL	54
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	63
C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	63
C.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	65
C.3. BELANJA DIBAYAR DI MUKA	67
C.4. UANG MUKA BELANJA	70
C.5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	71
C.6. PIUTANG BUKAN PAJAK	72
C.7. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR	73
C.8. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH – PIUTANG LANCAR	75
C.9. PERSEDIAAN	76
C.10. TAGIHAN TP/TGR	79
C.11. PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA	81
C.12. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PANJANG	82

	Hal
C.13. TANAH	84
C.14. PERALATAN DAN MESIN	93
C.15. GEDUNG DAN BANGUNAN	101
C.16. JALAN,IRIGASI, DAN JARINGAN	118
C.17. ASET TETAP LAINNYA	123
C.18. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)	126
C.19. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	129
C.20. ASET TAK BERWUJUD	135
C.21. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	139
C.22. ASET LAIN-LAIN	140
C.22.1 ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN	141
C.22.2 ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN	145
C.23. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA	147
C.24. UANG MUKA DARI KPPN	148
C.25. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	150
C.26. HIBAH YANG BELUM DISAHKAN	152
C.27. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	152
C.28. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	153
C.29. EKUITAS	158
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	159
D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	159
D.2. BEBAN PEGAWAI	165
D.3. BEBAN PERSEDIAAN	169
D.4. BEBAN BARANG DAN JASA	171
D.5. BEBAN PEMELIHARAAN	176
D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS	179
D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	181
D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	183
D.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	184
D.10. KEGIATAN NON OPERASIONAL	186
D.10.1. PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR	186
D.10.2. BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR	187
D.10.3. PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	188
D.10.4. BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	191
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	193
E.1. EKUITAS AWAL	193
E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO	193
E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	193
E.3.1. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	193
E.3.2. KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	194
E.3.3. SELISIH REVALUASI ASET	194
E.3.4. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	194
E.3.5. KOREKSI LAIN-LAIN	194
E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	195

	Hal
E.4.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)	195
E.4.2. TRANSFER KELUAR/TRANSFER MASUK	195
E.4.3. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG	200
E.4.4. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAHUN ANGGARAN YANG LALU	200
E.5. EKUITAS AKHIR	200
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.	201
F.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	201
F.2. PENYAJIAN KOREKSI NILAI HASIL REVALUASI	201
F.3. PERMASALAHAN PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2019	206
F.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	218
F.5. PENGUNGKAPAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA	222
F.6. TINDAK LANJUT PENYELESAIAN TEMUAN BPK	229



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Per 31 Desember 2019	11
Tabel 2	Perhitungan Penyisihan Piutang	15
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	28
Tabel 4	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	29
Tabel 5	Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2019	31
Tabel 6	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per TA 2019	32
Tabel 7	Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2019 dan TA 2018	33
Tabel 8	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	34
Tabel 9	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	36
Tabel 10	Rincian pengembalian pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	37
Tabel 11	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	38
Tabel 12	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	38
Tabel 13	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya	39
Tabel 14	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	39
Tabel 15	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda	40
Tabel 16	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain	41
Tabel 17	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019	42
Tabel 18	Perbandingan Realisasi Belanja Negara TA 2019 dan TA 2018	42
Tabel 19	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I	43
Tabel 20	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018	43
Tabel 21	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2019	44
Tabel 22	Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018	46
Tabel 23	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang TA 2019	47
Tabel 24	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional TA 2019	47
Tabel 25	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional TA 2019	48
Tabel 26	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Persediaan TA 2019	49
Tabel 27	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa TA 2019	50
Tabel 28	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan TA 2019	51
Tabel 29	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2019	52
Tabel 30	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2019	53
Tabel 31	Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2019	54
Tabel 32	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019	54
Tabel 33	Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019	55
Tabel 34	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019	57
Tabel 35	Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58
Tabel 36	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019	59
Tabel 37	Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	60
Tabel 38	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Lainnya TA 2019	60
Tabel 39	Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Lainnya	61
Tabel 40	Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 dan 2018	63
Tabel 41	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	63

Tabel 42	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019	64
Tabel 43	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	65
Tabel 44	Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	66
Tabel 45	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019	66
Tabel 46	Perbandingan Rincian Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	67
Tabel 47	Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	67
Tabel 48	Rincian Belanja Dibayar Dimuka berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2019	68
Tabel 49	Perbandingan Rincian Uang Muka Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	70
Tabel 50	Perbandingan Uang Muka Belanja Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	70
Tabel 51	Perbandingan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	71
Tabel 52	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2019	71
Tabel 53	Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	72
Tabel 54	Perbandingan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	73
Tabel 55	Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	73
Tabel 56	Perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	74
Tabel 57	Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	74
Tabel 58	Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	76
Tabel 59	Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	77
Tabel 60	Perbandingan Nilai Persediaan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	77
Tabel 61	Rincian Kerugian Persediaan Rusak/Usang berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	78
Tabel 62	Koreksi Lebih/Kurang Catat Persediaan berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	78
Tabel 63	Koreksi Lebih/Kurang Catat Persediaan berdasarkan Kelompok Persediaan Per 31 Desember 2019	79
Tabel 64	Perubahan Nilai Persediaan dari Unaudited menjadi Audited	79
Tabel 65	Perbandingan Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2019	80
Tabel 66	Rincian Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	80
Tabel 67	Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 2019	82
Tabel 68	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2019	82
Tabel 69	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	83

Tabel 70	Perbandingan Nilai Tanah Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31	84
Tabel 71	Koreksi Lebih/Kurang Catat Unaudited Tanah berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	84
Tabel 72	Perubahan Nilai Tanah dari Unaudited I menjadi Unaudited II Per 31 Desember 2019	85
Tabel 73	Koreksi Lebih/Kurang Catat Audited Tanah berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	85
Tabel 74	Perubahan Nilai Tanah dari Unaudited II menjadi Audited Per 31 Desember 2019	86
Tabel 75	Rincian Mutasi Tanah	86
Tabel 76	Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019	93
Tabel 77	Koreksi Lebih/Kurang Catat Audited Peralatan dan Mesin berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	94
Tabel 78	Perubahan Nilai Peralatan dan Mesin dari Unaudited menjadi Audited Per 31 Desember 2019	94
Tabel 79	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019	94
Tabel 80	Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	101
Tabel 81	Koreksi Lebih/Kurang Catat Unaudited Gedung dan Bangunan berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	102
Tabel 82	Perubahan Nilai Gedung dan Bangunan dari Unaudited I menjadi Unaudited II Per 31 Desember 2019	103
Tabel 83	Koreksi Lebih/Kurang Catat Audited Gedung dan Bangunan berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	103
Tabel 84	Perubahan Nilai Gedung dan Bangunan dari Unaudited II menjadi Audited I Per 31 Desember 2019	105
Tabel 85	Perubahan Nilai Gedung dan Bangunan dari Audited I menjadi Audited II Per 31 Desember 2019	105
Tabel 86	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	105
Tabel 87	Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	118
Tabel 88	Koreksi Lebih/Kurang Catat Unaudited Jalan berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	118
Tabel 89	Koreksi Lebih/Kurang Catat Unaudited Irigasi berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	119
Tabel 90	Perubahan Nilai Jalan dan Irigasi dari Unaudited I menjadi Unaudited II Per 31 Desember 2019	119
Tabel 91	Perubahan Nilai Irigasi dari Unaudited II menjadi Audited I Per 31 Desember 2019	119
Tabel 92	Perubahan Nilai Irigasi dari Audited I menjadi Audited II Per 31 Desember 2019	119
Tabel 93	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	120
Tabel 94	Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	123
Tabel 95	Rincian Transaksi Mutasi Aset Tetap Lainnya	124
Tabel 96	Rincian Nilai KDP Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember	127
Tabel 97	Perubahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Unaudited menjadi Audited Per 31 Desember 2019	127
Tabel 98	Rincian Mutasi KDP	127
Tabel 99	Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	129

Tabel 100	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	130
Tabel 101	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dari Unaudited menjadi Audited Per 31 Desember 2019	130
Tabel 102	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	130
Tabel 103	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dari Unaudited I menjadi Unaudited II Per 31 Desember 2019	131
Tabel 104	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	132
Tabel 105	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dari Unaudited II menjadi Audited I Per 31 Desember 2019	133
Tabel 106	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dari Audited I menjadi Audited II Per 31 Desember 2019	134
Tabel 107	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan dan Irigasi berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	134
Tabel 108	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan dan Irigasi dari Unaudited I menjadi Unaudited II Per 31 Desember 2019	134
Tabel 109	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Irigasi berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	134
Tabel 110	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Irigasi dari Unaudited II menjadi Audited I Per 31 Desember 2019	135
Tabel 111	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Irigasi dari Audited I menjadi Audited II Per 31 Desember 2019	135
Tabel 112	Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2019	135
Tabel 113	Rincian Aset Tak Berwujud Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	136
Tabel 114	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2019	136
Tabel 115	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	136
Tabel 116	Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	139
Tabel 117	Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Jenis Aset Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	140
Tabel 118	Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Berdasarkan Unit Eselon I	141
Tabel 119	Koreksi Lebih/Kurang Catat Unaudited Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	142
Tabel 120	Perubahan Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dari Unaudited I menjadi Unaudited II Per 31 Desember 2019	142
Tabel 121	Koreksi Lebih/Kurang Catat Audited Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	142
Tabel 122	Perubahan Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dari Unaudited II menjadi Audited Per 31 Desember 2019	142
Tabel 123	Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	143
Tabel 124	Rincian Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	145

Tabel 125	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	146
Tabel 126	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	147
Tabel 127	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dari Unaudited I menjadi Unaudited II Per 31 Desember 2019	147
Tabel 128	Koreksi Lebih/Kurang Catat Audited Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	148
Tabel 129	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dari Unaudited II menjadi Audited Per 31 Desember 2019	148
Tabel 130	Perbandingan Uang Muka dari KPPN Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	148
Tabel 131	Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019	149
Tabel 132	Rincian Jenis Utang Pihak Ketiga Per 31 Desember 2019	150
Tabel 133	Rincian Jenis Utang Pihak Ketiga Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019	151
Tabel 134	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	151
Tabel 135	Perbandingan Hibah Yang Belum Disahkan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	152
Tabel 136	Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	153
Tabel 137	Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019	153
Tabel 138	Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	153
Tabel 139	Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019	154
Tabel 140	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	159
Tabel 141	Perbandingan Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	161
Tabel 142	Rincian Selisih PNB-LO dan PNB-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	161
Tabel 143	Penjelasan Selisih Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	163
Tabel 144	Rekapitulasi Selisih Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	165
Tabel 145	Perbandingan Beban Pegawai-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	166
Tabel 146	Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	167
Tabel 147	Rincian Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	167
Tabel 148	Penjelasan Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	168
Tabel 149	Perhitungan Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	169
Tabel 150	Perbandingan Beban Persediaan-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	169

Tabel 151	Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	170
Tabel 152	Rincian Selisih Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	170
Tabel 153	Perhitungan Selisih Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Desember 2019	171
Tabel 154	Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	171
Tabel 155	Rincian Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	173
Tabel 156	Penjelasan Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	174
Tabel 157	Perhitungan Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang Jasa-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	175
Tabel 158	Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	176
Tabel 159	Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	177
Tabel 160	Rincian Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	177
Tabel 161	Penjelasan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	178
Tabel 162	Perhitungan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	179
Tabel 163	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	179
Tabel 164	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	180
Tabel 165	Rincian Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	180
Tabel 166	Penjelasan Selisih Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	181
Tabel 167	Perhitungan Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	181
Tabel 168	Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	181
Tabel 169	Rincian Selisih Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	182
Tabel 170	Penjelasan Selisih Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	182
Tabel 171	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	183
Tabel 172	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	183

Tabel 173	Rincian Selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	184
Tabel 174	Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	184
Tabel 175	Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	185
Tabel 176	Rincian Selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	185
Tabel 177	Penjelasan Selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	186
Tabel 178	Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	186
Tabel 179	Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO Dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	187
Tabel 180	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	187
Tabel 181	Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	188
Tabel 182	Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	189
Tabel 183	Rincian Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	189
Tabel 184	Penjelasan Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya –LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	190
Tabel 185	Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	191
Tabel 186	Penjelasan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya –LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019	192
Tabel 187	Perhitungan Transaksi Antar Entitas LPE 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	195
Tabel 188	Rincian Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk Per 31 Desember 2019	196



**PERNYATAAN
TELAH DIREVIU**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975
Laman: <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, Email: itjen@kemenkumham.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Semester II Tahun Anggaran 2019 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Hukum dan HAM RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 20 April 2020

Inspektur Jenderal,



M. Jhoni Ginting

NIP. 19610612 198903 1 003



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Semester II Tahun Anggaran 2019 *Audited* yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 April 2020

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,



Yasonna H. Laoly



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (Bruto) sebesar **Rp4.416.090.159.506,00** dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Neto) sebesar **Rp4.415.573.984.076,00** atau mencapai **129,83%** dari estimasi Pendapatan sebesar **Rp3.401.051.813.000,00**

Realisasi Belanja Negara (Bruto) per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp13.805.427.687.677,00** dan Realisasi Belanja Negara (Neto) sebesar **Rp13.774.396.008.362,00** atau mencapai **97,74%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp14.092.518.753.000,00**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar **Rp68.792.624.410.022,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp630.828.433.384,00**; Aset Tetap (Neto) sebesar **Rp67.885.365.205.948,00**; Piutang Jangka Panjang (Neto) sebesar **Rp9.318.818.961,00**; dan Aset Lainnya (Neto) sebesar **Rp267.111.951.729,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp517.906.061.796,00** dan **Rp68.274.718.348.226,00**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp4.180.768.548.845,00**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp113.788.265.242.903,00** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **(Rp9.607.496.694.058,00)**. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp10.395.109.265,00** dan **Rp0,00** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **(Rp9.597.101.584.793,00)**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar **Rp24.224.492.209.998,00** ditambah Defisit-LO sebesar **(Rp9.597.101.584.793,00)** ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar **Rp44.349.855.779.083,00** dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp9.297.471.943.938,00** sehingga Ekuitas entitas per 31 Desember 2019 adalah senilai **Rp68.274.718.348.226,00**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



**FACE
LAPORAN
REALISASI ANGGARAN**



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019		% Thd Angg	31 Desember 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1.				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	3.401.051.813.000,00	4.415.573.984.076,00	129,83	3.563.546.496.086,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.401.051.813.000,00	4.415.573.984.076,00	129,83	3.563.546.496.086,00
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1.	6.908.739.845.000,00	6.885.840.107.867,00	99,67	6.306.574.297.290,00
Belanja Barang	B.2.2.	5.489.842.363.000,00	5.261.614.869.573,00	95,84	4.489.360.521.766,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		12.398.582.208.000,00	12.147.454.977.440,00	97,97	10.795.934.819.056,00
Belanja Modal	B.3.				
Belanja Tanah	B.3.1	0,00	0,00	0,00	53.488.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	B.3.2	902.480.244.000,00	870.616.936.264,00	96,47	930.412.376.308,00
Belanja Gedung dan Bangunan	B.3.3	685.156.099.000,00	660.060.189.342,00	96,34	851.124.623.588,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.3.4	152.406.000,00	152.406.000,00	100,00	2.983.175.102,00
Belanja Aset Lainnya	B.3.5	106.147.796.000,00	96.111.499.316,00	90,54	61.181.021.473,00
JUMLAH BELANJA MODAL		1.693.936.545.000,00	1.626.941.030.922,00	96,04	1.845.754.684.471,00
JUMLAH BELANJA		14.092.518.753.000,00	13.774.396.008.362,00	97,74	12.641.689.503.527,00



**FACE
NERACA**



II. NERACA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.	1.937.351.678,00	2.473.362.985,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.	52.788.944.267,00	32.906.472.664,00
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.3.	9.853.310.665,00	11.586.621.509,00
Uang Muka Belanja (Prepayment)	C.4.	5.558.458.273,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5.	51.754.279,00	6.258.866,00
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	C.6.	322.805.448.526,00	386.127.641.921,00
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.7.	427.956.678,00	337.616.858,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar	C.8.	(302.474.661.409,00)	(347.985.003.319,00)
Persediaan	C.9.	539.879.870.427,00	411.488.366.832,00
JUMLAH ASET LANCAR		630.828.433.384,00	496.941.338.316,00
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10.	1.757.871.682,00	1.097.460.531,00
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.11.	7.683.800.000,00	9.449.000.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.12.	(122.852.721,00)	(132.842.165,00)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		9.318.818.961,00	10.413.618.366,00
ASET TETAP			
Tanah	C.13.	54.456.131.211.590,00	12.625.444.631.053,00
Peralatan dan Mesin	C.14.	7.398.289.284.727,00	6.680.447.076.850,00
Gedung dan Bangunan	C.15.	11.958.064.335.324,00	10.457.963.798.623,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.16.	99.520.892.828,00	74.628.773.346,00
Aset Tetap Lainnya	C.17.	29.342.783.620,00	68.218.739.768,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	C.18.	217.154.025.040,00	722.754.577.352,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19.	(6.273.137.327.181,00)	(6.786.047.821.180,00)
JUMLAH ASET TETAP		67.885.365.205.948,00	23.843.409.775.812,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20.	625.234.698.857,00	526.019.128.257,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.21.	13.924.560.000,00	14.478.828.000,00
Aset Lain-lain	C.22.	326.651.278.466,00	349.586.548.982,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23.	(698.698.585.594,00)	(611.529.694.834,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		267.111.951.729,00	278.554.810.405,00
JUMLAH ASET		68.792.624.410.022,00	24.629.319.542.899,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24.	1.937.351.678,00	2.473.362.985,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25.	64.435.234.760,00	105.218.621.484,00
Hibah Yang Belum Disahkan	C.26.	20.870.993.354,00	57.545.454,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.27.	0,00	893.850,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.28.	430.662.482.004,00	297.076.909.128,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		517.906.061.796,00	404.827.332.901,00
JUMLAH KEWAJIBAN		517.906.061.796,00	404.827.332.901,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.29.	68.274.718.348.226,00	24.224.492.209.998,00
JUMLAH EKUITAS		68.274.718.348.226,00	24.224.492.209.998,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		68.792.624.410.022,00	24.629.319.542.899,00



FACE

LAPORAN OPERASIONAL



III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.	4.180.768.548.845,00	3.528.582.438.941,00
JUMLAH PENDAPATAN		4.180.768.548.845,00	3.528.582.438.941,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	6.879.620.735.064,00	6.304.961.550.122,00
Beban Persediaan	D.3.	720.005.876.368,00	636.996.764.306,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.692.933.246.281,00	2.929.889.611.316,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	401.899.951.636,00	410.670.100.817,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	682.901.281.455,00	625.199.086.404,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	117.325.551,00	1.629.306.089,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1.456.312.580.320,00	1.126.350.293.138,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	(45.525.753.772,00)	(10.594.819.272,00)
JUMLAH BEBAN		13.788.265.242.903,00	12.025.101.892.920,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9.607.496.694.058,00)	(8.496.519.453.979,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10.		
Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(88.328.016.162,00)	(10.507.866.148,00)
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional lainnya		98.723.125.427,00	109.161.762.369,00
Defisit Selisih Kurs		0,00	0,00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		10.395.109.265,00	98.653.896.221,00
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9.597.101.584.793,00)	(8.397.865.557.758,00)
SURPLUS (DEFISIT) LO		(9.597.101.584.793,00)	(8.397.865.557.758,00)



FACE
LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	24.224.492.209.998,00	24.482.912.484.963,00
SURPLUS (DEFISIT) LO	E.2.	(9.597.101.584.793,00)	(8.397.865.557.758,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.	44.349.855.779.083,00	(988.246.429.629,00)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	1.658.251.434,00	21.090.031.820,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2.	112.326.144.764,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E.3.3.	44.458.917.830.958,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4.	(223.422.745.158,00)	(1.021.157.279.315,00)
Koreksi Lain-Lain	E.3.5.	376.297.085,00	11.820.817.866,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	9.297.471.943.938,00	9.127.691.712.422,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	68.274.718.348.226,00	24.224.492.209.998,00



**PENJELASAN UMUM
CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-2157/PB/2019 tanggal 31 Desember 2019 hal: Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2019 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun.

Profil dan Rencana Strategis

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A.2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan



- administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
 6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
 7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
 9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
 10. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
 11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A.2.2. Visi, Misi, Nilai, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Visi

Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussines*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum, dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

b. Misi

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;



- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

c. Nilai

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu di saat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan. Ada pun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

1. Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika, dan integritas profesi.

2. Akuntabel.

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

d. Tujuan

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh kementerian adalah:

- a. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana;
- b. Terwujudnya layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan



- masyarakat;
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang keimigrasian, kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan negara lain, pembinaan masyarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;
 - d. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional;
 - f. Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

A.2.3. Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan dalam kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Sekretariat Jenderal membawahi tujuh unit Eselon II, yaitu 6 (enam) biro dan satu pusat, yaitu:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. Biro Keuangan;
- e. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama;
- f. Biro Umum; dan
- g. Pusat Data dan Informasi yang merupakan unsur penunjang dalam Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

2. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawasan dalam Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

3. Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian yang bersifat teknis serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- b. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- c. Direktorat Jenderal Masyarakatan;
- d. Direktorat Jenderal Imigrasi;
- e. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- f. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

4. Badan

Badan merupakan unsur penunjang dalam Kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:



- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbang Hukum dan HAM); dan
- c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM Hukum dan HAM).

5. Kantor Wilayah

Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah membawahkan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungannya dalam hal pengawasan dan jalur koordinasi.

6. Unit Pelaksana Teknis

UPT adalah unit pelaksana pelayanan di bidang masing-masing dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada Tahun Anggaran 2018 Kantor Wilayah mengalami pemekaran entitas akuntansi. UPT Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Kantor Imigrasi;
- b. Rumah Detensi Imigrasi;
- c. Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Balai Pemasyarakatan;
- e. Rumah Tahanan Negara;
- f. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- g. Balai Harta Peninggalan (di lima Kantor Wilayah); dan
- h. Balai Pendidikan dan Latihan Hukum dan HAM (di tiga Kantor Wilayah).

A.2.4. Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2015 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan Restrukturisasi Program dan Kegiatan (RPK). RPK merupakan implementasi dari upaya penataan kembali Program dan Kegiatan sebagaimana rekomendasi dari Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.

Penataan kembali Program dan Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan kepada Unit Eselon I selaku pemangku Program untuk dapat memiliki Satuan Kerja di tingkat Wilayah *in line* secara penganggaran. Dampaknya adalah:

1. Unit Eselon I memiliki Satuan Kerja di tingkat Wilayah berupa satker Kantor Wilayah;
2. Satuan Kerja di daerah dan Perwakilan Luar Negeri yang semula bernaung di bawah Sekretariat Jenderal berpindah menjadi Satuan Kerja



Unit Eselon I terkait.

Dalam proses penganggarannya maka Satuan Kerja Kantor Wilayah mengalami pemekaran entitas keuangan dan akuntansi, sehingga Kantor Wilayah menjadi 9 (sembilan) entitas yaitu pemangku anggaran:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Ditjen Administrasi Hukum Umum;
3. Ditjen Pemasarakatan;
4. Ditjen Imigrasi;
5. Ditjen Kekayaan Intelektual;
6. Ditjen Peraturan Perundang-Undangan;
7. Ditjen Hak Asasi Manusia;
8. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
9. Balitbang Hukum dan HAM.

Pada tanggal 30 September 2015 telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terhadap entitas Kantor Wilayah pemangku anggaran Sekretariat Jenderal tidak mengalami perubahan kode Satuan Kerja, sedangkan delapan entitas baru memiliki kode Satuan Kerja baru.

Untuk 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) Unit Pelaksana Teknis daerah dan 18 (delapan belas) Perwakilan Luar Negeri seluruhnya mengalami perubahan kode Satuan Kerja karena berpindah program dari semula bernaung di bawah Sekretariat Jenderal menjadi bernaung di bawah Unit Eselon I terkait. Perubahan kode Eselon I dan kode satuan kerja tersebut memenuhi syarat sebagai UPT yang harus dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.05/2012 tentang Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Kementerian/Lembaga. Proses likuidasi dilaksanakan dengan menyusun Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Keuangan Likuidasi menggunakan Aplikasi SAIBA.

Ada pun jumlah Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Per 31 Desember 2019

Unit Eselon I	Satker Pusat	Satker Kanwil	Satker LN	Satker UPT	TOTAL
Sekretariat Jenderal	2	33	0	0	35
Inspektorat Jenderal	1	0	0	0	1
Ditjen AHU	1	33	0	5	39
Ditjen Pemasarakatan	1	33	0	663	697
Ditjen Imigrasi	1	33	18	138	190
Ditjen Kekayaan Intelektual	1	33	0	0	34



Ditjen PP	1	33	0	0	34
Ditjen HAM	1	33	0	0	34
BPHN	1	33	0	0	34
Balitbang	1	33	0	0	34
BPSDM	3	0	0	3	6
TOTAL	14	297	18	809	1.138

Pada 31 Desember 2018, jumlah Satuan Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1.166 (seribu seratus enam puluh enam) satuan kerja. Pada tahun 2019, terdapat pengurangan 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu satuan kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM di kantor wilayah. Kemudian, terdapat penambahan 5 (lima) satuan kerja pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu:

1. Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten;
2. Balai Pemasyarakatan Tangerang;
3. Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir;
4. Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan; dan
5. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan.

Dengan demikian, jumlah satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 1.138 satuan kerja.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktur di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti Eselon I, Kantor Wilayah, serta Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca, Laporan Operasional, dan laporan barang milik negara, serta laporan manajerial lainnya.



Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tingkat Kementerian, satuan kerja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan Kementerian adalah Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan BMN.

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:



Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan pada neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 2
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada



tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Kebijakan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap
Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:
 - 1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/ Daerah.
 - 2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap :

- a. Tanah,
- b. Gedung dan bangunan, dan
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi:
 - 1) Jalan dan Jembatan
 - 2) Bangunan Air



Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S761/MK.06/2018 tanggal 14 September 2018 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- **Kronologi Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP)**

Pada tahun 2017-2018, pemerintah melakukan inventarisasi dan penilaian kembali (IP) BMN atau revaluasi BMN berupa tanah, gedung bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Adapun kronologi pelaksanaan atas penilaian kembali BMN sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017, penilaian kembali BMN belum diselesaikan untuk semua BMN. Untuk menghindari ketidak-konsistenan penyajian BMN dalam laporan keuangan, dimana sebagian barang dalam satu kelompok BMN yang telah dilakukan penilaian kembali disajikan menggunakan nilai wajar sedangkan sebagian lagi yang belum dilakukan penilaian kembali disajikan menggunakan nilai historis, maka nilai wajar hasil penilaian kembali belum disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017. Namun demikian, nilai wajar hasil penilaian kembali tersebut tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I di tahun 2017. Selanjutnya, pemerintah melanjutkan dan menyelesaikan proses IP pada tahun 2018.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang dan instansi terkait lainnya Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, Badan



Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan tidak dapat menerima hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018, karena terdapat beberapa permasalahan antara lain mekanisme pengendalian internal dan kontrol kualitas dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak akurat. Untuk tetap menjaga kualitas LKKL dan LKPP, Pemerintah memutuskan hasil penilaian kembali BMN tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP tahun 2018.

Hasil penilaian kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK. Sebagaimana tahun 2017, nilai wajar hasil penilaian kembali tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I di tahun 2018.

3. Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut, maka koreksi atas hasil penilaian kembali yang sebelumnya telah dilakukan dalam LKKL dikeluarkan kembali dalam LKKL. Proses mengeluarkan nilai wajar hasil IP beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan dari LKKL dan LKPP tahun 2017 dan 2018, atau disebut dengan istilah *take out*, dilakukan melalui menu penjurnalan pada Aplikasi SAIBA menggunakan identitas Satker Konsolidasi masing-masing K/L. Hal ini mengakibatkan selisih saldo BMN dan akumulasi penyusutannya antara laporan keuangan dengan laporan BMN, yang harus dijelaskan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Selain jurnal *take out* pada LKKL dan LKPP tahun 2017 dan 2018, Pemerintah juga telah melakukan jurnal *take out* untuk mengeluarkan dampak IP terhadap transaksi-transaksi lanjutan pada LKKL dan LKPP periode Semester I Tahun 2019.
5. Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut diatas, Pemerintah telah melakukan alur bisnis baik pelaksanaan inventarisasi oleh satuan kerja maupun teknis pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.
6. Menanggapi perbaikan penilaian kembali BMN yang dilakukan pemerintah, melalui surat nomor 338/S/XV/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 hal Perkembangan Hasil Reviu dan Pengujian Terbatas atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada LHP Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 dan 2018, Auditor Utama Keuangan Negara II menyatakan bahwa secara umum penyempurnaan atas desain pengendalian dan metodologi penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh Pemerintah telah memadai, namun dalam implementasinya masih memerlukan perbaikan.



7. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan sebagaimana temuan dan rekomendasi BPK. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah disampaikan kepada BPK melalui surat Menteri Keuangan nomor S-937/MK.06/2019 tanggal 23 Desember 2019 hal Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018.

Menanggapi surat Menteri Keuangan tersebut, Anggota BPK menyampaikan surat nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, dimana BPK berpendapat bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

- Daftar Transaksi BMN dalam Aplikasi SIMAK-BMN

- Saldo Awal (Kode Transaksi 100)

Menu ini digunakan untuk menginput Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran Berjalan, yang belum dibukukan pada aplikasi Simak BMN baik diperoleh dengan pembelian, hibah, transfer masuk, reklas masuk atau perolehan lainnya yang sah. Pencatatan transaksi ini dibuktikan dengan dokumen sumber tahun anggaran yang lalu.

- Pembelian (Kode Transaksi 101)

Menu ini digunakan untuk menginput BMN yang diperoleh dengan pembelian dari DIPA/APBN pada Tahun Anggaran Berjalan yang tanpa melalui proses Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Pencatatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dilengkapi dengan faktur/nota pembelian barang dengan SPM/SP2D.

- Transfer Masuk (Kode Transaksi 102)

Menu ini digunakan untuk merekam data BMN dari hasil kiriman (transfer) satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST satker pemberi dan satker penerima BMN, bila transfer



dilakukan antar Pengguna Barang (antar Kementerian Negara/Lembaga) maka dibutuhkan dokumen persetujuan alih status untuk melakukan transaksi ini.

- Hibah Masuk (Kode Transaksi 103)

Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan aset yang bersumber dari hibah dan diterima dari pihak ketiga di luar Pemerintah Pusat, misalnya dari pemerintah daerah maupun dari swasta. Pencatatan aset tersebut sebagai BMN dilakukan berdasarkan BAST, tanpa menunggu adanya register dari DJPPR/Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan pengesahan ke KPPN (MPHL-BJS).

- Rampasan (Kode Transaksi 104)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi perolehan BMN hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan.

- Penyelesaian Pembangunan Langsung (Kode Transaksi 113)

Merupakan transaksi perolehan BMN dari pengadaan pembangunan gedung/bangunan dan BMN lainnya.

- Pembatalan Penghapusan (Kode Transaksi 106)

Menu ini digunakan untuk memunculkan kembali aset tetap/aset lainnya yang sudah dihapuskan disebabkan antara lain berupa temuan oleh APIP dan BPK. Dalam menginput menu transaksi pembatalan penghapusan harus disertai dokumen sumber Berita Acara Pembatalan Penghapusan oleh Kuasa Pengguna Barang.

- Reklasifikasi Masuk (Kode Transaksi 107)

Menu ini digunakan :

1. Untuk mencatat perubahan transaksi BMN atas jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain (Kode Barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub- sub kelompok);
2. Untuk mencatat perubahan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat sebagai aset intrakompabel menjadi aset ekstrakompabel atau sebaliknya.

- Pertukaran (Kode Transaksi 111)

Menu Pertukaran di SIMAK BMN digunakan untuk mencatat transaksi pertukaran dengan entitas lain. Menurut PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bahwa suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan



kewajiban lain yang di transfer/diserahkan.

- Perolehan Lainnya (Kode Transaksi 112)

Menu ini digunakan untuk merekam BMN yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, yang berasal dari transaksi selain Pembelian, Transfer Masuk, Hibah (Masuk), Rampasan, Penyelesaian Pembangunan, Pembatalan Penghapusan, Reklasifikasi Masuk, Pertukaran, dan Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS. Menu ini juga digunakan di beberapa kementerian yang melakukan pengadaan aset dari dana yang bersumber diluar mekanisme APBN seperti dana samsat pada POLRI.

- Pengurangan (Kode Transaksi 201)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pengurangan kuantitas volume Barang Milik Negara ketika ada koreksi terhadap nilai fisik Barang Milik Negara, bukan secara nilai asetnya.

- Perubahan Kondisi (Kode Transaksi 203)

Digunakan untuk melakukan pencatatan perubahan kondisi BMN. Perubahan kondisi BMN dilakukan agar terdapat kesesuaian antara pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN dengan kondisi fisik BMN yang sebenarnya.

- Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas (Kode Transaksi 204)

Menu ini digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan pada BMN, baik berupa nilai ataupun kuantitas, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian. Perubahan dapat dicatat pada saat dasar perubahan/koreksi telah ditetapkan.

- Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi (Kode Transaksi 206)

Menu ini digunakan untuk mencatat penambahan nilai aset yang berasal dari penerimaan aset tetap renovasi.

Aset tetap renovasi adalah renovasi yang dilakukan oleh penyewa/peminjam (bukan pemilik) terhadap aset yang disewa/dipinjam. Pada saat masa sewa BMN tersebut berakhir dan diserahkan, tambahan nilai tersebut harus dicatat sebagai penambah nilai aset.

- Pengembangan Langsung (Kode Transaksi 202)

Menu ini digunakan untuk merekam pengembangan atas suatu BMN yang sudah dimiliki (sudah tercatat) sampai dengan tahun anggaran berjalan. Pengembangan BMN yang dimaksud adalah pengembangan yang memenuhi syarat/ketentuan untuk dapat dikapitalisasi dan langsung selesai (tanpa melalui tahapan KDP/termin pembayaran).



- Pengembangan Dengan KDP (Kode Transaksi 208)
Menu ini digunakan untuk mereklasifikasi KDP pengembangan Aset yang sudah dimiliki menjadi aset definitifnya.
- Penghapusan (Kode Transaksi 301)
Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang.
- Transfer Keluar (Kode Transaksi 302)
Menu ini digunakan untuk mencatat penyerahan Aset Tetap/Aset Tetap Lainnya ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lain dimana UAKPB tersebut masih dalam satu entitas pelaporan akuntansi Pemerintah Pusat. Bukti penyerahan berupa Berita Acara Serah Terima atau dokumen yang dapat dipersamakan.
- Hibah Keluar (Kode Transaksi 303)
Menu ini disediakan untuk menginput Barang Milik Negara yang berkurang di tahun berjalan karena dihibahkan ke pihak lain di luar Instansi Pemerintah Pusat. Jenis Satuan Kerja yang memakai menu ini adalah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD).
- Reklasifikasi Keluar (Kode Transaksi 304)
Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi BMN pada perekaman sebelumnya.
- Koreksi Pencatatan (Kode Transaksi 305)
Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan kuantitas BMN pada perekaman sebelumnya.
- Penghentian BMN dari Penggunaan (Kode Transaksi 401)
Menu ini digunakan mencatat transaksi penghentian BMN sebelum dilakukan proses/langkah penghapusan BMN karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasi normal satker yang bersangkutan.
- Penggunaan Kembali BMN Yang Dihentikan (Kode Transaksi 402)
Menu ini digunakan untuk mencatat BMN yang dipergunakan kembali setelah sebelumnya dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dikarenakan perubahan kondisi. BMN tersebut dapat dipergunakan kembali setelah mendapat perbaikan, baik dengan atau tanpa biaya tambahan.
- Usulan Barang Hilang ke Pengelola (Kode Transaksi 308)
Pengusulan barang hilang ke pengelola digunakan untuk merekam BMN yang statusnya hilang guna diusulkan



penghapusannya ke Pengelola Barang. Pada saat dilakukan input pada menu ini, BMN yang hilang (yang semula masih tercatat pada Buku Barang dan Laporan Posisi BMN di Neraca) menjadi tidak ada lagi pada Buku Barang dan Neraca. BMN hilang tersebut selanjutnya tercantum dalam Daftar Barang Hilang.

- Usulan Barang RB (Rusak Berat) ke Pengelola (Kode Transaksi 306)

Usulan Barang RB ke Pengelola digunakan pada saat pengguna barang sudah mengajukan surat permohonan persetujuan pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN rusak berat ke Pengelola Barang.

Setelah dilakukan input pada menu ini, BMN rusak berat (yang semula masih tercatat pada Buku Barang dan Laporan Posisi BMN di Neraca) menjadi tidak ada lagi pada Buku Barang dan Neraca. BMN RB tersebut selanjutnya tercantum dalam Daftar Barang Rusak Berat.

- Penghapusan Daftar Barang RB (Rusak Berat) (Kode Transaksi 822)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pada saat sudah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan oleh Pengguna Barang setelah fisik BMN rusak berat telah selesai dipindahtangankan atau dimusnahkan.

Setelah terbit Surat Keputusan Penghapusan Barang, maka dilakukan penginputan penghapusan barang yang sudah diusulkan dihapuskan.

- BMN Bersejarah

Barang Bersejarah (heritage assets) dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut, tidak dikapitalisasi menjadi nilai barang atau penambah nilai barang. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

BMN yang memenuhi kriteria aset bersejarah (heritage assets) dibukukan dalam Buku Barang Bersejarah. Barang Bersejarah tidak dicatat dalam Laporan Neraca namun dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- Saldo Awal Barang Bersejarah (Kode Transaksi 601)

Menu saldo awal untuk Barang Bersejarah digunakan untuk



mencatat Barang Bersejarah yang telah memperoleh penetapan hukum sebagai barang bersejarah disebabkan kepentingan pelestarian budaya, lingkungan atau bersejarah sebelum tahun berjalan namun belum dilakukan pencatatan pada tahun tersebut sehingga baru dicatat pada tahun berjalan.

- Perolehan BMN Bersejarah (Kode Transaksi 602)

Menu perolehan BMN Bersejarah digunakan untuk mencatat Barang Bersejarah yang telah memperoleh penetapan hukum sebagai barang bersejarah disebabkan kepentingan pelestarian budaya, lingkungan atau bersejarah pada tahun berjalan.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

- Penghapusan BMN Bersejarah (Kode Transaksi 604)

Menu ini disediakan untuk menginput Barang Milik Negara Bersejarah yang berkurang di tahun berjalan karena hancur tak berbentuk lagi atau hilang. Satker mencatat di menu ini apabila izin penghapusan telah disetujui oleh Pengelola Barang (DJKN/KPKNL).

- Perolehan BMN Pihak Ketiga (Kode Transaksi 701)

Menu ini digunakan untuk mencatat aset tetap/aset lainnya berupa Barang Pihak Ketiga yang dititipkan kepada instansi atau barang pihak ketiga yang digunakan sehari-hari. Barang tersebut tidak muncul di neraca hanya muncul di daftar barang ruangan dan daftar barang pihak ketiga.

- Penghapusan BMN Pihak Ketiga (Kode Transaksi 702)

Menu Penghapusan BMN Pihak Ketiga digunakan untuk menghapus barang Pihak ketiga dari Daftar Barang Pihak Ketiga dikarenakan barang tersebut tidak ada lagi, misalnya karena dikembalikan ke pemiliknya, rusak berat atau hilang.

- Saldo Awal KDP (Kode Transaksi 501)

Digunakan untuk merekam KDP yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan. KDP tidak disusutkan.

- Perolehan KDP (Kode Transaksi 502)

Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan transaksi:

1. KDP yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai
2. Perekaman SPM/SP2D pertama kali untuk pembayaran pertama dalam rangka memperoleh aset tetap yang pembayarannya dilakukan per termin dan SPM/SP2D tersebut di tahun anggaran berjalan.



- Pengembangan KDP (Kode Transaksi 503)
Menu ini disediakan untuk menginput penambahan KDP setelah perolehan awal sampai dengan penambahan KDP terakhir dan siap dioperasikan untuk menjadi aset tetap yang definitif.
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Kode Transaksi 105)
Menu ini digunakan untuk merekam BMN yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, berasal dari aset yang telah selesai proses pembangunan melalui mekanisme KDP (telah selesai 100% pekerjaan fisiknya), dan biasanya pencairan dananya melalui beberapa termin pembayaran.
- Transfer Masuk KDP (Kode Transaksi 506)
Menu ini digunakan untuk merekam transaksi perolehan KDP bersumber dari Satker lain pada Pemerintah Pusat. Transaksi ini hanya satu kali saja pencatatannya ketika menerima transfer masuk KDP, selanjutnya akan dicatat pada menu pengembangan KDP sampai proses KDP selesai (jika proses KDP tersebut akan dilanjutkan oleh unit penerima transfer KDP).
- Hibah Masuk KDP (Kode Transaksi 508)
Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diperoleh dari pihak ketiga di luar Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat.
- Koreksi Perubahan Nilai KDP (Kode Transaksi 504)
Menu ini digunakan untuk menginput koreksi perubahan Nilai KDP yang sudah terinput sebelumnya.
- Transfer Keluar KDP (Kode Transaksi 507)
Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diserahkan ke Satker lain atau Kementerian Lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transfer Keluar diinput ke dalam Aplikasi SIMAK BMN apabila Berita Acara Serah Terima dari kedua belah pihak telah ditandatangani. Penginputan di Aplikasi SIMAK BMN pada menu Transaksi KDP, Transfer Keluar KDP.
- Hibah Keluar KDP (Kode Transaksi 509)
Menu Hibah Keluar KDP Digunakan untuk merekam Hibah Keluar KDP yang diberikan kepada entitas di luar Pemerintah Pusat pada tahun berjalan.
- Penghapusan/Penghentian KDP (Kode Transaksi 505)
Menu ini digunakan untuk mencatat aset-aset KDP yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan/penghentian pembangunannya. Dokumen sumber yang digunakan adalah surat keputusan penghapusan/penghentian atas KDP.



- Barang Berlebih (Kode Transaksi 120)
Sub-submenu Barang Berlebih digunakan untuk mencatat barang yang secara hak merupakan aset suatu satker namun karena satu dan lain hal belum pernah dicatat dan dilaporkan pada Aplikasi SIMAK-BMN. Secara substansi, transaksi Barang Berlebih identik dengan transaksi Saldo Awal pada menu transaksi umum dalam Aplikasi SIMAK-BMN.
- Reklas Masuk Inventarisasi (Kode Transaksi 121)
Sub-submenu Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi digunakan untuk mencatat transaksi reklasifikasi masuk barang sehubungan dengan dilakukannya inventarisasi barang. Barang-barang yang direkam melalui ini adalah barang-barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN yaitu tanah, jalan dan jembatan, gedung dan bangunan, dan bangunan air yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
- Reklas Keluar Inventarisasi (Kode Transaksi 321)
Sub-submenu Reklasifikasi Keluar Inventarisasi digunakan untuk mencatat reklasifikasi keluar barang sehubungan dengan pelaksanaan inventarisasi. Dalam hal ini barang-barang yang dapat direkam melalui sub-submenu reklasifikasi keluar inventarisasi merupakan barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN tahun 2017 dan 2018, yaitu barang berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, dan Bangunan Air yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2015.
- Tidak Ditemukan (Kode Transaksi 221)
Sub-submenu Barang Tidak Ditemukan digunakan untuk merekam barang yang selama ini tercatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN, namun dalam pelaksanaan Inventarisasi, barang tersebut secara fisik tidak ditemukan keberadaannya. Perekaman transaksi barang tidak ditemukan tidak serta merta menghapus BMN dari pencatatan karena bertujuan untuk mengidentifikasi BMN yang tidak ditemukan fisiknya. Dengan demikian atas pencatatan barang tidak ditemukan tidak akan terbentuk jurnal, tidak akan terdapat perubahan kuantitas barang, dan tidak terdapat perubahan nilai barang.
- Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi (Kode Transaksi 222)
Menu ini digunakan untuk pencatatan perubahan kuantitas barang-barang sebagai hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali. Barang-barang yang dapat direkam pada menu ini adalah barang-barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang secara karakteristik dapat berubah kuantitasnya karena satu dan lain hal. Dengan demikian barang yang dapat direkam dalam menu ini adalah



barang berupa Tanah (kode 2.xx.xx.xx.xxx), Jalan (kode 5.01.01.xx.xxx), dan jembatan (kode 5.01.02.xx.xxx) yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (Kode Transaksi 205)

Pencatatan hasil penilaian kembali BMN (revaluasi) dilakukan melalui submenu Koreksi Penilaian Kembali (kode transaksi 205). Nilai baru yang diinput dalam transaksi Koreksi Penilaian Kembali adalah nilai wajar hasil revaluasi yang tertuang dalam dokumen LHIP. Barang yang menjadi objek Penilaian Kembali BMN pada tahun 2017 dan 2018 adalah Tanah, Jalan dan Jembatan, Gedung dan Bangunan, dan Bangunan Air yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2015. Penggunaan submenu Penilaian Kembali BMN (Kode Transaksi 205) tidak terbatas pada barang-barang yang menjadi objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN namun juga dimungkinkan untuk perekaman hasil penilaian kembali BMN selain objek penilaian kembali tahun 2017 dan 2018, sepanjang Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jauh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atau suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.



Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima



Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi Akuntansi
Pemerintah Berbasis
Akrual Pertama Kali*

8. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai 31 Desember 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada 31 Desember 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REALISASI ANGGARAN**



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja prioritas dalam rangka pelaksanaan rencana kerja nyata pemerintahan, adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan serta dengan diterimanya Hibah Langsung berupa uang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2019

Uraian	2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	3.399.234.301.000,00	3.401.051.813.000,00
Jumlah Pendapatan	3.399.234.301.000,00	3.401.051.813.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	6.451.198.471.000,00	6.908.739.845.000,00
Belanja Barang	5.239.822.033.000,00	5.489.842.363.000,00
Belanja Modal	1.615.905.238.000,00	1.693.936.545.000,00
Jumlah Belanja	13.306.925.742.000,00	14.092.518.753.000,00

*Realisasi Pendapatan
(Netto)
Rp4.415.573.984.076,00*

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan (netto) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode TA 2019 adalah sebesar Rp4.415.573.984.076,00 atau mencapai 129,83% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.401.051.813.000,00.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2019 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2019

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	7.207.725.000,00	20.458.150.154,00	283,84
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	3.391.196.173.000,00	4.303.327.782.245,00	126,90
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	0,00	85.933.023,00	0,00
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	2.449.000.000,00	2.449.000.000,00	100,00
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	31.596.000,00	304.448.721,00	963,57
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	74.151.000,00	492.688.657,00	664,44
4258	Pendapatan Denda	0,00	9.262.197.485,00	0,00
4259	Pendapatan Lain-lain	93.168.000,00	79.193.783.791,00	85.001,06
	Jumlah Pendapatan	3.401.051.813.000,00	4.415.573.984.076,00	129,83

Keseluruhan Pendapatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Terdapat koreksi kurang realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha pada Laporan Keuangan TA 2019 *Audited* sebesar Rp76.000.000,00. Hal ini disebabkan kesalahan setor dengan menggunakan kode satker pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang seharusnya pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin hasil lelang aset Konsulat Kesehatan.

Jenis pendapatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain:

- Pendapatan jasa berasal dari penerimaan Jasa Keimigrasian yaitu penerbitan paspor WNI dan Visa/ijin tinggal Warga Negara Asing (Ditjen Imigrasi), perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual (Ditjen Kekayaan Intelektual), dan penerimaan jasa administrasi hukum (Ditjen Administrasi Hukum Umum).
- Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari pendapatan sewa rumah dinas yang ditempati oleh PNS.
- Pendapatan lain-lain berasal dari penggantian paspor rusak yang disebabkan oleh kelalaian manusia (Ditjen Imigrasi).
- Pendapatan dari hasil karya nabi ataupun atas penjualan pemanfaatan

- sumber daya yang ada pada satker yang melibatkan narapidana pada kegiatan industri dalam lapas/rutan yang dananya bersumber dari DIPA satker seperti penjualan hasil budidaya lele, ikan nila, hasil perkebunan dsb.
- e. Pendapatan penjualan atas hasil bongkahan/bongkaran bangunan sesuai arahan KPKNL setempat.
 - f. Pendapatan bunga lainnya merupakan pendapatan giro bank.
 - g. Pendapatan denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah digunakan untuk mencatat denda yang ditetapkan sesuai kontrak perjanjian pengadaan barang milik pemerintah yang dibayarkan oleh rekanan karena adanya wan prestasi atas pelaksanaan kontrak tersebut.

Berikut adalah perbandingan Realisasi PNBP TA 2019 dan TA 2018 :

Tabel 7
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2019 dan TA 2018

MAP	URAIAN	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Kenaikan/Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	20.458.150.154,00	18.039.944.726,00	2.418.205.428,00	13,40
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	4.303.327.782.245,00	3.508.128.693.239,00	795.199.089.006,00	22,67
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	85.933.023,00	476.390.288,00	(390.457.265,00)	(81,96)
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	2.449.000.000,00	2.251.500.000,00	197.500.000,00	8,77
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	304.448.721,00	333.748.656,00	(29.299.935,00)	(8,78)
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	492.688.657,00	1.662.987.694,00	(1.170.299.037,00)	(70,37)
4258	Pendapatan Denda	9.262.197.485,00	9.692.162.107,00	(429.964.622,00)	(4,44)
4259	Pendapatan Lain-lain	79.193.783.791,00	22.961.069.376,00	56.232.714.415,00	244,90
JUMLAH PENDAPATAN		4.415.573.984.076,00	3.563.546.496.086,00	852.027.487.990,00	23,91

Berdasarkan Tabel 7 di atas, realisasi PNBP TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018 terdapat kenaikan sebesar Rp852.027.487.990,00 atau 23,91%. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Meningkatnya jasa administrasi dan penegakan hukum atas kesadaran

- masyarakat terhadap perlindungan Merek, Paten, dan Hak Cipta dengan permohonan pendaftaran Merek melalui Protokol Madrid.
2. Meningkatnya penjualan hasil lelang barang-barang sesuai arahan KPKNL setempat.
 3. Meningkatnya pendapatan lain-lain berupa penerimaan kembali belanja modal TAYL atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2018, penerimaan kembali belanja barang TAYL atas temuan pemeriksaan Itjen dan BPK.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan TA 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	63.056.000,00	277.851.441,00	440,64
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	243.583.887,00	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	90.079.000,00	1.367.228.830,00	1.517,81
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.060.000,00	1.676.606.001,00	158.170,38
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.908.730.000,00	16.638.149.179,00	281,59
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	221.000.000,00	10.900.000,00	4,93
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	923.800.000,00	234.230.816,00	25,36
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya	0,00	9.600.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan		7.207.725.000,00	20.458.150.154,00	283,84

- a. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (Akun 425119) merupakan pendapatan atas penjualan hasil karya narapidana ataupun atas penjualan pemanfaatan sumber daya yang ada pada satker yang melibatkan narapidana pada kegiatan industri dalam lapas/rutan yang dananya bersumber

dari DIPA satker seperti penjualan hasil budidaya lele, ikan nila, hasil perkebunan, penjualan hasil karya narapidana, dsb.

- b. Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan (akun 425121) merupakan penjualan atas hasil bongkahan/bongkaran bangunan sesuai arahan KPKNL setempat dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	JUMLAH
BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	38.383.888,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN	5.600.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBON	32.000.000,00
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SURABAYA	1.400.000,00
KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN	3.500.000,00
KANTOR IMIGRASI KELAS I KENDARI	1.700.000,00
KANTOR IMIGRASI KELAS III PAMEKASAN	160.999.999,00
TOTAL	243.583.887,00

- c. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (akun 425122), Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (akun 425129), dan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya (Akun 425139) merupakan hasil penjualan / lelang atas aset – aset yang telah rusak berat dan dihapuskan dan pendapatan atas pemanfaatan aset lainnya.
- d. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (akun 425131) merupakan pendapatan atas sewa rumah dinas, sewa bangunan koperasi, kantin dan pendapatan sewa dari pemanfaatan gedung bangunan milik satker tersebut. Terdapat pengembalian pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp518.230,00 yang terdiri dari Kanwil Sumatera Barat dan Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru atas kesalahan pemotongan sewa rumah dinas pegawai melalui gaji.
- e. Pendapatan sewa Peralatan dan Mesin (Akun 425132) pada Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya Rp9.750.000,00 atas pendapatan sewa mesin pemotong kayu milik satker kepada pihak luar satker, Lapas Sijunjung Rp600.000,00 merupakan pendapatan sewa alat-alat las untuk kendaraan dan satker pusat Sekretariat Jenderal Rp550.000,00 atas kesalahan akun penyeteroran yang seharusnya pendapatan rumah dinas di Cilandak untuk Dirjen AHU.
- f. Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya (425149) yang merupakan kesalahan kode akun penyeteroran pendapatan sewa gedung untuk kegiatan koperasi (akun 425131) pada satker Lapas Wanita Bandar Lampung.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum per TA 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425211	Pendapatan Paspor	927.202.500.000,00	1.253.341.710.000,00	135,17
425212	Pendapatan Visa	132.785.750.000,00	406.729.595.455,00	306,31
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali	708.418.750.000,00	716.924.200.000,00	101,20
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	235.095.000.000,00	182.197.521.707,00	77,50
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	521.839.850.000,00	750.037.350.000,00	143,73
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	194.021.000.000,00	238.892.867.249,00	123,13
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	171.805.175.000,00	40.468.433.955,00	23,55
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	500.000.000.000,00	714.326.594.505,00	142,87
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	28.148.000,00	409.509.374,00	1.454,84
Jumlah Pendapatan		3.391.196.173.000,00	4.303.327.782.245,00	126,90

- Realisasi Pendapatan Akun 425211, 425212, 425213 dan 425214 merupakan pendapatan jasa yang berasal dari penerimaan Jasa Keimigrasian diantaranya penerbitan paspor WNI dan Visa/ijin tinggal Warga Negara.
- Realisasi Pendapatan Akun 425215, 425216 dan 425217 merupakan pendapatan dari penerimaan jasa administrasi hukum berupa layanan fidusia dan badan hukum lainnya.
- Realisasi Pendapatan Akun 425218 merupakan pendapatan dari Ditjen Kekayaan Intelektual dalam proses perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual berupa perlindungan Merek, Paten, dan Hak Cipta.
- Realisasi Pendapatan Akun 425219 merupakan pendapatan dari kegiatan kemandirian, bimbingan kerja dan kegiatan industri dalam lapas/rutan yang dibiayai oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama.

- e. Terdapat pengembalian pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp492.945.000,00 yang terjadi karena kelebihan pembayaran, kesalahan pembayaran atau pembayaran ganda dari penerimaan Jasa Keimigrasian yaitu penerbitan paspor WNI dan Visa/ijin tinggal Warga Negara Asing (Ditjen Imigrasi), perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual (Ditjen Kekayaan Intelektual), dan penerimaan jasa administrasi hukum (Ditjen Administrasi Hukum Umum).

Rincian pengembalian pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum TA 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10
Rincian pengembalian pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	100.000,00	Pengembalian Pendapatan Visa
		25.700.000,00	Pengembalian Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry)
		75.275.000,00	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya
2	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	1.100.000,00	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Fidusia
		68.700.000,00	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Badan Hukum
		29.600.000,00	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya
3	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	292.470.000,00	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual
TOTAL		492.945.000,00	

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan TA 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	0,00	62.795.023,00	0,00
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0,00	23.138.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	85.933.023,00	0,00

Realisasi Pendapatan Kesehatan (akun 4253) sebesar Rp85.933.023,00 terdiri atas pendapatan yang diperoleh atas jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Pengayoman Cipinang (akun 425313) sebesar Rp23.138.000,00 dan pendapatan atas dana kapitasi BPJS (akun 425311) yang telah disetorkan ke kas Negara sebesar Rp62.795.023,00 diperoleh oleh satker - satker di lingkungan Kanwil DKI Jakarta yang memiliki fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yaitu pada:.

No.	Satuan Kerja	Jumlah Dana
1	Lapas Cipinang	16.016.000,00
2	Rutan Jakarta Timur	8.609.500,00
3	Rutan Jakarta Pusat	2.428.652,00
4	Rutan Cipinang	2.178.000,00
5	Lapas Salemba	12.347.401,00
6	Lapas Narkotika Jakarta	21.215.470,00
JUMLAH		62.795.023,00

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi TA 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2.449.000.000,00	2.449.000.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan		2.449.000.000,00	2.449.000.000,00	100,00

Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi merupakan pendapatan yang diperoleh BPSDM atas PNBP Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Perancang Perundang-undangan dll.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya TA 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	31.596.000,00	304.448.721,00	963,57
Jumlah Pendapatan		31.596.000,00	304.448.721,00	963,57

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya (Akun 425699) merupakan pendapatan atas pemanfaatan jasa narapidana pada kegiatan industri dalam lapas/rutan, seperti jasa laundry, salon, cuci mobil/motor, dll yang dibiayai oleh DIPA satker.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan TA 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	0,00	157.673,00	0,00
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	72.025.000,00	201.126.738,00	279,25
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	2.126.000,00	244.409.564,00	11.496,22
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0,00	38.295.000,00	0,00
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	0,00	8.699.682,00	0,00
Jumlah Pendapatan		74.151.000,00	492.688.657,00	664,44

- a. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (akun 425764) merupakan pendapatan bunga rekening pemerintah di antaranya terdapat pada satker pusat Sekretaris Jenderal sebesar Rp115.386,00 merupakan jasa giro dari rekening dana operasional Menteri, satker BHP Jakarta sebesar

Rp139.797.940,00 dan BHP Semarang Rp61.082.600,00 atas rekening giro untuk menyimpan uang kepailitan, dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur hal tersebut, maka pendapatan atas jasa giro akan disetorkan ke Kas Negara. Selain itu, pendapatan bunga rekening pemerintah pada satker yang diberikan oleh Bank lokal daerah, walaupun ketentuannya atas rekening pemerintah tidak diberikan bunga, tapi hal ini belum berlaku pada beberapa bank lokal daerah dengan rincian satker sebagai berikut :

- 1) Rutan Wates Rp267,00
 - 2) Lapas Sragen Rp5.260,00
 - 3) Cabrutan Muntok Rp15.523,00
 - 4) Rutan Menggala Rp43.412,00
 - 5) Lapas Gorontalo Rp2.877,00
 - 6) Rutan Selong Rp34.150,00
 - 7) Kanwil Bandung Rp4.167,00
 - 8) Bapas Nusakambangan Rp4.628,00
 - 9) Lapas Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan Rp11.202,00
 - 10) Kanim Merauke Rp5.159,00
 - 11) Kanwil Bandung Rp4.167,00
- b. Pendapatan penyelesaian Ganti Rugi Negara (akun 425791, 425792 dan 425793) merupakan penerimaan pembayaran angsuran TGR.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda TA 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	9.262.197.485,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	9.262.197.485,00	0,00

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diantaranya terdapat pada :

- Satker Pusat Data Teknologi dan Informasi sebesar Rp794.377.865,00 merupakan pendapatan dari denda/restitusi pekerjaan layanan sewa bandwidth.
- Satker Pusat Ditjen AHU sebesar Rp626.816.930,00, Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp2.853.584.654,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp3.142.276.651,00, Ditjen Kekayaan Intelektual Rp228.403.845,00, BPSDM Rp913.388.366 dan satker daerah lainnya yang merupakan pendapatan denda keterlambatan atas penyelesaian paket pekerjaan pemerintah.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain TA 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	9.382.000,00	596.424.892,00	6.357,12
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	70.122.000,00	48.850.775.705,00	69.665,41
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	13.200.000,00	28.619.485.115,00	216.814,28
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0,00	792.132.522,00	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	464.000,00	40.235.807,00	8.671,51
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	294.729.750,00	0,00
Jumlah Pendapatan		93.168.000,00	79.193.783.791,00	85.001,06

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (akun 425911) merupakan pengembalian belanja pegawai diantaranya disebabkan kelebihan pembayaran uang makan TA 2018.
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (akun 425912) merupakan pengembalian belanja barang diantaranya atas kelebihan pembayaran belanja BAMA TA 2018 dan pengembalian belanja barang atas temuan pemeriksaan.
- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (akun 425913) merupakan pengembalian belanja modal diantaranya yang disebabkan atas temuan pemeriksaan Itjen/ BPK serta penerimaan kembali belanja modal TAYL atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2018.
- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (akun 425991) diantaranya disebabkan atas gaji yang telah dibayarkan dimuka untuk pegawai yang mengalami mutasi.
- Pendapatan anggaran lain-lain (425999)

Realisasi Belanja (Netto)
Rp13.774.396.008.362,00

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja (netto) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.774.396.008.362,00 atau 97,74% dari anggaran belanja sebesar Rp14.092.518.753.000,00.

Berikut adalah Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2019 menurut jenis belanja:

Tabel 17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	6.908.739.845.000,00	6.892.564.451.445,00	99,77
Belanja Barang	5.489.842.363.000,00	5.285.751.939.646,00	96,28
Belanja Modal	1.693.936.545.000,00	1.627.111.296.586,00	96,06
Total Belanja Kotor	14.092.518.753.000,00	13.805.427.687.677,00	97,96
Pengembalian Belanja	0,00	31.031.679.315,00	0,00
Total Belanja	14.092.518.753.000,00	13.774.396.008.362,00	97,74

Realisasi Belanja Negara TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 1.132.706.504.835,00 atau sebesar 8,96% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya belanja pegawai disebabkan adanya penambahan pegawai baru melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Meningkatnya kebutuhan belanja barang dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan non operasional Kementerian Hukum dan HAM.

Perbandingan Realisasi Belanja Negara TA 2019 dan TA 2018 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Negara TA 2019 dan TA 2018

Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan / (Penurunan) %	
	TA 2019	TA 2018		
Belanja Pegawai	6.885.840.107.867,00	6.306.574.297.290,00	579.265.810.577,00	9,19
Belanja Barang	5.261.614.869.573,00	4.489.360.521.766,00	772.254.347.807,00	17,20
Belanja Modal	1.626.941.030.922,00	1.845.754.684.471,00	(218.813.653.549,00)	(11,85)
Jumlah	13.774.396.008.362,00	12.641.689.503.527,00	1.132.706.504.835,00	8,96

Berikut Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja DIPA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2019 menurut Organisasi (Unit Eselon I):



Tabel 19
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I

No.	Unit	Anggaran	Realisasi	%
1	Sekretariat Jenderal	3.927.564.354.000,00	3.917.433.727.788,00	99,74
2	Inspektorat Jenderal	35.744.137.000,00	35.064.385.667,00	98,10
3	Ditjen AHU	735.659.896.000,00	636.374.253.834,00	86,50
4	Ditjen Pemasyarakatan	6.111.025.045.000,00	6.053.098.456.587,00	99,05
5	Ditjen Imigrasi	2.631.939.463.000,00	2.513.970.721.279,00	95,52
6	Ditjen KI	281.241.752.000,00	262.202.296.553,00	93,23
7	Ditjen PP	44.321.481.000,00	43.176.162.372,00	97,42
8	Ditjen HAM	37.209.054.000,00	36.507.000.908,00	98,11
9	BPHN	104.657.846.000,00	102.533.059.784,00	97,97
10	Balitbang HAM	31.478.608.000,00	31.175.012.935,00	99,04
11	BPSDM	151.677.117.000,00	142.860.930.655,00	94,19
Jumlah		14.092.518.753.000,00	13.774.396.008.362,00	97,74

Realisasi Belanja Pegawai B.2.1. Belanja Pegawai
Rp6.885.840.107.867,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 adalah sebesar Rp6.885.840.107.867,00 atau 99,67% dari pagu sebesar Rp6.908.739.845.000,00. Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp6.306.574.297.290,00 atau 98,17% dari pagu sebesar Rp 6.424.058.552.000,00

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2019 dan TA 2018 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018

MAP	URAIAN	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Kenaikan/Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%



5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.556.826.955.574,00	3.205.236.045.835,00	351.590.909.739,00	10,97
5122	Belanja Lembur	31.521.024.150,00	25.624.952.350,00	5.896.071.800,00	23,01
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	3.304.216.471.721,00	3.078.622.913.294,00	225.593.558.427,00	7,33
JUMLAH BELANJA KOTOR		6.892.564.451.445,00	6.309.483.911.479,00	583.080.539.966,00	9,24
PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI		6.724.343.578,00	2.909.614.189,00	3.814.729.389,00	131,11
JUMLAH BELANJA		6.885.840.107.867,00	6.306.574.297.290,00	579.265.810.577,00	9,19

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp579.265.810.577,00 atau sebesar 9,19% dibandingkan realisasi belanja TA 2018. Kenaikan ini terjadi antara lain karena meningkatnya belanja pegawai disebabkan adanya kenaikan jumlah pegawai baru melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil .

Berikut adalah Tabel Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 menurut jenis belanja pegawai :

Tabel 21
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2019

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.422.851.892.000,00	2.419.571.792.786,00	271.146.483,00	2.419.300.646.303,00	99,85
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.591.000,00	48.121.382,00	4.830.250,00	43.291.132,00	80,78
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	152.006.871.000,00	151.707.380.000,00	50.033.622,00	151.657.346.378,00	99,77
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	43.144.555.000,00	42.951.155.517,00	4.543.732,00	42.946.611.785,00	99,55
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	70.758.256.000,00	70.447.245.000,00	128.551.430,00	70.318.693.570,00	99,38
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	152.403.146.000,00	151.666.916.000,00	502.004.291,00	151.164.911.709,00	99,20
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4.193.792.000,00	3.652.696.497,00	1.581.006,00	3.651.115.491,00	87,06



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

511126	Belanja Tunj. Beras	122.946.750.000,00	122.555.838.938,00	13.684.923,00	122.542.154.015,00	99,67
511129	Belanja Uang Makan PNS	545.249.068.000,00	539.128.550.369,00	21.228.980,00	539.107.321.389,00	98,86
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil PNS	473.942.000,00	471.725.000,00	100.000,00	471.625.000,00	99,51
511138	Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	7.258.527.000,00	7.213.265.000,00	4.900.000,00	7.208.365.000,00	99,31
511142	Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)	45.000.000,00	23.954.085,00	0,00	23.954.085,00	53,23
511145	Belanja Tunj. Penghidupan LN utk Home Staf PNS	999.000.000,00	999.000.000,00	0,00	999.000.000,00	100,00
511147	Belanja Tunj. Lain-Lain termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	47.303.968.000,00	46.389.315.000,00	4.760.326.068,00	41.628.988.932,00	87,94
511192	Belanja Tunj. Lain-Lain termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	3.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512211	Belanja Uang Lembur	34.776.891.000,00	31.521.024.150,00	28.939.050,00	31.492.085.100,00	90,55
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.304.270.793.000,00	3.304.216.471.721,00	932.473.743,00	3.303.283.997.978,00	99,97
Jumlah		6.908.739.845.000,00	6.892.564.451.445,00	6.724.343.578,00	6.885.840.107.867,00	99,67

Pada laporan realisasi anggaran TA 2019 *Audited* sudah tidak terdapat satker yang mengalami pagu minus pada belanja pegawai, hal ini dikarenakan telah dilakukan perbaikan revisi pagu minus belanja pegawai sampai dengan bulan April 2020.

Pada Tabel di atas terdapat total pengembalian belanja pegawai dengan jumlah Rp6,724,343,578.,00 yang disebabkan diantaranya:

- Terdapat pada satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan total pengembalian sebesar Rp5.002.313.310,00 yang disebabkan terbitnya Surat Keputusan bagi PNS yang baru pada bulan Februari 2019 dan mendapatkan tunjangan pemasyarakatan yang dibayarkan sesuai TMT mulai bulan Januari 2019.
- Terdapat pada satker pusat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp63.434.031,00 yang merupakan pengembalian belanja pegawai atas gaji yang telah dibayarkan an. Markus dikarenakan yang



bersangkutan telah mengajukan pensiun dini.

Realisasi Belanja Barang B.2.2. Belanja Barang

Rp5.261.614.869.573,00

Realisasi Belanja Barang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2019 adalah sebesar Rp5.261.614.869.573,00 atau 95,84% dari pagu sebesar Rp5.489.883.229.000,00. Realisasi belanja barang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2018 adalah sebesar Rp4.489.360.521.766,00 atau mencapai 94,29% dari anggarannya sebesar Rp4.761.221.741.000,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2019 dan TA 2018 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018

Kode	URAIAN	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Kenaikan/Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	2.292.180.082.627,00	1.743.968.118.776,00	548.211.963.851,00	31,43
5212	Belanja Barang Non Operasional	483.463.426.441,00	547.588.114.222,00	(64.124.687.781,00)	(11,71)
5218	Belanja Barang Persediaan	721.220.894.190,00	463.085.190.060,00	258.135.704.130,00	55,74
5221	Belanja Jasa	703.684.192.029,00	719.894.360.902,00	(16.210.168.873,00)	(2,25)
5231	Belanja Pemeliharaan	382.622.608.795,00	384.142.242.536,00	(1.519.633.741,00)	(0,40)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	597.386.440.542,00	575.468.962.756,00	21.917.477.786,00	3,81
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	105.194.295.022,00	81.243.708.729,00	23.950.586.293,00	29,48
JUMLAH BELANJA KOTOR		5.285.751.939.646,00	4.515.390.697.981,00	770.361.241.665,00	17,06
PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI		24.137.070.073,00	26.030.176.215,00	(1.893.106.142,00)	(7,27)
JUMLAH BELANJA		5.261.614.869.573,00	4.489.360.521.766,00	772.254.347.807,00	17,20

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp772.254.347.807,00 atau sebesar 17,20% dibandingkan TA 2018. Hal ini

disebabkan antara lain meningkatnya kebutuhan belanja barang dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan non operasional Kementerian Hukum dan HAM.

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang TA 2019 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 23
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang TA 2019

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	2.325.082.416.000,00	2.292.180.082.627,00	1.236.134.819,00	2.290.943.947.808,00	98,53
5212	Belanja Barang Non Operasional	524.804.807.000,00	483.463.426.441,00	485.412.847,00	482.978.013.594,00	92,03
5218	Belanja Barang Persediaan	746.641.603.000,00	721.220.894.190,00	67.781.300,00	721.153.112.890,00	96,59
5221	Belanja Jasa	741.279.321.000,00	703.684.192.029,00	447.574.669,00	703.236.617.360,00	94,87
5231	Belanja Pemeliharaan	394.671.566.000,00	382.622.608.795,00	49.220.514,00	382.573.388.281,00	96,93
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	640.259.677.000,00	597.386.440.542,00	10.332.541.228,00	587.053.899.314,00	91,69
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	117.102.973.000,00	105.194.295.022,00	11.518.404.696,00	93.675.890.326,00	79,99
Jumlah		5.489.842.363.000,00	5.285.751.939.646,00	24.137.070.073,00	5.261.614.869.573,00	95,84

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Operasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 24
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional TA 2019

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	215.871.429.000,00	212.235.545.739,00	8.511.008,00	212.227.034.731,00	98,31
521112	Belanja Pengadaan BaMa	1.917.921.636.000,00	1.893.225.680.090,00	1.193.274.046,00	1.892.032.406.044,00	98,65
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	35.635.995.000,00	34.626.776.715,00	49.000,00	34.626.727.715,00	97,17
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.425.374.000,00	7.537.278.510,00	0,00	7.537.278.510,00	89,46
521115	Belanja Honor Operasional Satker	77.680.475.000,00	76.817.519.671,00	16.238.500,00	76.801.281.171,00	98,87
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	69.547.507.000,00	67.737.281.902,00	18.062.265,00	67.719.219.637,00	97,37
Jumlah		2.325.028.416.000,00	2.292.180.082.627,00	1.236.134.819,00	2.290.943.947.808,00	98,53

Pada tabel di atas terdapat pengembalian belanja barang operasional sebesar Rp1.236.134.819,00 diantaranya terdiri dari :

1. Perwakilan Imigrasi di Hongkong sebesar Rp3.132.008,00 yang merupakan pengembalian belanja jasa internet.
2. BHP Makassar Rp1.030.000,00 yang merupakan kelebihan pembayaran atas pengadaan baju kantor.
3. Rutan Bengkulu sebesar Rp165.000,00 dan Kanwil Jambi Rp100.000,00 merupakan pengembalian belanja langganan koran dikarenakan kesalahan input kuitansi.
4. Lapas Klas IIA Kerobokan Rp25.000,00 merupakan pengembalian belanja kartu kredit pemerintah oleh BRI.
5. Kanim Jakarta Timur Rp4.059.000,00 merupakan kelebihan pembayaran honor Pegawai Pemerintah Non PNS.
6. Pengembalian belanja pengadaan bama sebesar Rp1.193.274.046,00 terdapat pada satuan kerja pemasyarakatan diantaranya disebabkan karena kesalahan perhitungan jumlah narapidana dan jumlah hari dalam pengajuan pembayaran.
7. Pengembalian belanja honor sebesar Rp16.238.500,00 atas belanja honor yang melebihi SBU atas temuan Itjen dan dikarenakan ketidakhadiran narasumber.
8. Lapas Palembang sebesar Rp1.000.000,00 kelebihan pembayaran belanja pakaian dinas.
9. Rupbasan Padang Rp9.141.545,00 merupakan temuan inspektorat atas kelebihan pembayaran pakaian dinas.
10. Rupbasan Cirebon Rp234.420,00 merupakan kesalahan setor yang seharusnya pembayaran pajak.
11. Kanim Batulicin Rp7.626.300,00 merupakan temuan BPK atas kelebihan pembayaran pakaian dinas.
12. Kanim Kerinci Rp60.000,00 merupakan kelebihan pembayaran belanja atas temuan Itjen.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 25
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional TA 2019

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521211	Belanja Bahan	203.059.650.000,00	187.595.796.941,00	14.252.493,00	187.581.544.448,00	92,38
521213	Belanja Honor Output	55.076.744.000,00	47.356.438.608,00	190.568.500,00	47.165.870.108,00	85,64
521214	Belanja Rugi Selisih Kurs UP Satker Perwakilan LN	181.841.000,00	87.884.996,00	0,00	87.884.996,00	48,33

521219	Belanja Barang Non Operasional	266.486.572.000,00	248.423.305.896,00	280.591.854,00	248.142.714.042,00	93,12
Jumlah		524.804.807.000,00	483.463.426.441,00	485.412.847,00	482.978.013.594,00	92,03

Pada tabel di atas terdapat pengembalian belanja barang non operasional sebesar Rp485.412.847,00 diantaranya terdiri dari :

1. Pengembalian Belanja Bahan atas temuan Itjen dan BPK pada satker Kanwil Gorontalo Rp58.000,00 , Pusdatin Rp273.093,00 , Lapas Banjarmasin Rp4.852.400,00 , Rutan Pelaihari Rp2.000.000,00 dan Lapas Narkotika Martapura Rp7.105.000,00.
2. Satker pusat Ditjen Imigrasi sebesar Rp109.827.566,00 yang merupakan pengembalian kegiatan penyidikan dan operasi intelijen keimigrasian Rp97.323.566,00, pengembalian kegiatan pendataan orang asing Rp5.004.000,00 dan pengembalian kegiatan assessment uji kompetensi Rp7.500.000,00.
3. Kanim Maumere sebesar Rp7.740.000,00 merupakan pengembalian belanja barang non operasional lainnya yang disebabkan kesalahan penginputan kwitansi di aplikasi Silabi SAS.
4. Lapas Banjarbaru Rp5.185.000,00 pengembalian belanja atas temuan BPK
5. Kanim Batulicin Rp7.627.716,00 pengembalian belanja atas kegiatan intelijen dan pemantauan WNA.
6. BHP Semarang Rp350.000,00 kelebihan pembayaran pembinaan rohani.
7. Kanim Belawan sebesar Rp4.500.000,00 merupakan pengembalian belanja atas pembelian Jas Kepala Kantor Imigrasi.
8. Pengembalian belanja honor kegiatan sebesar Rp190.568.500,00 diantaranya terdapat pada Satker Dipa AHU sebanyak 19 satker yang merupakan pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran honor output Majelis Permusyawaratan Wilayah (MPW) dan Majelis Permusyawaratan Daerah (MPD) yang tidak sesuai ketentuan berlaku. Selain itu terdapat pada beberapa satker lainnya yang disebabkan dengan ketidakhadiran narasumber.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Persediaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 26
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Persediaan TA 2019

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	579.309.007.000,00	556.946.799.227,00	35.817.800,00	556.910.981.427,00	96,13
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	194.846.000,00	194.251.390,00	0,00	194.251.390,00	99,69
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	63.750.000,00	63.668.000,00	0,00	63.668.000,00	99,87
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	167.074.000.000,00	164.016.175.573,00	31.963.500,00	163.984.212.073,00	98,15



Jumlah	746.641.603.000,00	721.220.894.190,00	67.781.300,00	721.153.112.890,00	96,59

Pada tabel di atas dapat dilihat terdapat pengembalian belanja persediaan sebesar Rp67.781.300,00 yaitu terdiri dari :

1. Lapas Banjarbaru sebesar Rp33.637.00,00 dan Rp12.372.000,00 merupakan pengembalian belanja atas temuan Audit BPK TA 2019.
2. Lapas Banjarmasin sebesar Rp2.174.000,00 dan Lapas Narkotika Martapura sebesar Rp18.125.000,00 yang merupakan pengembalian belanja persediaan atas temuan pemeriksaan BPK TA 2019.
3. Lapas Narkotika Palembang sebesar Rp1.412.400,00 yang merupakan pengembalian belanja atas kesalahan input nilai SPM.
4. Kanim Ngurah Rai sebesar Rp6.000,00 dan Kanim Belawan sebesar Rp800,00 merupakan pengembalian belanja ATK.
5. Lapas Narkotika Jakarta Rp54.100,00 merupakan pengembalian belanja alat mandi WBP.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 27
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa TA 2019

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
522111	Belanja Langganan Listrik	173.431.599.000,00	168.405.022.799,00	33.645.179,00	168.371.377.620,00	97,08
522112	Belanja Langganan Telepon	7.382.083.000,00	6.395.086.389,00	613.260,00	6.394.473.129,00	86,62
522113	Belanja Langganan Air	17.700.061.000,00	16.173.851.351,00	2.102.600,00	16.171.748.751,00	91,37
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	65.723.611.000,00	64.885.599.488,00	13.762.149,00	64.871.837.339,00	98,70
522131	Belanja Jasa Konsultan	25.195.576.000,00	19.221.482.670,00	0,00	19.221.482.670,00	76,29
522141	Belanja Sewa	271.592.487.000,00	264.607.292.715,00	15.537.631,00	264.591.755.084,00	97,42
522151	Belanja Jasa Profesi	65.700.113.000,00	59.763.430.765,00	381.163.850,00	59.382.266.915,00	90,38
522191	Belanja Jasa Lainnya	114.553.791.000,00	104.232.425.852,00	750.000,00	104.231.675.852,00	90,99
Jumlah		741.279.321.000,00	703.684.192.029,00	447.574.669,00	703.236.617.360,00	94,87

Terdapat pengembalian belanja jasa sebesar Rp447.574.669,00 diantaranya pada:

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Rp29.618.645,00 merupakan pengembalian belanja atas temuan Itjen.
2. Kanim Denpasar Rp250,00 kelebihan pembayaran listrik bulan September

2019.

3. Lapas Anak Martapura sebesar Rp4.026.284,00 merupakan pengembalian belanja listrik rumah dinas Kalapas yang telah dibayarkan atau dibebankan kepada kantor
4. BHP Ujung Pandang Rp613.260,00 kelebihan pembayaran tagihan telepon.
5. Rutan Pangkajene sebesar Rp2.102.600,00 merupakan pengembalian belanja air.
6. Lapas Banjarbaru Rp4.800.000,00 merupakan pengembalian belanja atas temuan Audit BPK TA 2019.
7. Kanim Jakarta Timur Rp8.962.149,00 merupakan pengembalian belanja atas langganan TV kabel.
8. Pengembalian belanja sewa kendaraan roda 4 atas temuan Itjen terdapat pada BHP Semarang Rp1.500.000,00, Kanwil Aceh Dipa AHU Rp5.291.631,00, Kanwil Mataram Dipa AHU Rp5.346.000,00, Rupbasan Padang Rp500.000,00, Kanim Biak Rp1.400.000,00 dan Kanwil Bengkulu Dipa AHU Rp1.500.000,00 atas pengembalian sewa ruangan untuk sosialisasi fidusia di aula STAIN Curup.
9. Pengembalian belanja jasa profesi yang disebabkan diantaranya karena ketidakhadiran narasumber dan belanja telah diajukan LS dimuka yaitu pada Sekretariat Jenderal Rp8.655.000,00, Ditjen AHU sebesar Rp222.870.000,00, Ditjen KI sebesar Rp16.275.000,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp21.305.000,00, Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp2.925.000,00, BPSDM sebesar Rp86.715.250,00, Ditjen HAM Rp1.730.000,00, BPHN Rp7.650.000,00, Badiklat Jawa Tengah Rp5.483.600,00, dan 9 satuan kerja lainnya.
10. Kanwil Lampung Dipa BPHN Rp 750.000,00 merupakan pengembalian atas sisa honor juri lomba Kadarkum.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 28
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan TA 2019

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158.241.880.000,00	157.245.817.105,00	36.539.950,00	157.209.277.155,00	99,35
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.193.653.000,00	3.945.602.796,00	0,00	3.945.602.796,00	94,09
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.457.495.000,00	1.456.375.372,00	0,00	1.456.375.372,00	99,92

523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	227.176.927.000,00	216.762.838.065,00	12.680.564,00	216.750.157.501,00	95,41
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.193.241.000,00	1.820.268.406,00	0,00	1.820.268.406,00	82,99
523124	Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/ Apung/ Udara Bermotor	83.000.000,00	73.181.319,00	0,00	73.181.319,00	88,17
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	254.703.000,00	249.014.260,00	0,00	249.014.260,00	97,77
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	54.244.000,00	54.104.000,00	0,00	54.104.000,00	99,74
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1.016.423.000,00	1.015.407.472,00	0,00	1.015.407.472,00	99,90
Jumlah		394.671.566.000,00	382.622.608.795,00	49.220.514,00	382.573.388.281,00	96,93

Pada tabel di atas terdapat pengembalian belanja pemeliharaan sebesar Rp49.220.514,00 yang terdiri dari :

1. Pengembalian belanja atas temuan Inspektorat Jenderal Rutan Padang sebesar Rp22.551.237,00, Rupbasan Jambi sebesar Rp13.988.713,00, Kanim Kerinci Rp80.000,00 dan Rupbasan Manado Rp400.000,00.
2. Kanim Batulicin Rp11.011.564,00 merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan hardware dan instalasi jaringan TA 2019.
3. Lapas Banjarbaru Rp1.189.000,00 pengembalian belanja atas temuan audit BPK TA 2019.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 29
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2019

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	389.769.398.000,00	366.037.712.800,00	5.081.811.865,00	360.955.900.935,00	92,61
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.077.649.000,00	52.755.323.731,00	38.845.000,00	52.716.478.731,00	90,77
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	72.773.328.000,00	66.167.054.114,00	484.734.924,00	65.682.319.190,00	90,26
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	119.694.756.000,00	112.426.349.897,00	4.727.149.439,00	107.699.200.458,00	89,98
Jumlah		640.315.131.000,00	597.386.440.542,00	10.332.541.228,00	587.053.899.314,00	91,68

Pada tabel di atas terdapat pengembalian belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp10.322.541.228,00 diantaranya disebabkan perbedaan nilai riil (selisih harga hotel dan tiket) pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas karena pengajuan belanja perjalanan dinas melalui pembayaran LS dimuka.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 30
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2019

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	85.893.936.000,00	76.256.137.916,00	11.304.094.026,00	64.952.043.890,00	75,62
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	31.209.037.000,00	28.938.157.106,00	214.310.670,00	28.723.846.436,00	92,04
Jumlah		117.102.973.000,00	105.194.295.022,00	11.518.404.696,00	93.675.890.326,00	79,99

Pada tabel di atas, terlihat jumlah pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp11.518.404.696,00 yang terdapat pada satuan kerja pusat sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal sebesar Rp28.931.900,00 yang disebabkan perbedaan nilai riil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas karena pengajuan belanja perjalanan dinas luar negeri melalui LS dimuka dan terdapat perbedaan perhitungan selisih hari pada saat kedatangan di negara tujuan.
2. Ditjen AHU sebesar Rp10.125.696.695,00 yang disebabkan pejabat/pegawai yang bersangkutan batal melaksanakan perjalanan dinas luar negeri karena adanya perintah untuk melaksanakan tugas lain yang tidak dapat diwakilkan dan perbedaan nilai riil atas kelebihan pengajuan belanja perjalanan dinas dengan menggunakan metode Pembayaran LS dimuka.
3. Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.101.963.347,00 yang disebabkan perbedaan nilai riil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas karena pengajuan belanja perjalanan dinas luar negeri melalui LS dimuka dan terdapat perbedaan perhitungan selisih hari pada saat kedatangan di negara tujuan.
4. Balitbangkumham sebesar Rp4.619.202,00 yang merupakan pengembalian uang harian akibat adanya gangguan penerbangan ke Athena Yunani selama 1 hari.
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebesar Rp30.519.720,00 merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas biasa yang salah akun pada saat penyeteroran. Namun demikian telah dilakukan ralat pada tanggal 21 Oktober 2019.
6. Ditjen HAM sebesar Rp12.363.162,00 dikarenakan adanya selisih harga hotel dan tiket perjalanan dinas di luar negeri.
7. Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri Rp12.363.162,00 dikarenakan adanya selisih harga hotel dan tiket perjalanan dinas di luar negeri. Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri Rp12.363.162,00 dikarenakan adanya selisih harga hotel dan tiket perjalanan dinas di luar negeri.



Belanja Modal
Rp1.626.941.030.922,00

B.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2019 adalah sebesar Rp1.626.941.030.922,00 atau 96,06% dari pagu Rp1.693.936.545.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan Realisasi Belanja Modal TA 2018 adalah sebesar Rp1.845.754.684.471,00 atau 96,34% dari pagu Rp1.915.936.626.000,00.

Tabel 31
Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2019

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	902.480.244.000,00	870.633.556.264,00	16.620.000,00	870.616.936.264,00	96,47
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	684.976.099.000,00	660.213.835.006,00	153.645.664,00	660.060.189.342,00	96,36
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	152.406.000,00	152.406.000,00	0,00	152.406.000,00	100,00
5361	Belanja Modal Lainnya	106.147.796.000,00	96.111.499.316,00	0,00	96.111.499.316,00	90,54
Jumlah		1.693.756.545.000,00	1.627.111.296.586,00	170.265.664,00	1.626.941.030.922,00	96,06

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 32
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	897.162.362.000,00	865.371.844.864,00	16.620.000,00	865.355.224.864,00	96,45
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	5.317.882.000,00	5.261.711.400,00	0,00	5.261.711.400,00	98,94
Jumlah		902.480.244.000,00	870.633.556.264,00	16.620.000,00	870.616.936.264,00	96,47

Pada tabel di atas dapat dilihat terdapat pengembalian belanja modal sebesar Rp16.620.000,00 yaitu terdiri dari :

1. Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp16.150.000,00 merupakan merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas paket meeting fullboard kegiatan dalam kota yang juga kesalahan kode akun dalam melakukan pembayaran belanja ini.
2. Kanwil Padang sebesar Rp470.000,00 merupakan pengembalian belanja dispenser atas kesalahan kode akun belanja.

Penjelasan atas Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 33
Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019

Uraian	Nilai	Keterangan
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	870.616.936.264,00	
Rincian :		
Pembelian	849.773.958.368,00	Pembelian yang menambah nilai dan kuantitas Aset Peralatan dan Mesin pada Eselon I Sekretariat Jenderal Rp644.644.000,00, Ditjen AHU sebesar Rp116.367.662.355,00, Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp460.309.698.347,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp246.594.796.941,00, Ditjen KI sebesar Rp24.150.116.798,00, Ditjen PP sebesar Rp329.475.000,00, BPHN sebesar Rp244.380.927,00, Balitbangham sebesar Rp559.972.000,00 dan BPSDM sebesar Rp573.212.000,00.
Pengembangan Nilai Aset	5.417.075.800,00	Pengembangan Nilai Aset yang menambah nilai aset Peralatan dan Mesin pada satker Ditjen AHU sebesar Rp431.200.000,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp4.813.646.400,00, Kanim Jakarta Selatan Rp4.650.000,00, Kanim Belakang Padang Rp2.475.000,00, Kanim Denpasar Rp77.407.000,00, Kanim Banjarmasin Rp47.300.000,00, Perwakilan Imigrasi di Berlin Rp23.532.400,00 dan Ditjen KI sebesar Rp16.865.000,00.
Perolehan/Penambahan KDP	738.681.500,00	Perolehan/ Penambahan KDP yang menambah nilai KDP aset Peralatan dan Mesin pada satker Ditjen Imigrasi sebesar Rp650.604.500,00, dan Kanim Ternate sebesar Rp88.077.000,00.
Pengembangan KDP	856.117.500,00	Pengembangan KDP yang menambah nilai KDP aset Peralatan dan Mesin pada satker Ditjen Imigrasi sebesar Rp650.604.500,00, dan Kanim Ternate sebesar Rp205.513.000,00.
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang membentuk Beban Ekstra Peralatan dan Mesin	4.053.277.824,00	Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi Peralatan dan Mesin (Rp1.000.000,00) sehingga membentuk beban ekstra komptable Peralatan dan Mesin yaitu terdapat pada unut Eselon I Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp3.310.496.355,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp618.247.700,00, dan Ditjen KI sebesar Rp124.533.769,00.
Kesalahan Pembebanan Belanja barang persediaan menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin	4.057.743.280,00	Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin membentuk aset persediaan yang seharusnya menggunakan akun belanja persediaan pada Ditjen Pemasarakatan.
Salah Pembebanan Belanja modal peralatan dan mesin menggunakan akun belanja barang persediaan	(60.503.000,00)	Kesalahan penggunaan akun Belanja persediaan membentuk aset peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada Ditjen AHU sebesar Rp49.775.000,00, Lapas Sukamiskin Rp4.630.000,00 dan Lapas Banjarmasin Rp6.098.000,00.



Salah Pembebanan Belanja modal Aset Lainnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin	4.863.607.995,00	Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin membentuk aset lainnya yang seharusnya menggunakan akun belanja modal aset lainnya terdapat pada satker Ditjen AHU sebesar Rp4.862.749.995,00 Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp858.000,00.
Salah Pembebanan belanja modal peralatan dan mesin menggunakan akun Belanja modal Aset Lainnya	(141.386.300,00)	Kesalahan penggunaan akun Belanja modal aset lainnya membentuk aset peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada Ditjen KI.
Salah Pembebanan Belanja modal peralatan dan mesin menggunakan akun belanja barang non operasional lainnya	(3.596.945,00)	Kesalahan penggunaan akun Belanja barang non operasional lainnya membentuk aset peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada Rupbasan Wonosari.
Salah Pembebanan Belanja modal peralatan dan mesin menggunakan akun belanja jasa lainnya	(26.851.000,00)	Kesalahan penggunaan akun Belanja Jasa lainnya membentuk aset peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada BHP Ujung Pandang.
Salah Pembebanan Belanja modal peralatan dan mesin menggunakan akun belanja perjalanan dinas	(16.150.000,00)	Kesalahan penggunaan akun Belanja perjalanan dinas membentuk aset peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada Ditjen Pemasyarakatan.
Salah Pembebanan Belanja perjalanan dinas menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin	144.518.528,00	Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin membentuk beban perjalanan dinas yang seharusnya menggunakan akun belanja perjalanan dinas terdapat pada satker Ditjen Pemasyarakatan.
Salah Pembebanan Belanja sewa menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin	982.418.200,00	Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin membentuk beban sewa yang seharusnya menggunakan akun belanja sewa terdapat pada satker Ditjen Pemasyarakatan.
Salah Pembebanan Belanja modal peralatan dan mesin menggunakan akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	(13.800.000,00)	Kesalahan penggunaan akun Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan membentuk aset peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada Lapas Anak Pekanbaru.
Salah Pembebanan Belanja modal peralatan dan mesin menggunakan akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	(5.900.000,00)	Kesalahan penggunaan akun Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin membentuk aset peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada Lapas Narkotika Jayapura.
Koreksi AT Non Revaluasi atas kelebihan belanja modal Peralatan dan mesin	(2.275.486,00)	Koreksi AT Non Revaluasi atas kelebihan/ pengembalian belanja modal Peralatan dan mesin terdapat pada Ditjen Pemasyarakatan.
Total Rincian :	870.616.936.264,00	
Selisih	0,00	

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 34
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	572.384.651.000,00	555.326.768.006,00	138.459.379,00	555.188.308.627,00	97,00
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	6.579.810.000,00	6.141.018.982,00	2.606.800,00	6.138.412.182,00	93,29
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	106.011.638.000,00	98.746.048.018,00	12.579.485,00	98.733.468.533,00	93,13
Jumlah		684.976.099.000,00	660.213.835.006,00	153.645.664,00	660.060.189.342,00	96,36

Pada tabel di atas dapat dilihat terdapat pengembalian belanja modal sebesar Rp170.265.664,00 yaitu terdiri dari :

1. Kanim Balikpapan sebesar Rp7.309.000,00 yang merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas untuk administrasi proyek pembangunan gedung kantor.
2. Kanim Banjarmasin sebesar Rp20.486.323,00 yang merupakan pengembalian belanja atas temuan pemeriksaan BPK berupa kekurangan volume fisik pekerjaan rehab ruang pelayanan TA 2019.
3. Lapas Perempuan Manokwari sebesar Rp2.606.800,00 merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas untuk administrasi pengelola kegiatan dalam rangka proyek pembangunan gedung kantor.
4. Lapas Kotabaru Rp22.135.700,00 merupakan pengembalian atas temuan pemeriksaan BPK.
5. Lapas Perempuan Yogyakarta Rp575.000,00 merupakan pengembalian atas temuan Itjen.
6. Rutan Bandung Rp58.465.950,00 merupakan temuan Itjen atas kelebihan KDP Gedung dan Bangunan.
7. Kanim Kediri Rp21.420.000,00 merupakan pengembalian honor pengelola kegiatan pembangunan gedung.
8. Kanim Pangkal Pinang Rp6.552.185,00 merupakan pengembalian renovasi gedung kantor lantai 2 atas hasil audit BPK TA 2019.
9. Kanim Tembilahan Rp3.172.000,00 merupakan pengembalian biaya perjalanan dinas pegawai PPKP dan PU untuk administrasi proyek pembangunan gedung kantor.
10. Kanim Singaraja Rp2.855.300,00 merupakan pengembalian belanja modal hasil audit BPK TA 2019 atas kelebihan pembayaran pekerjaan interior ruang pelayanan kantor.

Penjelasan atas Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 35
Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai	Keterangan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	660.060.189.342,00	
Rincian :		
Pembelian	1.818.054.000,00	Pembelian yang menambah nilai dan kuantitas Aset Gedung dan Bangunan pada Satker Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp1.567.852.000,00, Kanim Banjarmasin sebesar Rp49.302.000,00, Kanim Ketapang Sebesar Rp159.900.000,00, dan Kanim Manokwari sebesar Rp41.000.000,00.
Pengembangan Nilai Aset	29.668.416.291,00	Pengembangan Nilai Aset yang menambah nilai aset Gedung dan Bangunan pada Eselon I Ditjen AHU Sebesar Rp20.812.756.186,00, Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp2.678.459.959,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp6.148.200.146,00, dan BPSDM sebesar Rp29.000.000,00.
Perolehan/Penambahan KDP	25.378.623.015,00	Perolehan/ Penambahan KDP yang menambah nilai KDP aset Gedung dan Bangunan pada Eselon I Ditjen AHU sebesar Rp42.215.250,00, Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp2.303.675.324,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp22.498.283.441,00, Ditjen KI Sebesar Rp84.546.000,00, dan BPSDM sebesar Rp449.903.000,00.
Pengembangan KDP	608.450.824.405,00	Pengembangan KDP yang menambah nilai KDP aset Gedung dan Bangunan pada Eselon I Ditjen AHU sebesar Rp519.207.329,00, Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp357.882.382.655,00, Ditjen Imigrasi sebesar Rp235.134.519.621,00, Ditjen KI sebesar Rp14.444.811.800 dan BPSDM sebesar Rp469.903.000,00.
Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.300.000.000,00	Penyelesaian Pembangunan Langsung yang menambah nilai dan kuantitas aset Gedung dan Bangunan pada Kanim Kediri
Piutang atas denda keterlambatan penyelesaian paket pekerjaan pemerintah	1.721.471.016,00	Piutang atas denda keterlambatan penyelesaian paket pekerjaan pemerintah merupakan koreksi nilai belanja gedung dan bangunan terdapat pada Ditjen KI
Salah Pembebanan Belanja modal Aset Lainnya menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan	239.969.000,00	Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal gedung dan bangunan membentuk aset lainnya yang seharusnya menggunakan akun belanja modal aset lainya terdapat pada Ditjen Pemasarakatan.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang membentuk Beban Ekstra Gedung dan Bangunan	31.747.600,00	Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi Gedung dan Bangunan (Rp25.000.000,00) sehingga membentuk beban ekstra komptable Gedung dan bangunan yaitu terdapat pada BHP Jakarta sebesar Rp18.860.000,00, dan Ditjen Pemasarakatan Rp12,887.600,00.
Salah Pembebanan belanja modal gedung dan bangunan menggunakan akun Belanja modal Aset Lainnya	(5.919.658.293,00)	Kesalahan penggunaan akun Belanja modal aset lainnya membentuk aset gedung dan bangunan yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada Ditjen KI.
Salah Pembebanan Belanja modal gedung dan bangunan menggunakan akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	(754.141.012,00)	Kesalahan penggunaan akun Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan membentuk aset gedung dan bangunan yang seharusnya menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan terdapat pada Lapas Majalengka Rp137.671.258,00, Lapas Wanita Malang Rp126.975.000,00, Bapas Ujung Pandang Rp29.160.000,00, Rutan Gresik Rp52.981.000,00 dan Kanim Jakarta Pusat Rp407.353.754,00.
Koreksi atas belanja modal Gedung dan Bangunan	(1.875.116.680,00)	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi yang merupakan pengembalian belanja modal gedung dan bangunan atas Temuan BPK pada Unit Eselon I Ditjen Pemasarakatan Rp83.783.450,00, Ditjen Imigrasi Rp69.862.214,00, Ditjen KI Rp1.721.471.016,00.
Total Rincian :	660.060.189.342,00	
Selisih	0,00	

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 36
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2019

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
534131	Belanja Modal Jaringan	152.406.000,00	152.406.000,00	0,00	152.406.000,00	100,00
Jumlah		152.406.000,00	152.406.000,00	0,00	152.406.000,00	100,00

Realisasi belanja modal jaringan sebesar Rp152.406.000,00 terdapat pada Kantor Imigrasi Bekasi yang merupakan pengadaan jaringan Lan, listrik dan internet pada gedung kantor.

Penjelasan atas Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 37
Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Nilai	Keterangan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	152.406.000,00	
Rincian :		
Pembelian	152.406.000,00	Pembelian yang menambah nilai dan kuantitas JIJ terdapat pada Kantor Imigrasi Bekasi yang merupakan pengadaan jaringan Lan, listrik dan internet pada gedung kantor
Total Rincian :	152.406.000,00	
Selisih	0,00	

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 38
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Lainnya TA 2019

Kode	Rincian Belanja	Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
536111	Belanja Modal Lainnya	63.268.530.000,00	57.340.596.161,00	0,00	57.340.596.161,00	90,63
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	42.879.266.000,00	38.770.903.155,00	0,00	38.770.903.155,00	19,33
Jumlah		106.147.796.000,00	96.111.499.316,00	0,00	96.111.499.316,00	90,54

Penjelasan atas Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 39
Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Lainnya

Uraian	Nilai	Keterangan
Realisasi Belanja Modal Lainnya	96.111.499.316,00	
Rincian :		
Pembelian	29.206.431.070,00	Pembelian yang menambah nilai dan kuantitas Aset lainnya pada Eselon I Ditjen AHU Sebesar Rp23.389.789.241,00, Ditjen Pemasarakatan Rp1.143.847.001,00, Ditjen Imigrasi Sebesar Rp1.853.950.848,00, Ditjen KI Sebesar Rp2.639.387.581,00, dan BPHN Sebesar Rp179.456.399,00.
Perolehan/Penambahan KDP	32.550.457.700,00	Perolehan/ Penambahan KDP yang menambah nilai KDP aset lainnya pada Satker Pusat Ditjen Imigrasi.
Pengembangan Nilai Aset	19.439.911.600,00	Pengembangan Nilai Aset yang menambah nilai aset lainnya pada Satker Pusat Ditjen Imigrasi Sebesar Rp17.580.767.600,00, Ditjen KI Sebesar Rp1.614.534.000,00, dan BPHN Sebesar Rp244.610.000,00.
Pengembangan KDP	13.969.652.033,00	Pengembangan Nilai Aset yang menambah nilai aset lainnya terdapat pada Satker Ditjen Imigrasi.
Salah Pembebanan belanja modal peralatan dan mesin menggunakan akun Belanja modal Aset Lainnya	141.386.300,00	Kesalahan penggunaan akun Belanja modal aset lainnya membentuk aset peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada Ditjen KI.
Salah Pembebanan belanja modal gedung dan bangunan menggunakan akun Belanja modal Aset Lainnya	5.919.658.293,00	Kesalahan penggunaan akun Belanja modal aset lainnya membentuk aset gedung dan bangunan yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada Ditjen KI.
Salah Pembebanan Belanja modal Aset Lainnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin	(4.863.607.995,00)	Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin membentuk aset lainnya yang seharusnya menggunakan akun belanja modal aset lainnya terdapat pada satker Ditjen AHU sebesar Rp4.862.749.995,00 Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp858.000,00.
Salah Pembebanan Belanja modal Aset Lainnya menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan	(239.969.000,00)	Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal gedung dan bangunan membentuk aset lainnya yang seharusnya menggunakan akun belanja modal aset lainnya terdapat pada Ditjen Pemasarakatan.



Salah Pembebanan Belanja modal Aset Lainnya menggunakan akun belanja jasa lainnya	(52.771.600,00)	Kesalahan penggunaan akun Belanja Jasa lainnya membentuk aset lainnya yang seharusnya menggunakan akun belanja modal aset lainnya terdapat pada BHP Ujung Pandang.
Salah Pembebanan Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan menggunakan akun belanja Aset lainnya	40.350.915,00	Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal Aset lainnya membentuk beban pemeliharaan gedung dan bangunan yang seharusnya menggunakan akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan terdapat pada satker Ditjen KI.
Total Rincian :	96.111.499.316,00	
Selisih	0,00	



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**PENJELASAN ATAS
POS-POS NERACA**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp1.937.351.678,00*

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.937.351.678,00 dan Rp2.473.362.985,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2019 dan 2018

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2018
Uang Tunai	428.249.999,00	521.394.086,00
Rekening Bank	1.509.101.679,00	1.951.968.899,00
Jumlah	1.937.351.678,00	2.473.362.985,00

Tabel 41
Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Kas di Bendahara Pengeluaran	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	928.500,00
Ditjen Pemasyarakatan	506.338.799,00	215.540.500,00
Ditjen Imigrasi	1.431.012.879,00	2.210.726.514,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	46.167.471,00
TOTAL	1.937.351.678,00	2.473.362.985,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42
Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019

NO	URAIAN SATKER	SALDO	KETERANGAN
DITJEN PEMASYARAKATAN			
1	Balai Pemasyarakatan Ambon	25.440.000,00	Sisa TUP TA 2019
2	Lapas Batam	18.300.000,00	Sisa UP TA 2019
		95.979.950,00	Sisa TUP TA 2019
3	LPKA Ambon, Provinsi Maluku	18.656.100,00	Sisa TUP TA 2019
4	Lembaga Pemasyarakatan Cipinang	275.138.000,00	Sisa TUP TA 2019
5	Rumah Tahanan Negara Rangkas Bitung	38.660.000,00	Sisa TUP TA 2019
6	Balai Pemasyarakatan Bojonegoro	15.266.000,00	Sisa TUP TA 2019
7	Cabang Rumah Tahanan Negara Gunung Tua	2.109,00	Sisa UP TA 2019
8	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang	2.625.000,00	Sisa UP TA 2019
		3.449.000,00	Sisa TUP TA 2019
9	Lembaga Pemasyarakatan Ulu Siau	2.390.940,00	Sisa TUP TA 2019
10	Lembaga Pemasyarakatan Kendari	2.009.000,00	Sisa TUP TA 2019
11	Balai Pemasyarakatan Pontianak	4.514.700,00	Sisa TUP TA 2019
12	Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari	3.908.000,00	Sisa TUP TA 2019
SUBTOTAL		506.338.799,00	
DITJEN IMIGRASI			
1	Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura	95.000,00	Sisa UP TA 2019
2	Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat	15.004.000,00	Sisa TUP TA 2019
3	Perwakilan Imigrasi Di Singapura	219.706.817,00	Sisa UP TA 2019
		460.000,00	Sisa TUP TA 2019
4	Perwakilan Imigrasi Di Kualalumpur	72.382.090,00	Sisa UP TA 2019
5	Perwakilan Imigrasi Di Penang	85.433.182,00	Sisa UP TA 2019
6	Perwakilan Imigrasi Di Bangkok	58.067.814,00	Sisa UP TA 2019
7	Perwakilan Imigrasi Di Hongkong	130.836.074,00	Sisa UP TA 2019
8	Perwakilan Imigrasi Di Tokyo	32.976.899,00	Sisa UP TA 2019
		57.020,00	Sisa TUP TA 2019
9	Perwakilan Imigrasi Di Davao	23.498.667,00	Sisa UP TA 2019
10	Perwakilan Imigrasi Di Den Haag	91.435.079,00	Sisa UP TA 2019
11	Perwakilan Imigrasi Di Berlin	18.436.896,00	Sisa UP TA 2019
12	Perwakilan Imigrasi Di Sidney	32.388.080,00	Sisa UP TA 2019
13	Perwakilan Imigrasi Di Kuching	53.806.323,00	Sisa UP TA 2019

14	Perwakilan Imigrasi Di Tawao	53.217.645,00	Sisa UP TA 2019
		758.409,00	Sisa TUP TA 2019
15	Perwakilan Imigrasi Di Los Angeles	14.318.308,00	Sisa UP TA 2019
16	Perwakilan Imigrasi Di Jeddah	281.442.287,00	Sisa UP TA 2019
17	Perwakilan Imigrasi Di Beijing	66.212.409,00	Sisa UP TA 2019
18	Perwakilan Imigrasi Di Johor Bahru	4.579.406,00	Sisa UP TA 2019
19	Kantor Perwakilan Imigrasi Pada Kantor Urusan Kepentingan Ri Di Dili Timor	172.401.869,00	Sisa UP TA 2019
20	Perwakilan Imigrasi Guangzhou Di RRC	3.498.605,00	Sisa UP TA 2019
SUBTOTAL		1.431.012.879,00	
GRAND TOTAL		1.937.351.678,00	

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 pada seluruh satuan kerja telah disetorkan ke kas negara pada awal tahun 2020, kecuali saldo kas di bendahara pengeluaran pada kantor perwakilan imigrasi di luar negeri, dengan total nilai sebesar Rp1.415.913.879,00 belum disetor ke kas negara dan akan menjadi potongan UP awal pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan PMK Nomor:160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp52.788.944.267,00*

C.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp52.788.944.267,00 dan Rp32.906.472.664,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, dan kas lainnya di bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	86.350.048,00	323.577.765,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	52.702.594.219,00	32.570.194.899,00
Kas Lainnya dari Hibah	0,00	12.700.000,00
Jumlah	52.788.944.267,00	32.906.472.664,00

Tabel 44
Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Eselon I	Kas Lainnya dan Setara Kas	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	3.641.104,00	26.362.567,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	11.434.999.150,00	14.406.595.599,00
Ditjen Pemasyarakatan	79.409.955,00	152.250.967,00
Ditjen Imigrasi	1.498.989,00	157.664.231,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	41.269.395.069,00	18.163.599.300,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	52.788.944.267,00	32.906.472.664,00

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2019 dapat disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 45
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
Sekretariat Jenderal			
1	Sekretariat Jenderal	3.641.104,00	Sisa tunjangan kinerja yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2019
SUBTOTAL		3.641.104,00	
Ditjen AHU			
1	Balai Harta Peninggalan Jakarta	4.214.272.187,00	Pencatatan uang pailit. Uang Pailit ini digunakan untuk proses pembebasan dan operasional sampai dengan proses Pailit dinyatakan selesai oleh Pengadilan.
2	Balai Harta Peninggalan Semarang	2.177.966.873,00	
3	Balai Harta Peninggalan Surabaya	3.373.729.819,00	
4	Balai Harta Peninggalan Medan	1.637.579.835,00	
5	Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang	29.650.436,00	
6	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jakarta Raya	1.800.000,00	Pengembalian sisa belanja honor output kegiatan sesuai SPM No. 0038/408721/LS-H/TIM/XII/2019 yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2019.
SUBTOTAL		11.434.999.150,00	
Ditjen Pemasyarakatan			
1	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Malang	79.387.180,00	Berupa kas di bendahara pengeluaran atas sisa tunjangan kinerja

2	Lembaga Pemasyarakatan Metro	19.440,00	Pendapatan Jasa Giro dari Rek. Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas negara
3	Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan	3.335,00	Pendapatan Jasa Giro dari Rek. Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas negara
	SUBTOTAL	79.409.955,00	
	Ditjen Imigrasi		
1	Kantor Imigrasi Kelas II Karawang	1.498.989,00	Berupa uang atas tunjangan kinerja yang belum sempat diberikan kepada pegawai per tanggal 31 Desember 2019
	SUBTOTAL	1.498.989,00	
	Ditjen Kekayaan Intelektual		
1	Ditjen Kekayaan Intelektual	41.269.395.069,00	Pembayaran permohonan pendaftaran merek melalui WIPO (Protokol Madrid) yang belum selesai divalidasi kesesuaian jumlah kelas dalam setiap permohonan dengan jumlah uang yang diterima. Berupa mata uang <i>Swiss Franc</i> senilai 2.872.764,00SFr yang dikonversikan dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2019 senilai Rp14.365,75 per 1 <i>Swiss Franc</i>
	SUBTOTAL	41.269.395.069,00	
	TOTAL	52.788.944.267,00	

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp9.853.310.665,00

C.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp9.853.310.665,00 dan Rp11.586.621.509,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang atau jasa yang telah dibayarkan secara penuh oleh pemerintah kepada pihak lain namun manfaat atas barang atau jasa tersebut belum diterima seluruhnya oleh pemerintah. Rincian Belanja Dibayar Dimuka disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 46
Perbandingan Rincian Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	1.813.327.983,00	1.979.815.709,00
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	8.006.242.070,00	9.228.728.072,00
Pembayaran beban langganan daya dan jasa listrik	33.740.612,00	378.077.728,00
Jumlah	9.853.310.665,00	11.586.621.509,00

Tabel 47
Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Belanja Dibayar Dimuka	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	826.935.681,00	1.431.427.676,00

Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	1.550.609.201,00	2.622.699.601,00
Ditjen Pemasyarakatan	484.160.568,00	956.420.484,00
Ditjen Imigrasi	6.991.605.215,00	6.576.073.748,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	9.853.310.665,00	11.586.621.509,00

Rincian atas Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 pada satuan kerja dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 48
Rincian Belanja Dibayar Dimuka berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2019

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
Sekretariat Jenderal			
1	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Surabaya	16.421.662,00	Sewa kendaraan dinas
2	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Ambon	682.050.118,00	Pembayaran atas sewa gedung kantor selama 24 bulan dari November 2018 sampai Oktober 2020
3	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jayapura	66.981.968,00	Sewa kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit
4	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Kendari	61.481.933,00	Sewa kendaraan dinas roda 4
SUBTOTAL		826.935.681,00	
Ditjen AHU			
1	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	876.745.793,00	a) Sewa Gedung CIKS an. PD Pembangunan senilai Rp71.632.000; b) Sewa kendaraan an. Adi Sarana Armada senilai Rp805.113.793.
2	Balai Harta Peninggalan Surabaya	59.928.440,00	Sewa kendaraan an. PT Serasi
3	Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang	4.441.639,00	Sewa kendaraan operasional
4	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jakarta Raya	301.175.863,00	a) Sewa Kendaraan Operasional senilai Rp64.755.738,00; b) Sewa Meubelair senilai Rp21.360.732,00; c) Sewa Gudang Arsip MPD senilai Rp190.846.995,00; dan d) Sewa AC 2 pk senilai Rp24.212.398,00.
5	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah	28.271.632,00	Sewa kendaraan roda 4
6	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Surabaya	30.140.334,00	Sewa mobil an. PT Serasi

7	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Tanjung Karang	107.887.743,00	Sewa kendaraan
8	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jayapura	86.524.590,00	Sewa kendaraan roda 4
9	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Kendari	55.493.167,00	Sewa mobil an. PT Serasi
SUBTOTAL		1.550.609.201,00	
Ditjen Pemasyarakatan			
1	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	160.470.655,00	a) Pembayaran listrik satker - satker pemasyarakatan yang masih terhutang sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp33.740.612,00 yang dilakukan oleh kantor pusat berdasarkan tagihan dari Kantor PLN Pusat namun ternyata telah dibayarkan oleh satker yang bersangkutan. Selanjutnya pembayaran double ini oleh PLN Pusat akan dikompensasi sebagai pengurang pembayaran tagihan satker yang bersangkutan di bulan berikutnya; b) Pembayaran sewa kendaraan dinas dibayar dimuka senilai Rp126.730.043,00
2	Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo	6.468.251,00	Pembayaran sewa dibayar dimuka atas kantin
3	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jakarta Selatan	317.221.662,00	Sewa gedung kantor
SUBTOTAL		484.160.568,00	
Ditjen Imigrasi			
1	Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta	195.766.423,00	Sewa gedung ULP Bantul an. Suwardi Saropie
2	Kantor Imigrasi Kelas I Jambi	107.632.153,00	Sewa gedung an. Ahmad Sakalani
3	Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan	287.435.500,00	Sewa gedung kantor an. Leonardus Hidayat
4	Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda	327.250.000,00	Sewa gedung kantor ULP (unit layanan paspor) Kab. Sangatta an. PT. Bekarya Usaha Mandiri Indah
5	Kantor Imigrasi Kelas II Tembilahan	219.334.290,00	Sewa gedung kantor periode 1 tahun dari 22 Juli 2019 sampai 21 Juli 2020
6	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Surabaya	8.520.704,00	Sewa kendaraan dinas roda 4
7	Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta	220.729.927,00	Sewa gedung an. CV Perintis Jaya
8	Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga	181.454.795,00	Sewa gedung dan bangunan
9	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai	3.037.467.541,00	Sewa Rumah Dinas (Kos) sebanyak 10 unit
10	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Kendari	26.562.000,00	a) Sewa rumah dinas an. Arwin Rudi senilai Rp986.000,00; b) Sewa rumah dinas an. Adma Husni dan Ezardy senilai Rp1.479.000,00; c) Sewa rumah dinas an. Moh. Tosen Rp2.900.000,00; d) Sewa rumah dinas an. Santosa dan Rahmad senilai Rp5.424.000,00; e) Sewa kendaraan dinas roda 4 atas nama PT Serasi Autoraya senilai Rp15.773.000,00

11	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Propinsi Bangka Belitung	45.625.452,00	Sewa kendaraan dinas roda 4 an. PT Bumi Jasa Utama
12	Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara	2.140.000.000,00	Sewa gedung an. Ir Andry Arifin Tarjono
13	Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	7.489.644,00	Sewa rumah dinas sebanyak 4 unit
14	Rumah Detensi Imigrasi Semarang	5.573.771,00	Sewa Rumah untuk dijadikan rumah dinas an. Sulhan dan Sri Yuliarni
15	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua Barat	180.763.015,00	Sewa mobil dinas an. CV Kasuari Emas
SUBTOTAL		6.991.605.215,00	
Grand Total		9.853.310.665,00	

Uang Muka Belanja
Rp5.558.458.273,00

C.4. UANG MUKA BELANJA

Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp5.558.458.273,00 dan Rp0,00. Uang muka belanja merupakan pemberian uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban atas dasar suatu kontrak atau kesepakatan tertentu. Rincian Uang Muka Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Perbandingan Rincian Uang Muka Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Uang Muka Belanja Modal	5.558.458.273,00	0,00
Total	5.558.458.273,00	0,00

Tabel 50
Perbandingan Uang Muka Belanja Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Uang Muka Belanja	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	0,00	0,00
Ditjen Imigrasi	5.558.458.273,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	5.558.458.273,00	0,00

Uang Muka Belanja tersebut adalah kelebihan pencatatan Konstruksi dalam Pengerjaan sesuai progres fisik pekerjaan pada Kantor Imigrasi Kelas III Bima per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.558.458.273,55. Nilai yang telah dibayarkan atas pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp15.781.053.250,00, sedangkan nilai dari pekerjaan yang telah diselesaikan adalah sebesar Rp10.222.594.976,45, sehingga selisih antara nilai tersebut dicatat sebagai uang muka belanja modal.

*Pendapatan yang Masih
Harus Diterima
Rp51.754.279,00*

C.5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp51.754.279,00 dan Rp6.258.866,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan karena manfaat atas barang dan jasa telah diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain. Pendapatan yang Masih Harus Diterima di Kementerian Hukum dan HAM adalah berupa pendapatan sewa atas tanah, gedung dan bangunan. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 51
Perbandingan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	27.748.800,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	22.000.000,00	133.866,00
Ditjen Imigrasi	2.005.479,00	6.125.000,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	51.754.279,00	6.258.866,00

Rincian atas Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2019 pada satuan kerja dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 52
Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2019

No	Nama Satker	Saldo	Keterangan
	Sekretariat Jenderal		

1	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jakarta Raya	27.748.800,00	Berupa pendapatan yang masih harus diterima atas sewa gedung an. Bank BRI
	SUBTOTAL	27.748.800,00	
	Ditjen Pemasyarakatan		
1	Rumah Tahanan Negara Bandung	22.000.000,00	Berupa pendapatan yang masih harus diterima dari sewa ATM senilai Rp12.000.000,00 dan kantin senilai Rp10.000.000,00
	SUBTOTAL	22.000.000,00	
	Ditjen Imigrasi		
1	Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	2.005.479,00	Berupa pendapatan yang masih harus diterima atas sewa koperasi yang belum dibayarkan oleh pihak penyewa
	SUBTOTAL	2.005.479,00	
	TOTAL	51.754.279,00	

Piutang Bukan Pajak
Rp322.805.448.526,00

C.6. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp322.805.448.526,00 dan Rp386.127.641.921,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53
Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	320.957.758.705,00	362.189.910.210,00
Piutang Lainnya	1.847.689.821,00	23.937.731.711,00
Jumlah	322.805.448.526,00	386.127.641.921,00

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain berasal dari :

1. Pengakuan PNBPN lainnya dari hasil temuan BPK atau Inspektorat Jenderal atas kerugian negara pada transaksi pengadaan barang dan pekerjaan;
2. Piutang PNBPN dari hasil temuan BPK terkait beban alat angkut untuk orang asing yang tidak memiliki dokumen;
3. Piutang PNBPN atas pencairan garansi bank dari pekerjaan yang belum selesai;
4. Piutang atas layanan hukum Ditjen KI berupa Piutang Paten Batal Demi Hukum (BDH), Piutang Pembatalan Paten atas Permintaan Sendiri (PAPS) dan Piutang Paten Keterlambatan; atau
5. Piutang PNBPN atas sewa tanah, gedung dan bangunan yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga. Atas pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan, terdapat beberapa satuan kerja yang telah melakukan pencatatan

piutang atas pemanfaatan aset oleh pihak lain berdasarkan tarif kontrak tahun sebelumnya, dan akan dilakukan koreksi ketika surat penetapan tarif baru telah terbit dari KPKNL.

Tabel 54
Perbandingan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	5.497.857.565,00	3.872.462.565,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	334.280.520,00	20.042.727.258,00
Ditjen Pemasyarakatan	2.101.346.652,00	3.230.146.109,00
Ditjen Imigrasi	11.184.551.896,00	7.900.531.590,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	303.599.188.478,00	350.991.550.984,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	33.223.415,00	33.223.415,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	2.000.000,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	55.000.000,00	55.000.000,00
TOTAL	322.805.448.526,00	386.127.641.921,00

Rincian atas Transaksi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Rp427.956.678,00

C.7. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp427.956.678,00 dan Rp337.616.858,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:

Tabel 55
Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Nama	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Bagian Lancar TP	44.400.000,00	81.925.008,00
2	Bagian Lancar TGR	383.556.678,00	255.691.850,00
Jumlah		427.956.678,00	337.616.858,00

Tabel 56
Perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	46.450.812,00	18.000.000,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	20.400.000,00	51.925.008,00
Ditjen Pemasyarakatan	151.245.866,00	97.997.882,00
Ditjen Imigrasi	184.600.000,00	116.600.000,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	15.732.000,00	30.749.968,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	9.528.000,00	22.344.000,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	427.956.678,00	337.616.858,00

Rincian atas Transaksi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 57
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
Sekretariat Jenderal			
1	Sekretariat Jenderal (Pusat)	19.575.000,00	TGR atas nama: a) Handy Nurjaman Rp1.575.000,00 b) Amirullah Rp18.000.000,00
2	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara Di Medan	10.508.316,00	TGR transfer masuk dari BHP Medan an. Teti Winarti (TGR atas tindak lanjut temuan Itjen)
3	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Pekanbaru	5.220.000,00	TGR an. Angga Abdian
4	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Tanjung Karang	5.700.000,00	TGR an. Bambang Rushananto
5	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Banjarmasin	5.447.496,00	TGR an. Mas Budi Priyatno atas hilangnya BMN berupa laptop
SUBTOTAL		46.450.812,00	
Ditjen AHU			
1	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	20.400.000,00	TGR an. Nurjaman (TGR berupa hilangnya kendaraan roda empat)
SUBTOTAL		20.400.000,00	
Ditjen Pemasyarakatan			
1	Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung	18.000.000,00	TGR atas Persediaan Beras an. Kusmana
2	Lembaga Pemasyarakatan Ambon	24.000.000,00	TGR atas kelebihan belanja rutin selaku KPA an Ronald Tuasun

3	Cabang Rumah Tahanan Negara Namlea	18.000.000,00	TGR an Sugiarto Basir
4	Rumah Tahanan Negara Bandung	50.257.500,00	TGR atas Persediaan Beras an. Suherman
5	Balai Pemasarakatan Jakarta Selatan	6.549.996,00	Kehilangan Kendaraan Roda 2 an. Hadi Wijoyo
6	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Bandung, Kot.Bandung, Jawa Barat	12.000.000,00	TGR atas Persediaan Beras an. Sambas Hermansyah
7	Balai Pemasarakatan Ternate, Maluku Utara	22.438.370,00	TGR an. Husein Sepa, merupakan kelebihan pembayaran ATK. TGR ini telah diajukan untuk penghapusan karena yang terhutang telah meninggal dan ahli waris sudah menyatakan tidak mampu dan TGR beberapa pegawai atas perjalanan fiktif
SUBTOTAL		151.245.866,00	
Ditjen Imigrasi			
1	Kantor Imigrasi Kelas I Ternate	24.000.000,00	TGR an. Aisa Arsad atas hilangnya kendaraan dinas
2	Kantor Imigrasi Kelas II Madiun	85.000.000,00	TGR an. Waskito Utomo
3	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua Barat	75.600.000,00	TGR an. Muhammad Akmal atas hilangnya kendaraan roda empat
SUBTOTAL		184.600.000,00	
Ditjen PP			
1	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	15.732.000,00	a) TGR atas hilangnya kendaraan dinas tahun 2004 an Teguh Ariyono senilai Rp13.632.000,00; b) Kelebihan pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas yang telah dihentikan penggunaannya senilai Rp2.100.000,00.
SUBTOTAL		15.732.000,00	
Ditjen HAM			
1	Direktorat Jenderal HAM	9.528.000,00	a) TGR an. Tarwo senilai Rp9.278.000,00 atas kehilangan kendaraan roda empat; b) TGR an. Agus Yulianto senilai Rp250.000,00 atas kehilangan kendaraan roda dua.
SUBTOTAL		9.528.000,00	
Grand Total		427.956.678,00	

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar
(Rp302.474.661.409,00)

C.8. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG LANCAR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp302.474.661.409,00) dan (Rp347.985.003.319,00). Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancer merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancer yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak

Tertagih-Piutang Lancar berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 58
Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
	Nilai Piutang Jk. Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan	Nilai Piutang Jk. Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak						
Lancar	18.795.257.763,00	0,50%	93.976.293,00	36.688.337.941,00	0,50%	183.441.688,00
Kurang Lancar	1.799.161.590,00	10%	179.916.159,00	1.807.811.590,00	10%	180.781.159,00
Diragukan	24.800.000,00	50%	12.400.000,00	24.800.000,00	50%	12.400.000,00
Macet	302.186.229.173,00	100%	302.186.229.173,00	347.606.692.390,00	100%	347.606.692.390,00
Jumlah	322.805.448.526,00		302.472.521.625,00	386.127.641.921,00		347.983.315.237,00
Bagian Lancar TP/ TGR						
Lancar	427.956.678,00	0,50%	2.139.784,00	337.616.858,00	0,50%	1.688.082,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00	0	10%	0
Diragukan	0,00	50%	0,00	0	50%	0
Macet	0,00	100%	0,00	0	100%	0
Jumlah	427.956.678,00		2.139.784,00	337.616.858,00		1.688.082,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	323.233.405.204,00		302.474.661.409,00	386.465.258.779,00		347.985.003.319,00

Penyisihan Piutang kategori macet di antaranya terdapat pada satker milik Ditjen Kekayaan Intelektual berupa Piutang Paten Batal Demi Hukum (BDH) dan Pembatalan atas Permintaan Sendiri (PAPS). Piutang yang macet ini kemudian diserahkan kepada KPKNL guna diterbitkan PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-85/PB/2011 sebagai dasar penyerahan ke Ditjen Kekayaan Negara DJKN/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang disebutkan bahwa piutang tersebut dapat dihapuskan setelah 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih tanggal 18 September Tahun 2018.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar untuk masing-masing satuan kerja dapat dilihat pada lampiran.

Persediaan
Rp539.879.870.427,00

C.9. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau

untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp539.879.870.427,00 dan Rp411.488.366.832,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59
Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Persediaan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	499.217.618.038,00	364.667.077.931,00
Amunisi	36.620.981.310,00	34.570.912.054,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	1.866.938.621,00	2.936.457.724,00
Suku Cadang	39.411.688,00	359.369.392,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	902.500.000,00	911.500.000,00
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	41.584.625,00	41.584.625,00
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	593.706.580,00	742.218.657,00
Bahan Baku	0,00	562.444.277,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis	0,00	1.690.402.429,00
Persediaan Lainnya	597.129.565,00	5.006.399.743,00
Jumlah	539.879.870.427,00	411.488.366.832,00

Rincian Persediaan berdasarkan Eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 60
Perbandingan Nilai Persediaan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Persediaan	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	3.862.893.174,00	5.569.676.562,00
Inspektorat Jenderal	156.353.797,00	152.949.675,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	825.494.947,00	938.273.385,00
Ditjen Pemasyarakatan	133.579.538.882,00	78.024.627.046,00
Ditjen Imigrasi	394.025.736.795,00	319.043.025.967,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	5.430.257.863,00	6.148.464.073,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	642.510.860,00	802.468.294,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	179.177.865,00	206.439.400,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	185.516.985,00	380.015.466,00
Balitbang Hukum dan HAM	44.346.898,00	61.113.105,00
BPSDM Hukum dan HAM	948.042.361,00	161.313.859,00
TOTAL	539.879.870.427,00	411.488.366.832,00

Pada 31 Desember 2019 terdapat kerugian atas persediaan yang rusak/usang senilai Rp8.833.412.896,00 dengan rincian satuan kerja sebagai berikut:

Tabel 61
Rincian Kerugian Persediaan Rusak/Usang berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
Ditjen Pemasyarakatan			
1	Lembaga Pemasyarakatan Jailolo	8.933.280,00	Barang Usang
2	Rumah Tahanan Negara Soasiu	8.981.568,00	Barang Usang
3	Lembaga Pemasyarakatan Sintang	152.912,00	Barang Usang
4	Rumah Tahanan Negara Mempawah	2.945.568,00	Barang Rusak
5	Rumah Tahanan Negara Donggala	83.304.054,00	Barang Rusak
6	Lembaga Pemasyarakatan Watampone	3.300,00	Barang Rusak
7	Lembaga Pemasyarakatan Tobello	28.208.240,00	Barang Rusak
SUBTOTAL		132.528.922,00	
Ditjen Imigrasi			
1	Direktorat Jenderal Imigrasi	8.288.134.580,00	Barang Usang
2	Kantor Imigrasi Kelas I Polonia	750.200,00	Barang Usang
3	Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga	14.157,00	Barang Usang
4	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta	359.612,00	Barang Usang
5	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan	281.099.940,00	Barang Usang
6	Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh	554.289,00	Barang Usang
7	Kantor Imigrasi Kelas I Palu	12.003.200,00	Barang Usang
8	Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda	6.751.800,00	Barang Usang
9	Kantor Imigrasi Kelas II Belawan	78.396,00	Barang Rusak
10	Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar	1.500.400,00	Barang Usang
11	Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim	45.012,00	Barang Usang
SUBTOTAL		8.591.291.586,00	
Ditjen PP			
1	Ditjen Peraturan Perundang-undangan	111.137.800,00	Barang Usang
SUBTOTAL		111.137.800,00	
Grand Total		8.834.958.308,00	

Dalam Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 terdapat koreksi nilai persediaan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu sebagai berikut:

Tabel 62
Koreksi Lebih/Kurang Catat Persediaan berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Satker	Nilai Persediaan			
		Unaudited	Koreksi		Audited
			Tambah	Kurang	
1	Lapas Mataram	417.625.929,000	111.369.120,00		528.995.049
2	Rutan Praya	24.160.985,00	93.623.620,00		117.784.605
3	LPKA Bandung	72.807.753,00	17.766.520,00		90.574.273

4	Kanim Ponorogo	452.612.018,00	1.052.000,00		453.664.018
5	Rudenim Medan	62.375.000,00	32.000,00		62.407.000
6	Kanim Muara Enim	957.240.092,00		45.012,00	957.195.080
7	Kanim Soetta	2.590.813.552,00	60.500,00		2.590.874.052
8	Kanim Langsa	21.830.875,00		106.088,00	21.724.787
9	Kanim Bagan Siapi-api	486.330.048,00		106.088,00	486.223.960
10	Rutan Perempuan Bandung	100.497.300,00		1.264.280,00	99.233.020
11	Kanim Pematang Siantar	351.780.363,00		1.500.400,00	350.279.963
12	Lapas Sukamiskin	472.985.800,00		6.051.180,00	466.934.620
13	Kanim Tembagapura	230.497.079,00		371.308,00	230.125.771
14	Kanim Polonia	991.668.669,00	142.560,00		991.811.229
15	Kanwil Sumut	27.294.710,00	11.000,00		27.305.710
JUMLAH			224.057.320,00	9.444.356,00	

Tabel 63
Koreksi Lebih/Kurang Catat Persediaan berdasarkan Kelompok Persediaan
Per 31 Desember 2019

No	Kelompok Persediaan	Unaudited	Koreksi		Audited
			Tambah	Kurang	
1	Barang Konsumsi	499.003.016.074,00	224.046.320,00	9.444.356,00	499.217.618.038,00
2	Bahan Pemeliharaan	1.866.927.621,00	11.000,00		1.866.938.621,00
JUMLAH			224.057.320,00	9.444.356,00	

Secara total nilai persediaan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 64
Perubahan Nilai Persediaan dari Unaudited menjadi Audited
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited	Koreksi		Audited
		Tambah	Kurang	
Persediaan	539.665.257.463,00	224.057.320,00	9.444.356,00	539.879.870.427,00

Tagihan TP/TGR
Rp1.757.871.682,00

C.10. TAGIHAN TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Tagihan TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.757.871.682,00 dan Rp1.097.460.531,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tabel 65
Perbandingan Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Tagihan TP/TGR	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	321.854.930,00	319.702.424,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	27.200.000,00	48.835.396,00
Ditjen Pemasyarakatan	835.890.992,00	175.123.951,00
Ditjen Imigrasi	563.989.240,00	535.584.240,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	8.936.520,00	8.936.520,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	9.278.000,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	1.757.871.682,00	1.097.460.531,00

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing satuan kerja eselon I disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 66
Rincian Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
	Sekretariat Jenderal		
1	Sekretariat Jenderal (Pusat)	311.227.426,00	TGR atas nama: a) Denny Ardiyanto Rp50.598.000,00 b) Fengki Rekli Kampong Rp23.876.000,00 c) Gusti Ika Purnama Rp23.292.500,00 d) Handy Nurjaman Rp1.575.000,00 e) Jaya Rafikal Rp19.512.500,00 f) Kusno Rp25.626.000,00 g) Musyarofah Noor Rohmah Rp23.292.500,00 h) Zamrony Rp32.042.500,00 i) Amirullah Rp42.800.002,00 j) Nuras Rp71.012.424,00 k) Maruli (Rp2.400.000,00) atas koreksi penyetoran simfoni taspen akun TGR menjadi Piutang PNB
2	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Pekanbaru	435.000,00	TGR an. Angga Abdian
3	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Tanjung Karang	5.700.000,00	TGR an. Bambang Rushananto

4	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Banjarmasin	4.492.504,00	TGR an. Mas Budi Priyatno atas hilangnya BMN berupa laptop
	Subtotal	321.854.930,00	
	Ditjen AHU		
1	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	27.200.000,00	TGR an. Nurjaman (TGR berupa hilangnya kendaraan roda empat)
	Subtotal	27.200.000,00	
	Ditjen Pemasyarakatan		
1	Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung	228.012.000,00	TGR atas Persediaan Beras an. Kusmana
2	Lembaga Pemasyarakatan Ambon	120.713.032,00	TGR atas kelebihan belanja rutin selaku KPA an Ronald Tuasun
3	Cabang Rumah Tahanan Negara Namlea	228.119,00	TGR an Sugiarto Basir
4	Rumah Tahanan Negara Bandung	50.257.500,00	TGR atas Persediaan Beras an. Suherman
5	Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan	545.841,00	Kehilangan Kendaraan Roda 2 an. Hadi Wijoyo
6	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Bandung, Kot.Bandung, Jawa Barat	436.134.500,00	TGR atas Persediaan Beras an. Sambas Hermansyah
	Subtotal	835.890.992,00	
	Ditjen Imigrasi		
1	Kantor Imigrasi Kelas I Ternate	209.209.240,00	TGR an. Aisa Arsad atas hilangnya kendaraan dinas
2	Kantor Imigrasi Kelas II Entikong	5.000.000,00	TGR an Marhaen
3	Kantor Imigrasi Kelas II Madiun	71.000.000,00	TGR an. Waskito Utomo
4	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua Barat	278.780.000,00	TGR an. Muhammad Akmal atas hilangnya kendaraan roda empat
	Subtotal	563.989.240,00	
	Ditjen PP		
1	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	8.936.520,00	MA dkk dan merupakan temuan Itjen tahun 2016
	Subtotal	8.936.520,00	
	TOTAL	1.757.871.682,00	

Piutang Jangka Panjang Lainnya
Rp7.683.800.000,00

C.11. PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar masing-masing Rp7.683.800.000,00 dan Rp9.449.000.000,00. Perbandingan Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 67
Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Piutang Jangka Panjang Lainnya	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	7.683.800.000,00	9.449.000.000,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00
Ditjen Pemasarakatan	0,00	0,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	7.683.800.000,00	9.449.000.000,00

Piutang Jangka Panjang Lainnya tersebut adalah atas transaksi perjanjian kontrak sewa lahan antara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan PT. Paramita selama 20 Tahun.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
(Rp122.852.721,00)*

C.12. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PANJANG

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp122.852.721,00) dan (Rp132.842.165,00). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 68
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2019

Kualitas Piutang	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Jangka Panjang Lainnya						
Lancar	7.683.800.000,00	0,50%	38.419.000,00	9.449.000.000,00	0,50%	47.245.000,00

Kurang Lancar	0,00	10%	0,00	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00	0,00	100%	0,00
Jumlah	7.683.800.000,00		38.419.000,00	9.449.000.000,00		47.245.000,00
Piutang TP/TGR						
Lancar	1.684.259.258,00	0,50%	8.421.297,00	1.016.948.107,00	0,50%	5.084.741,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00	0,00	50%	0,00
Macet	76.012.424,00	100%	76.012.424,00	80.512.424,00	100%	80.512.424,00
Salah setor piutang yang seharusnya piutang PNB	(2.400.000,00)					
Jumlah	1.757.871.682,00		84.433.721,00	1.097.460.531,00		85.597.165,00
TOTAL	9.441.671.682,00		122.852.721,00	10.546.460.531,00		132.842.165,00

Tabel 69
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019

Nama Satker	Jumlah Piutang Jk Panjang	Jumlah Penyisihan	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL			
Sekretariat Jenderal (Pusat)	7.926.415.002,00	39.632.075,00	Lancar
	(2.400.000,00)	0,00	Terdapat salah setor piutang TP/TGR yang seharusnya merupakan piutang PNB
	71.012.424,00	71.012.424,00	Macet
Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Pekanbaru	435.000,00	2.175,00	Lancar
Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Tanjung Karang	5.700.000,00	28.500,00	Lancar
Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Banjarmasin	4.492.504,00	22.463,00	Lancar
SUBTOTAL	8.005.654.930,00	110.697.637,00	
DITJEN AHU			
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	27.200.000,00	136.000,00	Lancar
SUBTOTAL	27.200.000,00	136.000,00	
DITJEN PEMASYARAKATAN			
Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung	228.012.000,00	1.140.060,00	Lancar
Lembaga Pemasyarakatan Ambon	120.713.032,00	603.565,00	Lancar
Cabang Rumah Tahanan Negara Namlea	228.119,00	1.141,00	Lancar
Rumah Tahanan Negara Bandung	50.257.500,00	251.287,00	Lancar

Balai Pemasarakatan Jakarta Selatan	545.841,00	2.729,00	Lancar
Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Bandung, Kot.Bandung, Jawa Barat	436.134.500,00	2.180.673,00	Lancar
SUBTOTAL	835.890.992,00	4.179.455,00	
DITJEN IMIGRASI			
Kantor Imigrasi Kelas I Ternate	209.209.240,00	1.046.046,00	Lancar
Kantor Imigrasi Kelas II Entikong	5.000.000,00	5.000.000,00	Macet
Kantor Imigrasi Kelas II Madiun	71.000.000,00	355.000,00	Lancar
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua Barat	278.780.000,00	1.393.900,00	Lancar
SUBTOTAL	563.989.240,00	7.794.946,00	
DITJEN PP			
Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	8.936.520,00	44.683,00	Lancar
SUBTOTAL	8.936.520,00	44.683,00	
TOTAL	9.441.671.682,00	122.852.721,00	

Tanah
Rp54.456.131.211.590,00

C.13. TANAH

Tanah yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp54.456.131.211.590,00 dan Rp12.625.444.631.053,00. Rincian perbandingan nilai Aset Tanah berdasarkan Eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel 70
Perbandingan Nilai Tanah Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Tanah	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	20.362.182.762.229,00	13.290.731.876.448,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	299.052.826.000,00	257.387.463.000,00
Ditjen Pemasarakatan	28.098.171.464.697,00	27.070.935.810.923,00
Ditjen Imigrasi	4.268.332.433.664,00	4.460.083.822.507,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	356.165.357.000,00	74.534.060.000,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	1.072.226.368.000,00	737.997.290.000,00
Konsolidasi Kemenkumham	0,00	(33.266.225.691.825,00)
TOTAL	54.456.131.211.590,00	12.625.444.631.053,00

Pada periode Tahunan 2019 (*Unaudited*) nilai Tanah pada Kementerian

Hukum dan HAM mengalami perubahan akibat tindak lanjut atas koreksi hasil revaluasi di tahun 2019 dalam aplikasi SIMAK-BMN sebagai berikut:

Tabel 71
Koreksi Lebih/Kurang Catat *Unaudited* Tanah berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited I	Koreksi		Unaudited II
			Tambah	Kurang	
1	Kanwil Sumut	124.796.121.000,00		733.547.000,00	124.062.574.000,00
2	Kanwil Maluku	46.100.419.000,00		3.095.316.000,00	43.005.103.000,00
3	Lapas Ternate	5.522.121.000,00		1.000,00	5.522.120.000,00
4	Kanim Dabo Singkep	638.791.000,00		385.000,00	638.406.000,00
5	Kanim Jakarta Pusat	67.186.569.000,00		53.572.869.000,00	13.613.700.000,00
6	Lapas Cilacap	41.941.647.000,00	17.130.000,00		41.958.777.000,00
7	Lapas Manado	107.226.664.000,00	92.697.000,00		107.319.361.000,00
8	Rupbasan Purwokerto	96.937.949.000,00	2.801.607.000,00		99.739.556.000,00
9	Kanim Tarempa	3.646.787.000,00	196.000,00		3.646.983.000,00
10	Rudenim Tanjung Pinang	723.558.000,00	462.000,00		724.020.000,00
11	BPHN	74.534.060.000,00	281.631.297.000,00		356.165.357.000,00
12	Konsolidasi Kemenkumham	(53.572.869.000,00)	53.572.869.000,00		0,00
JUMLAH		515.681.817.000,00	338.116.258.000,00	57.402.118.000,00	796.395.957.000,00

Sehingga secara total, perubahan nilai Tanah dalam periode Tahunan 2019 (*Unaudited*) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 72
Perubahan Nilai Tanah dari *Unaudited I* menjadi *Unaudited II*
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited I	Koreksi		Unaudited II
		Tambah	Kurang	
Tanah	53.063.360.084.260,00	338.116.258.000,00	57.402.118.000,00	53.344.074.224.260,00

Dalam Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 *Unaudited* terdapat koreksi nilai tanah atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu koreksi tanah berupa perubahan nilai revaluasi tahun 2019 pada 15 satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73
Koreksi Lebih/Kurang Catat *Audited* Tanah berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited	Koreksi		Audited
			Tambah	Kurang	
1	Sekretariat Jenderal	16.083.264.570.000,00	1.007.377.475.000,00		17.090.642.045.000,00
2	Rutan Wonosari	155.128.346.000,00	59.024.939.000,00		214.153.285.000,00
3	Lapas Binjai	43.934.000.000,00	3.135.792.000,00		47.069.792.000,00
4	Lapas Kediri	46.317.810.000,00		1.000,00	46.317.809.000,00

5	Rutan Selat Panjang	5.393.187.000,00	4.574.209.380,00		9.967.396.380,00
6	BHP Surabaya	111.688.434.000,00	3.004.560.000,00		114.692.994.000,00
7	Kanim Tanjungpandan	5.873.719.000,00	823.276.000,00		6.696.995.000,00
8	Bapas Sibolga	13.190.424.000,00	885.924.000,00		14.076.348.000,00
9	Bapas Palangkaraya	7.795.228.000,00		769.775.000,00	7.025.453.000,00
10	Kanwil Babel	3.501.456.050,00		50,00	3.501.456.000,00
11	Lapas Tanjungpandan	11.046.849.000,00		780.736.000,00	10.266.113.000,00
12	Kanim Pangkalpinang	17.734.318.000,00		1.463.405.000,00	16.270.913.000,00
13	Kanim Sorong	12.341.200.000,00		181.831.000,00	12.159.369.000,00
14	Kanim Jakarta Pusat	13.613.700.000,00	53.572.869.000,00		67.186.569.000,00
15	Kanim Surabaya	107.302.684.000,00		17.146.309.000,00	90.156.375.000,00
JUMLAH			1.132.399.044.380,00	20.342.057.050,00	

Sehingga secara total, perubahan nilai Tanah dalam periode Tahunan 2019 (Audited) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 74
Perubahan Nilai Tanah dari Unaudited II menjadi Audited
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited II	Koreksi		Audited
		Tambah	Kurang	
Tanah	53.344.074.224.260,00	1.132.399.044.380,00	20.342.057.050,00	54.456.131.211.590,00

Rincian Mutasi Tanah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 75
Rincian Mutasi Tanah

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2018	12.625.444.631.053,00
Mutasi tambah :	
Koreksi Take In Revaluasi	33.266.225.691.825,00
Penambahan Saldo Awal	16.372.191.500,00
Transfer Masuk	553.149.702.000,00
Hibah Masuk	9.831.626.561,00
Reklasifikasi Masuk	1.231.308.844.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	53.572.869.000,00
Pengembangan Melalui KDP	575.797.557,00
Koreksi Tambah Revaluasi BMN	10.283.744.408.000,00
Total Mutasi Tambah :	45.414.781.130.443,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	70.050.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	6.791.447.613,00
Penghapusan	1.019.820.000,00
Transfer Keluar	774.162.203.000,00

Hibah Keluar	18.290.320.000,00
Reklasifikasi Keluar	1.231.308.844.000,00
Koreksi Pencatatan	866.294.118.500,00
Koreksi Kurang Revaluasi BMN	686.157.746.793,00
Total Mutasi Kurang :	3.584.094.549.906,00
Saldo per 31 Desember 2019	54.456.131.211.590,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	54.456.131.211.590,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

• **Mutasi Tambah**

- a. Penambahan Saldo Awal senilai Rp16.372.191.500,00 diantaranya terdapat pada:
 - Rutan Gianyar sebesar Rp2.817.250.000,00 yang merupakan pemecahan NUP dari Tanah Rumah Dinas seluas 1.936 m² di SIMAK dicatat sebagai 1 NUP padahal terdapat 10 sertifikat. Kemudian berdasarkan arahan dari KPKNL Denpasar, tanah tersebut dirubah nilai/luasnya sesuai sertifikat kemudian sisa dari perubahan nilai/luas tersebut dicatat sebagai saldo awal sesuai luas di sertifikat
 - Lapas Tanjung senilai Rp6.000.000.000,00 yang merupakan hibah tanah dari Pemda Tabalong pada tahun 2017 yang baru diinput di SIMAK setelah diberikan penilaian sesuai NJOP pada tahun 2018 oleh KPKNL Banjarmasin
 - Kanim Batam senilai Rp3.094.560.000,00 yang merupakan penginputan tanah yang belum pernah tercatat di SIMAK
 - Kanim Depok senilai Rp543.219.250,00 yang merupakan pencatatan tanah yang belum tercatat di SIMAK pada saat pelaksanaan revaluasi dimana sebelumnya nilai tanah tersebut dijadikan satu dengan Bangunan Gedung Kantor Permanen
 - LPP Palu senilai Rp471.600.000,00 yang merupakan pencatatan tanah yang sudah ada pada tahun sebelumnya namun baru mendapatkan sertifikat pada tahun 2019.
- b. Transfer Masuk senilai Rp553.149.702.000,00 diantaranya terdapat pada:
 - Badiklat Jateng sebesar Rp323.737.178.000,00 yang merupakan transfer dari Kanwil Jateng berupa 1 bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
 - LPKA Pangkal Pinang sebesar Rp83.420.491.000,00 yang merupakan transfer dari Rupbasan Pangkalpinang berupa 1 bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
 - Kanim Jakarta Pusat sebesar Rp67.186.569.000,00 yang merupakan transfer dari Pusat Pengelola Komplek Kemayoran berupa 1 bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
 - BHP Surabaya sebesar Rp41.730.000.000,00 yang merupakan transfer dari Kanim Surabaya berupa 1 bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I
 - Lapas Batam sebesar Rp21.190.114.000,00 yang merupakan transfer dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berupa 1 bidang Tanah Bangunan Rumah Tahanan
- c. Hibah Masuk senilai Rp9.831.626.561,00 diantaranya terdapat pada:
 - Rutan Selat Panjang sebesar Rp4.574.209.380,00 yang merupakan hibah dari Pemkab Meranti berupa tanah untuk pembangunan Lapas Selat Panjang dengan nomor BAST : W4.PB.06.03-5049 tanggal 28 Oktober

- 2019
- Kanim Kediri sebesar Rp1.330.000.000,00 yang merupakan hibah dari Pemkab Kediri berupa Tanah ex. Gedung Kantor BP Pertanian dengan nomor BAST : 028/0311/418.51/2019 tanggal 23 Januari 2019
 - Lapas Indramayu sebesar Rp816.250.000,00 yang merupakan hibah dari Pemkab Indramayu berupa dua bidang Tanah dengan nomor BAST : 590/BAST.6-Tapem/2019 tanggal 10 Mei 2019
 - Kanim Muara Enim sebesar Rp594.000.000,00 yang merupakan hibah dari Pemkab Musi Rawas berupa 1 bidang tanah dengan nomor BAST : 028/113/BAST/BPKAD/2019 tanggal 26 April 2019
 - Kanim Sukabumi sebesar Rp561.298.096,00 yang merupakan hibah dari Pemkot Sukabumi berupa 1 bidang tanah dengan nomor BAST : 593/09/BPKD/2019 tanggal 14 Oktober 2019
- d. Reklasifikasi Masuk senilai Rp1.231.308.844.000,00 terdapat pada:
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.108.823.040.000,00 merupakan perbaikan atas tindak lanjut koreksi revaluasi atas Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan NUP 2 yang mengalami transaksi reklasifikasi. Dimana sebelumnya nilai revaluasi tidak terakomodir untuk tanah tersebut karena proses reklasifikasi dilakukan sebelum menerima ADK Revaluasi dari SIMAN
 - Kanim Surabaya sebesar Rp104.013.000.000,00 yang merupakan perbaikan atas tindak lanjut koreksi revaluasi atas pemecahan NUP Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang dipecah menjadi 2 NUP masing-masing berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, dimana sebelumnya nilai revaluasi tidak terakomodir untuk tanah tersebut karena proses reklasifikasi dilakukan sebelum menerima ADK Revaluasi dari SIMAN
 - BHP Semarang sebesar Rp16.400.081.000,00 yang merupakan reklas kode tanah yang sebelumnya kurang tepat yaitu Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I menjadi kode yang tepat yaitu Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya
 - Rutan Rangkasbitung sebesar Rp1.797.723.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap Temuan Itjen yang menyatakan bahwa kodefikasi Tanah Rumah Negara Tanpa Golongan kurang tepat sehingga harus dilakukan reklasifikasi
 - LPKA Gorontalo sebesar Rp275.000.000,00 yang merupakan reklasifikasi Tanah yang secara fisik merupakan Tanah Kantor namun dicatat sebagai Tanah Rumah Negara
- e. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp53.572.869.000,00 merupakan tindak lanjut Temuan BPK yang mengidentifikasi bahwa nilai atas tanah obyek transfer pada Kanim Jakarta Pusat belum sesuai dengan nilai wajarnya, sehingga perlu dilakukan koreksi sesuai dengan nilai wajar yang ada senilai Rp67.186.569.000,00. Adapun perolehan tanah berasal dari transfer masuk dari Pusat Pengelola Kemayoran dibawah instansi Sekretariat Negara (Setneg).
- f. Pengembangan Melalui KDP senilai Rp575.797.557,00 terdapat pada :
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp304.480.000,00 yang merupakan pengadaan RUTR dan Pra Design Tanah Setjen di Tangerang
 - Lapas Bukittinggi sebesar Rp271.317.557,00 yang merupakan pekerjaan pengurukan tanah pasca terjadinya kebakaran di Lapas Bukittinggi

- g. Koreksi Tambah Revaluasi BMN senilai Rp10.283.744.408.000,00 diantaranya terdiri dari :
- Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi senilai Rp41.900.000,00 merupakan transaksi yang terkait penyesuaian kodefikasi barang sebelum dilakukan penilaian. Transaksi ini terdapat pada Lapas Panyabungan
 - Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi senilai Rp162.828.298.000,00 merupakan Koreksi revaluasi berupa penambahan nilai dari perekaman barang berlebih, BMN berupa bangunan yang belum pernah tercatat berdasarkan LHIP Tahun 2019. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada :
 - BPHN sebesar Rp137.206.397.000,00
 - Kanim Surabaya sebesar Rp20.474.520.000,00
 - Lapas Kediri sebesar Rp5.147.381.000,00
 - Koreksi Penilaian Kembali BMN senilai Rp458.305.000,00 merupakan penambahan nilai bangunan dari perekaman nilai koreksian (menjadi nilai wajar) hasil penilaian yang terbit dalam LHIP tahun 2019. Transaksi ini terdapat pada Kanwil NTT sebesar Rp258.839.000,00 dan Lapas Panyabungan sebesar Rp199.466.000,00
 - Koreksi Kesalahan input IP senilai Rp10.117.331.012.000,00 merupakan penyesuaian hasil penilaian (nilai wajar) **barang ditemukan** tahun 2017/2018 menjadi hasil penilaian baru tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Penilai KPKNL, dalam artian nilai wajar baru lebih tinggi dari nilai wajar sebelumnya. Penyesuaian tersebut menambah nilai gedung pada periode tahun 2019. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada :
 - Setjen sebesar Rp8.301.294.604.000,00
 - Lapas Cipinang sebesar Rp580.827.065.000,00
 - Kanwil DKI Jakarta sebesar Rp232.024.336.000,00
 - Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp185.190.324.000,00
 - BPHN sebesar Rp144.424.900.000,00
 - Koreksi revaluasi berupa penyesuaian hasil penilaian (nilai wajar) Barang Berlebih tahun 2017/2018 menjadi hasil penilaian baru tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Penilai KPKNL, dalam artian nilai wajar baru lebih tinggi dari nilai wajar sebelumnya. Penyesuaian tersebut menambah nilai Gedung dan Bangunan pada periode tahun 2019 di Lapas Boalemo senilai Rp23.747.000,00 .
 - Koreksi revaluasi berupa koreksi ekuitas senilai Rp2.819.395.000,00 merupakan penambahan nilai atas perekaman koreksi manual akibat dari transaksi lanjutan berupa reklasifikasi/transfer yang terjadi di tahun 2017/2018 namun atas BMN obyek reval tersebut mengalami kenaikan nilai wajar sehingga perlu dilakukan penyesuaian pula pada perekaman barang barunya (hasil reklasifikasi/transfer). Transaksi tersebut terdapat pada:
 - Rupbasan Purwokerto sebesar Rp2.801.607.000,00
 - Lapas Cilacap sebesar Rp17.130.000,00
 - Rudenim Tanjung Pinang sebesar Rp462.000,00
 - Kanim Tarempa sebesar Rp196.000,00

- Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi senilai Rp241.366.0000,00 merupakan koreksi reval atas hasil eliminir nilai koreksian pada LHIP tahun 2019, dimana atas BMN obyek reval tersebut telah dilakukan transaksi penghapusan. Transaksi tersebut terdapat pada Lapas Panyabungan
- Koreksi revaluasi berupa Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi senilai Rp385.000,00 merupakan jenis transaksi yang mengeliminir koreksian nilai wajar sebelumnya pada LHIP tahun 2017/2018, karena atas BMN obyek reval tersebut pada tahun 2019 mengalami transaksi penghentian/usulan barang rusak berat. Transaksi tersebut terdapat pada Kanim Dabo Singkep
- **Mutasi Kurang**
 - a. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp70.050.000,00 terdapat pada Kanwil Aceh yang merupakan Tindak Lanjut Barang Tidak Ditemukan (BTD) kategori Tidak Ditemukan Fisiknya atau Tidak Dapat Ditelusuri
 - b. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp6.791.447.613,00 diantaranya terdapat pada:
 - Rutan Gianyar sebesar Rp6.262.812.250,00 yang merupakan pengurangan nilai Tanah Rumah Dinas seluas 1.936 m² sesuai arahan KPKNL Denpasar
 - Lapas Tanjung Balai Asahan sebesar Rp528.635.363,00 yang merupakan tindak lanjut alih status sebagian bidang Tanah Kebun seluas 4.322 m²
 - c. Penghapusan senilai Rp1.019.820.000,00 terdapat pada Rutan Bangli yang merupakan penghapusan berupa 1 bidang Tanah Bangunan Rutan berdasarkan SK Penghapusan Nomor : SEK-11.PB.06.04 Tahun 2019 yang merupakan tindak lanjut BTD pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah dilakukan *ruislag* dengan Pemda Bangli
 - d. Transfer Keluar senilai Rp774.162.203.000,00 diantaranya terdapat pada:
 - Kanwil Jateng sebesar Rp323.737.178.000,00 yang merupakan transfer ke Badiklat Jateng berupa 1 bidang Tanah
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp309.389.184.000,00 yang merupakan perbaikan atas tindak lanjut koreksi revaluasi atas Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan NUP 3 yang mengalami transaksi transfer keluar ke satker SLOG Polri. Dimana sebelumnya nilai revaluasi tidak terakomodir untuk tanah tersebut karena proses transfer keluar dilakukan sebelum menerima ADK Revaluasi dari SIMAN
 - Rupbasan Pangkalpinang sebesar Rp83.420.891.000,00 yang merupakan transfer ke LPKA Pangkal Pinang berupa 1 bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
 - Kanim Surabaya sebesar Rp41.730.000.000,00 yang merupakan perbaikan atas tindak lanjut penginputan koreksi revaluasi atas Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I NUP 15 yang mengalami transaksi transfer keluar ke BHP Surabaya. Dimana sebelumnya nilai revaluasi tidak terakomodir untuk tanah tersebut karena proses transfer keluar dilakukan sebelum menerima ADK Revaluasi dari SIMAN
 - Lapas Klaten sebesar Rp11.576.066.000,00 yang merupakan transfer ke Bapas Klaten berupa berupa 1 bidang Tanah
 - e. Hibah Keluar senilai Rp18.290.320.000,00 terdapat di Lapas Indramayu yang

merupakan hibah keluar tanah ke Pemkab Indramayu berupa 1 bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nomor BAST : W11.PAS18.PL.04.01-1308.

- f. Reklasifikasi Keluar senilai Rp1.231.308.844.000,00 terdapat pada:
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.108.823.040.000,00 perbaikan atas kesalahan prosedur penginputan koreksi revaluasi terhadap pemecahan 1 NUP Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan menjadi 2 NUP, kemudian salah satu NUP tanah tersebut ditransfer ke Polres Tangerang. Sebelumnya proses pemecahan NUP tersebut tidak mengakomodir nilai revaluasi karena proses reklasifikasi keluar dilakukan sebelum menerima ADK Revaluasi dari SIMAN
 - Kanim Surabaya sebesar Rp104.013.000.000,00 yang merupakan perbaikan atas kesalahan prosedur penginputan koreksi revaluasi terhadap pemecahan NUP Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang dipecah menjadi 2 NUP masing-masing berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah. Sebelumnya proses pemecahan NUP tersebut tidak mengakomodir nilai revaluasi karena proses reklasifikasi keluar dilakukan sebelum menerima ADK Revaluasi dari SIMAN
 - BHP Semarang sebesar Rp16.400.081.000,00 yang merupakan reklas kode tanah yang sebelumnya kurang tepat yaitu Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I menjadi kode yang tepat yaitu Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya
 - Rutan Rangkasbitung sebesar Rp1.797.723.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap Temuan Itjen yang menyatakan bahwa kodefikasi Tanah Rumah Negara Tanpa Golongan kurang tepat sehingga harus dilakukan reklasifikasi
 - LPKA Gorontalo sebesar Rp275.000.000,00 yang merupakan reklasifikasi Tanah yang secara fisik merupakan Tanah Kantor namun dicatat sebagai Tanah Rumah Negara
- g. Koreksi Pencatatan senilai Rp866.294.118.500,00 diantaranya terdapat pada :
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp835.568.246.500,00 yang merupakan Tindak Lanjut BTM Kategori Pencatatan Ganda
 - Kanim Surabaya sebesar Rp21.630.685.000,00 merupakan tindak lanjut terhadap Tanah Rumah Negara dan Tanah Asrama yang pada saat rerevaluasi 2019 dikategorikan sebagai BTM, kemudian dilakukan rerevaluasi kembali dan dikategorikan sebagai Barang Berlebih dengan NUP yang baru
 - Lapas Kediri sebesar Rp5.147.382.000,00 merupakan tindak lanjut terhadap Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang pada saat rerevaluasi 2019 dikategorikan sebagai BTM, kemudian dilakukan rerevaluasi kembali dan dikategorikan sebagai Barang Berlebih dengan NUP yang baru
 - Kanwil Kepri sebesar Rp2.912.000.000,00 yang merupakan koreksi terhadap tanah yang belum resmi dihibahkan namun sudah dicatat di Kanwil
 - Kanwil Aceh sebesar Rp675.384.000,00 yang merupakan Tindak Lanjut BTM Kategori Pencatatan Ganda
 - Lapas Biak sebesar Rp252.800.000,00 yang merupakan Tindak Lanjut BTM Kategori Pencatatan Ganda
 - LPKA Kotabumi sebesar Rp107.621.000,00 yang merupakan tindak lanjut

Barang Tidak Ditemukan (BTD) terhadap BMN berupa tanah yang sudah ditetapkan sebagai BMN Idle dan suah diserahkan ke Pengelola Barang

- h. Koreksi Kurang Revaluasi BMN senilai Rp686.157.746.793,00 diantaranya terdiri dari:
- Koreksi Kesalahan input IP senilai Rp602.716.809.993,00, merupakan penyesuaian hasil penilaian (nilai wajar) **barang ditemukan** tahun 2017/2018 menjadi hasil penilaian baru tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Penilai KPKNL, dalam artian nilai wajar baru lebih rendah dari nilai wajar sebelumnya. Penyesuaian tersebut mengurangi nilai bangunan pada periode tahun 2019. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada :
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp201.263.827.000,00
 - Lapas Narkotika Palembang sebesar Rp45.674.715.000,00
 - Kanwil Jatim sebesar Rp38.816.152.000,00
 - Lapas Bekasi sebesar Rp39.339.250.000,00
 - Rutan Serang sebesar Rp34.336.612.000,00
 - Koreksi revaluasi berupa Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang tidak ditemukan senilai Rp9.883.358.800,00 merupakan transaksi yang mengeliminir nilai koreksian sebelumnya (LHIP 2017/2018), dimana pada pelaksanaan revaluasi ulang tahun 2019 atas BMN obyek reval tersebut semula barang ditemukan menjadi barang tidak ditemukan (BTD) sesuai dengan LHIP Tahun 2019. Transaksi tersebut terdapat pada dan Lapas Bengkulu sebesar Rp8.146.991.800,00 dan Rutan Trenggalek sebesar Rp1.736.367.000,00
 - Koreksi revaluasi berupa koreksi manual transfer masuk senilai Rp53.572.869.000,00 yang terdapat pada Kanim Jakarta Pusat, merupakan pengurangan nilai tanah dari perekaman koreksi revaluasi secara manual pada satker penerima barang dimana BMN tersebut merupakan obyek reval di tahun 2019 pada satker pemberi barang yaitu Pusat Pengelola Kemayoran (satker Setneg).
 - Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi senilai Rp199.466.000,00 yang terdapat pada Lapas Panyabungan merupakan penambahan nilai bangunan hasil dari eliminir nilai koreksi reval (menjadi nilai wajar) dalam LHIP 2017/2018. Kemudian pada LHIP tahun 2019 diketahui bahwa dilakukan proses penyesuaian kode barang melalui reklasifikasi hasil inventarisasi.
 - Koreksi revaluasi berupa penyesuaian hasil penilaian (nilai wajar) Barang Berlebih tahun 2017/2018 menjadi hasil penilaian baru tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Penilai KPKNL, dalam artian nilai wajar baru lebih rendah dari nilai wajar sebelumnya. Penyesuaian tersebut mengurangi nilai Tanah pada periode tahun 2019 senilai Rp16.113.368.000,00. Transaksi tersebut terdapat pada Lapas Palembang senilai Rp15.075.337.000,00 dan Rutan Bangli senilai Rp1.038.031.000,00
 - Koreksi revaluasi berupa koreksi ekuitas senilai Rp608.206.000,00 merupakan pengurangan nilai atas perekaman koreksi manual akibat dari transaksi lanjutan berupa reklasifikasi/transfer yang terjadi di tahun 2017/2018 namun atas BMN obyek reval tersebut mengalami penurunan nilai wajar sehingga perlu dilakukan penyesuaian pula pada perekaman

barang barunya (hasil reklasifikasi/transfer). Transaksi tersebut terdapat pada Rutan Pandeglang senilai Rp607.821.000,00 dan Kanim Dabo Singkep senilai Rp385.000,00

- Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi senilai Rp41.900.000,00 di Lapas Panyabungan merupakan transaksi yang terkait penyesuaian kodefikasi barang sebelum dilakukan penilaian
- Koreksi revaluasi berupa Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi senilai Rp3.021.769.000,00 merupakan jenis transaksi yang mengeliminir koreksian nilai wajar pada LHIP 2019, karena atas BMN obyek reval tersebut pada tahun 2018 mengalami transaksi reklasifikasi keluar/transfer keluar/penghapusan. Transaksi tersebut terdapat pada :
 - Lapas Purwokerto sebesar Rp2.801.607.000,00
 - Lapas Ampara sebesar Rp202.374.000,00
 - Lapas Batu sebesar Rp17.130.000,00
 - Kanim Batam sebesar Rp462.000,00
 - Kanim Tarempa sebesar Rp196.000,00

Peralatan dan Mesin
Rp7.398.289.284.727,0
0

C.14. PERALATAN DAN MESIN

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.398.289.284.727,00 dan Rp6.680.447.076.850,00.

Rincian nilai Peralatan dan Mesin berdasarkan unit Eselon I sebagai berikut :

Tabel 76
Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Peralatan dan Mesin	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	754.885.634.928,00	800.612.812.505,00
Inspektorat Jenderal	18.354.871.501,00	17.784.008.735,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	472.990.755.550,00	370.717.544.988,00
Ditjen Pemasarakatan	2.872.589.715.013,00	2.414.066.729.040,00
Ditjen Imigrasi	2.939.535.848.673,00	2.767.651.215.906,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	208.548.642.013,00	180.863.099.036,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	27.189.593.645,00	27.073.268.111,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	20.380.728.133,00	16.247.578.855,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	17.998.176.389,00	17.722.812.539,00
Balitbang Hukum dan HAM	13.455.052.412,00	12.860.982.105,00
BPSDM Hukum dan HAM	52.360.266.470,00	54.847.025.030,00
Jumlah	7.398.289.284.727,00	6.680.447.076.850,00

Terdapat koreksi peralatan dan mesin berupa kurang catat atas perolehan

hibah barang, penghapusan, serta pencatatan alat kantor yang sebelumnya digabung dengan nilai bangunan pada empat satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77
Koreksi Lebih/Kurang Catat Audited Peralatan dan Mesin berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited	Koreksi		Audited
			Tambah	Kurang	
1	Lapas Bengkulu	8.935.405.489,00	39.655.000,00		8.975.060.489,00
2	Lapas Kota Agung	1.942.672.289,00	18.100.000,00		1.960.772.289,00
3	Kanim Dumai	8.516.329.481,00		119.037.000,00	8.397.292.481,00
4	Kanim Bogor	14.832.034.003,00	5.153.047.881,00		19.985.081.884,00
JUMLAH			5.210.802.881,00	119.037.000,00	

Sehingga secara total, perubahan nilai Peralatan dan Mesin dalam periode Tahunan 2019 (*Audited*) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 78
Perubahan Nilai Peralatan dan Mesin dari Unaudited menjadi Audited Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited	Koreksi		Audited
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	7.393.197.518.846,00	5.210.802.881,00	119.037.000,00	7.398.289.284.727,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 79
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2018	6.680.447.076.850,00
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	14.749.062.506,00
Pembelian	849.773.958.368,00
Transfer Masuk	840.760.190.920,00
Hibah Masuk	10.295.842.338,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	4.818.531.550,00
Reklasifikasi Masuk	115.973.116.496,00
Perolehan Lainnya	5.938.625.220,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	7.995.723.571,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	487.376.893,00

Pengembangan Nilai Aset	5.417.075.800,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.839.034.782,00
Transaksi Normalisasi BMN	69.369.201,00
Total Mutasi Tambah :	1.858.117.907.645,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	142.560.556.097,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	337.148.096,00
Transaksi Normalisasi BMN	432.719.782,00
Penghapusan	5.655.091.685,00
Transfer Keluar	840.741.472.970,00
Reklasifikasi Keluar	138.928.349.304,00
Koreksi Pencatatan	11.581.246.350,00
Usulan Barang RB ke Pengelola	39.115.484,00
Total Mutasi Kurang :	1.140.275.699.768,00
Saldo per 31 Desember 2019	7.398.289.284.727,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	5.208.649.428.511,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	2.189.639.856.216,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

• Mutasi Tambah

- a. Penambahan Saldo Awal senilai Rp14.749.062.506,00 diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen HAM sebesar Rp4.724.556.052,00 yang merupakan pencatatan sejumlah BMN dengan rincian sebagai berikut : 1) 2 buah AC pengadaan Tahun 2018 senilai Rp18.903.502; 2) 1 buah Genset dan 1 buah Trafo yang sudah ada sejak berdirinya Gedung Ditjen HAM dan belum pernah dicatatkan dalam Aplikasi SIMAK BMN sehingga dicatatkan dengan harga taksiran Rp1 dan telah diusulkan ke KPKNL untuk dilakukan Penilaian Aset; 3) 3 buah Elevator yang dicatat sebagai saldo awal karena pada Semester I 2019 Ditjen HAM memperoleh ATR berupa perbaikan 3 buah elevator. Karena pada aset BMN Ditjen HAM tidak terdapat Aset Lift, maka terhadap transfer masuk Peralatan dan Mesin dalam Renovasi (ATR) tersebut dilakukan transaksi Koreksi Pencatatan dan dicatatkan kembali dalam transaksi Saldo Awal; 4) Pencatatan 1 buah Genset yang dipecah menjadi dua NUP berupa Genset dan Trafo, karena setelah dilakukan cek fisik Genset tersebut terdiri dari Genset dan Trafo.
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.270.152.550,00 yang merupakan pencatatan Genset yang sudah lama berada di gedung Ditjen HAM dan pengadaannya menggunakan DIPA Setjen, namun belum pernah diinput di SIMAK sehingga kemudian dicatat sebagai Saldo Awal untuk kemudian ditransfer ke Ditjen HAM
 - Ditjen AHU sebesar Rp3.197.905.000,00 yang merupakan pencatatan 2 unit kendaraan dinas yang belum pernah diinput di SIMAK
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.110.687.412,00 yang merupakan pencatatan kendaraan yang belum pernah tercatat di SIMAK serta pemecahan NUP beberapa jenis alat kantor yang sebelumnya dicatat sebagai satu jenis alat

- kantor
- Kanim Polonia sebesar Rp512.022.500,00 yang merupakan pencatatan 1 unit genset yang belum pernah diinput di SIMAK
- b. Pembelian senilai Rp849.773.958.368,00 diantaranya terdapat pada :
- Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp437.136.901.550,00 yang merupakan pembelian sejumlah barang inventaris kantor, alat-alat kedokteran, dan kendaraan dinas
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp186.995.079.537,00 yang merupakan pembelian sejumlah barang inventaris kantor, alat-alat kedokteran, dan kendaraan dinas
 - Ditjen AHU sebesar Rp115.915.740.805,00 yang merupakan pembelian sejumlah barang inventaris kantor, alat-alat kedokteran, dan kendaraan dinas
 - Ditjen KI sebesar Rp24.150.116.798,00 yang merupakan pembelian sejumlah barang inventaris kantor, alat-alat kedokteran, dan kendaraan dinas
 - Kanim Batam sebesar Rp5.262.737.300,00 yang merupakan pembelian sejumlah barang inventaris kantor dan komputer
- c. Transfer Masuk senilai Rp840.760.190.920,00 diantaranya terdapat pada:
- Pusdatin sebesar Rp199.943.502.020,00 yang merupakan transfer masuk dari Sekretariat Jenderal
 - Lapas Karanganyar Nusakambangan sebesar Rp137.736.895.381,00 yang merupakan transfer masuk dari Ditjen Pemasarakatan
 - Kanim Soetta sebesar Rp18.940.156.586,00 yang merupakan transfer masuk dari Ditjen Imigrasi
 - Kanim Batam sebesar Rp10.199.401.900,00 yang merupakan transfer masuk dari Ditjen Imigrasi
 - Ditjen KI sebesar Rp8.614.043.811,00 yang merupakan transfer masuk dari Ditjen AHU
- d. Hibah Masuk senilai Rp10.295.842.338,00 diantaranya terdapat pada:
- Ditjen Imigrasi sebesar Rp4.125.000.000,00 yang merupakan hibah dari Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs berupa Perangkat Video Spectral Comparator dengan nomor BAST : IMI.1-PB.06.03-5742 tanggal 8 November 2019
 - Kanwil Kalsel sebesar Rp1.396.617.220,00 yang merupakan hibah dari Dishub Kalsel berupa Perlengkapan Pengecekan Paspor dengan nomor BAST : 027/1878/Set-Dishub tanggal 6 Desember 2019
 - Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp547.080.210,00 yang merupakan hibah dari ICITAP berupa peralatan kantor dan komputer dengan nomor BAST : USDOJ-ICITAP/VII-19/326 tanggal 11 September 2019
 - Lapas Cianjur sebesar Rp476.370.000,00 yang merupakan hibah dari Pemprov Jabar berupa Kendaraan Dinas dengan nomor BAST : 153/PT.At-Taubah/LPCjr/2019 tanggal 28 Oktober 2019
 - Lapas Kuala Tungkal sebesar Rp424.885.200,00 yang merupakan hibah dari Pemkab Tanjung Jabung Barat berupa Kendaraan Dinas dengan nomor BAST : 032/2222/BAST/BKAD/2019 tanggal 30 September 2019
- e. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp4.818.531.550,00 diantaranya terdapat pada :
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.223.732.550,00 yang merupakan

- pengadaan genset yang pembayarannya dilakukan per termin
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.301.209.000,00 yang merupakan pembelian FCU dan peralatan audio visual
 - Kanim Ternate sebesar Rp293.590.000,00 yang merupakan pelunasan terhadap pengadaan peralatan kantor yang sebelumnya dilakukan pembayaran secara per termin
- f. Reklasifikasi Masuk senilai Rp115.973.116.496,00 diantaranya terdapat pada:
- Pusdatin sebesar Rp88.607.370.000,00 yang merupakan reklas Server dari Setjen menjadi server dan software Oracle serta peralatan vicon dari Ditjen AHU menjadi server
 - Kanim Bogor sebesar Rp5.153.047.881,00 yang merupakan tindak lanjut Temuan BPK atas pekerjaan pembangunan gedung kantor untuk disesuaikan pencatatannya antara kriteria bangunan dan peralatan & mesin
 - Kanim Medan sebesar Rp4.601.993.490,00 yang merupakan rekodefikasi dari kode barang yang sebelumnya kurang tepat yaitu Alat Studio dan Alat Laboratorium menjadi kode yang lebih tepat yaitu Alat Kantor
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp980.353.000,00 yang merupakan rekodefikasi drone dan sejumlah peralatan kantor seperti tool kit box dan overhead projector menjadi kode yang lebih tepat seperti kamera udara dan LCD Projector
 - Kanim Batam sebesar Rp2.314.539.483,00 yang merupakan rekodefikasi dari kode barang yang sebelumnya kurang tepat yaitu Alat Studio dan Alat Laboratorium menjadi kode yang lebih tepat yaitu Alat Kantor
- g. Perolehan Lainnya senilai Rp5.938.625.220,00 diantaranya terdapat pada :
- Lapas Batu sebesar Rp3.761.100.240,00 yang merupakan hasil GRBB dari PT.Holcim berupa meubeulair dan kendaraan
 - Bapas Nusakambangan sebesar Rp973.932.500,00 yang merupakan hasil GRBB dari PT.Holcim berupa meubeulair dan kendaraan
 - Lapas Pasir Putih Nusakambangan sebesar Rp502.411.000,00 yang merupakan hasil GRBB dari PT.Holcim berupa meubeulair dan kendaraan
 - Lapas Terbuka Nusakambangan sebesar Rp181.126.000,00 yang merupakan hasil GRBB dari PT.Holcim berupa meubeulair dan kendaraan
 - Kanim Merauke sebesar Rp143.325.000,00 yang merupakan penginputan AC dimana sebelumnya pencatatan AC tersebut dijadikan satu dengan pembangunan gedung pada tahun 2017, sehingga Itjen merekomendasikan agar AC tersebut dicatat sebagai BMN tersendiri.
- h. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap senilai Rp7.995.723.571,00 diantaranya terdapat pada :
- Kanim Ngurah Rai sebesar Rp1.881.220.000,00 merupakan transaksi yang dilakukan terhadap beberapa barang yang sudah dihentikan dari penggunaan, namun setelah dilakukan inventarisasi ternyata barang tersebut masih bisa digunakan
 - Kanwil Aceh sebesar Rp596.780.000,00 merupakan transaksi yang dilakukan terhadap beberapa barang yang sudah dihentikan dari penggunaan, namun setelah dilakukan inventarisasi ternyata barang tersebut masih bisa digunakan
 - Lapas Terbuka Jakarta sebesar Rp470.992.000,00 merupakan transaksi yang dilakukan terhadap beberapa barang yang sudah dihentikan dari penggunaan, namun setelah dilakukan inventarisasi ternyata barang tersebut masih bisa digunakan

- Kanim Banda Aceh sebesar Rp389.905.103,00 merupakan transaksi yang dilakukan terhadap beberapa barang yang sudah dihentikan dari penggunaan, namun setelah dilakukan inventarisasi ternyata barang tersebut masih bisa digunakan
 - Rutan Dumai sebesar Rp387.514.000,00 merupakan transaksi yang dilakukan terhadap beberapa barang yang sudah dihentikan dari penggunaan, namun setelah dilakukan inventarisasi ternyata barang tersebut masih bisa digunakan
- i. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi senilai Rp487.376.893,00 diantaranya terdapat pada :
- BPSDM sebesar Rp64.176.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
 - Rutan Ternate sebesar Rp50.537.700,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
 - Kanim Langsa sebesar Rp48.000.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
 - Lapas Sanana sebesar Rp32.308.224,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
 - Lapas Sukamiskin sebesar Rp3.900.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
- j. Pengembangan Nilai Aset senilai Rp5.417.075.800,00 diantaranya terdapat pada :
- Ditjen Imigrasi sebesar Rp4.813.646.400,00 yang merupakan pekerjaan penggantian spare part lift, penggantian spare part genset, serta pembelian software Ms. Office
 - Ditjen AHU sebesar Rp431.200.000,00 yang merupakan penambahan Systemboard Fujitsu pada Server NUP 38
 - Kanim Denpasar sebesar Rp77.407.000,00 yang merupakan perbaikan spare part genset
 - Perwakilan Imigrasi di Berlin sebesar Rp23.532.400,00 yang merupakan pembelian 4 buah *winter tires*
- k. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp1.839.034.782,00 diantaranya terdapat pada :
- Lapas Batu sebesar Rp1.068.467.440,00 yang merupakan perbaikan 4 unit kapal hasil GRBB dari PT. Holcim
 - Kanim Karawang sebesar Rp353.942.834,00 yang merupakan penambahan nilai software ke PC dan server
 - Rudenim Kupang sebesar Rp174.740.668,00 yang merupakan penambahan nilai pompa air yang sebelumnya dicatat sebagai Irigasi kemudian dilakukan koreksi catat dan nilainya sebagian ditambahkan ke pompa air
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp98.000.000,00 yang merupakan Penambahan nilai 8 unit lift sebagai tindak lanjut CHR Itjen Semester I 2019
 - Rutan Pondok Bambu sebesar Rp46.500.000,00 yang merupakan Tindak Lanjut Temuan Itjen berupa penambahan nilai alat X-Ray
- l. Transaksi Normalisasi BMN senilai Rp69.369.201,00 diantaranya terdapat pada :
- BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp64.176.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
 - Rutan Temanggung sebesar Rp1.826.200,00 yang merupakan tindak lanjut

terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon

- Kanim Palu sebesar Rp1.700.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
- Kanim Soetta sebesar Rp1.667.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
- BHP Surabaya sebesar Rp1,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon

• **Mutasi Kurang**

- a. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp142.560.556.097,00 diantaranya terdapat pada :
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp25.723.158.902,00 yang merupakan penghentian dari penggunaan terhadap sejumlah barang inventaris kantor, komputer, senjata, dan alat kedokteran yang kondisinya sudah rusak berat
 - Pusdatin sebesar Rp13.552.733.555,00 yang merupakan penghentian dari penggunaan terhadap sejumlah barang inventaris kantor dan komputer yang kondisinya sudah rusak berat
 - Kanim Jakarta Barat sebesar Rp11.165.905.270,00 yang merupakan penghentian dari penggunaan terhadap sejumlah barang inventaris kantor dan komputer yang kondisinya sudah rusak berat
 - BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp5.541.575.710,00 yang merupakan penghentian dari penggunaan terhadap sejumlah barang inventaris kantor, alat kesehatan, dan komputer yang kondisinya sudah rusak berat
 - Kanim Sorong sebesar Rp4.528.915.105,00 yang merupakan penghentian dari penggunaan terhadap sejumlah barang inventaris kantor, alat keamanan, kendaraan dinas, dan komputer yang kondisinya sudah rusak berat
- b. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp337.148.096,00 diantaranya terdapat pada :
 - Perwakilan Imigrasi di Hongkong sebesar Rp307.997.610,00 yang merupakan koreksi terhadap 3 unit PC NUP karena harga satuannya dinilai tidak wajar, dengan menggunakan harga taksiran PC merek yg sama tahun 2009
 - Kanim Batulicin sebesar Rp26.875.000,00 yang merupakan tindak lanjut Temuan BPK berupa pengembalian belanja pompa air
 - Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp2.275.486,00 yang merupakan Pengembalian Kegiatan Uji Petik Pengadaan SPPT IT
- c. Transaksi Normalisasi BMN senilai Rp432.719.782,00 diantaranya terdapat pada :
 - Kanim Tembilahan sebesar Rp55.027.500,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
 - Rutan Ternate sebesar Rp50.537.700,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
 - Lapas Sanana sebesar Rp28.980.700,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
 - Bapas Ternate sebesar Rp5.697.750,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
 - Lapas Sukamiskin sebesar Rp3.900.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon

- d. Penghapusan senilai Rp5.655.091.685,00 diantaranya terdapat pada:
 - Kanwil Jatim sebesar Rp950.894.961,00 yang merupakan penghapusan peralatan kantor, kendaraan dinas dan komputer dengan nomor SK : W.15.PB.06.01-384 Tahun 2019 tanggal 14 Okt 2019
 - Kanim Sambas sebesar Rp799.486.833,00 yang merupakan penghapusan peralatan kantor dan komputer dengan nomor SK : W16-5999.PB.06.04 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019
 - Kanim Ambon sebesar Rp741.767.000,00 yang merupakan penghapusan peralatan kantor dan komputer dengan nomor SK : W28-745-PB.04.04 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019
 - BPSDM sebesar Rp463.956.000,00 yang merupakan penghapusan peralatan kantor, kendaraan dinas dan komputer dengan nomor SK : SEK-52.PB.06.04/2018 tanggal 17 September 2019
 - Lapas Wanita Tangerang sebesar Rp298.825.216,00 yang merupakan penghapusan peralatan kantor dan komputer dengan nomor SK : W.12-236.PB.06.04 Tahun 2019 tanggal 3 September 2019
- e. Transfer Keluar senilai Rp840.741.472.970,00 diantaranya terdapat pada :
 - Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp390.100.422.464,00 yang merupakan transfer keluar peralatan SDP ke sejumlah satker Pemasyarakatan
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp205.216.071.421,00 yang merupakan transfer keluar tenda ke 33 Kanwil (DIPA Setjen) dan beberapa Unit Pusat
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp193.138.965.838,00 merupakan transfer keluar peralatan SIMKIM ke sejumlah satker Imigrasi di dalam dan luar negeri
 - Ditjen AHU sebesar Rp19.499.708.780,00 merupakan transfer keluar ke sejumlah satker daerah dan beberapa Unit Pusat
 - Ditjen KI sebesar Rp5.110.697.832,00 merupakan transfer keluar peralatan kantor dan peralatan komputer ke sejumlah Kanwil (DIPA Setjen), satker Pemasyarakatan, dan beberapa Unit Pusat
- f. Reklasifikasi Keluar senilai Rp138.928.349.304,00 diantaranya terdapat pada:
 - Pusdatin sebesar Rp88.607.370.000,00 yang merupakan reklas Server dari Setjen menjadi server dan software Oracle serta peralatan vicon dari Ditjen AHU menjadi server
 - Kanim Medan sebesar Rp4.601.993.490,00 yang merupakan rekodefikasi dari kode barang yang sebelumnya kurang tepat yaitu Alat Studio dan Alat Laboratorium menjadi kode yang lebih tepat yaitu Alat Kantor
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp980.353.000,00 yang merupakan rekodefikasi drone dan sejumlah peralatan kantor seperti tool kit box dan overhead projector menjadi kode yang lebih tepat seperti kamera udara dan LCD Projector
 - Kanim Batam sebesar Rp2.314.539.483,00 yang merupakan rekodefikasi dari kode barang yang sebelumnya kurang tepat yaitu Alat Studio dan Alat Laboratorium menjadi kode yang lebih tepat yaitu Alat Kantor
 - Lapas Pahuwato sebesar Rp1.847.340.000,00 yang merupakan rekodefikasi dari kode barang yang sebelumnya kurang tepat yaitu Alat Laboratorium menjadi kode yang lebih tepat yaitu Alat Bengkel dan Alat Pertanian
- g. Koreksi Pencatatan senilai Rp11.581.246.350,00 diantaranya terdapat pada:
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.292.624.550,00 yang merupakan koreksi terhadap AC Sentral dan Genset yang telah lama dihapus namun belum dihapuskan di SIMAK, serta koreksi terhadap Partisi yang merupakan satu kesatuan dengan Gedung Kantor pada saat pelaksanaan revaluasi

- Ditjen HAM sebesar Rp3.270.152.550,00 yang merupakan terhadap 1 buah Genset karena setelah dilakukan cek fisik Genset tersebut terdiri dari 2 buah barang yaitu Genset dan Trafo
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.091.509.000,00 yang merupakan koreksi terhadap kelebihan nilai sice yang secara fisik terdiri dari beberapa jenis barang dan reklasifikasi dari aset tetap ke persediaan
 - Lapas Batu sebesar Rp1.068.467.440,00 yang merupakan perbaikan kapal sebagai GRBB dari PT Holcim
 - Lapas Terbuka Jakarta sebesar Rp434.544.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap kesalahan input alat dapur yang seharusnya masuk ke Persediaan
- h. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola senilai Rp39.115.484,00 terdapat pada:
- Kanim Muara Enim sebesar Rp15.650.000,00 yang merupakan usulan barang rusak berat berupa barang inventaris kantor kepada Pengelola Barang
 - Kanim Banda Aceh sebesar Rp14.500.000,00 yang merupakan usulan barang rusak berat berupa barang inventaris kantor kepada Pengelola Barang
 - Rupbasan Bengkulu sebesar Rp8.528.500,00 yang merupakan usulan barang rusak berat berupa komputer dan barang inventaris kantor kepada Pengelola Barang
 - Bapas Palangkaraya sebesar Rp436.984,00 yang merupakan usulan barang rusak berat berupa barang inventaris kantor kepada Pengelola Barang

Gedung dan Bangunan C.15. GEDUNG DAN BANGUNAN
Rp11.958.064.335.324,00

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah RpRp11.958.064.335.324,00 dan Rp10.457.963.798.623,00. Rincian nilai Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 80
Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Eselon I	Gedung dan Bangunan	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	819.461.694.713,00	836.429.768.955,00
Inspektorat Jenderal	810.945.000,00	895.379.000,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	170.001.592.689,00	123.797.994.406,00
Ditjen Pemasyarakatan	8.583.020.273.903,00	8.410.217.420.179,00
Ditjen Imigrasi	1.913.362.195.662,00	1.632.472.235.385,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	166.663.861.460,00	139.077.924.460,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	26.853.457.000,00	26.853.457.000,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	70.325.976.000,00	70.325.976.000,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	57.766.459.562,00	48.298.479.692,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00

BPSDM Hukum dan HAM	149.797.879.335,00	170.017.010.834,00
Konsolidasi Kemenkumham	0,00	(1.000.421.847.288,00)
TOTAL	11.958.064.335.324,00	10.457.963.798.623,00

Pada periode Tahunan 2019 (*Unaudited*) nilai Gedung dan Bangunan pada Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan sebagai dampak dari pemantauan Ditjen Perbendaharaan yang menyatakan bahwa belum seluruh satker menginput hasil rerevaluasi ke Aplikasi SIMAK BMN. Perubahan nilai tanah akibat koreksi hasil rerevaluasi tersebut terdapat pada 38 satuan kerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 81
Koreksi Lebih/Kurang Catat *Unaudited* Gedung dan Bangunan berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited I	Koreksi		Unaudited II
			Tambah	Kurang	
1	Sekretariat Jenderal	204.155.034.038,00	315.000,00		204.155.349.038,00
2	Kanwil NTB	7.829.533.000,00	144.424.000,00		7.973.957.000,00
3	Ditjen AHU	121.677.745.212,00	320.000,00		121.678.065.212,00
4	Lapas Besi	24.940.558.987,00	1.767.527.000,00		26.708.085.987,00
5	Lapas Yogyakarta	17.553.065.000,00	1.054.746.000,00		18.607.811.000,00
6	Lapas Pemuda Plantungan	1.106.613.000,00	10.941.000,00		1.117.554.000,00
7	Rutan Sigli	22.804.339.000,00	95.170.000,00		22.899.509.000,00
8	Cabrut Blangkajeren	1.299.452.000,00	173.270.000,00		1.472.722.000,00
9	Bapas Pekanbaru	1.712.128.000,00	30.417.000,00		1.742.545.000,00
10	Lapas Denpasar	34.648.105.877,00	13.464.249.000,00		48.112.354.877,00
11	Rutan Kefamenanu	10.231.786.967,00	98.041.033,00		10.329.828.000,00
12	Rutan Manna	4.513.265.000,00	809.600.000,00		5.322.865.000,00
13	Lapas Curup	5.570.810.000,00	1.375.530.000,00		6.946.340.000,00
14	Bapas Amuntai	1.170.542.000,00	8.867.000,00		1.179.409.000,00
15	Rupbasan Jakarta Pusat	157.226.000,00	4.261.000,00		161.487.000,00
16	Lapas Ternate	38.921.054.000,00	5.640.502.000,00		44.561.556.000,00
17	Lapas Narkotika NK	14.324.306.000,00	850.000,00		14.325.156.000,00
18	Rupbasan Purwokerto	4.887.737.000,00	662.873.000,00		5.550.610.000,00
19	Kanim Palopo	318.230.000,00	2.993.000,00		321.223.000,00
20	BPHN	50.683.778.692,00	7.082.680.870,00		57.766.459.562,00
21	Kanwil Sumut	18.669.613.000,00		1.690.738.000,00	16.978.875.000,00
22	Lapas Argamakmur	11.320.431.049,00		7.270.000,00	11.313.161.049,00
23	Lapas Langsa	7.083.733.000,00		499.277.000,00	6.584.456.000,00
24	Rutan Sanggau	11.667.854.862,00		163.862,00	11.667.691.000,00
25	Lapas Singkawang	10.994.871.113,00		634.113,00	10.994.237.000,00
26	Lapas Ketapang	6.869.559.265,00		2.771.265,00	6.866.788.000,00
27	Lapas Manado	57.818.813.000,00		52.815.210.000,00	5.003.603.000,00

28	Lapas Palopo	16.053.411.000,00		242.624.000,00	15.810.787.000,00
29	Bapas Mataram	5.335.666.000,00		15.990.000,00	5.319.676.000,00
30	Lapas Kalabahi	5.821.117.702,00		3.365.702,00	5.817.752.000,00
31	Bapas Banjarmasin	2.553.220.000,00		64.632.000,00	2.488.588.000,00
32	Rutan Soasiu	60.785.001.070,00		194.792.000,00	60.590.209.070,00
33	Rutan Pontianak	12.104.037.201,00		1.497.201,00	12.102.540.000,00
34	Bapas Sumbawa Besar	1.791.450.378,00		291.697.144,00	1.499.753.234,00
35	Kanim Cirebon	10.646.807.000,00		459.149.000,00	10.187.658.000,00
36	Kanim Palu	537.578.000,00		143.794.100,00	393.783.900,00
37	Kanim Langsa	9.221.818.952,00		509.600.000,00	8.712.218.952,00
38	Kanim Siak Sri Indrapura	6.900.810.320,00		328.213.000,00	6.572.597.320,00
JUMLAH			32.427.576.903,00	57.271.418.387,00	

Sehingga secara total, perubahan nilai Gedung dan Bangunan dalam periode Tahunan 2019 (*Unaudited*) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 82
Perubahan Nilai Gedung dan Bangunan dari *Unaudited I* menjadi *Unaudited II*
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited I	Koreksi		Unaudited II
		Tambah	Kurang	
Gedung dan Bangunan	11.969.258.064.117,00	32.427.576.903,00	57.271.418.387,00	11.944.414.222.633,00

Dalam Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 terdapat koreksi nilai gedung dan bangunan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu:

Terdapat koreksi gedung dan bangunan berupa perubahan nilai revaluasi tahun 2019 pada 56 satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83
Koreksi Lebih/Kurang Catat *Audited* Gedung dan Bangunan berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited	Koreksi		Audited
			Tambah	Kurang	
1	Sekretariat Jenderal	204.155.349.038,00		36.430.000,00	204.118.919.038,00
2	Rutan Wonosari	6.319.402.000,00	3.099.624.000,00		9.419.026.000,00
3	Cabrut Bireun	42.087.866.000,00	12.093.490.000,00		54.181.356.000,00
4	Lapas Binjai	39.443.958.015,00	14.453.858.000,00		53.897.816.015,00
5	Lapas Kediri	13.978.889.000,00	29.070.000,00		14.007.959.000,00
6	Lapas Padang Sidempuan	24.389.311.000,00	7.352.254.000,00		31.741.565.000,00
7	Lapas Jember	8.056.696.000,00	5.810.580.000,00		13.867.276.000,00
8	Rutan Medan	41.868.708.764,00	3.761.783.000,00		45.630.491.764,00
9	Lapas Tabanan	3.384.138.000,00	3.045.649.000,00		6.429.787.000,00
10	Bapas Pamekasan	3.800.398.000,00	1.413.533.000,00		5.213.931.000,00
11	Rupbasan Argamakmur	1.563.866.000,00	1.183.210.000,00		2.747.076.000,00

12	Cabrut Muntok	9.386.735.000,00	418.446.000,00		9.805.181.000,00
13	Kanim Tanjung Pandan	5.429.427.488,00	217.842.000,00		5.647.269.488,00
14	Bapas Sibolga	1.690.611.000,00	122.811.000,00		1.813.422.000,00
15	Rutan Sidikalang	4.124.563.000,00	782.933.000,00		4.907.496.000,00
16	Lapas Lubuk Linggau	16.274.644.000,00	801.836.000,00		17.076.480.000,00
17	Rutan Gianyar	4.430.305.000,00	658.006.000,00		5.088.311.000,00
18	Cabrut Bagan Siapi-api	7.246.288.960,00	246.014.000,00		7.492.302.960,00
19	Bapas Denpasar	2.323.967.000,00	99.025.000,00		2.422.992.000,00
20	Lapas Batu	74.451.367.298,00	85.103.000,00		74.536.470.298,00
21	LPP Medan	43.059.254.034,00	103.429.000,00		43.162.683.034,00
22	BHP Medan	8.868.274.760,00	92.038.000,00		8.960.312.760,00
23	Bapas Palangkaraya	2.960.845.000,00	968.203.000,00		3.929.048.000,00
24	Kanim Palopo	321.223.000,00		5.986.000,00	315.237.000,00
25	Cabrut Natal	596.506.000,00		8.430.000,00	588.076.000,00
26	Kanim Ngurah Rai	24.427.523.000,00		11.616.000,00	24.415.907.000,00
27	Kanim Belawan	2.160.786.000,00		12.613.000,00	2.148.173.000,00
28	Kanim Bengkalis	3.405.073.000,00		14.312.000,00	3.390.761.000,00
29	Bapas Metro	449.840.000,00		21.358.000,00	428.482.000,00
30	Kanim Tembagapura	10.343.005.977,00		21.508.000,00	10.321.497.977,00
31	Lapas Magelang	10.163.445.000,00		95.180.000,00	10.068.265.000,00
32	Kanim Polonia	4.899.324.950,00		64.900.000,00	4.834.424.950,00
33	Bapas Tanjung Pinang	592.127.000,00		100.000.000,00	492.127.000,00
34	Rupbasan Denpasar	2.158.945.000,00		78.682.000,00	2.080.263.000,00
35	Lapas Bekasi	4.050.057.000,00		20.000,00	4.050.037.000,00
36	Kanim Medan	28.680.205.490,00		110.000.000,00	28.570.205.490,00
37	Lapas Narkotika Siantar	17.473.368.000,00		195.684.000,00	17.277.684.000,00
38	LPP Pekanbaru	9.766.568.000,00		301.142.000,00	9.465.426.000,00
39	Lapas Bontang	24.213.823.744,00		9.402.805,00	24.204.420.939,00
40	LPKA Pekanbaru	14.181.982.722,00		49.035.000,00	14.132.947.722,00
41	Rudenim Tanjung Pinang	36.083.603.717,00		287.828.000,00	35.795.775.717,00
42	Kanim Tarempa	2.425.974.231,00		594.838.000,00	1.831.136.231,00
43	Kanim Bogor	49.864.078.761,00		5.153.047.881,00	44.711.030.880,00
44	Kanim Dumai	7.442.464.500,00		508.478.000,00	6.933.986.500,00
45	Kanim Denpasar	8.388.636.229,00		1.153.329.000,00	7.235.307.229,00
46	Kanim Pangkalpinang	6.508.934.815,00	230.358.000,00		6.739.292.815,00
47	Lapas Wamena	59.314.951.324,00		1.072.114.000,00	58.242.837.324,00
48	Rutan Tarutung	2.781.225.000,00		1.577.423.000,00	1.203.802.000,00
49	Cabrut Sipirok	3.959.892.000,00		1.398.677.000,00	2.561.215.000,00
50	Lapas Gunung Sitoli	15.910.672.403,00		2.610.541.403,00	13.300.131.000,00
51	Lapas Serui	11.776.683.000,00		2.943.437.000,00	8.833.246.000,00
52	Kanim Sorong	17.772.006.700,00		2.827.843.000,00	14.944.163.700,00
53	LPKA Batam	9.385.653.220,00		4.438.751.220,00	4.946.902.000,00
54	Lapas Medan	54.453.206.800,00	582.310.000,00		55.035.516.800,00

55	Rupbasan Manokwari	19.873.278.884,00		7.227.129.000,00	12.646.149.884,00
56	Lapas Probolinggo	16.830.507.000,00		11.530.706.000,00	5.299.801.000,00
JUMLAH			57.651.405.000,00	44.460.441.309,00	

Sehingga secara total, perubahan nilai Gedung dan Bangunan dalam periode Tahunan 2019 (*Audited*) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 84
Perubahan Nilai Gedung dan Bangunan dari *Unaudited II* menjadi *Audited*
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited	Koreksi		Audited I
		Tambah	Kurang	
Gedung dan Bangunan	11.944.414.222.633,00	57.651.405.000,00	44.460.441.309,00	11.957.605.186.324,00

Setelah Laporan Audited 2019 diserahkan kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 21 April 2020, terdapat Temuan Pemeriksaan dari BPK LKPP terhadap satuan kerja Kanim Cirebon yang belum melakukan perekaman transaksi revaluasi terkait Barang Berlebih, sehingga dilakukan koreksi tambah pada satuan kerja Kanim Cirebon senilai Rp459.149.000,00. Sehingga secara total, perubahan nilai Gedung dan Bangunan dalam periode Tahunan 2019 (*Audited*) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 85
Perubahan Nilai Gedung dan Bangunan dari *Audited I* menjadi *Audited II*
Per 31 Desember 2019

Uraian	Audited I	Koreksi		Audited II
		Tambah	Kurang	
Gedung dan Bangunan	11.957.605.186.324,00	459.149.000,00		11.958.064.335.324,00

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 86
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2018	10.457.963.798.623,00
Mutasi tambah :	
Koreksi Take In Revaluasi	1.000.421.847.288,00
Penambahan Saldo Awal	5.090.669.307,00
Pembelian	1.818.054.000,00
Transfer Masuk	573.865.484.938,00
Hibah Masuk	56.853.280.809,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	1.005.656.267.989,00
Reklasifikasi Masuk	166.185.360.973,00
Perolehan Lainnya	7.121.798.943,00

Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.300.000.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	39.024.551.361,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	14.139.391.750,00
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	1.462.671.395,00
Pengembangan Nilai Aset	34.363.362.993,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	12.912.626.065,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	23.749.437.470,00
Pengembangan Melalui KDP	117.252.713.249,00
Transaksi Normalisasi BMN	3.121.720,00
Koreksi Tambah Revaluasi BMN	803.723.631.640,00
Total Mutasi Tambah :	3.864.944.271.890,00
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	53.360.041.762,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	35.980.426.643,00
Transaksi Normalisasi BMN	5.010.110.231,00
Penghapusan	1.884.994.000,00
Transfer Keluar	574.171.516.938,00
Hibah Keluar	98.798.000,00
Reklasifikasi Keluar	154.375.316.639,00
Koreksi Pencatatan	58.661.588.742,00
Koreksi Kurang Revaluasi BMN	1.481.300.942.234,00
Total Mutasi Kurang :	2.364.843.735.189,00
Saldo per 31 Desember 2019	11.958.064.335.324,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	2.468.189.664.649,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	9.489.874.670.675,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

• **Mutasi Tambah**

- a. Penambahan Saldo Awal senilai Rp5.090.669.307,00 terdapat pada:
 - Lapas Sampit sebesar Rp1.327.388.400,00 yang merupakan tindak lanjut Temuan Itjen terhadap sejumlah bangunan yang belum tercatat di SIMAK
 - Lapas Wanita Sigli sebesar Rp1.185.000.000,00 yang merupakan penginputan Rumah Negara yang sebelumnya dijadikan satu dengan Gedung Kantor
 - Lapas Lahat sebesar Rp1.012.160.907,00 yang merupakan pencatatan Bangunan Gedung LP Kelas II yang dipecah menjadi dua NUP dimana salah satu gedung dicatat sebagai saldo awal berdasarkan arahan dari KPKNL Lahat
 - LPP Pangkalpinang sebesar Rp834.894.000,00 yang merupakan pemecahan NUP gedung Lapas menjadi beberapa jenis gedung sesuai fisik bangunan
 - LPP Kupang sebesar Rp696.226.000,00 yang merupakan tindak lanjut dari revaluasi ulang yang dilakukan oleh KPKNL Kupang yang menyatakan bahwa terdapat 6 unit gedung yang belum tercatat di SIMAK
 - Kanim Depok sebesar Rp35.000.000,00 yang merupakan pencatatan gedung yang belum tercatat di SIMAK pada saat pelaksanaan revaluasi dimana

sebelumnya nilai gedung tersebut dijadikan satu dengan nilai tanah.

- b. Pembelian sebesar Rp1.818.054.000,00 terdapat pada :
 - Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp1.567.852.000,00 yang merupakan pembayaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Lapas Ciangir dan Bapas Ciangir
 - Kanim Ketapang sebesar Rp159.900.000,00 yang merupakan pemasangan pagar kantor
 - Kanim Banjarmasin sebesar Rp49.302.000,00 yang merupakan pemasangan kanopi
 - Kanim Manokwari sebesar Rp41.000.000,00 yang merupakan pemasangan kanopi
- c. Transfer Masuk senilai Rp573.865.484.938,00 diantaranya terdapat pada:
 - Lapas Karanganyar Nusakambangan sebesar Rp463.590.175.300,00 yang merupakan transfer dari Ditjen Pemasarakatan berupa 1 unit Bangunan Gedung LP Kelas II
 - Lapas Perempuan Medan sebesar Rp28.898.347.034,00 yang merupakan transfer dari LPKA Medan berupa Bangunan Gedung LP Kelas II, Gedung Kantor, Tempat Ibadah, dan Pos Jaga
 - Lapas Terbuka Jakarta sebesar Rp24.261.130.992,00 yang merupakan transfer dari Ditjen Pemasarakatan berupa Bangunan Gedung Parkir, Gedung Kantor, Pagar, dan Pos Jaga
 - LPKA Jakarta sebesar Rp14.871.109.000,00 yang merupakan transfer dari Ditjen Pemasarakatan berupa Bangunan Gedung LP Kelas II, Gedung Kantor, Gedung Parkir, Garasi, dan Pos Jaga
 - Lapas Narkotika Langkat sebesar Rp14.036.813.000,00 yang merupakan transfer dari Kanwil Sumut berupa 1 unit Bangunan Gedung LP Kelas II
- d. Hibah Masuk senilai Rp56.853.280.809,00 diantaranya terdapat pada:
 - Kanim Bekasi sebesar Rp31.864.962.000,00 yang merupakan hibah dari Pemkot Bekasi berupa 1 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nomor BAST : 640/304/BAST/DPKPP/SET tanggal 28 Januari 2019
 - Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp8.154.543.895,00 yang merupakan hibah dari Panitia Pembangunan Rumah Ibaah berupa Bangunan Tempat Ibadah untk Poltekup dan Poltekim dengan nomor BAST : PAS1.PB.06.03-2589 tanggal 11 November 2019
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.580.000.000,00 yang merupakan hibah dari DKM Masjid Khusnul Khotimah berupa Masjid dengan nomor BAST : SEK.KU.03.02-104 tanggal 21 Maret 2019
 - Rutan Pelaihari sebesar Rp1.596.280.000,00 yang merupakan hibah dari Pemkab Tanah Laut berupa Pos Jaga dan Tembok Permanen dengan nomor BAST : 032/3827/BAST/UM-SETDA/2019 tanggal 13 November 2019
 - Lapas Indramayu sebesar Rp1.429.845.000,00 yang merupakan hibah dari Pemkab Indramayu berupa 1 unit Bangunan Gedung Pertemuan Permanen dengan nomor BAST : 590/BAST.6-Tapem/2019 tanggal 10 Mei 2019
- e. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp1.005.656.267.989,00 diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp496.891.366.987,00 yang merupakan penyelesaian pembangunan gudang tertutup di Rupbasan Jakarta Barat, pagar permanen di Open Camp Ciangir, gedung kantor Bapas Ciangir, dan

- pembangunan Lapas Karanganyar
 - Kanim Balikpapan sebesar Rp78.141.977.589,00 yang merupakan penyelesaian pembangunan gedung kantor dan sejumlah fasilitas pendukung
 - Kanim Bogor sebesar Rp45.857.990.761,00 yang merupakan penyelesaian pembangunan gedung kantor dan sejumlah fasilitas pendukung
 - BPSDM sebesar Rp41.821.258.350,00 yang merupakan penyelesaian pembangunan sejumlah fasilitas di Poltekip dan Poltekim
 - LPP Jayapura sebesar Rp35.582.607.827,00 yang merupakan penyelesaian pembangunan gedung kantor dan sejumlah fasilitas pendukung
- f. Reklasifikasi Masuk senilai Rp166.185.360.973,00 diantaranya terdapat pada:
- BPSDM sebesar Rp35.231.270.657,00 yang merupakan pemecahan NUP dari penyelesaian pembangunan gedung Poltekip dan Poltekim menjadi 1 bidang jalan dan 2 jenis gedung
 - Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp24.261.130.992,00 yang merupakan rekodefikasi 1 unit gedung menjadi 4 unit gedung di Bapas Ciangir dan 1 buah Pagar Permanen menjadi 1 unit gedung, 1 buah pagar permanen, dan 1 bidang Jalan Akses di Open Camp Ciangir
 - Rutan Labuhan Deli sebesar Rp20.359.606.684,00 yang merupakan rekodefikasi 1 unit Gedung Rutan menjadi 1 unit Bangunan Rutan, 1 unit Rumah Genset, dan 1 buah Pagar Permanen
 - LPP Bengkulu sebesar Rp14.439.005.850,00 yang merupakan rekodefikasi pembangunan gedung kantor menjadi beberapa gedung yang sesuai dengan kondisi di lapangan
 - Lapas Mataram sebesar Rp13.910.118.750,00 yang merupakan pemecahan NUP dari penyelesaian pembangunan blok hunian menjadi Blok Hunian, Dapur, Tempat Ibadah, dan Pagar
- g. Perolehan Lainnya senilai Rp7.121.798.943,00 yang seluruhnya merupakan hasil GRBB dari PT. Holcim ke sejumlah satker di Nusakambangan, antara lain : Lapas Batu, Lapas Besi, Lapas Kembang Kuning, Lapas Narkotika, Lapas Pasir Putih, dan Lapas Permisian
- h. Penyelesaian Pembangunan Langsung senilai Rp1.300.000.000,00 terdapat di Kanim Kediri yang merupakan penyelesaian pembangunan gedung kantor
- i. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap senilai Rp30.794.349.861,00 diantaranya terdapat pada:
- Kanwil Maluku sebesar Rp7.856.836.000,00 yang merupakan penggunaan kembali 1 unit bangunan yang sudah dihentikan dari penggunaan
 - Rudenim Makassar sebesar Rp6.353.939.000,00 yang merupakan penggunaan kembali 1 unit bangunan yang sudah dihentikan dari penggunaan
 - Rutan Donggala sebesar Rp5.887.317.000,00 yang merupakan penggunaan kembali 1 unit bangunan yang sudah dihentikan dari penggunaan
 - Lapas Ambon sebesar Rp3.270.418.235,00 yang merupakan penggunaan kembali 1 unit bangunan yang sudah dihentikan dari penggunaan
 - Kanwil NTB sebesar Rp1.723.093.000,00 yang merupakan penggunaan kembali 3 unit bangunan yang sudah dihentikan dari penggunaan
- j. Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi senilai Rp14.139.391.750,00 terdapat pada :
- BHP Surabaya sebesar Rp10.303.687.268,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon

- Setjen sebesar Rp3.763.593.762,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
 - Bapas Serang sebesar Rp68.989.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
 - Cabrut Wahai sebesar Rp3.121.720,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
- k. Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya sebesar Rp1.462.671.395,00 terdapat pada :
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.197.716.044,00 yang merupakan penambahan nilai gedung dimana nilai sebelumnya di bawah batas kapitalisasi
 - Lapas Perempuan sebesar Rp207.666.000,00 yang merupakan penambahan nilai gedung dimana nilai sebelumnya di bawah batas kapitalisasi
 - Rupbasan Mataram sebesar Rp57.289.351,00 yang merupakan penambahan nilai gedung dimana nilai sebelumnya di bawah batas kapitalisasi
- l. Pengembangan Nilai Aset senilai Rp34.363.362.993,00 diantaranya terdapat pada:
- Ditjen AHU sebesar Rp20.467.707.909,00 yang merupakan pekerjaan renovasi gedung utama, gedung arsip di Jalan Kramat, Data Center di Batam, dan Graha Pengayoman
 - Lapas Kerobokan sebesar Rp2.421.551.877,00 yang merupakan pekerjaan renovasi gedung Lapas
 - Lapas Takalar sebesar Rp1.387.500.000,00 yang merupakan pekerjaan renovasi gedung Lapas
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.095.112.000,00 yang merupakan pekerjaan penataan ruangan dan renovasi gedung utama
 - Lapas Narkotika Jayapura sebesar Rp944.172.701,00 yang merupakan pembayaran belanja modal yang belum dibayarkan pada tahun sebelumnya berupa penyelesaian pembangunan gedung Bapas Jayapura
- m. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp3.307.380.735,00 diantaranya terdapat pada:
- Lapas Ambon sebesar Rp1.141.142.235,00 yang merupakan renovasi blok hunian
 - Lapas Batu sebesar Rp423.500.000,00 yang merupakan renovasi gedung hasil GRBB dari PT. Holcim
 - Lapas Muara Teweh sebesar Rp412.481.000,00 yang merupakan penambahan nilai gedung dari Jalan dan Instalasi Air yang dilakukan Koreksi Pencatatan
 - Rutan Tanah Grogot sebesar Rp322.474.000,00 merupakan hibah masuk berupa renovasi masjid dari PT. Kideco
 - Lapas Pasir Putih sebesar R. 189.645.000,00 merupakan renovasi gedung lapas dan rekabeling pagar yang merupakan hasil GRBB dari PT. Holcim
- n. Penerimaan Aset Tetap Renovasi senilai Rp23.749.437.470,00 diantaranya terdapat pada:
- BHP Semarang sebesar Rp8.477.035.458,00 yang merupakan renovasi gedung menggunakan DIPA Ditjen AHU
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp4.391.776.130,00 yang merupakan renovasi gedung menggunakan DIPA Ditjen KI
 - BPSDM sebesar Rp3.510.597.094,00 yang merupakan renovasi Gedung Pendidikan yang menggunakan DIPA Ditjen Imigrasi

- BPHN sebesar Rp2.385.299.000,00 yang merupakan renovasi gedung yang menggunakan DIPA Sekretariat Jenderal
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.828.771.088,00 yang merupakan renovasi gedung yang menggunakan DIPA Ditjen AHU
- o. Pengembangan Melalui KDP senilai Rp117.252.713.249,00 diantaranya terdapat pada:
 - Lapas Sukamiskin sebesar Rp10.679.075.000,00 yang merupakan renovasi gedung lapas
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp10.065.611.795,00 yang merupakan pekerjaan penataan ruang kerja dan renovasi aula
 - Lapas Bulukumba sebesar Rp9.967.000.100,00 yang merupakan renovasi gedung lapas
 - Kanim Pamekasan sebesar Rp9.226.935.765,00 yang merupakan renovasi gedung kantor
 - BPSDM sebesar Rp9.161.521.750,00 yang merupakan renovasi asrama pendidikan dan aula
- p. Transaksi Normalisasi BMN senilai Rp3.121.720,00 terdapat di Cabrut Wahai yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
- q. Koreksi Tambah Revaluasi senilai Rp803.723.631.640,00 diantaranya terdiri dari:
 - Koreksi revaluasi berupa perekaman transaksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi senilai Rp8.126.650.000,00 merupakan penambahan nilai bangunan yang menjadi barang berlebih karena sampai dengan periode pelaporan sebelumnya atas BMN tersebut belum pernah tercatat berdasarkan LHIP Tahun 2017/2018, yang terdapat pada :
 - Lapas Panyabungan sebesar Rp7.200.098.000,00
 - Kanim Cirebon sebesar Rp459.149.000,00
 - Rutan Enrekang sebesar Rp458.110.000,00
 - Lapas Siborong-borong sebesar Rp9.293.000,00
 - Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi senilai Rp2.690.953.648,00 merupakan transaksi yang terkait penyesuaian kodefikasi barang sebelum dilakukan penilaian, yang terdapat pada :
 - Lapas Siborong-borong sebesar Rp1.289.000.000,00
 - Lapas Panyabungan sebesar Rp862.300.000,00
 - Kanwil NTT sebesar Rp472.718.750,00
 - Rutan Enrekang sebesar Rp66.934.898,00
 - Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi senilai Rp24.956.173.000,00 merupakan Koreksi revaluasi berupa penambahan nilai dari perekaman barang berlebih, BMN berupa bangunan yang belum pernah tercatat berdasarkan LHIP Tahun 2019. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada :
 - Lapas Pontianak sebesar Rp11.002.826.000,00
 - LPKA Batam sebesar Rp4.946.902.000,00
 - Cabrut Muntok sebesar Rp3.419.416.000,00
 - Lapas Narkotika Jakarta sebesar Rp2.139.368.000,00
 - Lapas Malang sebesar Rp954.659.000,00

- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali senilai Rp20.851.979.511,00 merupakan nilai penyusutan transaksional atas koreksi reval terhadap nilai bangunan. Transaksi ini diantaranya terdapat pada :
 - Kanwil Sumut sebesar Rp13.036.724.250,00
 - Kanim Kupang sebesar Rp1.869.750.454,00
 - Kanwil Maluku sebesar Rp1.772.174.747,00
 - LPKA Palembang sebesar Rp476.910.129,00
 - Kanim Palu sebesar Rp475.494.003,00
- Koreksi Penilaian Kembali BMN senilai Rp8.813.743.213,00 merupakan penambahan nilai bangunan dari perekaman nilai koreksian (menjadi nilai wajar) hasil penilaian yang terbit dalam LHIP tahun 2019. Transaksi ini diantaranya terdapat pada :
 - Kanim Jakarta Barat sebesar Rp6.728.190.313,00
 - Kanwil NTT sebesar Rp1.175.266.600,00
 - Lapas Yogyakarta sebesar Rp434.319.000,00
 - Rutan Enrekang sebesar Rp275.387.713,00
 - Rutan Sambas sebesar Rp90.357.000,00
- Koreksi Kesalahan input IP senilai Rp571.255.526.017,00 merupakan penyesuaian hasil penilaian (nilai wajar) **barang ditemukan** tahun 2017/2018 menjadi hasil penilaian baru tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Penilai KPKNL, dalam artian nilai wajar baru lebih tinggi dari nilai wajar sebelumnya. Penyesuaian tersebut menambah nilai gedung pada periode tahun 2019. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada :
 - Lapas Banyuasin sebesar Rp70.063.415.000,00
 - Rutan Bandung sebesar Rp29.651.737.000,00
 - Ditjen KI sebesar Rp27.585.937.000,00
 - Lapas Cibinong sebesar Rp23.921.144.000,00
 - Lapas Bulukumba sebesar Rp23.660.899.000,00
- Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan senilai Rp127.014.737.503,00 merupakan penambahan nilai akibat dalam pelaksanaan revaluasi ulang tahun 2019 atas BMN obyek reval tersebut berubah hasil invent nya dari semula barang ditemukan (LHIP 2017/2018) menjadi barang tidak ditemukan (LHIP 2019). Penambahan nilai tersebut merupakan hasil dari eliminir nilai koreksi (menjadi nilai wajar) pada LHIP sebelumnya. Transaksi ini diantaranya terdapat pada :
 - Kanwil Sumut sebesar Rp125.177.804.831,00
 - Kanim Jakbar sebesar Rp1.294.756.127,00
 - Kanim Kupang sebesar Rp510.852.545,00
 - Rutan Kupang sebesar Rp31.324.000,00
- Koreksi revaluasi berupa koreksi manual transfer masuk senilai Rp93.174.000,00 , merupakan penambahan nilai gedung dari perekaman koreksi revaluasi secara manual pada satker penerima barang dimana BMN tersebut merupakan obyek reval di tahun 2019. Transaksi ini terdapat pada LPP Medan, dimana LPP Medan menerima sejumlah gedung dari LPKA Medan yang mengalami kenaikan nilai wajar pada tahun 2019.
- Koreksi revaluasi berupa Koreksi BMN ditemukan Kembali senilai Rp1.003.302.779,00 merupakan penambahan nilai bangunan, dimana terdapat

kondisi pada LHIP sebelumnya tahun 2017/2018 atas BMN tersebut terlapor sebagai barang tidak ditemukan (BTD), namun ketika dilakukan revaluasi ulang tahun 2019 atas BMN tersebut diketahui ditemukan kembali (barang ditemukan). Transaksi ini terdapat pada :

- Ditjen Imigrasi sebesar Rp611.948.574,00
- Rutan Labuhan Deli sebesar Rp336.428.850,00
- Kanim Sukabumi sebesar Rp54.925.355,00

- Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi senilai Rp532.430.969,00 merupakan penambahan nilai bangunan hasil dari eliminir nilai koreksi reval (menjadi nilai wajar) dalam LHIP 2017/2018. Dan pada LHIP tahun 2019 diketahui bahwa dilakukan proses penyesuaian kode barang melalui reklasifikasi hasil inventarisasi. Transaksi ini terdapat pada Lapas Siborong-borong senilai Rp380.999.344,00 dan Kanwil NTT senilai Rp151.431.625,00
- Koreksi revaluasi senilai Rp315.000,00 yang merupakan koreksi manual terhadap obyek revaluasi berupa **Barang Ditemukan** pada satker Sekretariat Jenderal yang sudah mendapatkan nilai wajar namun belum direkam di Aplikasi SIMAK. Kemudian pada tahun 2019 obyek revaluasi tersebut teridentifikasi sebagai BMN tidak normal sehingga dilakukan normalisasi kemudian dilakukan penilaian ulang yang menambah nilai wajar. Terhadap kenaikan nilai wajar tersebut kemudian dilakukan koreksi manual.
- Koreksi revaluasi berupa penyesuaian hasil penilaian (nilai wajar) Barang Berlebih tahun 2017/2018 menjadi hasil penilaian baru tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Penilai KPKNL, dalam artian nilai wajar baru lebih tinggi dari nilai wajar sebelumnya. Penyesuaian tersebut menambah nilai Gedung dan Bangunan pada periode tahun 2019 senilai Rp28.200.704.000,00. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada :
 - Lapas Sukamiskin sebesar Rp21.843.313.000,00
 - Ditjen AHU sebesar Rp1.940.079.000,00
 - Rutan Bandung sebesar Rp1.413.615.000,00
 - Lapas Lubuk Linggau sebesar Rp593.303.000,00
 - Rutan Pekalongan sebesar Rp341.806.000,00
- Koreksi revaluasi berupa koreksi ekuitas senilai Rp1.127.533.000,00 merupakan penambahan nilai atas perekaman koreksi manual akibat dari transaksi lanjutan berupa reklasifikasi/transfer yang terjadi di tahun 2017/2018 namun atas BMN obyek reval tersebut mengalami kenaikan nilai wajar sehingga perlu dilakukan penyesuaian pula pada perekaman barang barunya (hasil reklasifikasi/transfer). Transaksi tersebut terdapat pada:
 - Rupbasan Purwokerto sebesar Rp662.873.000,00
 - Rutan Bandar Lampung sebesar Rp335.602.000,00
 - BHP Medan sebesar Rp92.038.000,00
 - Kanim Dumai sebesar Rp35.850.000,00
 - Lapas Narkotika NK sebesar Rp850.000,00
 - Ditjen AHU sebesar Rp320.000,00
- Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi senilai Rp301.934.000,00 berupa penambahan nilai terhadap obyek revaluasi yang dilakukan transfer

keluar pada tahun 2019 sebelum dilakukan penilaian ulang pada tahun yang sama, dimana transaksi tersebut mengeliminir penurunan nilai wajar pada satker pemberi. Transaksi tersebut terdapat pada LPKA Pekanbaru senilai Rp301.142.000,00 dan Kanim Ngurah Rai sebesar Rp792.000,00.

- Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi senilai Rp35.366.0000,00 merupakan koreksi reval atas hasil eliminir nilai koreksian pada LHIP tahun 2019, dimana atas BMN obyek reval tersebut telah dilakukan transaksi penghapusan. Transaksi tersebut terdapat pada Rutan Sambas senilai Rp34.393.000,00 dan LPP Medan senilai Rp973.000,00.
- Koreksi revaluasi berupa Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi senilai Rp8.719.109.000,00 merupakan jenis transaksi yang mengeliminir koreksian nilai wajar sebelumnya pada LHIP tahun 2017/2018, karena atas BMN obyek reval tersebut pada tahun 2019 mengalami transaksi penghentian/usulan barang rusak berat. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada :
 - Lapas Bekasi sebesar Rp2.935.000.000,00
 - Lapas Medan sebesar Rp2.848.606.000,00
 - Lapas Yogyakarta sebesar Rp1.842.784.000,00
 - Rutan Sukadana sebesar Rp572.101.000,00
 - Kanim Batam sebesar Rp287.828.000,00
- **Mutasi Kurang**
 - a. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp53.360.041.762,00 diantaranya terdapat pada :
 - Lapas Medan sebesar Rp10.018.453.500,00 yang merupakan dampak dari penarikan ulang ADK Revaluasi dari Aplikasi SIMAN terhadap 30 NUP Gedung yang sudah dihentikan dari penggunaan
 - Rutan Donggala sebesar Rp6.650.290.000,00 yang merupakan penghentian dari penggunaan terhadap gedung kantor yang hancur dan terbakar ketika terjadi bencana gempa bumi tahun 2018
 - Rudenim Makassar sebesar Rp6.353.939.000,00 yang merupakan penghentian dari penggunaan terhadap gedung kantor yang kondisinya sudah rusak berat
 - Lapas Labuhan Ruku sebesar Rp6.297.902.000,00 yang merupakan penghentian dari penggunaan terhadap sejumlah blok hunian dan gedung yang terbakar pada tahun 2013
 - Lapas Palopo sebesar Rp3.794.300.000,00 yang merupakan penghentian dari penggunaan terhadap sejumlah blok hunian yang terbakar pada tahun 2013
 - b. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp35.980.426.643,00 diantaranya terdapat pada:
 - Rutan Perempuan Surabaya sebesar Rp13.486.346.715,00 yang merupakan pemecahan NUP gedung menjadi 9 unit gedung sesuai dengan kondisi fisiknya
 - Lapas Mataram sebesar Rp7.265.615.600,00 yang merupakan pemecahan NUP dari penyelesaian pembangunan blok hunian
 - Kanim Bogor Rp5.641.419.242,00 senilai yang merupakan tindak lanjut Temuan BPK atas pekerjaan pembangunan gedung kantor untuk disesuaikan pencatatannya antara kriteria bangunan dan peralatan & mesin
 - Kanim Ponorogo sebesar Rp4.647.522.146,00 yang merupakan pemecahan NUP gedung menjadi 8 unit gedung sesuai dengan kondisi fisiknya

- LPP Sigli sebesar Rp1.185.000.000,00 yang merupakan koreksi pengurangan nilai gedung kantor yang sebelumnya dijadikan satu dengan rumah dinas
- c. Transaksi Normalisasi BMN senilai Rp5.010.110.231,00 terdapat pada :
 - Lapas Anak Wanita Tangerang sebesar Rp3.793.405.187,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.197.716.044,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
 - Bapas Serang sebesar Rp18.989.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BMN yang teridentifikasi tidak normal di E-Rekon
- d. Penghapusan senilai Rp1.884.994.000,00 diantaranya terdapat pada:
 - LPKA Medan sebesar Rp932.687.000,00 yang merupakan penghapusan bangunan berdasarkan SK Penghapusan nomor : SEK-129.PB.06.04 Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019
 - LPP Medan sebesar Rp589.944.000,00 yang merupakan penghapusan bangunan berdasarkan SK Penghapusan nomor : SEK-27.PB.06.04 Tahun 2019 tanggal 2 April 2019
 - Kanwil Lampung sebesar Rp250.000.000,00 yang merupakan penghapusan bangunan berdasarkan SK Penghapusan nomor : SEK-66.PB.06.04 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019
 - Kanim Dumai sebesar Rp35.177.000,00 yang merupakan penghapusan Rumah Negara Gol I Tipe B Semi Permanen berdasarkan SK Penghapusan nomor : S-08/MK.6/WKN.03/KNL.05/18 tanggal 18 September 2018
 - Rutan Dumai sebesar Rp32.595.000,00 yang merupakan penghapusan bangunan berdasarkan SK Penghapusan nomor : SEK-12.PB.06.04 Tahun 2019 tanggal 8 Maret 2019
- e. Transfer Keluar senilai Rp574.171.516.938,00 diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp495.680.056.792,00 yang merupakan penyelesaian pembangunan di tahun 2019 pada satker Lapas Karanganyar Nusakambangan, Lapas Terbuka Jakarta, dan Rupasban Jakarta menggunakan DIPA Ditjen Pemasyarakatan
 - LPKA Medan sebesar Rp28.898.347.034,00 yang merupakan transfer ke Lapas Wanita Medan berupa Bangunan Gedung LP Kelas II, Gedung Kantor, Tempat Ibadah, dan Pos Jaga
 - Lapas Terbuka Jakarta sebesar Rp14.871.109.000,00 yang merupakan transfer ke LPKA Jakarta berupa Bangunan Gedung LP Kelas II, Gedung Kantor, Gedung Parkir, Garasi, dan Pos Jaga
 - Kanwil Sumut sebesar Rp14.036.813.000,00 yang merupakan transfer Bangunan Gedung LP Kelas II ke Lapas Narkotika Langkat
 - LPKA Pekanbaru sebesar Rp9.766.568.000,00 yang merupakan transfer ke LPP Pekanbaru berupa Bangunan Gedung LP Kelas II, Gedung Kantor, Gedung Pertemuan, Klinik, Gudang, Tempat Kerja Lainnya, Bengkel, Tempat Ibadah, dan Garasi
- f. Hibah Keluar senilai Rp98.798.000,00 terdapat di Lapas Indramayu yang merupakan hibah gedung asrama dan gedung Lapas ke Pemkab Indramayu berdasarkan BAST nomor : W11.PAS.PAS18.PL.04.01-1308
- g. Reklasifikasi Keluar senilai Rp154.375.316.639,00 diantaranya terdapat pada:

- BPSDM sebesar Rp40.924.536.350,00 yang merupakan pemecahan NUP dari penyelesaian pembangunan gedung Poltekip dan Poltekim menjadi 1 bidang jalan dan 2 jenis gedung
 - Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp25.472.441.187,00 yang merupakan rekodefikasi 1 unit gedung menjadi 4 unit gedung di Bapas Ciangir dan 1 buah Pagar Permanen menjadi 1 unit gedung, 1 buah pagar permanen, dan 1 bidang Jalan Akses di Open Camp Ciangir
 - Rutan Labuhan Deli sebesar Rp20.359.606.684,00 yang merupakan rekodefikasi 1 unit Gedung Rutan menjadi 1 unit Bangunan Rutan, 1 unit Rumah Genset, dan 1 buah Pagar Permanen
 - LPP Bengkulu sebesar Rp14.439.005.850,00 yang merupakan rekodefikasi pembangunan gedung kantor menjadi beberapa gedung yang sesuai dengan kondisi di lapangan
 - Lapas Mataram sebesar Rp13.524.822.750,00 yang merupakan pemecahan NUP dari penyelesaian pembangunan blok hunian menjadi Blok Hunian, Dapur, Tempat Ibadah, dan Pagar
- h. Koreksi Pencatatan senilai Rp53.318.918.522,00 diantaranya terdapat pada:
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp23.511.254.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap Gedung Parkir di gedung Sentra Mulia yang sudah diserahkan ke Ditjen Imigrasi pada tahun 2013 serta rumah dinas di BPSDM yang sudah terkena pengusuran proyek jalan tol Cijago
 - Cabrut Calang sebesar Rp8.952.930.678,00 yang merupakan tindak lanjut Barang Tidak Ditemukan kategori Kesalahan Kodefikasi
 - LPKA Batam sebesar Rp4.438.751.220,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap Barang Tidak Ditemukan (BTD) hasil revaluasi tahun 2019 berupa Gedung Rutan dan Rumah Negara yang berubah kategori menjadi Barang Berlebih
 - Lapas Batu sebesar Rp3.670.361.500,00 yang merupakan renovasi gedung lapas yang merupakan GRBB dari PT. Holcim
 - Lapas Terbuka Jakarta sebesar Rp3.460.235.746,00 yang merupakan koreksi terhadap pencatatan gedung parkir yang tadinya terpisah kemudian dijadikan satu dengan gedung kantor
- i. Koreksi Kurang Revaluasi senilai Rp1.481.300.942.234,00 terdiri dari :
- Koreksi Penilaian Kembali BMN senilai Rp1.500.203.166,00 , merupakan pengurangan nilai bangunan dari perekaman nilai koreksian (menjadi nilai wajar) hasil penilaian yang terbit dalam LHIP tahun 2019. Transaksi ini diantaranya terdapat pada :
 - Lapas Siborong-borong sebesar Rp794.299.636,00
 - Lapas Panyabungan sebesar Rp421.801.530,00
 - Lapas Palopo sebesar Rp242.624.000,00
 - Kanim Tembilahan sebesar Rp41.478.000,00
 - Koreksi Kesalahan input IP senilai Rp898.414.367.604,00 , merupakan penyesuaian hasil penilaian (nilai wajar) **barang ditemukan** tahun 2017/2018 menjadi hasil penilaian baru tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Penilai KPKNL, dalam artian nilai wajar baru lebih rendah dari nilai wajar sebelumnya. Penyesuaian tersebut mengurangi nilai bangunan pada periode tahun 2019. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada :
 - Lapas Gunung Sindur sebesar Rp89.185.753.000,00
 - Lapas Pekalongan sebesar Rp73.681.599.000,00
 - BPSDM sebesar Rp69.079.366.000,00

- Lapas Manado sebesar Rp52.815.210.000,00
- Lapas Salemba sebesar Rp52.414.139.000,00
- Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi senilai Rp1.552.234.771,00 merupakan nilai penyusutan transaksional atas koreksi reval tahun 2019. Transaksi ini diantaranya terdapat pada :
 - Lapas Siborong-borong sebesar Rp410.136.364,00
 - Lapas Gunung Sitoli sebesar Rp355.114.736,00
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp271.013.574,00
 - Lapas Panyabungan sebesar Rp196.958.470,00
 - Kanim Batam sebesar Rp104.339.288,00
- Koreksi revaluasi berupa Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang tidak ditemukan senilai Rp17.897.294.687,00 merupakan transaksi yang mengeliminir nilai koreksian sebelumnya (LHIP 2017/2018), dimana pada pelaksanaan revaluasi ulang tahun 2019 atas BMN obyek reval tersebut semula barang ditemukan menjadi barang tidak ditemukan (BTD) sesuai dengan LHIP Tahun 2019.
Transaksi ini diantaranya terdapat pada :
 - LPKA Palembang sebesar Rp5.667.041.129,00
 - Lapas Bekasi sebesar Rp3.161.456.313,00
 - Lapas Medan sebesar Rp2.894.192.100,00
 - Lapas Yogyakarta sebesar Rp2.020.167.817,00
 - LPKA Batam sebesar Rp870.451.484,00
- Koreksi revaluasi berupa koreksi manual transfer masuk senilai Rp301.142.000,00 , merupakan penambahan nilai gedung dari perekaman koreksi revaluasi secara manual pada satker penerima barang dimana BMN tersebut merupakan obyek reval di tahun 2019. Transaksi ini terdapat pada LPP Pekanbaru, dimana LPP Medan menerima sejumlah gedung dari LPKA Pekanbaru yang mengalami penurunan nilai wajar pada tahun 2019.
- Koreksi revaluasi berupa Koreksi BMN ditemukan Kembali senilai Rp2.206.137.667,00 merupakan pengurangan nilai bangunan, dimana terdapat kondisi pada LHIP sebelumnya tahun 2017/2018 atas BMN tersebut terlapor sebagai barang tidak ditemukan (BTD), namun ketika dilakukan revaluasi ulang tahun 2019 atas BMN tersebut diketahui ditemukan kembali (barang ditemukan).. Transaksi ini terdapat pada Lapas Gunung Sitoli.
- Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi senilai Rp480.888.793,00 merupakan penambahan nilai bangunan hasil dari eliminir nilai koreksi reval (menjadi nilai wajar) dalam LHIP 2017/2018. Dan pada LHIP tahun 2019 diketahui bahwa dilakukan proses penyesuaian kode barang melalui reklasifikasi hasil inventarisasi. Transaksi ini terdapat pada Rutan Enrekang sebesar Rp314.381.262 dan Lapas Panyabungan sebesar Rp166.507.531.
- Koreksi revaluasi berupa penyesuaian hasil penilaian (nilai wajar) Barang Berlebih tahun 2017/2018 menjadi hasil penilaian baru tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Penilai KPKNL, dalam artian nilai wajar baru lebih rendah dari nilai wajar sebelumnya. Penyesuaian tersebut mengurangi nilai Gedung dan Bangunan pada periode tahun 2019 senilai

Rp411.762.524.000,00. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada :

- LPP Malang sebesar Rp390.536.984.000,00
- Rutan Jakpus sebesar Rp6.068.613.000,00
- Lapas Pematang Siantar sebesar Rp3.599.577.000,00
- Lapas Palembang sebesar Rp2.649.272.000,00
- Lapas Malang sebesar Rp2.013.477.000,00

- Koreksi revaluasi berupa koreksi ekuitas senilai Rp517.799.000,00 merupakan penambahan nilai atas perekaman koreksi manual akibat dari transaksi lanjutan berupa reklasifikasi/transfer yang terjadi di tahun 2017/2018 namun atas BMN obyek reval tersebut mengalami penurunan nilai wajar sehingga perlu dilakukan penyesuaian pula pada perekaman barang barunya (hasil reklasifikasi/transfer).

Transaksi tersebut terdapat pada:

- Rudenim Tanjungpinang sebesar Rp287.828.000,00
- Rutan Soasiu sebesar Rp194.792.000,00
- Lapas Denpasar sebesar Rp16.855.000,00
- Kanim Bengkalis sebesar Rp14.312.000,00
- Kanim Palopo sebesar Rp2.993.000,00
- Kanim Balikpapan sebesar Rp1.019.000,00

- Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi senilai Rp2.850.433.928,00 merupakan transaksi yang terkait penyesuaian kodefikasi barang sebelum dilakukan penilaian, yang terdapat pada :

- Lapas Siborong-borong sebesar Rp1.289.000.000,00
- Lapas Panyabungan sebesar Rp862.300.000,00
- Kanwil NTT sebesar Rp472.718.750,00
- Rutan Enrekang sebesar Rp115.354.178,00
- Bapas Sumbawa Besar sebesar Rp111.061.000,00

- Koreksi revaluasi senilai Rp62.263.614.033,00 berupa pengurangan nilai terhadap obyek revaluasi yang dilakukan transfer keluar pada tahun 2019 sebelum dilakukan penilaian ulang pada tahun yang sama, dimana transaksi tersebut mengeliminir kenaikan nilai wajar pada satker pengirim. Transaksi tersebut terdapat pada Kanwil Sumut

- Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi senilai Rp376.778.910,00 merupakan koreksi reval atas hasil eliminir nilai koreksian pada LHIP tahun 2019, dimana atas BMN obyek reval tersebut telah dilakukan transaksi penghapusan.

Transaksi tersebut terdapat pada :

- Lapas Indramayu sebesar Rp314.922.000,00
- Rutan Dumai sebesar Rp39.829.000,00
- Kanim Palu sebesar Rp16.908.910,00
- Lapas Batu sebesar Rp3.049.000,00
- Kanim Dumai sebesar Rp2.070.000,00

- Koreksi revaluasi berupa Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi senilai Rp81.177.523.675,00 merupakan jenis transaksi yang mengeliminir koreksian nilai wajar pada tahun 2019, karena atas BMN obyek reval tersebut pada

tahun 2018 mengalami transaksi reklasifikasi keluar atau transfer keluar. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada :

- Kanwil Sumut sebesar Rp75.950.915.048,00
- Kanim Kupang sebesar Rp2.380.602.999,00
- Kanwil Maluku sebesar Rp1.246.286.628,00
- Lapas Purwokerto sebesar Rp662.873.000,00
- LPP Bandar Lampung sebesar Rp335.602.000,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp99.520.892.828,00

C.16. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp99.520.892.828,00 dan Rp74.628.773.346,00. Rincian nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 87
Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	9.163.589.000,00	10.074.424.977,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	857.380.960,00	857.380.960,00
Ditjen Pemasyarakatan	51.098.806.549,00	33.415.584.354,00
Ditjen Imigrasi	28.036.971.326,00	28.528.018.312,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	968.500.000,00	968.500.000,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	9.395.644.993,00	3.051.171.300,00
Konsolidasi Kemenkumham	0,00	(2.266.306.557,00)
Total	99.520.892.828,00	74.628.773.346,00

Pada periode Tahunan 2019 (*Unaudited*) nilai Jalan dan Irigasi pada Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan sebagai dampak dari pemantauan Ditjen Perbendaharaan yang menyatakan bahwa belum seluruh satker menginput hasil rerevaluasi ke Aplikasi SIMAK BMN. Perubahan nilai akibat koreksi hasil rerevaluasi tersebut terdapat pada Lapas Ternate dan Kanim Palu untuk akun Jalan serta Bapas Sumbawa Besar untuk akun Irigasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 88
Koreksi Lebih/Kurang Catat *Unaudited* Jalan berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited I	Koreksi		Unaudited II
			Tambah	Kurang	
1	Lapas Ternate	916.677.000,00		530.231.000,00	386.446.000,00
2	Kanim Palu	36.105.000,00		14.114.000,00	21.991.000,00
JUMLAH			0,00	544.345.000	

Tabel 89
Koreksi Lebih/Kurang Catat Unaudited Irigasi berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited I	Koreksi		Unaudited II
			Tambah	Kurang	
1	Bapas Sumbawa Besar	0,00	14.333.000,00		14.333.000,00

Sehingga secara total, perubahan nilai Jalan dan Irigasi dalam periode Tahunan 2019 (Unaudited) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 90
Perubahan Nilai Jalan dan Irigasi dari Unaudited I menjadi Unaudited II
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited I	Koreksi		Unaudited II
		Tambah	Kurang	
Jalan	47.962.985.374,00		544.345.000,00	47.418.640.374,00
Irigasi	14.222.994.819,00	14.333.000,00		14.237.327.819,00

Dalam Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 terdapat koreksi nilai irigasi atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu terdapat koreksi irigasi berupa perubahan nilai revaluasi tahun 2019 pada Cabrut Sipirok berupa koreksi kurang senilai Rp77.202.000,00, sehingga secara total nilai Irigasi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 91
Perubahan Nilai Irigasi dari Unaudited II menjadi Audited
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited	Koreksi		Audited I
		Tambah	Kurang	
Irigasi	14.237.327.819,00		77.202.000,00	14.160.125.819,00

Setelah Laporan Audited 2019 diserahkan kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 21 April 2020, terdapat Temuan Pemeriksaan dari BPK LKPP terhadap satuan kerja Lapas Narkotika Sawah Lunto yang belum melakukan perekaman transaksi revaluasi terkait Barang Berlebih, sehingga dilakukan koreksi tambah pada satuan kerja Lapas Narkotika Sawah Lunto senilai Rp100.221.000,00,

sehingga secara total nilai Irigasi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 92
Perubahan Nilai Irigasi dari Audited I menjadi Audited II
Per 31 Desember 2019

Uraian	Audited I	Koreksi		Audited II
		Tambah	Kurang	
Irigasi	14.160.125.819,00	100.221.000,00		14.260.346.819,00

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 93
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2018	74.628.773.346,00
Mutasi tambah :	
Koreksi Take In Revaluasi	2.266.306.557,00
Pembelian	152.406.000,00
Transfer Masuk	1.793.558.195,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	559.093.885,00
Reklasifikasi Masuk	13.233.917.888,00
Perolehan Lainnya	176.380.000,00
Koreksi Tambah Revaluasi BMN	18.035.766.640,00
Total Mutasi Tambah :	36.217.429.165,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	144.044.318,00
Transfer Keluar	1.793.558.195,00
Reklasifikasi Keluar	830.016.885,00
Koreksi Pencatatan	7.225.334.645,00
Koreksi Kurang Revaluasi BMN	1.332.355.640,00
Total Mutasi Kurang :	11.325.309.683,00
Saldo per 31 Desember 2019	99.520.892.828,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	48.137.670.513,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	51.383.222.315,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

• **Mutasi Tambah**

- Pembelian senilai Rp152.406.000,00 terdapat pada Kanim Bekasi berupa Instalasi Komputer dan Jaringan Telepon Lainnya.
- Transfer Masuk sebesar Rp1.793.558.195,00 terdapat pada :
 - Lapas Terbuka Jakarta senilai Rp1.211.310.195,00 berupa nilai atas pembangunan Jalan Komplek pada open camp Ciangir.

- Bapas Sorong senilai Rp363.205.000,00 berupa Bangunan Penguat Tebing/Pantai Rp274.854.000,00 dan Bangunan Pembuang Air Kotor Lainnya Rp88.351.000,00.
- LPKA Jakarta senilai Rp219.043.000,00 berupa bangunan pintu air/klep dari Lapas Terbuka Jakarta.
- c. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp559.093.885,00 terdapat pada Rutan Ruteng berupa penyelesaian proyek sumur bor.
- d. Reklasifikasi Masuk senilai Rp13.233.917.888,00 terdapat pada :
 - BPSDM senilai Rp5.693.265.693,00 berupa Jalan Khusus Kompleks NUP 2, yang semula tercatat satu kesatuan dengan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 7.
 - Sekretariat Jenderal senilai Rp5.535.003.000,00 berupa kesalahan kodefikasi dari Cubikal NUP 1 menjadi Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang NUP 1.
 - Ditjen Pemasarakatan senilai Rp1.211.310.195,00 berupa pembangunan jalan pada open camp Ciangir yang semula tercatat sebagai satu kesatuan pembangunan gedung dan bangunan.
 - LPKA Mamuju senilai Rp523.416.000,00 berupa saluran drainage yang semula tercatat menjadi satu kesatuan dengan Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan Lainnya NUP 1.
 - Kanim Muara Enim senilai Rp270.923.000,00 berupa Jembatan Pada Jalan Khusus Kompleks.
- e. Perolehan Lainnya senilai Rp176.830.000,00 terdapat pada Lapas Permisan berupa tandon air dari GRBB Holcim.
- f. Koreksi Tambah Revaluasi BMN senilai Rp18.035.766.640,00 diantaranya terdiri dari
 - Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi senilai Rp159.480.280,00 merupakan transaksi yang terkait penyesuaian kodefikasi barang sebelum dilakukan penilaian. Transaksi ini terdapat pada Rutan Enrekang senilai Rp48.419.280,00 dan Bapas Sumbawa Besar Rp111.061.000,00
 - Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi senilai Rp10.443.440.000,00 merupakan Koreksi revaluasi berupa penambahan nilai dari perekaman barang berlebih, BMN berupa bangunan yang belum pernah tercatat berdasarkan LHIP Tahun 2019. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada :
 - Ditjen Pemasarakatan senilai Rp10.289.886.000,00
 - Lapas Narkotika Sawah Lunto senilai Rp100.221.000,00
 - Rutan Sidikalang senilai Rp29.785.000,00
 - Cabrut Muntok senilai Rp13.548.000,00
 - Koreksi Penilaian Kembali BMN senilai Rp65.815.360,00 merupakan penambahan nilai bangunan dari perekaman nilai koreksian (menjadi nilai wajar) hasil penilaian yang terbit dalam LHIP tahun 2019. Transaksi tersebut terdapat pada Rutan Enrekang.
 - Koreksi Kesalahan input IP senilai Rp6.681.384.000 merupakan penyesuaian hasil penilaian (nilai wajar) **barang ditemukan** tahun 2017/2018 menjadi hasil penilaian baru tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Penilai KPKNL,

dalam artian nilai wajar baru lebih tinggi dari nilai wajar sebelumnya. Penyesuaian tersebut menambah nilai gedung pada periode tahun 2019. Transaksi tersebut terdapat pada :

- Ditjen Pemasyarakatan senilai Rp5.935.178.000,00
- BPSDM senilai Rp659.922.000,00
- Lapas Jombang senilai Rp29.842.000,00
- Rutan Siak Sri Indrapura senilai Rp25.832.000,00
- Lapas Tanjung Balai Asahan senilai Rp24.426.000,00

- Koreksi revaluasi berupa penyesuaian hasil penilaian (nilai wajar) Barang Berlebih tahun 2017/2018 menjadi hasil penilaian baru tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Penilai KPKNL, dalam artian nilai wajar baru lebih tinggi dari nilai wajar sebelumnya. Penyesuaian tersebut menambah nilai Gedung dan Bangunan pada periode tahun 2019 senilai Rp695.647.000,00 yang terdapat pada :

- Lapas Malang senilai Rp417.539.000,00
- Lapas Narkotika Sawah Lunto senilai Rp148.649.000,00
- Lapas Cilacap senilai Rp90.055.000,00
- Lapas Tulungagung senilai Rp16.128.000,00
- Lapas Permisan senilai Rp15.714.000,00

- **Mutasi Kurang**

- a. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp144.044.318,00 terdapat pada Kanim Bekasi berupa Instalasi Penangkal Petir Manual, Instalasi Generating Set, Instalasi Komputer, Instalasi Lain-lain dan Jaringan Listrik Lainnya.
- b. Transfer Keluar senilai Rp1.793.588.195,00 terdapat pada :
 - Ditjen Pemsyarakatan senilai Rp1.211.310.195,00 berupa Jalan Khusus Kompleks ke Lapas Terbuka Jakarta (open camp Ciangir).
 - Kanwil Papua Barat (Setjen) senilai Rp363.205.000,00 berupa Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam Rp274.854.000,00 dan Bangunan Air Kotor Rp88.351.000,00.
 - Lapas Terbuka Jakarta senilai Rp219.043.000,00 berupa Bangunan Pintu Air/Klep ke LPKA Jakarta.
- c. Reklasifikasi Keluar senilai Rp830.016.885,00 terdapat pada:
 - Rutan Ruteng senilai Rp559.093.885,00 yang merupakan tindak lanjut kesalahan pencatatan Irigasi yang semula dicatat sebagai Sumur Dengan Pompa NUP 1-7 kemudian direklas menjadi Sumur Pemboran Air NUP 1.
 - Kanim Muara Enim senilai Rp270.923.000,00 berupa Bangunan Penguat Tebing/Pantai.
- d. Koreksi Pencatatan senilai Rp7.225.334.645,00 terdapat pada:
 - Satker Sekretariat Jenderal senilai Rp6.062.896.977,00 merupakan koreksi terhadap selokan dan talang yang terkena pelebaran proyek jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago)
 - Lapas Muara Tewe senilai Rp305.950.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap kesalahan pencatatan Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil yang nilainya ditambahkan ke Bangunan Gedung Kantor Permanen.
 - Rudenim Kupang senilai Rp245.353.668,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap kesalahan pencatatan Sumur Bor NUP 1 perolehan Tahun 2018 dan dilakukan pemecahan menjadi Stasionary Water Pump NUP 1 senilai

- Rp174.740.668,00 dan menambah nilai Bangunan Gedung Lainnya NUP 1 senilai Rp70.613.000,00.
- Kanim Padang senilai Rp198.550.000,00 berupa Instalasi lain-lain yang merupakan jaringan penambah daya listrik.
 - Lapas Permisan senilai Rp176.380.000,00 berupa koreksi tendon air GRBB Holcim menambah nilai gedung.
- e. Koreksi Kurang Revaluasi BMN senilai Rp1.332.355.640,00 di antaranya terdiri dari :
- Koreksi Penilaian Kembali BMN senilai Rp77.292.324,00 merupakan penambahan nilai bangunan dari perekaman nilai koreksian (menjadi nilai wajar) hasil penilaian yang terbit dalam LHIP tahun 2019. Transaksi tersebut terdapat pada Bapas Sumbawa Besar.
 - Koreksi Kesalahan input IP senilai Rp6.681.384.000,00 merupakan penyesuaian hasil penilaian (nilai wajar) **barang ditemukan** tahun 2017/2018 menjadi hasil penilaian baru tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Penilai KPKNL, dalam artian nilai wajar baru lebih rendah dari nilai wajar sebelumnya. Penyesuaian tersebut mengurangi nilai Jalan dan Irigasi pada periode tahun 2019. Transaksi tersebut terdapat pada :
 - Lapas Ternate senilai Rp530.231.000,00
 - Lapas Warung Kiara senilai Rp326.307.000,00
 - Lapas Pamekasan senilai Rp176.114.000,00
 - Lapas Nabire senilai Rp119.731.000,00
 - Kanwil Bangka Belitung (Setjen) senilai Rp19.737.000,00
 - Lapas Kuala Tungkal senilai Rp18.670.000,00
 - Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi senilai Rp28.126.316,00 merupakan nilai penyusutan transaksional atas koreksi reval tahun 2019. Transaksi ini terdapat pada Bapas Sumbawa Besar senilai Rp19.435.676,00 dan Rutan Enrekang senilai Rp8.690.640,00
 - Koreksi revaluasi berupa penyesuaian hasil penilaian (nilai wajar) Barang Berlebih tahun 2017/2018 menjadi hasil penilaian baru tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Penilai KPKNL, dalam artian nilai wajar baru lebih rendah dari nilai wajar sebelumnya. Penyesuaian tersebut mengurangi nilai Gedung dan Bangunan pada periode tahun 2019 senilai Rp78.403.000,00. Transaksi tersebut terdapat pada :
 - Cabrut Sipirok senilai Rp77.202.000,00
 - Rutan Menggala senilai Rp1.201.000,00

Aset Tetap Lainnya
Rp29.342.783.620,00

C.17. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk ke dalam aset tetap lainnya adalah aset tetap dalam renovasi. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp29.342.783.620,00 dan Rp68.218.739.768,00.

Rincian nilai Aset Tetap Lainnya berdasarkan unit Eselon I ialah sebagai berikut:

Tabel 94
Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Aset Tetap lainnya	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	6.303.283.740,00	36.202.560.725,00
Inspektorat Jenderal	26.057.824,00	26.057.824,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	546.432.711,00	359.982.711,00
Ditjen Pemasyarakatan	11.022.908.119,00	11.080.264.953,00
Ditjen Imigrasi	3.679.764.648,00	10.342.907.542,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	2.062.889.242,00	4.564.158.176,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	413.755.982,00	413.755.982,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	526.914.963,00	526.914.963,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	1.575.124.449,00	1.516.484.950,00
Balitbang Hukum dan HAM	213.007.945,00	213.007.945,00
BPSDM Hukum dan HAM	2.972.643.997,00	2.972.643.997,00
Total	29.342.783.620,00	68.218.739.768,00

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 95
Rincian Transaksi Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2018	68.218.739.768,00
Mutasi tambah :	
Pembelian	14.148.337.627,00
Transfer Masuk	2.331.539.474,00
Hibah Masuk	11.900.000,00
Reklasifikasi Masuk	42.000.000,00
Perolehan Lainnya	86.350.000,00
Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Tetap	272.429,00
Total Mutasi Tambah :	16.620.399.530,00
Mutasi Kurang :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3.147.609.193,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	15.215.200,00
Hibah Keluar	43.549.000,00
Reklasifikasi Keluar	71.165.228,00
Transfer Keluar	24.471.651.344,00
Koreksi Pencatatan	27.747.165.713,00
Total Mutasi Kurang :	55.496.355.678,00
Saldo per 31 Desember 2019	29.342.783.620,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	5.467.887.245,00

Nilai Buku per 31 Desember 2019	23.874.896.375,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

• **Mutasi Tambah**

- a. Pembelian senilai Rp14.148.337.627,00 di antaranya terdapat pada:
 - Satker Ditjen AHU senilai Rp11.255.558.646,00 merupakan ATR revitalisasi bangunan weeskamer di Semarang, renovasi Rumah Dinas Sekretaris Ditjen AHU dan perbaikan bangunan Balkesmas Sekretariat Jenderal dan BHP Surabaya.
 - Satker Ditjen Kekayaan Intelektual senilai Rp2.046.083.881,00 merupakan penataan ruang kantor di Gedung Sentra Mulia(ATR).
 - Ditjen Pemasarakatan senilai Rp239.969.000,00 merupakan pembangunan pagar keliling pada Rutan Tangerang.
 - Satker Ditjen AHU senilai Rp186.450.000,00 merupakan ukiran kayu.
 - LPKA Kendari senilai Rp55.750.000,00 merupakan (ATL)
- b. Transfer Masuk senilai Rp2.331.539.474,00 di antaranya terdapat pada:
 - Satker Ditjen Hak Asasi Manusia senilai Rp1.435.500.000,00 yang merupakan penerimaan transfer masuk dari Sekretariat Jenderal berupa Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi berupa perbaikan 3 unit Lift.
 - LPKA Jakarta senilai Rp753.317.484,00 berupa alat band, monografi, dan alat musik daerah dari Lapas Terbuka Jakarta.
 - Kanwil Sumatera Barat (DIPA SETJEN) senilai Rp22.000.000,00 berupa monografi dari Kanwil Sumatera Barat (DIPA BPHN).
 - Kanwil NTB (DIPA Setjen) senilai Rp19.419.000,00 berupa buku dari Kanwil NTB (DIPA BPHN).
 - Kanwil Aceh (DIPA Setjen) senilai Rp14.991.900,00
- c. Hibah Masuk senilai Rp11.900.000,00 terdapat pada Rutan Purworejo berupa alat musik dari Koperasi KPPRI-KPPDK dan HAM
- d. Reklasifikasi Masuk senilai Rp42.000.000,00 terdapat pada :
 - Lapas Serang senilai Rp32.000.000,00 berupa Peralatan Studio Lainnya menjadi Alat Musik Modern/Band, Keyboard menjadi Alat Musik Modern/Band.
 - Kanwil Riau (DIPA BPHN) senilai Rp10.000.000,00 berupa monografi.
- e. Perolehan Lainnya senilai Rp86.350.000,00 terdapat pada Lapas Permisan berupa alat musik dari GRBB Holcim.
- f. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap senilai Rp272.429,00 terdapat pada Kanim Banda Aceh yang merupakan penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan.

• **Mutasi Kurang**

- a. Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya senilai Rp3.147.609.193,00 di antaranya terdapat pada:
 - Kanim Bekasi senilai Rp2.566.018.283,00 berupa Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi Rp2.509.018.283 dan Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi Rp56.894.000 (akan di hibahkan ke Pemkot Bekasi).
 - Kanim Bekasi senilai Rp197.597.000,00 berupa Barang Bercorak Kesenian

- Lainnya.
- Lapas Cilegon senilai Rp82.200.000,00 berupa penghentian penggunaan Maket/Replika Gedung Bangunan Lapas kondisi rusak berat.
 - Kanwil DKI Jakarta (DIPA Setjen) senilai Rp79.226.840,00 merupakan penghentian penggunaan barang karena kondisi rusak berat dan akan diusulkan untuk dihapuskan, berupa monografi.
 - Kanwil NTB (DIPA Setjen) senilai Rp56.856.042,00 berupa penghentian buku kondisi rusak berat berdasarkan surat no : W21.PB.01.02-376 tanggal 3 September 2019.
- b. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp15.215.200,00 terdapat pada Ditjen Kekayaan Intelektual berupa ATR yang membentuk peralatan dan mesin (lemari kayu dan door lock control system).
- c. Hibah Keluar senilai Rp43.549.000,00 terdapat pada Kanim Kerinci berupa Aset Tetap Renovasi ke Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- d. Reklasifikasi Keluar senilai Rp71.165.228,00 terdapat pada:
- Kanim Semarang senilai Rp59.372.000,00 berupa backdrop dan panel layanan dari gedung lama menjadi alat kantor lainnya.
 - Kanwil Riau (DIPA BPHN) senilai Rp10.000.000,00 berupa monografi.
 - Lapas Kotabumi senilai Rp1.500.000,00 berupa kesalahan pencatatan alat olahraga namun tercatat monografi.
 - Lapas Sukamiskin senilai Rp293.228,00 berupa reklas 3 NUP monografi menjadi alat rumah tangga lainnya (home use).
- e. Transfer Keluar senilai Rp24.471.651.344,00 terdapat pada:
- Satker Ditjen AHU senilai Rp11.255.558.646,00 berupa ATR ke satker Sekretariat Jenderal, BHP Semarang dan BHP Surabaya.
 - Satker Ditjen Kekayaan Intelektual senilai Rp4.532.137.615,00 berupa ATR ke Ditjen Imigrasi.
 - Satker Sekretariat Jenderal Rp3.820.799.000,00 berupa perbaikan lift pada Ditjen HAM Rp1.435.500.000 dan Renovasi Gedung dan Bangunan BPHN Rp2.385.299.000.
 - Satker Ditjen Imigrasi senilai Rp3.727.147.609,00 merupakan transfer keluar atas pencatatan Aset Tetap Renovasi (ATR) ke BPSDM Hukum dan HAM berupa renovasi gedung Politeknik Imigrasi senilai Rp3.370.235.609,00 berdasarkan BA Nomor IMI.1-PB.06.04-3.950 Tanggal 12 April 2019 dan renovasi gedung dan bangunan senilai Rp356.912.000,00 ke Kanim Palu berdasarkan BA Nomor : IMI.1-PL.04.01-3.1434 Tanggal 27 Juni 2019.
 - Lapas Terbuka Jakarta senilai Rp753.317.484,00 berupa alat band, monografi dan alat musik daerah ke LPKA Jakarta.
- f. Koreksi Pencatatan senilai Rp27.747.165.713,00 terdapat pada:
- Satker Sekretariat Jenderal senilai Rp26.044.114.913,00 merupakan koreksi atas renovasi sejumlah aset di satker yang menggunakan DIPA Setjen dan telah selesai di bawah tahun 2015
 - Satker Ditjen Hak Asasi Manusia senilai Rp1.435.500.000,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan perbaikan 3 unit Lift .
 - Kanim Singaraja senilai Rp197.000.000,00 berupa ATR Bangunan yang salah catat, seharusnya pembangunan gedung kanim.
 - Lapas Madiun senilai Rp60.590.800,00 berupa Bahan Perpustakaan Tercetak

Lainnya (Buku Perpustakaan).

- Lapas Anak Kotabumi senilai Rp9.900.000,00 berupa buku bacaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan **C.18. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)**

Pengerjaan

Rp217.154.025.040,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp217.154.025.040,00 dan Rp722.754.577.352,00.

Rincian nilai KDP berdasarkan unit Eselon I ialah sebagai berikut :

Tabel 96
Rincian Nilai KDP Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	14.935.206.525,00	22.147.421.075,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	156.734.719.952,00	595.653.263.329,00
Ditjen Imigrasi	32.488.337.279,00	54.703.044.348,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	12.995.761.284,00	187.874.500,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	50.062.974.100,00
TOTAL	217.154.025.040,00	722.754.577.352,00

Dalam Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 terdapat koreksi KDP atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu terdapat kelebihan pembayaran dalam pekerjaan pembangunan gedung kantor Kanim Bima berupa koreksi kurang senilai Rp5.558.458.273,00. Sehingga secara total, nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 97
Perubahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Unaudited menjadi Audited
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited	Koreksi		Audited
		Tambah	Kurang	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	222.712.483.313,00		5.558.458.273,00	217.154.025.040,00

Rincian Mutasi KDP disajikan dalam tabel disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 98
Rincian Mutasi KDP

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2018	722.754.577.352,00
Mutasi tambah :	
Saldo Awal KDP	164.216.250
Perolehan/Penambahan KDP	8.881.780.390
Pengembangan KDP	626.542.466.030
Koreksi Nilai KDP	49.083.120.100
Total Mutasi Tambah :	684.671.582.770,00
Mutasi Kurang :	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.011.033.893.424
Pengembangan Melalui KDP	117.828.510.806
Koreksi Nilai KDP	12.084.442.002
Penghapusan/Penghentian KDP	49.325.288.850
Total Mutasi Kurang :	1.190.272.135.082,00
Saldo per 31 Desember 2019	217.154.025.040,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

• **Mutasi Tambah**

- a. Saldo Awal KDP senilai Rp164.216.250,00 terdapat pada Kanim Batam yang merupakan penginputan ulang KDP yang sudah dihapuskan pada tahun 2018 namun tidak melalui Sekretariat Jenderal, sehingga harus dilakukan penginputan ulang dan mengajukan usulan Penghapusan ulang ke Setjen.
- b. Perolehan/Penambahan KDP merupakan penambahan nilai KDP dari adanya pembangunan atau perbaikan aset yang umumnya adalah berupa gedung dan bangunan yang pekerjaannya dilakukan secara bertahap serta pembayaran yang dibagi kedalam beberapa termin. Adapun perolehan/penambahan KDP senilai Rp8.881.780.390,00 diantaranya terdapat pada:
 - Satker Ditjen Imigrasi senilai Rp1.007.034.500,00
 - Kanim Sorong senilai Rp701.106.000,00
 - Satker BPSDM senilai Rp449.903.000,00
 - Rutan Siak Sri Indrapura senilai Rp434.031.675,00
 - Rutan Perempuan Bandungan senilai Rp380.424.440,00
- c. Pengembangan KDP merupakan penambahan nilai KDP sebagai kelanjutan dari termin perolehan KDP serta termin-termin selanjutnya sampai KDP tersebut selesai. Adapun pengembangan KDP senilai Rp626.542.466.030,00 diantaranya terdapat pada:
 - Kanim Bogor senilai Rp43.702.166.761,00
 - Lapas Mataram senilai Rp37.223.931.100,00
 - Lapas Perempuan Jayapura senilai Rp35.569.239.827,00
 - Kanim Balikpapan senilai Rp29.091.874.066,00
 - LPKA Jayapura senilai Rp26.845.587.312,00

- d. Koreksi Nilai KDP senilai Rp49.083.120.100 terdapat pada Satker BPSDM senilai Rp49.083.120.100.

• **Mutasi Kurang**

- a. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP merupakan perolehan baru aset (KDP menjadi aset definitif) yang telah selesai proses pembangunannya melalui mekanisme KDP atau telah selesai 100% pekerjaan fisiknya, dan dalam hal ini biasanya pencairan dananya melalui beberapa termin pembayaran. Adapun Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp1.011.033.893.424,00 diantaranya terdapat pada:
- Satker Ditjen Pemasyarakatan senilai Rp496.891.366.987,00
 - Kanim Balikpapan senilai Rp78.141.977.589,00
 - Kanim Bogor senilai Rp45.857.990.761,00
 - Satker BPSDM senilai Rp41.821.258.350,00
 - Lapas Perempuan Jayapura senilai Rp35.582.607.827,00
- b. Pengembangan Melalui KDP merupakan penyelesaian atas pengembangan aset melalui KDP yang sudah dimiliki menjadi aset definitifnya. Adapun Pengembangan Melalui KDP senilai Rp117.828.510.806 diantaranya terdapat pada:
- Lapas Sukamiskin senilai Rp10.679.075.000,00
 - Satker Ditjen Imigrasi senilai Rp10.065.611.795,00
 - Lapas Bulukumba senilai Rp9.967.000.100,00
 - Kanim Pamekasan senilai Rp9.226.935.765,00
 - Satker BPSDM senilai Rp9.161.521.750,00
- c. Koreksi Nilai KDP senilai Rp12.084.442.002,00 terdapat pada:
- Kanim Bima senilai Rp5.558.458.273,00
 - Satker Ditjen Pemasyarakatan senilai Rp1.882.407.398,00
 - Ditjen KI senilai Rp1.701.471.016,00
 - LPKA Kendari senilai Rp1.406.560.000,00
 - Rutan Takengon senilai Rp788.798.640,00
- d. Penghapusan/Penghentian KDP senilai Rp49.325.288.850,00 terdapat pada:
- Satker BPSDM senilai Rp49.083.120.100,00
 - Kanim Batam senilai Rp164.216.250,00
 - Kanim Mataram senilai Rp57.952.500,00
 - Satker Ditjen KI senilai Rp20.000.000,00

Akumulasi Penyusutan C.19. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Aset Tetap

(Rp6.273.137.327.181,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar (Rp6.273.137.327.181,00) dan (Rp6.786.047.821.180,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan masa manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019.

Tabel 99
Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Aset Tetap	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7.398.289.284.727,00	5.208.649.428.511,00	2.189.639.856.216,00	6.680.447.076.850,00	4.407.498.695.412,00	2.272.948.381.438,00
2	Gedung dan Bangunan	11.958.064.335.324,00	1.010.882.340.912,00	10.947.181.994.412,00	10.457.963.798.623,00	2.323.816.547.094,00	8.134.147.251.529,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	99.520.892.828,00	48.137.670.513,00	51.383.222.315,00	74.628.773.346,00	48.688.864.957,00	25.939.908.389,00
4	Aset Tetap Lainnya	29.342.783.620,00	5.467.887.245,00	23.874.896.375,00	68.218.739.768,00	6.043.713.717,00	62.175.026.051,00
Jumlah		19.485.217.296.499,00	6.273.137.327.181,00	13.212.079.969.318,00	17.281.258.388.587,00	6.786.047.821.180,00	10.495.210.567.407,00

Dalam Laporan Keuangan Audited Tahun 2019 terdapat perubahan nilai penyusutan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 100
Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited	Koreksi		Audited
			Tambah	Kurang	
1	Lapas Bengkulu	(7.253.626.245,00)	(3.965.500,00)		(7.257.591.745,00)
2	Lapas Kota Agung	(1.329.149.354,00)	(6.787.500,00)		(1.335.936.854,00)
3	Rutan Labuhan Deli	(3.548.943.385,00)		(118.778.805,00)	(3.430.164.580,00)
4	LPKA Blitar	(2.628.932.424,00)		(163.689.713,00)	(2.465.242.711,00)
5	LPKA Pekanbaru	(1.404.493.746,00)	(55.812.770,00)		(1.460.306.516,00)
6	Kanim Bogor	(11.653.761.532,00)	(510.464.049,00)		(12.164.225.581,00)
7	Kanim Dumai	(6.614.543.966,00)		(119.037.000,00)	(6.495.506.966,00)
JUMLAH			(577.029.819,00)	(401.505.518,00)	

Sehingga secara total, perubahan nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dalam periode Tahunan 2019 (*Audited*) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 101
Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dari Unaudited menjadi Audited Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited	Koreksi		Audited
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.208.473.904.210,00)	(577.029.819,00)	(401.505.518,00)	(5.208.649.428.511,00)

Pada periode Tahunan 2019 (*Unaudited*) nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan, sebagai berikut:

Tabel 102
Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited I	Koreksi		Unaudited II
			Tambah	Kurang	
1	Sekretariat Jenderal	(23.464.276.032,00)	(43.750,00)		(23.464.319.782,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2	Kanwil NTB (Setjen)	(699.827.136,00)	(13.803.268,00)		(713.630.404,00)
3	Ditjen AHU	(6.755.634.625,00)	(17.543,00)		(6.755.652.168,00)
4	Lapas Besi	(1.858.154.550,00)	(135.245.567,00)		(1.993.400.117,00)
5	Lapas Argamakmur	(3.987.949.747,00)	(2.664.199,00)		(3.990.613.946,00)
6	Lapas Yogyakarta	(1.624.071.594,00)	(64.158.068,00)		(1.688.229.662,00)
7	Rutan Sigli	(2.231.760.897,00)	(13.305.723,00)		(2.245.066.620,00)
8	Cabrut Blangkajeren	(62.419.244,00)	(11.664.420,00)		(74.083.664,00)
9	Bapas Pekanbaru	(152.983.122,00)	(3.178.053,00)		(156.161.175,00)
10	Lapas Denpasar	(3.592.056.326,00)	(2.154.026.297,00)		(5.746.082.623,00)
11	Bapas Mataram	(269.306.928,00)	(1.257.479,00)		(270.564.407,00)
12	Rutan Kefamenanu	(1.299.849.760,00)	(16.168.058,00)		(1.316.017.818,00)
13	Rutan Manna	(515.639.672,00)	(88.524.322,00)		(604.163.994,00)
14	Lapas Curup	(660.981.876,00)	(194.214.966,00)		(855.196.842,00)
15	Bapas Amuntai	(70.952.956,00)	(581.444,00)		(71.534.400,00)
16	Rupbasan Jakarta Pusat	(8.933.295,00)	(242.105,00)		(9.175.400,00)
17	Lapas Ternate	(2.805.056.004,00)	(431.316.697,00)		(3.236.372.701,00)
18	Lapas Narkotika Nusakambangan	(833.188.575,00)	(23.621,00)		(833.212.196,00)
19	Rupbasan Purwokerto	(441.544.550,00)	(26.064.045,00)		(467.608.595,00)
20	Rutan Bandar Lampung	(830.037.595,00)	(389.780.846,00)		(1.219.818.441,00)
21	Kanim Palopo	(26.968.645,00)	(54.418,00)		(27.023.063,00)
22	BPHN	(8.459.946.717,00)	(1.075.039.364,00)		(9.534.986.081,00)
23	Kanwil Sumut	(1.366.967.508,00)		(35.411.924,00)	(1.331.555.584,00)
24	Lapas Pemuda Plantungan	(203.922.417,00)		(22.578.865,00)	(181.343.552,00)
25	Lapas Langsa	(674.004.372,00)		(23.352.866,00)	(650.651.506,00)
26	Rutan Sanggau	(569.426.412,00)		(59.039,00)	(569.367.373,00)
27	Lapas Singkawang	(708.523.683,00)		(101.418,00)	(708.422.265,00)
28	Lapas Ketapang	(1.433.951.668,00)		(583.424,00)	(1.433.368.244,00)
29	Lapas Manado	(11.376.422.285,00)		(10.549.644.640,00)	(826.777.645,00)
30	Lapas Palopo	(1.927.079.276,00)		(41.527.956,00)	(1.885.551.320,00)
31	Lapas Kalabahi	(859.622.047,00)		(528.253,00)	(859.093.794,00)
32	Bapas Banjarmasin	(346.407.505,00)		(12.944.795,00)	(333.462.710,00)
33	Rutan Soasiu	(6.210.991.341,00)		(4.427.091,00)	(6.206.564.250,00)
34	Rutan Pontianak	(1.185.268.320,00)		(146.785,00)	(1.185.121.535,00)
35	Bapas Sumbawa Besar	(60.487.493,00)		(10.608.630,00)	(49.878.863,00)
36	Kanim Cirebon	(688.375.803,00)		(5.709.419,00)	(682.666.384,00)
37	Kanim Palu	(56.548.926,00)		(23.965.685,00)	(32.583.241,00)
38	Kanim Siak Sri Indrapura	(1.260.793.969,00)		(52.694.346,00)	(1.208.099.623,00)
JUMLAH			(4.621.374.253,00)	(10.784.285.136,00)	

Sehingga secara total, perubahan nilai Gedung dan Bangunan dalam periode Tahunan 2019 (Unaudited) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 103
Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dari Unaudited I menjadi Unaudited II
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited I	Koreksi		Unaudited II
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.053.820.116.449,00)	(4.621.374.253,00)	(10.784.285.136,00)	(1.047.657.205.566,00)

Dalam Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 terdapat koreksi nilai gedung dan bangunan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu sebagai berikut:

Tabel 104
Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited	Koreksi		Audited
			Tambah	Kurang	
1	Sekretariat Jenderal	(23.464.319.782,00)		(2.046.630,00)	(23.462.273.152,00)
2	Rutan Wonosari	(1.226.594.110,00)	(606.827.565,00)		(1.833.421.675,00)
3	Cabrut Bireun	(40.674.534.854,00)		(34.373.899.941,00)	(6.300.634.913,00)
4	Lapas Binjai	(4.355.369.344,00)	(1.355.900.873,00)		(5.711.270.217,00)
5	Lapas Kediri	(4.319.551.154,00)		(3.187.705.890,00)	(1.131.845.264,00)
6	Lapas Padang Sidempuan	(1.968.496.097,00)	(1.091.044.243,00)		(3.059.540.340,00)
7	Lapas Jember	(1.433.415.655,00)	(1.076.033.330,00)		(2.509.448.985,00)
8	Rutan Medan	(3.349.455.111,00)	(361.432.820,00)		(3.710.887.931,00)
9	Lapas Tabanan	(192.940.236,00)	(186.875.760,00)		(379.815.996,00)
10	Bapas Pamekasan	(244.221.400,00)	(75.109.360,00)		(319.330.760,00)
11	Rupbasan Argamakmur	(81.931.956,00)	(66.647.246,00)		(148.579.202,00)
12	Cabrut Muntok	(664.827.598,00)		(636.749.322,00)	(28.078.276,00)
13	Kanim Tanjung Pandan	(365.253.888,00)	(27.008.139,00)		(392.262.027,00)
14	Bapas Sibolga	(107.885.500,00)	(9.465.270,00)		(117.350.770,00)
15	Rutan Sidikalang	(437.467.603,00)	(84.641.404,00)		(522.109.007,00)
16	Lapas Lubuk Linggau	(2.261.087.183,00)	(119.598.741,00)		(2.380.685.924,00)
17	Rutan Labuhan Deli	(1.881.732.212,00)		(196.632.380,00)	(1.685.099.832,00)
18	Rutan Gianyar	(499.686.059,00)	(75.662.925,00)		(575.348.984,00)
19	Cabrut Bagan Siapi-api	(512.225.416,00)	(22.102.849,00)		(534.328.265,00)
20	LPKA Blitar	(1.540.978.145,00)		(13.192.972,00)	(1.527.785.173,00)
21	Bapas Denpasar	(312.042.232,00)		(2.351.192,00)	(309.691.040,00)
22	Lapas Batu	(8.736.378.167,00)		(29.640.755,00)	(8.706.737.412,00)
23	LPP Medan	(3.811.372.907,00)	(13.846.093,00)		(3.825.219.000,00)
24	BHP Medan	(630.192.597,00)	(3.636.402,00)		(633.828.999,00)

25	Bapas Palangkaraya	(352.481.545,00)	(115.262.265,00)		(467.743.810,00)
26	Kanim Balikpapan	(1.122.070.712,00)		(10.500,00)	(1.122.060.212,00)
27	Kanim Palopo	(27.023.063,00)		(311.558,00)	(26.711.505,00)
28	Cabrut Natal	(63.124.130,00)		(1.011.680,00)	(62.112.450,00)
29	Kanim Ngurah Rai	(1.200.272.064,00)		(1.651.869,00)	(1.198.620.195,00)
30	Kanim Belawan	(165.937.160,00)		(1.029.015,00)	(164.908.145,00)
31	Kanim Bengkalis	(181.040.742,00)		(2.222.516,00)	(178.818.226,00)
32	Bapas Metro	(31.238.890,00)		(1.483.195,00)	(29.755.695,00)
33	Kanim Tembagapura	(375.764.171,00)		(915.233,00)	(374.848.938,00)
34	Lapas Pontianak	(1.212.725.695,00)	(43.832.055,00)		(1.256.557.750,00)
35	Lapas Magelang	(1.013.067.117,00)		(50.392.113,00)	(962.675.004,00)
36	Kanim Polonia	(476.434.870,00)		(1.081.667,00)	(475.353.203,00)
37	Bapas Tanjung Pinang	(94.350.975,00)		(26.000.000,00)	(68.350.975,00)
38	Rupbasan Denpasar	(112.928.940,00)		(4.216.764,00)	(108.712.176,00)
39	Lapas Bekasi	(496.463.843,00)	(102.010.646,00)		(598.474.489,00)
40	Lapas Narkotika Siantar	(981.649.893,00)		(10.993.475,00)	(970.656.418,00)
41	LPP Pekanbaru	(1.966.594.885,00)		(63.816.357,00)	(1.902.778.528,00)
42	Lapas Bontang	(1.537.500.621,00)	(230.970.997,00)		(1.768.471.618,00)
43	LPKA Pekanbaru	(183.880.237,00)	(150.910.672,00)		(334.790.909,00)
44	Rudenim Tanjung Pinang	(1.864.267.789,00)		(12.408.779,00)	(1.851.859.010,00)
45	Kanim Tarempa	(126.371.582,00)		(21.638.406,00)	(104.733.176,00)
46	Kanim Bogor	(891.355.295,00)		(51.530.479,00)	(839.824.816,00)
47	Kanim Dumai	(644.548.614,00)		(8.700.880,00)	(635.847.734,00)
48	Kanim Denpasar	(647.916.292,00)		(101.468.940,00)	(546.447.352,00)
49	Kanim Pangkalpinang	(858.062.432,00)		(42.938.174,00)	(815.124.258,00)
50	Lapas Wamena	(3.977.059.404,00)	(124.941.476,00)		(4.102.000.880,00)
51	Rutan Tarutung	(426.754.592,00)		(324.066.902,00)	(102.687.690,00)
52	Cabrut Sipirok	(301.180.230,00)		(98.469.546,00)	(202.710.684,00)
53	Lapas Gunung Sitoli	(1.107.371.545,00)		(514.428.277,00)	(592.943.268,00)
54	Lapas Serui	(1.081.807.132,00)		(247.052.588,00)	(834.754.544,00)
55	Kanim Sorong	(1.039.023.834,00)		(207.886.245,00)	(831.137.589,00)
56	LPKA Batam	(1.180.534.634,00)		(665.232.344,00)	(515.302.290,00)
57	Lapas Medan	(3.680.448.661,00)	(147.608.369,00)		(3.828.057.030,00)
58	Rupbasan Manokwari	(968.213.026,00)		(353.604.720,00)	(614.608.306,00)
59	Kanim Soetta	(2.064.659.510,00)		(83.591.229,00)	(1.981.068.281,00)
60	Lapas Probolinggo	(2.244.218.948,00)		(1.531.571.040,00)	(712.647.908,00)
JUMLAH			(6.091.369.500,00)	(42.871.943.573,00)	

Sehingga secara total, perubahan nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan dalam periode Tahunan 2019 (Unaudited) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 105
Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dari *Unaudited II* menjadi *Audited I*
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited	Koreksi		Audited I
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.047.657.205.566,00)	(6.091.369.500,00)	(42.871.943.573,00)	(1.010.876.631.493,00)

Setelah Laporan Audited 2019 diserahkan kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 21 April 2020, terdapat Temuan Pemeriksaan dari BPK LKPP terhadap satuan kerja Kanim Cirebon yang belum melakukan perekaman transaksi revaluasi terkait Barang Berlebih, sehingga terdapat koreksi tambah pada satuan kerja Kanim Cirebon senilai Rp5.709.419,00. Dengan demikian, secara total, perubahan nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan dalam periode Tahunan 2019 (*Unaudited*) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 106
Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dari *Audited I* menjadi *Audited II*
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited	Koreksi		Audited I
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.010.876.631.493,00)	(5.709.419,00)		(1.010.882.340.912,00)

Dalam Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2019 terdapat perubahan nilai penyusutan Jalan dan Irigasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 107
Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan dan Irigasi berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited I	Koreksi		Unaudited II
			Tambah	Kurang	
1	Lapas Ternate	(916.677.000,00)		(640.644.143,00)	(276.032.857,00)
2	Kanim Palu	(30.087.500,00)		(20.924.584,00)	(9.162.916,00)
3	Bapas Sumbawa Besar	0,00	(651.501,00)		(651.501,00)
JUMLAH			(651.501,00)	(661.568.727,00)	

Sehingga secara total, perubahan nilai Akumulasi Penyusutan Jalan dan Irigasi dalam periode Tahunan 2019 (*Unaudited*) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 108
Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan dan Irigasi dari *Unaudited I* menjadi *Unaudited II*
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited I	Koreksi		Unaudited II
		Tambah	Kurang	
Akm. Penyusutan Jalan	(17.375.164.753,00)		(661.568.727,00)	(16.713.596.026,00)
Akm. Penyusutan Irigasi	(4.982.375.924,00)	(651.501,00)		(4.983.027.425,00)

Dalam Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 terdapat koreksi nilai akumulasi penyusutan irigasi atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu sebagai berikut:

Tabel 109
Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Irigasi berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited II	Koreksi		Audited
			Tambah	Kurang	
1	LPKA Blitar	(11.069.421,00)		(203.139,00)	(10.866.282,00)
2	Cabrut Sipirok	(15.485.545,00)		(8.391.525,00)	(7.094.020,00)
JUMLAH			0,00	(8.594.664,00)	

Sehingga secara total, perubahan nilai Akumulasi Penyusutan Irigasi dalam periode Tahunan 2019 (*Audited*) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 110
Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Irigasi dari *Unaudited II* menjadi *Audited I*
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited II	Koreksi		Audited I
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Irigasi	(4.983.027.425,00)		(8.594.664,00)	(4.974.432.761,00)

Setelah Laporan Audited 2019 diserahkan kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 21 April 2020, terdapat Temuan Pemeriksaan dari BPK LKPP terhadap satuan kerja Lapas Narkotika Sawah Lunto yang belum melakukan perekaman transaksi revaluasi terkait Barang Berlebih, sehingga terdapat koreksi kurang pada satuan kerja Lapas Narkotika Sawah Lunto sebesar Rp8.594.664,00. Dengan demikian, secara total, perubahan nilai Akumulasi Penyusutan Irigasi dalam periode Tahunan 2019 (*Audited*) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 111
Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Irigasi dari *Audited I* menjadi *Audited II*
Per 31 Desember 2019

Uraian	Audited I	Koreksi		Audited II
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Irigasi	(4.983.027.425,00)		(8.594.664,00)	(4.974.432.761,00)

Aset Tak Berwujud **C.20. ASET TAK BERWUJUD**
Rp625.234.698.857,00

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp625.234.698.857,00 dan Rp526.019.128.257,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112
Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2019

No	Uraian	Nilai
1	Software	542.367.402.109,00
2	Lisensi	78.738.882.748,00
3	ATB Lainnya	4.128.414.000,00
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2019		625.234.698.857,00

Tabel 113
Rincian Aset Tak Berwujud Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Aset Tak Berwujud	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	26.479.031.595,00	3.265.517.295,00
Inspektorat Jenderal	1.626.917.458,00	1.626.917.458,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	60.497.834.966,00	48.732.571.871,00
Ditjen Pemasyarakatan	7.754.351.647,00	6.980.749.488,00
Ditjen Imigrasi	503.309.923.110,00	442.258.465.464,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	19.223.880.477,00	17.016.042.777,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	1.005.351.500,00	1.005.351.500,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	340.505.700,00	381.220.000,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	3.991.605.500,00	3.746.995.500,00
Balitbang Hukum dan HAM	173.720.214,00	173.720.214,00
BPSDM Hukum dan HAM	831.576.690,00	831.576.690,00
Total	625.234.698.857,00	526.019.128.257,00

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 114
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2019

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2018	526.019.128.257,00
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	24.996.800,00
Pembelian	15.058.093.443,00
Transfer Masuk	1.710.270.909,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	46.520.109.733,00
Reklasifikasi Masuk	105.127.811.986,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.578.225,00
Pengembangan Nilai Aset	19.439.911.600,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	3.427.710.000,00
Total Mutasi Tambah :	191.310.482.696,00

Mutasi Kurang :	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	445.952.525,00
Penghapusan	3.479.790.000,00
Transfer Keluar	1.710.270.909,00
Reklasifikasi Keluar	82.134.832.986,00
Koreksi Pencatatan	4.324.065.676,00
Total Mutasi Kurang :	92.094.912.096,00
Saldo per 31 Desember 2019	625.234.698.857,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	442.517.380.284,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	182.717.318.573,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

• **Mutasi Tambah**

- a. Penambahan Saldo Awal senilai Rp24.996.800,00 terdapat pada Kanwil Sulawesi Selatan (DIPA AHU) senilai Rp24.996.800,00 berupa Aplikasi Layanan Notariat (Temuan Inspektorat Jenderal Tahun 2018).
- b. Pembelian senilai Rp15.058.093.443,00 di antaranya terdapat pada:
 - Satker Ditjen AHU senilai Rp11.730.049.995,00 berupa lisensi aplikasi sebanyak 72 buah.
 - Rumah Sakit Pengayoman Cipinang senilai Rp743.100.001,00 berupa aplikasi software NUP 5 yaitu aplikasi rumah sakit Trans Medic-Jasamedika.
 - Satker Ditjen Kekayaan Intelektual senilai Rp593.303.700,00
 - Satker Ditjen Imigrasi senilai Rp523.990.000,00 berupa pengadaan Aplikasi DUPAK,Perbendaharaan, Input Prakebijakan, SIMON REPELANGI, Identifikasi Belanja Modal Satker, dan Booking Online WNI dan WNA pada Perwakilan Imigrasi di Kota Kinabalu.
 - Perwakilan Imigrasi Jeddah senilai Rp247.624.121,00 berupa Aplikasi Dbase ABG, Aplikasi Antrian Terpadu, Aplikasi Modul Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Aplikasi Modul Pre Registrasi.
- c. Transfer Masuk senilai Rp1.710.270.909,00 terdapat pada:
 - Kanwil Yogyakarta (DIPA Setjen) dan Kanwil Yogyakarta (DIPA AHU) masing-masing senilai Rp182.517.500,00 berupa aplikasi e-notaris dari Ditjen AHU.
 - Kanim Jakarta Selatan senilai Rp34.911.540,00
 - Kanim Medan senilai Rp32.862.139,00 berupa 98 unit Lisensi (Neurotech Additional) dari Ditjen Imigrasi.
 - Kanim Batam senilai Rp31.862.139,00 berupa lisensi
- d. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp46.520.109.733,00 terdapat pada:
 - satker Ditjen Imigrasi senilai Rp46.176.680.000,00 berupa pengadaan perangkat lunak berlisensi Biometrik Termin I (software).
 - satker Ditjen Imigrasi senilai Rp343.429.733,00 berupa pengadaan lisensi ICAO sebagai keikutsertaan Ditjen Imigrasi.

- e. Reklasifikasi Masuk senilai Rp105.127.811.986,00 terdapat pada :
 - satker Ditjen Imigrasi senilai Rp64.697.103.500,00 merupakan koreksi dari Aset Tak Berwujud Lainnya (Aplikasi e-Office) pada Kanim dan Aplikasi SIMKIM v.1 pada Kanim dan Perwakilan Luar Negeri.
 - Pusdatin senilai Rp23.045.500.000,00 berupa Aplikasi Rekans Rp49.500.000 dan Oracle yang merupakan pecahan dari server Rp22.996.000.000
 - Satker Ditjen Kekayaan Intelektual senilai Rp16.542.965.777,00 berupa reklas 63 jenis Aplikasi yang sebelumnya tercatat pada Aset tak Berwujud Lainnya menjadi Aset Tak Berwujud.
 - Perwakilan Imigrasi di Beijing senilai Rp33.951.709,00 berupa Aplikasi Visa NUP 1 dan 2, reklas dari Aset Tak Berwujud Lainnya.
 - Kanim Bogor senilai Rp24.915.000,00 berupa Aplikasi Pendataan POA
- f. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap senilai Rp1.578.225,00 terdapat pada PKA Martapura berupa Anti Virus yang digunakan kembali.
- g. Pengembangan Nilai Aset senilai Rp19.439.911.600,00 terdapat pada :
 - Satker Ditjen Imigrasi senilai Rp17.580.767.600,00 berupa pengembangan Aplikasi SIMKIM v.2.
 - Satker Ditjen Kekayaan Intelektual senilai Rp1.614.534.000,00 berupa penambahan fitur Web Ditjen KI basis android, Web berbasis IOS, Aplikasi SIPENGADU, Aplikasi Manajemen Kompetensi, Aplikasi SI APIN, Aplikasi AMPERA, Aplikasi Manajemen Pelaporan Bulanan, Aplikasi Desain Industri, Aplikasi Paten, dan Aplikasi Merk Dagang.
 - Satker BPHN senilai Rp244.610.000 berupa pengembangan Aplikasi Penyuluh Hukum dan Bantuan Hukum NUP 3 Rp197.780.000,00 dan pengembangan Aplikasi JDIHN Rp46.830.000,00.
- h. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp3.427.710.000,00 terdapat pada :
 - satker Ditjen AHU senilai Rp3.378.540.000,00 merupakan koreksi Aset Tak Berwujud Lainnya menambah nilai software.
 - Satker Ditjen PP senilai Rp49.170.000,00 berupa software yang sebelumnya tercatat NUP sendiri, sebenarnya pengembangan dari software yang sudah ada.
- **Mutasi Kurang**
 - a. Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp445.952.525,00 terdapat pada:
 - Kanim Bogor senilai Rp48.752.000,00 berupa Aplikasi Keuangan yang sudah dilakukan penghapusan berdasarkan SK No. W.11-7332.PB.06.01 Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019.
 - Kanim Bogor senilai Rp261.958.000 berupa Software yang sudah dilakukan penghapusan berdasarkan SK No. W.11-7332.PB.06.01 Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019..
 - Satker Ditjen HAM senilai Rp40.714.300 berupa Anti virus.
 - LPKA Martapura senilai Rp1.578.225 berupa penghentian penggunaan Anti Virus karena akan diusulkan penghapusan.
 - b. Penghapusan senilai Rp3.479.790.000,00 terdapat pada Kanim Jakarta Barat senilai Rp79.790.000,00 merupakan penghapusan lisensi NUP 1 dasar SK Penghapusan No: SEK-08.PB.06.04-2019 tanggal 6 Februari 2019.
 - c. Transfer Keluar senilai Rp1.710.270.909,00 terdapat pada:

- Satker Ditjen Imigrasi senilai Rp1.310.239.109,00 berupa lisensi ke seluruh satker Imigrasi.
 - Satker Ditjen AHU dan Kanwil Yogyakarta (DIPA AHU) masing-masing senilai Rp182.517.500,00 berupa Aplikasi e-Notaris.
 - Kanwil Sulawesi Selatan (DIPA AHU) senilai Rp24.996.800,00 berupa Aplikasi Layanan Notariat ke Kanwil Sulawesi Selatan (DIPA SETJEN).
 - Kanwil Sumatera Selatan (DIPA Imigrasi) senilai Rp10.000.000,00 berupa software ke Kanwil Sumatera Selatan (Setjen).
- d. Reklasifikasi Keluar senilai Rp83.134.832.986,00 terdapat pada :
- Satker Ditjen Imigrasi senilai Rp64.700.124.500,00 berupa Aplikasi e-Office pada Kanim, Aplikasi SIMKIM v.1 pada Kanim dan Perwakilan Luar Negeri menjadi software, dan Aset Tak Berwujud Lainnya menjadi LCD/Infocus.
 - Satker Ditjen KI senilai Rp16.542.965.777,00
 - Kanim Tanjung Priok senilai Rp760.026.000,00
 - Pusdatin senilai Rp49.500.000,00 berupa Aplikasi Rekas yang tercatat sebagai Aset Tak Berwujud Lainnya menjadi *software*.
 - Perwakilan Imigrasi di Beijing senilai Rp33.951.709,00 berupa Aplikasi Visa NUP 1 dan 2 menjadi software.
- e. Koreksi Pencatatan senilai Rp4.324.065.676,00 terdapat pada :
- Satker Ditjen AHU senilai Rp3.378.540.000,00 merupakan koreksi Aset Tak Berwujud Lainnya NUP 1 s.d 4.
- Kanim Karawang senilai Rp353.942.834,00 berupa software yang sebenarnya merupakan peralatan dan mesin dengan BA No. W.11.IMI.IMI.4-PB.05.01-0752
 - Satker Ditjen Imigrasi senilai Rp344.845.000,00 berupa koreksi pada Gedung Kantor Permanen NUP 7 sebesar Rp342.975.000,00 berupa pengembangan dan Rp1.870.000 pada saldo awal persediaan.
 - Kanim Malang senilai Rp124.000.000,00 berupa Aset Tak Berwujud Lainnya direklas menambah nilai asset server NUP 5 Rp24.500.000,00 dan menambah nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen Rp99.500.000,00.
 - Kanim Ngurah Rai senilai Rp49.900.000,00 berupa kesalahan pencatatan Aset Tetap Tak Berwujud.

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp13.924.560.000,00*

C.21. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp13.924.560.000,00 dan Rp14.478.828.000,00.

Rincian nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berdasarkan unit Eselon I sebagai berikut :

Tabel 115
Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	13.924.560.000,00	14.478.828.000,00

Ditjen Pemasyarakatan	0,00	0,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	13.924.560.000,00	14.478.828.000,00

Dana Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dana tersebut merupakan dana yang ditempatkan di Department of Justice Hongkong terkait dengan kasus Century senilai HKD7.800.000 dengan kurs Rp1.785,2 sesuai Kurs Tengah BI Tahun 2019 Yang Berlaku Untuk periode Tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lain-Lain
Rp326.651.278.466,00

C.22. ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp326.651.278.466,00 dan Rp349.586.548.982,00.

Rincian nilai Aset Lain-Lain berdasarkan unit Eselon I sebagai berikut :

Tabel 116
Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Aset Lain-lain	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	44.653.137.018,00	36.722.413.780,00
Inspektorat Jenderal	492.592.000,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	664.668.616,00	34.420.015.631,00
Ditjen Pemasyarakatan	149.441.120.995,00	142.176.795.579,00
Ditjen Imigrasi	116.101.687.518,00	119.398.833.388,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	1.554.301.350,00	4.554.301.350,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	108.279.764,00	2.970.000,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	1.263.038.815,00	540.861.195,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	662.708.600,00	1.214.403.600,00
Balitbang Hukum dan HAM	209.338.000,00	258.341.000,00
BPSDM Hukum dan HAM	11.500.405.790,00	17.034.458.267,00
Konsolidasi Kemenkumham	0,00	(6.736.844.808,00)
Total	326.651.278.466,00	349.586.548.982,00

Aset Lain-Lain terdiri dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam

Operasional Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan. Rincian Aset Lain-Lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 117
Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Jenis Aset
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis Aset	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	325.067.001.477,00	318.379.510.023,00
Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	1.584.276.989,00	31.207.038.959,00
Total	326.651.278.466,00	349.586.548.982,00

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan
Rp325.067.001.477,00

C.22.1. ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN

Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp325.067.001.477,00 dan Rp318.379.510.023,00.

Rincian nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan berdasarkan unit Eselon I sebagai berikut :

Tabel 118
Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	44.638.137.018,00	36.612.913.780,00
Inspektorat Jenderal	492.592.000,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	664.668.616,00	27.674.077.390,00
Ditjen Pemasyarakatan	149.407.805.569,00	142.143.480.153,00
Ditjen Imigrasi	114.606.440.255,00	95.080.548.096,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	1.554.301.350,00	4.554.301.350,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	108.279.764,00	2.970.000,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	1.222.324.515,00	540.861.195,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	662.708.600,00	1.214.403.600,00
Balitbang Hukum dan HAM	209.338.000,00	258.341.000,00
BPSDM Hukum dan HAM	11.500.405.790,00	17.034.458.267,00
Konsolidasi Kemenkumham	0,00	(6.736.844.808,00)
Total	325.067.001.477,00	318.379.510.023,00

Pada periode Tahunan 2019 (Unaudited) nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan pada Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan sebagai dampak dari pemantauan Ditjen Perbendaharaan yang menyatakan bahwa belum seluruh satker menginput hasil rerevaluasi ke Aplikasi SIMAK BMN. Perubahan nilai akibat koreksi hasil rerevaluasi tersebut terdapat pada Lapas Besi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 119
Koreksi Lebih/Kurang Catat Unaudited Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited I	Koreksi		Unaudited II
			Tambah	Kurang	
1	Lapas Besi	809.763.000,00		273.646.000,00	536.117.000,00

Sehingga secara total, perubahan nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dalam periode Tahunan 2019 (Unaudited) dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 120
Perubahan Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dari Unaudited I menjadi Unaudited II
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited I	Koreksi		Unaudited II
		Tambah	Kurang	
AT yang Tidak Digunakan	330.396.477.477,00		273.646.000,00	330.122.831.477,00

Dalam Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 terdapat koreksi nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu koreksi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan yang terkait dengan perubahan nilai rerevaluasi serta perbaikan nilai buku minus pada tiga satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 121
Koreksi Lebih/Kurang Catat Audited Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited II	Koreksi		Audited
			Tambah	Kurang	
1	Rutan Labuhan Deli	461.645.000,00	256.797.000,00		718.442.000,00
2	Lapas Batu	1.233.905.375,00		85.103.000,00	1.148.802.375,00
3	Lapas Medan	7.764.563.155,00		5.227.524.000,00	2.537.039.155,00
JUMLAH			256.797.000,00	5.312.627.000,00	

Sehingga, secara total nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 122
Perubahan Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan

dari *Unaudited II* menjadi *Audited*
Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited	Koreksi		Audited
		Tambah	Kurang	
Aset Tetap yang Tidak Digunakan	330.122.831.477,00	256.797.000,00	5.312.627.000,00	325.067.001.477,00

Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 123
Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2018	318.379.510.023,00
Mutasi tambah :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	199.282.301.370,00
Transaksi Normalisasi (BMN Yang Dihentikan)	721.163,00
Koreksi Take In Revaluasi	6.736.844.808,00
Total Mutasi Tambah :	206.019.867.341,00
Mutasi Kurang :	
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	47.020.547.361,00
Transaksi Normalisasi (BMN Yang dihentikan)	261.899.401,00
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	143.293.241.106,00
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	12.200.000,00
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	695.907.157,00
Usulan Barang RB ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	8.046.230.862,00
Usulan Barang Hilang ke pengelola (BMN yang dihentikan)	2.350.000,00
Total Mutasi Kurang :	199.332.375.887,00
Saldo per 31 Desember 2019	325.067.001.477,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	254.689.878.321,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	70.377.123.156,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

• **Mutasi Tambah**

- Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya senilai Rp199.282.301.370,00 diantaranya terdapat pada:
 - Satker Ditjen Imigrasi senilai Rp25.727.690.792,00 merupakan penghentian penggunaan berupa Penghentian penggunaan BMN yang akan dihapuskan dengan SK Penghapusan Nomor IMI.1-1792.PB.06.04 tanggal 13 Desember 2019.
 - Pusdatin senilai Rp13.552.733.555,00 merupakan penghentian penggunaan AC Split 3unit, PC Unit 11 unit, Printer (Perlitan Personal Komputer) 3 unit,

- dan Server 1 unit.
- Kanim Jakarta Barat senilai 11.189.775.270,00 merupakan penghentian penggunaan berupa sejumlah barang inventaris kantor dan alat keamanan.
 - Lapas Medan senilai Rp10.133.444.155,00 merupakan penghentian penggunaan Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen 10 unit, Tipe IE Permanen 18 unit dan Tipe Semi Permanen 2 unit.
 - Rutan Donggala senilai Rp6.650.290.000,00 merupakan penghentian penggunaan atas Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1.
- b. Transaksi Normalisasi (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp721.163,00 yang umumnya disebabkan karena terdapat data BMN yang terindikasi tidak normal seperti nilai buku minus yang dilihat dalam fitur eRekon&LK dan akan ditindaklanjuti sesuai petunjuk dari Ditjen Kekayaan Negara, yang diantaranya terdapat pada Kanim Banda Aceh senilai Rp721.163.
- c. Koreksi Take In Revaluasi senilai Rp6.736.844.808,00 merupakan nilai koreksi atas revaluasi di tahun 2017, 2018, dan 2019 yang ditake in pada akhir tahun 2019 dan terdapat pada satuan kerja konsolidasi Kementerian Hukum dan HAM.
- **Mutasi Kurang**
- a. Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap senilai Rp47.020.547.361,00 diantaranya terdapat pada:
- Kanwil Maluku DIPA Setjen senilai Rp7.856.836.000,00 yang merupakan penggunaan kembali Bangunan Kantor Permanen NUP 17.
 - Lapas Medan senilai Rp7.645.547.500,00 merupakan Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya 1 unit, Bangunan Gedung LP Kelas I 1 unit, Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen 10 unit, Tipe IE Permanen 18 unit dan Tipe Semi Permanen 2 unit.
 - Rudenim Makasar senilai Rp6.353.939.000,00 yang merupakan penggunaan kembali terhadap Bangunan Gedung Kantor.
 - Rutan Donggala senilai Rp5.887.317.000,00 yang merupakan Penggunaan Kembali Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1.
 - Lapas Ambon senilai Rp3.270.418.235,00 merupakan penggunaan kembali Bangunan Gedung Rutan Kelas II 2 unit, Gedung Pos Jaga Permanen 1 unit, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen 2 unit.
- b. Transaksi Normalisasi (BMN yang dihentikan) senilai Rp261.899.401,00 yang umumnya disebabkan karena terdapat data BMN yang terindikasi tidak normal seperti nilai buku minus yang dilihat dalam fitur eRekon&LK dan akan ditindaklanjuti sesuai petunjuk dari Ditjen Kekayaan Negara, yang diantaranya terdapat pada:
- Satker BPSDM senilai Rp128.352.000,00
 - Bapas Serang senilai Rp50.000.000,00
 - Kanim Langsa senilai Rp48.000.000,00
 - Kanim Blitar senilai Rp14.358.000,00
 - Kanwil Mataram (DIPA Setjen) senilai Rp11.720.000,00
- c. Penghapusan (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp143.293.241.106,00 diantaranya terdapat pada:
- Satker Ditjen AHU senilai Rp26.986.367.960,00 merupakan penghapusan kendaraan dinas dan barang inventaris kantor dengan dasar penghapusan nomor M.HH.05.PL.05.02 Tahun 2019 ; SEK-29.PB.06.04 Tahun 2019; Dan

- SEK-06.PB.06.04 Tahun 2019
- Satker Ditjen Imigrasi senilai Rp25.946.935.860,00 merupakan penghapusan sepeda motor dan sejumlah peralatan kantor dengan dasar penghapusan nomor : SEK-48.PB.06.04 Tahun 2019 tanggal 5 Mei 2019 dan IMI.1-1792.PB.06.04 tanggal 13 Desember 2019
 - Satker BPSDM senilai Rp13.138.065.833,00 merupakan penghapusan atas barang berupa alat angkutan, peralatan kantor dan rumah tangga, serta peralatan komputer dengan dasar Surat Keputusan Penghapusan Nomor: SEK-52.PB.06.04/2018 Tanggal 17 September 2018.
 - Kanim Entikong senilai Rp3.831.763.000,00 merupakan penghapusan gedung kantor, rumah dinas, dan pagar dengan dasar penghapusan nomor SEK-15.PB.06.04 TAHUN 2019 dan SEK-04.PB.06.04 TAHUN 2019
 - Lapas Palopo senilai Rp3.794.300.000,00 merupakan penghapusan sejumlah gedung yang terbakar pada tahun 2013 dan dikategorikan sebagai Barang Tidak Ditemukan (BTD) pada revaluasi tahun 2017 dengan dasar penghapusan nomor : SEK-88.PB.06.04 Tahun 2019 tanggal 9 September 2019
- d. Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan) senilai Rp12.200.000,00 terdapat pada : Rutan Sabang senilai Rp10.200.000,00 dan Kanim Tembilahan senilai Rp2.000.000,00
- e. Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) senilai Rp695.907.157,00 terdapat pada :
- Lapas Metro senilai Rp194.810.974,00
 - Lapas Kalianda senilai Rp188.470.183,00
 - Kanwil Riau (DIPA Setjen) senilai Rp169.173.000,00
 - Rutan Takengon senilai Rp108.500.000,00
 - Lapas Rantau Prapat senilai Rp28.000.000,00
- f. Usulan Barang Rusak Berat Ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp8.046.230.862,00 terdapat pada :
- Kanim Palu senilai Rp2.213.085.000,00
 - Rutan Donggala senilai Rp1.645.023.349,00
 - Kanim Muara Enim senilai Rp1.064.834.184,00
 - Kanim Banda Aceh senilai Rp866.998.032,00
 - Rupbasan Palu senilai Rp792.596.000,00
- e. Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp2.350.000,00 terdapat pada Lapas Palangkaraya.

Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan Rp1.584.276.989,00

C.22.2.ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN

Nilai Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.584.276.989,00 dan Rp31.207.038.959,00.

Rincian nilai Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan berdasarkan unit Eselon I ialah sebagai berikut :

Tabel 124
Rincian Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan
Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	15.000.000,00	109.500.000,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	6.745.938.241,00
Ditjen Pemasyarakatan	33.315.426,00	33.315.426,00
Ditjen Imigrasi	1.495.247.263,00	24.318.285.292,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	40.714.300,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
Total	1.584.276.989,00	31.207.038.959,00

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 125
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2018	31.207.038.959,00
Mutasi Tambah :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	445.952.525,00
Total Mutasi Tambah :	445.952.525,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.578.225,00
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	30.067.136.270,00
Total Mutasi Kurang :	30.068.714.495,00
Saldo per 31 Desember 2019	1.584.276.989,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	1.491.326.989,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	92.950.000,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

• **Mutasi Tambah**

- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp445.952.525,00 di antaranya terdapat pada:
 - Kanim Bogor senilai Rp310.710.000,00.
 - Ditjen Imigrasi senilai Rp92.950.000,00.
 - Ditjen HAM senilai Rp40.714.300,00.
 - LPKA Martapura senilai Rp1.578.225,00.

• **Mutasi Kurang**

- a. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap senilai Rp1.578.225,00 terdapat pada LPKA Martapura.
- b. Penghapusan (BMN yang dihentikan) senilai Rp30.067.136.270,00 terdapat pada:
 - Ditjen Imigrasi senilai Rp22.906.088.029,00.
 - Ditjen Administrasi Hukum Umum senilai Rp6.745.938.241,00
 - Kanim Bogor senilai Rp310.710.000,00
 - Kanwil Riau senilai Rp94.500.000,00
 - Kanim Kalianda senilai Rp9.900.000,00.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(Rp698.698.585.594,00)

C.23. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp698.698.585.594,00) dan 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp611.529.694.834,00). Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 126

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Aset Lainnya	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi	Nilai Buku	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud (ATB)						
1	Software	542.367.402.109,00	411.517.619.374,00	130.849.782.735,00	365.999.789.149,00	299.196.496.040,00	66.803.293.109,00
2	Lisensi	78.738.882.748,00	27.053.200.410,00	51.685.682.338,00	69.961.715.122,00	21.898.296.731,00	48.063.418.391,00
3	Hasil Kajian/Penelitian	0,00	0,00	0,00	92.950.000,00	0,00	92.950.000,00
4	Aset Tak Berwujud Lainnya	4.128.414.000,00	3.946.560.500,00	181.853.500,00	89.964.673.986,00	2.609.225.500,00	87.355.448.486,00
	Jumlah	625.234.698.857,00	442.517.380.284,00	182.717.318.573,00	526.019.128.257,00	323.704.018.271,00	202.315.109.986,00
B	Aset Lain-lain						
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	325.067.001.477,00	254.689.878.321,00	70.377.123.156,00	318.379.510.023,00	256.677.527.937,00	61.701.982.086,00
2	ATB yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	1.584.276.989,00	1.491.326.989,00	92.950.000,00	31.207.038.959,00	31.148.148.626,00	58.890.333,00
	Jumlah	326.651.278.466,00	256.181.205.310,00	70.470.073.156,00	349.586.548.982,00	287.825.676.563,00	61.760.872.419,00
	Grand Total	951.885.977.323,00	698.698.585.594,00	253.187.391.729,00	875.605.677.239,00	611.529.694.834,00	264.075.982.405,00

Pada periode Tahunan 2019 (*Unaudited*) nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan pada Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan sebagai dampak dari pemantauan Ditjen Perbendaharaan yang menyatakan bahwa belum seluruh satker menginput hasil rerevaluasi ke Aplikasi SIMAK BMN, yaitu pada Lapas Besi berupa koreksi kurang sebesar Rp145.155.680,00. Sehingga secara total, perubahan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dalam periode Tahunan 2019 (*Unaudited*) dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 127

Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dari *Unaudited I* menjadi *Unaudited II* Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited I	Koreksi		Unaudited II
		Tambah	Kurang	
Akm. Penyusutan AT yang Tidak Digunakan	(255.265.814.315,00)		(145.155.680,00)	(255.120.658.635,00)

Dalam Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 terdapat koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu sebagai berikut:

Tabel 128
Koreksi Lebih/Kurang Catat *Audited* Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019

No	Satker	Unaudited	Koreksi		Audited
			Tambah	Kurang	
1	Rutan Labuhan Deli	(138.980.183,00)		(63.071.811,00)	(75.908.372,00)
2	Lapas Batu	(1.194.342.271,00)		(63.843.746,00)	(1.130.498.525,00)
3	LPKA Pekanbaru	(41.808.414,00)	(61.063,00)		(41.869.477,00)
4	Lapas Medan	(550.380.980,00)		(303.925.820,00)	(246.455.160,00)
JUMLAH			(61.063,00)	(430.841.377,00)	

Sehingga secara total, perubahan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dalam periode Tahunan 2019 (*Audited*) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 129
Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dari *Unaudited II* menjadi *Audited* Per 31 Desember 2019

Uraian	Unaudited II	Koreksi		Audited
		Tambah	Kurang	
Akm. Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	255.120.658.635,00	(61.063,00)	(430.841.377,00)	254.689.878.321,00

Uang Muka dari KPPN
Rp1.937.351.678,00

C.24. UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.937.351.678,00 dan Rp2.473.362.985,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka Di KPPN mencerminkan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran.

Rincian Uang Muka dari KPPN berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 130
Perbandingan Uang Muka dari KPPN Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Uang Muka dari KPPN	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	928.500,00
Ditjen Pemasyarakatan	506.338.799,00	215.540.500,00
Ditjen Imigrasi	1.431.012.879,00	2.210.726.514,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	46.167.471,00
TOTAL	1.937.351.678,00	2.473.362.985,00

Rincian Uang Muka dari KPPN berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 131
Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019

NO	URAIAN SATKER	SALDO	KETERANGAN
	DITJEN PEMASYARAKATAN		
1	Balai Pemasyarakatan Ambon	25.440.000,00	Sisa TUP TA 2019
2	Lapas Batam	18.300.000,00	Sisa UP TA 2019
		95.979.950,00	Sisa TUP TA 2019
3	LPKA Ambon, Provinsi Maluku	18.656.100,00	Sisa TUP TA 2019
4	Lembaga Pemasyarakatan Cipinang	275.138.000,00	Sisa TUP TA 2019
5	Rumah Tahanan Negara Rangkas Bitung	38.660.000,00	Sisa TUP TA 2019
6	Balai Pemasyarakatan Bojonegoro	15.266.000,00	Sisa TUP TA 2019
7	Cabang Rumah Tahanan Negara Gunung Tua	2.109,00	Sisa UP TA 2019
8	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang	2.625.000,00	Sisa UP TA 2019
		3.449.000,00	Sisa TUP TA 2019
9	Lembaga Pemasyarakatan Ulu Siau	2.390.940,00	Sisa TUP TA 2019
10	Lembaga Pemasyarakatan Kendari	2.009.000,00	Sisa TUP TA 2019
11	Balai Pemasyarakatan Pontianak	4.514.700,00	Sisa TUP TA 2019

12	Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari	3.908.000,00	Sisa TUP TA 2019
	SUBTOTAL	506.338.799,00	
	DITJEN IMIGRASI		
1	Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura	95.000,00	Sisa UP TA 2019
2	Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat	15.004.000,00	Sisa TUP TA 2019
3	Perwakilan Imigrasi Di Singapura	219.706.817,00	Sisa UP TA 2019
		460.000,00	Sisa TUP TA 2019
4	Perwakilan Imigrasi Di Kuala Lumpur	72.382.090,00	Sisa UP TA 2019
5	Perwakilan Imigrasi Di Penang	85.433.182,00	Sisa UP TA 2019
6	Perwakilan Imigrasi Di Bangkok	58.067.814,00	Sisa UP TA 2019
7	Perwakilan Imigrasi Di Hongkong	130.836.074,00	Sisa UP TA 2019
8	Perwakilan Imigrasi Di Tokyo	32.976.899,00	Sisa UP TA 2019
		57.020,00	Sisa TUP TA 2019
9	Perwakilan Imigrasi Di Davao	23.498.667,00	Sisa UP TA 2019
10	Perwakilan Imigrasi Di Den Haag	91.435.079,00	Sisa UP TA 2019
11	Perwakilan Imigrasi Di Berlin	18.436.896,00	Sisa UP TA 2019
12	Perwakilan Imigrasi Di Sidney	32.388.080,00	Sisa UP TA 2019
13	Perwakilan Imigrasi Di Kuching	53.806.323,00	Sisa UP TA 2019
14	Perwakilan Imigrasi Di Tawao	53.217.645,00	Sisa UP TA 2019
		758.409,00	Sisa TUP TA 2019
15	Perwakilan Imigrasi Di Los Angeles	14.318.308,00	Sisa UP TA 2019
16	Perwakilan Imigrasi Di Jeddah	281.442.287,00	Sisa UP TA 2019
17	Perwakilan Imigrasi Di Beijing	66.212.409,00	Sisa UP TA 2019
18	Perwakilan Imigrasi Di Johor Bahru	4.579.406,00	Sisa UP TA 2019
19	Kantor Perwakilan Imigrasi Pada Kantor Urusan Kepentingan RI Di Dili Timor	172.401.869,00	Sisa UP TA 2019
20	Perwakilan Imigrasi Guangzhou Di RRC	3.498.605,00	Sisa UP TA 2019
	SUBTOTAL	1.431.012.879,00	
	GRAND TOTAL	1.937.351.678,00	

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp64.435.234.760,00

C.25. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp64.435.234.760,00 dan Rp105.218.621.484,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari utang biaya perjalanan dinas mutasi pegawai yang belum dibayar, kekurangan gaji dan

uang makan pegawai yang belum dibayar, kekurangan belanja bahan makanan narapidana dan belanja barang yang tagihannya belum dilunasi.

Tabel 132
Rincian Jenis Utang Pihak Ketiga Per 31 Desember 2019

No	Tipe Utang	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	6.539.852.465,00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	46.404.315.668,00
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0,00
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	80.886.169,00
5	Dana Pihak Ketiga	11.410.180.458,00
Grand Total		64.435.234.760,00

Tabel 133
Rincian Jenis Utang Pihak Ketiga Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2019

Unit Eselon I	Utang Kepada Pihak Ketiga					TOTAL
	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga	
Sekretariat Jenderal	75.380.516,00	12.915.745.117,00	0,00	0,00	0,00	12.991.125.633,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	17.419.488,00	0,00	0,00	11.410.180.458,00	11.427.599.946,00
Ditjen Pemasyarakatan	5.711.183.953,00	30.862.712.468,00	0,00	79.387.180,00	0,00	36.653.283.601,00
Ditjen Imigrasi	746.341.796,00	1.611.130.361,00	0,00	1.498.989,00	0,00	2.358.971.146,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	744.233.324,00	0,00	0,00	0,00	744.233.324,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	253.074.910,00	0,00	0,00	0,00	253.074.910,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	6.946.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946.200,00
TOTAL	6.539.852.465,00	46.404.315.668,00	0,00	80.886.169,00	11.410.180.458,00	64.435.234.760,00

Tabel 134
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Utang Kepada Pihak Ketiga	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	12.991.125.633,00	11.081.082.489,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	11.427.599.946,00	14.418.158.842,00
Ditjen Pemasyarakatan	36.653.283.601,00	75.914.541.108,00
Ditjen Imigrasi	2.358.971.146,00	3.382.154.738,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	744.233.324,00	10.646.000,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00

Badan Pembinaan Hukum Nasional	253.074.910,00	412.038.307,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	6.946.200,00	0,00
TOTAL	64.435.234.760,00	105.218.621.484,00

Rincian atas Transaksi Utang Kepada Pihak Ketiga berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran.

Hibah Yang Belum Disahkan
Rp20.870.993.354,00

C.26. HIBAH YANG BELUM DISAHKAN

Hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji sebesar Rp20.870.993.354,00 dan Rp57.545.454,00. Hibah yang belum disahkan merupakan aset yang diterima oleh Satuan Kerja dan belum disahkan melalui KPPN, namun telah dicatatkan pada aplikasi SIMAK-BMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Perbandingan Nilai Hibah Yang Belum Disahkan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 135
Perbandingan Hibah Yang Belum Disahkan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Hibah yang Belum Disahkan	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	0,00	57.545.454,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	20.870.993.354,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	20.870.993.354,00	57.545.454,00

Hibah yang belum disahkan tersebut terdapat pada satuan kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berupa hibah luar negeri bentuk jasa yang berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Hibah tersebut sudah terbit nomor registernya berdasarkan Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor S-691/PR.8/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan nomor register 21UXHLMA, tetapi baru disahkan di tahun 2020.

Utang Jangka Pendek C.27. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Lainnya Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp893.850,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara. Rincian utang jangka pendek lainnya pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut.

Tabel 136
Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Utang Jangka Pendek Lainnya	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	0,00	893.850,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	0,00	893.850,00

Pendapatan Diterima Dimuka C.28. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Dimuka

Rp430.662.482.004,00

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp430.662.482.004,00 dan Rp297.076.909.128,00. Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan PNPB yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Tabel 137
Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2019

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Perorangan/ Badan lainnya	419.915.140.000,00	Jasa Hukum untuk pengurusan Hak dan Perizinan
Badan Swasta Lainnya	10.747.342.004,00	Sewa tanah, gedung, dan bangunan
TOTAL	430.662.482.004,00	

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan Eselon I per 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 138
Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Unit Eselon I	Pendapatan Diterima Dimuka	
	31 Desember 2019	31 Desember 2019
Sekretariat Jenderal	1.840.698.646,00	749.004.302,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	6.609.550.000,00	11.381.845.675,00
Ditjen Pemasyarakatan	1.480.710.856,00	131.240.226,00
Ditjen Imigrasi	544.969.090,00	797.443.358,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	420.165.372.277,00	284.016.063.067,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	1.378.125,00	1.312.500,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	19.803.010,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	430.662.482.004,00	297.076.909.128,00

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 139
Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan
Satuan Kerja Per 31 Desember 2019

No	Nama Satker	Saldo	Keterangan
	Sekretariat Jenderal		
1	Sekretariat Jenderal (Pusat)	1.678.832.806,00	Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut: a) An. Abdul Hanny berupa sewa tanah di jl. TMP taruna Tangerang; b) An. Adi Cipta berupa sewa menara BTS di gedung Setjen; c) An. Etty Nurbaiti berupa sewa tanah di jl. Jend Sudirman Tangerang; d) An. Bank BNI berupa sewa lahan di Jl. Rasuna Said Kav 6-7; e) An. Siti Rokhaniyah berupa sewa tanah di jl. TMP taruna Tangerang.
2	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah	38.133.533,00	a) Pendapatan sewa lahan untuk ATM an. Bank BRI senilai Rp37.654.188,00; b) Pendapatan sewa lahan untuk kantin senilai Rp3.752.372,00
3	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Surabaya	59.499.529,00	Pendapatan sewa lahan untuk ATM an. Bank BNI
4	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Ujung Pandang	54.603.066,00	Sewa lahan untuk ATM an. Bank BNI
5	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Pekanbaru	921.521,00	Sewa lahan untuk koperasi

6	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Pontianak	3.601.205,00	Sewa lahan untuk kantin
7	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Banjarmasin	5.106.986,00	Sewa lahan untuk koperasi
	SUBTOTAL	1.840.698.646,00	
	Ditjen AHU		
1	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	6.609.550.000,00	Berupa pendapatan atas voucher yang belum digunakan atas Pelayanan Ditjen AHU
	SUBTOTAL	6.609.550.000,00	
	Ditjen Pemasyarakatan		
1	Lembaga Pemasyarakatan Karawang	85.863.000,00	Sewa lahan untuk kegiatan bisnis steam cuci mobil dan sewa koperasi
2	Rumah Tahanan Negara Bantul	1.642.336,00	Sewa lahan untuk koperasi
3	Rumah Tahanan Negara Yogyakarta	4.352.634,00	Sewa lahan untuk kantin
4	Balai Pemasyarakatan Jaktim/Jakut	586.792,00	Sewa lahan untuk kantin
5	Lapas Tasikmalaya	7.655.848,00	Sewa lahan untuk koperasi
6	Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin	143.738.898,00	Sewa lahan untuk BTS, kegiatan bisnis paving block
7	Lapas Cianjur	4.717.178,00	Sewa lahan untuk koperasi/KPPDK
8	Lembaga Pemasyarakatan Serang	1.117.510,00	Sewa lahan untuk kantin
9	Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang	4.640.710,00	Sewa lahan untuk koperasi
10	Lapas Brebes	37.404.375,00	Sewa lahan untuk koperasi
11	Lembaga Pemasyarakatan Magelang	4.215.833,00	Sewa lahan untuk koperasi
12	Rumah Tahanan Negara Wonosobo	1.420.657,00	Sewa lahan untuk koperasi
13	Rumah Tahanan Negara Purworejo	77.328,00	Sewa lahan untuk koperasi/KPPDK
14	Rumah Tahanan Negara Kebumen	6.126.229,00	Sewa lahan untuk koperasi/KPRI senilai Rp1.986.885,00 dan sewa lahan persawahan senilai Rp4.139.344,00
15	Rumah Tahanan Negara Rembang	1.374.000,00	Sewa lahan untuk koperasi/KPPDK
16	Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto	25.531.402,00	Sewa lahan untuk koperasi
17	Rumah Tahanan Negara Purbalingga	26.172.775,00	Sewa atas sebagian tanah, gedung dan bangunan
18	Rumah Tahanan Negara Banjarnegara	1.627.685,00	Sewa lahan untuk koperasi
19	Lapas Ngawi	9.378.000,00	Sewa lahan untuk ATM an. Bank BRI senilai Rp8.329.000,00 dan sewa lahan untuk koperasi/KPPDK senilai Rp1.049.000,00
20	Lembaga Pemasyarakatan Binjai	22.090.936,00	Sewa lahan untuk koperasi
21	Lembaga Pemasyarakatan Pontianak	11.126.439,00	Sewa lahan untuk kantin
22	Lembaga Pemasyarakatan Singkawang	484.994,00	Sewa lahan untuk kantin
23	Rumah Tahanan Negara Sambas	1.565.720,00	Sewa lahan untuk kantin

24	Lembaga Pemasyarakatan Palangkaraya	16.076.500,00	Sewa lahan untuk kantin
25	Lapas Sampit	3.684.000,00	Sewa lahan untuk koperasi
26	Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin	23.969.791,00	Sewa lahan untuk koperasi
27	Rumah Tahanan Negara Pelaihari	1.761.497,00	Sewa lahan untuk koperasi
28	Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru	450.000,00	Sewa lahan untuk koperasi
29	Rumah Tahanan Negara Kandangan	5.016.795,00	Sewa lahan untuk koperasi
30	Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan	165.991.187,00	a) Sewa lahan an. RM Bebek senilai Rp12.549.000,00 b) Sewa lahan an. PT Centratama Menara Indonesia senilai Rp105.787.500,00 c) Sewa lahan untuk koperasi senilai Rp3.602.643,00 d) Sewa lahan an. RM Kedai Laut senilai Rp25.561.552,00 e) Sewa lahan an. RM Torani senilai Rp18.490.492,00
31	Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat	21.527.794,00	Sewa lahan untuk ATM an. Bank BJB
32	Lembaga Pemasyarakatan Cibinong	33.596.059,00	Sewa lahan untuk koperasi
33	Lembaga Pemasyarakatan Slawi	4.435.926,00	Sewa lahan untuk koperasi
34	Rumah Tahanan Negara Ujung Pandang	45.661.000,00	Sewa lahan untuk koperasi
35	Rumah Tahanan Negara Pontianak	12.027.512,00	Sewa lahan untuk kantin
36	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Semarang, Kot.Semarang, Jawa Tengah	3.820.500,00	Sewa lahan untuk koperasi
37	Lembaga Pemasyarakatan Sleman	6.538.889,00	Sewa lahan untuk koperasi
38	Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal	544.773.822,00	Sewa lahan untuk usaha pertanian dan perikanan an. PT Sumber Tirta Windu
39	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta	187.175.707,00	Sewa lahan untuk mesin ATM an. Bank BJB senilai Rp24.709.078,00 dan sewa lahan untuk kantin senilai Rp162.466.629,00
40	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Martapura	334.247,00	Sewa lahan untuk kantin
41	Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Agung	958.351,00	Sewa lahan untuk koperasi
	SUBTOTAL	1.480.710.856,00	
	Ditjen Imigrasi		
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan	38.161.000,00	Sewa lahan untuk ATM Bank Mandiri senilai Rp3.792.000,00, Bank BRI senilai Rp22.449.000,00, dan Bank BNI senilai Rp11.920.000,00
2	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat	48.899.341,00	Sewa lahan an. Coffee Jera senilai Rp8.499.333,00, bank BRI senilai Rp26.933.336,00, Bank BNI senilai Rp6.733.336,00, dan Bank Mandiri senilai Rp6.733.336,00
3	Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	741.997,00	Sewa lahan koperasi senilai

4	Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta	27.885.246,00	Sewa kantin an. Joni Marshal senilai Rp24.540.984,00 dan sewa kantin an. Gono Utomo senilai Rp3.344.262,00
5	Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar	6.718.457,00	Sewa lahan untuk kantin an. Ibu Rosita
6	Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	11.184.852,00	Sewa lahan ATM an. Bank BNI
7	Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	25.990.000,00	Sewa lahan untuk kantor kas dan ATM Bank Lampung
8	Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan	10.930.833,00	Sewa lahan untuk ATM an. Bank BNI
9	Kantor Imigrasi Kelas I Makassar	26.025.830,00	Sewa lahan an. Bank BNI
10	Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar	39.503.159,00	Sewa lahan untuk kantin an. Ni Nyoman Wangi Artini senilai Rp8.217.828,00, an. I Wayan Sumardika senilai Rp6.321.468,00, an. I Ketut Sudigama senilai Rp10.745.944,00, an. I Made Wiranata senilai Rp10.745.944,00, dan an. PT.Pos Denpasar senilai Rp3.471.975,00
11	Kantor Imigrasi Kelas I Palangkaraya	7.668.000,00	Sewa lahan untuk kantin
12	Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda	6.235.833,00	Sewa lahan untuk kantin an. CV. Kesuma Jaya
13	Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur	118.738.406,00	Sewa lahan untuk koperasi senilai Rp40.241.652,00 dan ATM BNI senilai Rp78.496.754,00
14	Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh	2.164.850,00	Sewa lahan untuk koperasi
15	Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin	9.254.081,00	Sewa lahan untuk ATM an. Bank BNI dan kantin an. Sahrian Noor
16	Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta	12.446.202,00	Sewa lahan untuk koperasi
17	Kantor Imigrasi Kelas I Kendari	75.945.813,00	Sewa lahan an. Bank BNI
18	Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan	545.500,00	Sewa lahan untuk koperasi pegawai
19	Kantor Imigrasi Kelas II Sanggau	7.631.894,00	Sewa lahan untuk kantin an. Kurniawati
20	Kantor Imigrasi Kelas II Karawang	14.749.564,00	Sewa lahan untuk koperasi
21	Kantor Imigrasi Kelas II Pematang	19.309.732,00	Sewa lahan untuk ATM an. Bank BRI
22	Kantor Imigrasi Kelas II Pati	10.999.500,00	Sewa lahan untuk ATM an. Bank BNI
23	Kantor Imigrasi Kelas II Madiun	10.530.000,00	Sewa lahan untuk koperasi an. PRI Bhumi Pura Sejahtera
24	Kantor Imigrasi Kelas II Agam	12.709.000,00	Sewa lahan untuk ATM an. Bank BRI
	SUBTOTAL	544.969.090,00	
	Ditjen KI		
1	Ditjen Kekayaan Intelektual	420.165.372.277,00	a) Pendapatan pemeliharaan pemegang paten senilai Rp419.915.140.000,00; dan b) Pendapatan sewa gedung dan bangunan an. Bank BNI senilai Rp250.232.277,00
	SUBTOTAL	420.165.372.277,00	
	Ditjen HAM		

1	Direktorat Jenderal HAM	1.378.125,00	Berupa Pendapatan Pemanfaatan BMN Lainnya dari TV Lift dari PT Force Media untuk bulan Januari 2020 yang sudah dibayarkan pada tahun 2019.
	SUBTOTAL	1.378.125,00	
	BPHN		
1	Badan Pembinaan Hukum Nasional	19.803.010,00	Berupa Pendapatan Sewa Kantin untuk koperasi BPHN
	SUBTOTAL	19.803.010,00	
	TOTAL	430.662.482.004,00	

Ekuitas

Rp68.274.718.348.226,00

C.29. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp68.274.718.348.226,00 dan Rp24.224.492.209.998,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**PENJELASAN ATAS
POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp4.180.768.548.845,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Basis akrual akuntansi Pendapatan-LO mengakui pengaruh transaksi penghasil pendapatan atau peristiwa lain penghasil pendapatan pada saat transaksi atau peristiwa penyebab timbulnya hak atas pendapatan terjadi, tanpa memerhatikan saat pendapatan tersebut diterima dalam bentuk tunai atau bentuk penerimaan lain.

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berasal dari:

- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Pendapatan Pemanfaatan dan Pengelolaan BMN, mis: Sewa Rumah Dinas, Sewa Lahan untuk ATM, Kantin dan lain-lain;
- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian;
- Pendapatan Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
- Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual;
- Pendapatan Layanan Pendidikan/Pelatihan BPSDM;
- Pendapatan Jasa Lainnya dan Jasa Giro;
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Lainnya;
- Pendapatan Lain-Lain.

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.180.768.548.845,00 dan Rp3.528.582.438.941,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 140
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/Turun (%)
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	277.851.441,00	290.545.536,00	(4,37)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.209.291.060,00	10.291.346.119,00	47,79
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	10.900.000,00	8.160.000,00	33,58
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	234.165.191,00	562.368.691,00	(58,36)
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya	9.600.000,00	14.400.000,00	(33,33)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

425211	Pendapatan Paspor	1.253.341.710.000,00	1.097.623.900.000,00	14,19
425212	Pendapatan Visa	406.729.595.455,00	222.629.046.105,00	82,69
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	716.924.200.000,00	521.131.100.000,00	37,57
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	184.997.521.707,00	274.963.445.000,00	(32,72)
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	750.024.850.000,00	740.164.800.000,00	1,33
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	238.347.370.511,00	144.979.996.707,00	64,40
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	45.785.779.630,00	20.240.856.749,00	126,20
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	555.826.647.519,00	481.336.737.398,00	15,48
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	409.509.374,00	118.735.738,00	244,89
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	62.795.023,00	436.659.488,00	(85,62)
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	23.138.000,00	39.730.800,00	(41,76)
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2.449.000.000,00	2.251.500.000,00	8,77
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	304.448.721,00	332.838.093,00	(8,53)
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	224.052.819,00	1.222.520.623,00	(81,67)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	9.262.197.485,00	9.189.934.113,00	0,79
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0,00	334.599.600,00	(100,00)
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	40.235.807,00	119.984.831,00	(66,47)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	273.689.102,00	299.233.350,00	(8,54)
	Total	4.180.768.548.845,00	3.528.582.438.941,00	18,48



Perbandingan Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 141
Perbandingan Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan PNBP-LO	Pendapatan PNBP-LRA	Selisih
4.180.768.548.845,00	4.415.573.984.076,00	(234.805.435.231,00)

Rincian selisih antara Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 142
Rincian Selisih PNBP-LO dan PNBP-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	PNBP-LO	PNBP-LRA	Selisih
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	277.851.441,00	277.851.441,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	243.583.887,00	(243.583.887,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	1.367.228.830,00	(1.367.228.830,00)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	1.676.606.001,00	(1.676.606.001,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.209.291.060,00	16.638.149.179,00	(1.428.858.119,00)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	234.165.191,00	234.230.816,00	(65.625,00)
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
Pendapatan Paspor	1.253.341.710.000,00	1.253.341.710.000,00	0,00
Pendapatan Visa	406.729.595.455,00	406.729.595.455,00	0,00
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali	716.924.200.000,00	716.924.200.000,00	0,00
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	184.997.521.707,00	182.197.521.707,00	2.800.000.000,00
Pendapatan Pelayanan Fidusia	750.024.850.000,00	750.037.350.000,00	(12.500.000,00)
Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	238.347.370.511,00	238.892.867.249,00	(545.496.738,00)
Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	45.785.779.630,00	40.468.433.955,00	5.317.345.675,00
Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	555.826.647.519,00	714.326.594.505,00	(158.499.946.986,00)
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	409.509.374,00	409.509.374,00	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	62.795.023,00	62.795.023,00	0,00
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	23.138.000,00	23.138.000,00	0,00
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2.449.000.000,00	2.449.000.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	304.448.721,00	304.448.721,00	0,00
Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	0,00	157.673,00	(157.673,00)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	224.052.819,00	201.126.738,00	22.926.081,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0,00	244.409.564,00	(244.409.564,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0,00	38.295.000,00	(38.295.000,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	0,00	8.699.682,00	(8.699.682,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	9.262.197.485,00	9.262.197.485,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	596.424.892,00	(596.424.892,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	48.850.775.705,00	(48.850.775.705,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	28.619.485.115,00	(28.619.485.115,00)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0,00	792.132.522,00	(792.132.522,00)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	40.235.807,00	40.235.807,00	0,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	273.689.102,00	294.729.750,00	(21.040.648,00)
Total	4.180.768.548.845,00	4.415.573.984.076,00	(234.805.435.231,00)



Penjelasan selisih antara Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 143
Penjelasan Selisih Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	Selisih	Penjelasan
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	(243.583.887,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	(1.367.228.830,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	(1.676.606.001,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	(1.428.858.119,00)	Pencatatan Transaksi Akrua: • Pencatatan Baru Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Tahun Berjalan sebesar Rp45.495.413,00 • Pencatatan Baru Piutang PNBP sebesar Rp1.888.347.547,00 • Pengurangan Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar (Rp1.765.200.000,00) • Pencatatan Baru Pendapatan Diterima Dimuka sebesar (Rp1.916.290.264,00) • Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka yang telah Kadaluarsa sebesar Rp18.953.127,00
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	(65.625,00)	Pencatatan Transaksi Akrua: • Pencatatan Baru Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan sebesar (Rp1.378.125,00) • Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka yang telah Kadaluarsa sebesar Rp1.312.500,00
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	2.800.000.000,00	Pencatatan Transaksi Akrua: • Pencatatan Baru Piutang PNBP Tahun Berjalan sebesar Rp6.850.000.000,00 • Pengurangan Piutang PNBP sebesar (Rp4.050.000.000,00)
Pendapatan Pelayanan Fidusia	(12.500.000,00)	Pencatatan Transaksi Akrua: • Pencatatan Baru Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan sebesar (Rp27.650.000,00) • Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka yang telah Kadaluarsa sebesar Rp15.150.000,00
Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	(545.496.738,00)	Pencatatan Transaksi Akrua: • Pengurangan Piutang PNBP sebesar (Rp12.946.738,00) • Pencatatan Baru Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan sebesar (Rp5.446.950.000,00) • Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka yang telah Kadaluarsa sebesar Rp4.914.400.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	5.317.345.675,00	Pencatatan Transaksi Akrua: - Pencatatan Baru Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan sebesar (Rp1.134.950.000,00) - Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka yang telah Kadaluarsa sebesar Rp6.452.295.675,00
Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	(158.499.946.986,00)	Pencatatan Transaksi Akrua: - Pengurangan Piutang PNBPNP sebesar (Rp43.399.870.255,00) - Pencatatan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan sebesar Rp23.105.795.769,00 - Pencatatan Baru Pendapatan Diterima Dimuka sebesar (Rp135.947.772.000,00)
Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	(157.673,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	22.926.081,00	Pencatatan Transaksi Akrua: - Pengurangan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar (Rp92.611,00) - Pencatatan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan sebesar Rp23.018.692,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	(244.409.564,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	(38.295.000,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	(8.699.682,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(596.424.892,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(48.850.775.705,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(28.619.485.115,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	(792.132.522,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Pendapatan Anggaran Lain-lain	(21.040.648,00)	Pencatatan Transaksi Akrua: - Pengurangan Piutang PNBPNP sebesar (Rp21.000.000,00) - Pengurangan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar (Rp40.648,00)
Total	(234.805.435.231,00)	

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa selisih antara Pendapatan PNBPNP-LO dan Pendapatan PNBPNP-LRA sebesar (Rp234.805.435.231,00) disebabkan oleh adanya faktor yang menambah Pendapatan PNBPNP-LO tahun berjalan dan faktor yang mengurangi Pendapatan PNBPNP-LO karena secara akuntansi akrual transaksi



tersebut tidak diperhitungkan sebagai Pendapatan PNB-LO tahun berjalan namun merupakan Pendapatan Operasional Tahun Anggaran Yang Lalu.
Rekapitulasi selisih dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 144
Rekapitulasi Selisih Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Faktor Yang Menambah Pendapatan PNB-LO Tahun Berjalan	
Pendapatan PNB-LO atas Kas di Bendahara Penerimaan	261.817.843,00
Pendapatan PNB-LO atas Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	83.661.080.689,00
Pendapatan PNB-LO Tahun Berjalan atas Transaksi Piutang PNB	666.078.928.003,00
Pendapatan PNB-LO Tahun Berjalan atas Transaksi Pendapatan Diterima Dimuka	139.439.812.928,00
A Sub Total	889.441.639.463,00
Faktor Yang Mengurangi Pendapatan PNB-LO Tahun Berjalan karena merupakan Pendapatan PNB-LO Tahun Sebelumnya	
Pendapatan atas Transaksi Kas di bendahara pengeluaran Tahun Anggaran sebelumnya	(115.386,00)
Pendapatan atas Transaksi Kas lainnya di bendahara pengeluaran Tahun Anggaran sebelumnya	(40.648,00)
Pendapatan atas Transaksi Kas di bendahara penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya	(43.855.796,00)
Pendapatan atas Transaksi Kas lainnya di bendahara penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya	(5.797.649.275,00)
Pendapatan atas Transaksi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Tahun Anggaran sebelumnya	(133.866,00)
Pendapatan atas Transaksi Piutang PNB Tahun Anggaran sebelumnya	(684.350.900.646,00)
Pendapatan atas Transaksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran Sebelumnya	(351.907.984.452,00)
B Sub Total	(1.042.100.680.069,00)
C Pendapatan yang membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(3.287.418.718,00)
D Pendapatan Yang Membentuk Pendapatan Kegiatan Non Operasional	(78.858.975.907,00)
TOTAL (A + B + C + D)	(234.805.435.231,00)

Penjelasan Selisih Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA berdasarkan Analisa Hubungan antar Laporan terdapat pada Lampiran CaLK Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Beban Pegawai
Rp6.879.620.735.064,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai-LO adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negara Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Beban Pegawai-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.879.620.735.064,00 dan Rp6.304.961.550.122,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 145
Perbandingan Beban Pegawai-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/ Turun (%)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	2.419.104.654.311,00	2.160.206.671.670,00	11,98
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	43.302.681,00	39.020.033,00	10,98
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	151.658.198.520,00	139.100.846.054,00	9,03
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	42.946.660.723,00	39.894.342.057,00	7,65
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	70.318.598.570,00	70.951.138.062,00	(0,89)
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	151.331.356.409,00	101.430.267.472,00	49,20
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	3.650.782.765,00	2.680.587.027,00	36,19
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	122.542.154.015,00	118.684.562.664,00	3,25
511129	Beban Uang Makan PNS	532.919.642.689,00	499.340.617.688,00	6,72
511135	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	471.625.000,00	422.250.000,00	11,69
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	7.208.365.000,00	6.672.340.000,00	8,03
511142	Beban Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)	23.954.085,00	0,00	-
511145	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS	999.000.000,00	1.032.024.000,00	(3,20)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	41.629.998.322,00	61.901.668.805,00	(32,75)



512211	Beban Uang Lembur	31.492.085.100,00	25.624.952.350,00	22,90
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3.303.280.356.874,00	3.076.980.262.240,00	7,35
	Total	6.879.620.735.064,00	6.304.961.550.122,00	9,11

Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 146
Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban Pegawai-LO	Belanja Pegawai-LRA	Selisih
6.879.620.735.064,00	6.885.840.107.867,00	(6.219.372.803,00)

Rincian selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 147
Rincian Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Akun	Uraian	Beban Pegawai-LO	Blj. Pegawai-LRA	Selisih
511111	Beban Gaji Pokok PNS	2.419.104.654.311,00	2.419.300.646.303,00	(195.991.992,00)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	43.302.681,00	43.291.132,00	11.549,00
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	151.658.198.520,00	151.657.346.378,00	852.142,00
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	42.946.660.723,00	42.946.611.785,00	48.938,00
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	70.318.598.570,00	70.318.693.570,00	(95.000,00)
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	151.331.356.409,00	151.164.911.709,00	166.444.700,00
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	3.650.782.765,00	3.651.115.491,00	(332.726,00)
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	122.542.154.015,00	122.542.154.015,00	0,00
511129	Beban Uang Makan PNS	532.919.642.689,00	539.107.321.389,00	(6.187.678.700,00)
511135	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	471.625.000,00	471.625.000,00	0,00
511138	Beban Tunjangan	7.208.365.000,00	7.208.365.000,00	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Khusus Papua PNS			
511142	Beban Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)	23.954.085,00	23.954.085,00	0,00
511145	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS	999.000.000,00	999.000.000,00	0,00
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	41.629.998.322,00	41.628.988.932,00	1.009.390,00
512211	Beban Uang Lembur	31.492.085.100,00	31.492.085.100,00	0,00
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3.303.280.356.874,00	3.303.283.997.978,00	(3.641.104,00)
	Total	6.879.620.735.064,00	6.885.840.107.867,00	(6.219.372.803,00)

Selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 148
Penjelasan Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Gaji Pokok PNS	(195.991.992,00)	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu • Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.549,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	852.142,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Beban Tunjangan Anak PNS	48.938,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Beban Tunjangan Struktural PNS	(95.000,00)	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Beban Tunjangan Fungsional PNS	166.444.700,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu • Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan
Beban Tunjangan PPh PNS	(332.726,00)	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Beban Uang Makan PNS		Pencatatan AkruaI atas Transaksi:



	(6.187.678.700,00)	Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Beban Tunjangan Umum PNS	1.009.390,00	Pencatatan Akrua atas Transaksi: - Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu - Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	(3.641.104,00)	Pencatatan Akrua atas Transaksi: Pengurangan Piutang atas Beban Belanja Pegawai
Total	(6.219.372.803,00)	

Perhitungan selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA berdasarkan Analisa Hubungan antar Laporan dapat dijelaskan secara ringkas dalam tabel berikut:

Tabel 149
Perhitungan Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

A	Beban Pegawai-LO	6.879.620.735.064,00
B	Belanja Pegawai-LRA	6.885.840.107.867,00
C	Selisih Antara LO dan LRA	(6.219.372.803,00)
	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
D	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL	(12.778.147.164,00)
E	Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Berjalan	6.562.415.465,00
f	Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas Pengembalian Belanja Pegawai Yang Belum Disetor Ke Kas Negara	(3.641.104,00)
h	TOTAL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	(6.219.372.803,00)
	Selisih (c - h)	0,00

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA sebesar (Rp6.219.372.803,00) disebabkan oleh adanya transaksi pembayaran utang belanja pegawai tahun anggaran yang lalu menggunakan anggaran belanja pegawai tahun berjalan sebesar (Rp12.778.147.164,00), Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas Pengembalian Belanja Pegawai Yang Belum Disetor Ke Kas Negara sebesar (Rp3.641.104,00), dan adanya pencatatan utang belanja pegawai pada tahun berjalan sebesar Rp6.562.415.465,00, yang mengakibatkan menambah Beban Pegawai-LO tahun berjalan.

Beban Persediaan **Rp720.005.876.368,00**

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp720.005.876.368,00 dan Rp636.996.764.306,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 150
Perbandingan Beban Persediaan-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/ Turun (%)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	559.764.509.498,00	605.045.441.811,00	(7,48)
593112	Beban Persediaan Amunisi	1.570.058.368,00	4.115.457.328,00	(61,85)
593121	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	56.800.500,00	301.152.624,00	(81,14)
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	146.344.744.092,00	4.960.295.924,00	2.850,32
593141	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga	611.069.660,00	5.323.579.795,00	(88,52)
593149	Beban Persediaan Lainnya	11.658.694.250,00	17.250.836.824,00	(32,42)
	Total	720.005.876.368,00	636.996.764.306,00	13,03

Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 151
Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban Persediaan-LO	Belanja Persediaan-LRA	Selisih
720.005.876.368,00	721.153.112.890,00	(1.147.236.522,00)

Rincian selisih antara Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 152
Rincian Selisih Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Persediaan Konsumsi	559.764.509.498,00	556.910.981.427,00	2.853.528.071,00
Beban Persediaan Amunisi	1.570.058.368,00	0,00	1.570.058.368,00
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	56.800.500,00	0,00	56.800.500,00
Beban Persediaan Bahan Baku	146.344.744.092,00	194.251.390,00	146.150.492.702,00
Beban Persediaan Dalam Proses	0,00	63.668.000,00	(63.668.000,00)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga	611.069.660,00	0,00	611.069.660,00



Beban Persediaan Lainnya	11.658.694.250,00	163.984.212.073,00	(152.325.517.823,00)
Total	720.005.876.368,00	721.153.112.890,00	(1.147.236.522,00)

Perhitungan selisih antara Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 153
Perhitungan Selisih Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban Persediaan LO	720.005.876.368,00
Belanja Barang Persediaan LRA (Akun 5218xx)	721.153.112.890,00
Selisih Antara LO dan LRA	(1.147.236.522,00)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
Persediaan Awal	411.488.366.832,00
Persediaan Akhir	434.783.362.850,00
Kenaikan/Penurunan Persediaan	23.294.996.018,00
Pembelian	387.455.194.130,00
Beban Persediaan Konsumsi	(339.498.694.805,00)
Beban Persediaan Amunisi	(897.067.672,00)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	(13.789.199.632,00)
Beban Persediaan Suku Cadang	(6.517.909.703,00)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, Leges	(30.641.500,00)
Beban Barang Lainnya utk Diserhkan Kpd Msy	(91.323.551,00)
Beban Persediaan Bahan Baku	(36.454.944.634,00)
Beban Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	(600.057.085,00)
Beban Persediaan Lainnya	(10.287.989.048,00)
Transfer Keluar Barang Persediaan	(261.421.450.782,00)
Transfer Masuk Barang Persediaan	235.174.036.718,00
Saldo Awal Persediaan Hasil Reklasifikasi Aset	762.488.544,00
Koreksi Nilai Persediaan (Kurang)	(34.877.853.503,00)
Koreksi Nilai Persediaan (Tambah)	71.501.658.515,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(338.888.750,00)
Penghapusan Barang Persediaan	(10.836.874,00)
Reklasifikasi Masuk	140.406.450.614,00
Reklasifikasi Keluar	(107.287.645.964,00)
Hibah Barang Persediaan	22.671.000,00
Persediaan yang didapat dari Perolehan Lainnya	77.000.000,00
Total Beban Persediaan	23.294.996.018,00
Selisih	0,00

Beban Barang dan Jasa D.4 Beban Barang dan Jasa

Rp3.692.933.246.281,00 Beban Barang dan Jasa-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.692.933.246.281,00 dan Rp2.929.889.611.316,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 154
Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/ Turun (%)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	212.206.212.210,00	190.013.709.934,00	11,68
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	1.857.223.662.223,00	1.281.459.329.893,00	44,93
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	34.626.727.715,00	30.444.866.667,00	13,74
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.822.936.780,00	6.339.441.811,00	23,40
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	76.801.281.171,00	82.189.505.531,00	(6,56)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	67.723.012.637,00	65.278.712.442,00	3,74
521211	Beban Bahan	186.047.925.701,00	230.214.364.455,00	(19,18)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	47.164.070.108,00	48.706.164.678,00	(3,17)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	248.051.968.772,00	267.410.701.268,00	(7,24)
522111	Beban Langganan Listrik	169.246.708.305,00	152.297.446.946,00	11,13
522112	Beban Langganan Telepon	6.402.419.470,00	6.643.564.706,00	(3,63)
522113	Beban Langganan Air	16.418.928.471,00	15.929.235.600,00	3,07
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	64.982.326.120,00	73.250.696.692,00	(11,29)
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	1.221.000,00	172.171.592,00	(99,29)
522131	Beban Jasa Konsultan	19.221.482.670,00	37.813.377.693,00	(49,17)
522141	Beban Sewa	266.943.950.547,00	281.659.011.056,00	(5,22)
522151	Beban Jasa Profesi	59.382.266.915,00	79.882.062.593,00	(25,66)
522191	Beban Jasa Lainnya	348.459.348.642,00	77.598.047.267,00	349,06
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	4.206.796.824,00	2.565.300.492,00	63,99
595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0,00	21.900.000,00	(100,00)
Total		3.692.933.246.281,00	2.929.889.611.316,00	26,04

Rincian selisih Perbandingan antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 155
Rincian Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Akun	Uraian	Beban Barang dan Jasa-LO	Beban Barang dan Jasa-LRA	Selisih
521111	Beban Keperluan Perkantoran	212.206.212.210,00	212.227.034.731,00	(20.822.521,00)
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	1.857.223.662.223,00	1.892.032.406.044,00	(34.808.743.821,00)
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	34.626.727.715,00	34.626.727.715,00	0,00
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.822.936.780,00	7.537.278.510,00	285.658.270,00
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	76.801.281.171,00	76.801.281.171,00	0,00
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	67.723.012.637,00	67.719.219.637,00	3.793.000,00
521211	Beban Bahan	186.047.925.701,00	187.581.544.448,00	(1.533.618.747,00)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	47.164.070.108,00	47.165.870.108,00	(1.800.000,00)
521214	Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	0,00	87.884.996,00	(87.884.996,00)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	248.051.968.772,00	248.142.714.042,00	(90.745.270,00)
522111	Beban Langganan Listrik	169.246.708.305,00	168.371.377.620,00	875.330.685,00
522112	Beban Langganan Telepon	6.402.419.470,00	6.394.473.129,00	7.946.341,00
522113	Beban Langganan Air	16.418.928.471,00	16.171.748.751,00	247.179.720,00
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	64.982.326.120,00	64.871.837.339,00	110.488.781,00
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00
522131	Beban Jasa Konsultan	19.221.482.670,00	19.221.482.670,00	0,00
522141	Beban Sewa	266.943.950.547,00	264.591.755.084,00	2.352.195.463,00
522151	Beban Jasa Profesi	59.382.266.915,00	59.382.266.915,00	0,00
522191	Beban Jasa Lainnya	348.459.348.642,00	104.231.675.852,00	244.227.672.790,00



595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	4.206.796.824,00	0,00	4.206.796.824,00
	Total	3.692.933.246.281,00	3.477.158.578.762,00	215.774.667.519,00

Penjelasan selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 156
Penjelasan Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Keperluan Perkantoran	(20.822.521,00)	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu • Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan • Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka
Beban Pengadaan Bahan Makanan	(34.808.743.821,00)	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pencatatan Piutang lebih Bayar Pengadaan Bahan Makanan • Pembayaran Utang Belanja Bahan Makanan Tahun Anggaran Yang Lalu
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	285.658.270,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3.793.000,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan
Beban Bahan	(1.533.618.747,00)	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Beban Honor Output Kegiatan	(1.800.000,00)	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	(87.884.996,00)	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pencatatan Beban Rugi selisih Kurs Uang Persediaan Satker perwakilan RI/Atase Teknis
Beban Barang Non Operasional Lainnya	(90.745.270,00)	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Beban Langganan Listrik	875.330.685,00	• Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu • Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan
Beban Langganan Telepon	7.946.341,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu • Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan
Beban Langganan Air	247.179.720,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		- Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu - Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	110.488.781,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: - Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu - Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan
Beban Jasa Pos dan Giro	1.221.000,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: - Pembayaran Utang Belanja Sewa Tahun Berjalan - Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka - Belanja Sewa menggunakan hibah
Beban Sewa	2.352.195.463,00	Pencatatan AkruaI atas Transaksi: Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Beban Jasa Lainnya	244.227.672.790,00	Pembayaran Utang Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	4.206.796.824,00	Beban ini terbentuk dari Pembelanjaan Aset Peralatan dan Mesin dibawah nilai Kapitalisasi
Total	215.774.667.519,00	

Perhitungan selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 157
Perhitungan Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang Jasa-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

a	Beban Barang dan Jasa LO	3.692.933.246.281,00
b	Belanja Barang dan Jasa LRA	3.477.158.578.762,00
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	215.774.667.519,00
	Faktor Yang Mempengaruhi	
	Beban Rugi selisih Kurs Uang Persediaan Satker perwakilan RI/Atase Teknis	(87.884.996,00)
	Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa TAYL	(80.226.345.738,00)
	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan	47.200.323.614,00
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Menggunakan Akun Persediaan (5218xx), namun digunakan untuk Belanja Barang Non Persediaan	(1.571.623.175,00)
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx) yang membentuk Aset	(83.219.545,00)
	Jurnal Manual Peralatan dan Mesin Belum Diregister karena Belanja menggunakan akun 53, namun digunakan untuk Belanja Barang	982.418.200,00
	Jurnal Pencatatan Baru Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	(9.236.953.689,00)
	Jurnal Pencatatan Atas Kadaluarsa atau Habis Masa Manfaat Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	10.955.851.437,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas Beban Honor yang belum diserahkan	(1.800.000,00)
	Beban Ekstrakomptabel	4.206.796.824,00
	Jurnal Manual atas Hibah Jasa	244.312.988.740,00
	Jurnal Transfer Masuk Utang Belanja Barang	(13.080.460.606,00)
	Jurnal Transfer Keluar Utang Belanja Barang	13.080.460.606,00
	Jurnal Pencatatan Piutang PNPB atas Transaksi Kelebihan Pembayaran Belanja BAMA (52xxxx)	(675.884.153,00)
d	Total Faktor Yang Mempengaruhi	215.774.667.519,00
	Selisih (c - d)	0,00

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dan Belanja Barang khusus pembentuk Belanja Barang dan Jasa-LRA sebesar Rp215.774.667.519,00 karena ada faktor-faktor yang mengurangi Beban Tahun Anggaran Berjalan sebesar (Rp104.964.171.902,00) dan faktor-faktor yang menambah beban Tahun Anggaran Berjalan sebesar Rp320.738.839.421,00.

Beban Pemeliharaan
Rp401.899.951.636,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp401.899.951.636,00 dan Rp410.670.100.817,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 158
Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/ Turun (%)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	156.481.687.058,00	164.534.403.679,00	(4,89)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.456.375.372,00	1.811.630.643,00	(19,61)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216.744.257.501,00	210.198.893.880,00	3,11
523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	0,00	501.882.535,00	(100,00)
523124	Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara	73.181.319,00	0,00	-
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.014.260,00	1.355.693.796,00	(81,63)
523132	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	1.220.645.700,00	(100,00)
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	54.104.000,00	226.707.650,00	(95,57)
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1.015.407.472,00	705.046.380,00	347,89



593113	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	18.820.012.236,00	28.020.186.707,00	2.569,33
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	6.869.277.418,00	1.984.034.947,00	(75,48)
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	136.635.000,00	110.974.900,00	(93,11)
Total		401.899.951.636,00	410.670.100.817,00	(2,14)

Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 159
Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban Pemeliharaan-LO	Belanja Pemeliharaan-LRA	Selisih
401.899.951.636,00	382.573.388.281,00	19.326.563.355,00

Rincian selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 160
Rincian Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Akun	Uraian	Beban Pemeliharaan-LO	Belanja Pemeliharaan-LRA	Selisih
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	156.481.687.058,00	157.209.277.155,00	(727.590.097,00)
523112	Beban Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	3.945.602.796,00	(3.945.602.796,00)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.456.375.372,00	1.456.375.372,00	0,00
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216.744.257.501,00	216.750.157.501,00	(5.900.000,00)
523123	Beban Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	1.820.268.406,00	(1.820.268.406,00)
523124	Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara	73.181.319,00	73.181.319,00	0,00
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.014.260,00	249.014.260,00	0,00
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	54.104.000,00	54.104.000,00	0,00
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1.015.407.472,00	1.015.407.472,00	0,00



593113	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	18.820.012.236,00	0,00	18.820.012.236,00
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	6.869.277.418,00	0,00	6.869.277.418,00
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	136.635.000,00	0,00	136.635.000,00
Total		401.899.951.636,00	382.573.388.281,00	19.326.563.355,00

Penjelasan selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 161
Penjelasan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(727.590.097,00)	Pencatatan Akrua atas Transaksi: • Belanja Pemeliharaan yang memenuhi nilai kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan sebesar (Rp727.590.097,00)
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(3.945.602.796,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(5.900.000,00)	Pencatatan Akrua atas Transaksi: • Belanja Pemeliharaan yang memenuhi nilai kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan sebesar (Rp5.900.000,00)
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(1.820.268.406,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	18.820.012.236,00	Beban yang terbentuk dari pemakaian barang persediaan yang ditujukan untuk pemeliharaan
Beban Persediaan Suku Cadang	6.869.277.418,00	Beban yang terbentuk dari pemakaian barang persediaan yang ditujukan untuk pemeliharaan
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	136.635.000,00	Beban yang terbentuk dari Belanja Aset Gedung dan Bangunan yang dibawah nilai batas kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan
Total	19.326.563.355,00	

Perhitungan selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 162
Perhitungan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

	Beban Pemeliharaan LO	401.899.951.636,00
	Belanja Pemeliharaan LRA (Akun 523xxx)	382.573.388.281,00
	Selisih Antara LO dan LRA	19.326.563.355,00
	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	18.820.012.236,00



	Beban Persediaan Suku Cadang	6.869.277.418,00
	Beban Barang Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO	25.689.289.654,00
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	(3.945.602.796,00)
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	(1.820.268.406,00)
	Belanja Akun 523xxx yang membentuk Barang Persediaan	(5.765.871.202,00)
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Aset	(773.841.012,00)
	Jurnal Manual Belum Register atas Belanja Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan (536xxx) dengan nilai dibawah kapitalisasi	40.350.915,00
	Beban Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	136.635.000,00
	Total Jurnal Manual	(596.855.097,00)
	Total Beban Pemeliharaan	401.899.951.636,00
	Selisih	0,00

Dari tabel diatas dapat disimpulkan selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp19.326.563.355,00 disebabkan adanya faktor yang menambah Beban Pemeliharaan-LO tahun berjalan Beban Barang Persediaan yang atas pemakaiannya membentuk Beban Pemeliharaan sebesar Rp25.689.289.654,00 , Jurnal Manual sebesar Rp40.350.915,00 dan Beban Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan sebesar Rp136.635.000,00.

Sedangkan faktor yang mengurangi Beban Pemeliharaan-LO tahun berjalan yaitu Transaksi Belanja Akun Pemeliharaan yang membentuk Beban Persediaan-LO sebesar (Rp5.765.871.202,00) dan Belanja Pemeliharaan yang membentuk Aset karena memenuhi nilai kapitalisasi Aset sebesar (Rp773.841.012,00).

Beban Perjalanan Dinas
Rp682.901.281.455,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp682.901.281.455,00 dan Rp625.199.086.404,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 163
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/ Turun (%)
524111	Beban Perjalanan Biasa	363.165.412.750,00	321.039.530.376,00	13,12
524112	Beban Perjalanan Tetap	0,00	676.300.000,00	(100,00)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.694.608.731,00	61.010.898.691,00	(13,63)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	65.666.169.190,00	77.744.869.991,00	(15,54)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	107.699.200.458,00	93.352.969.574,00	15,37



524211	Beban Perjalanan Biasa – Luar Negeri	64.952.043.890,00	48.735.514.428,00	33,27
524212	Beban Perjalanan Tetap – Luar Negeri	0,00	1.978.694.434,00	(100,00)
524219	Beban Perjalanan Lainnya – Luar Negeri	28.723.846.436,00	20.660.308.910,00	39,03
	Total	682.901.281.455,00	625.199.086.404,00	9,23

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 164
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban Perjadin-LO	Belanja Perjadin-LRA	Selisih
682.901.281.455,00	680.729.789.640,00	2.171.491.815,00

Rincian selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 165
Rincian Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	Beban Perjadin-LO	Belanja Perjadin-LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	363.165.412.750,00	360.955.900.935,00	2.209.511.815,00
Beban Perjalanan Tetap	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.694.608.731,00	52.716.478.731,00	(21.870.000,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	65.666.169.190,00	65.682.319.190,00	(16.150.000,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	107.699.200.458,00	107.699.200.458,00	0,00
Beban Perjalanan Biasa – Luar Negeri	64.952.043.890,00	64.952.043.890,00	0,00
Beban Perjalanan Tetap – Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Lainnya – Luar Negeri	28.723.846.436,00	28.723.846.436,00	0,00
Total	682.901.281.455,00	680.729.789.640,00	2.171.491.815,00

Penjelasan selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 166
Penjelasan Selisih Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019



Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Perjalanan Biasa	2.209.511.815,00	Pencatatan Akrua atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp9.980.749.348,00) • Pencatatan Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun Berjalan sebesar Rp12.190.261.163,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(21.870.000,00)	Pencatatan Akrua atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran Tahun Berjalan sebesar (Rp21.870.000,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(16.150.000,00)	Pencatatan Akrua atas Transaksi: • Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran Tahun Berjalan sebesar (Rp16.150.000,00)

Perhitungan selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 167
Perhitungan Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO
dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban Perjalanan Dinas LO	682.901.281.455,00
Belanja Perjalanan Dinas LRA	680.729.789.640,00
Selisih Antara LO dan LRA	2.171.491.815,00
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
Pembayaran Utang Belanja Perjadi TAYL	(10.018.769.348,00)
Pencatatan Utang Belanja Perjadi Tahun Berjalan	12.190.261.163,00
Total	2.171.491.815,00
Selisih	0,00

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp2.171.491.815,00 adalah karena adanya faktor yang mengurangi Beban Perjalanan Dinas-LO tahun berjalan yaitu pembayaran utang belanja perjalanan dinas tahun lalu (biaya mutasi) sebesar (Rp10.018.769.348,00) dan faktor yang menambah beban perjalanan dinas yaitu pencatatan utang perjalanan dinas (biaya mutasi) tahun berjalan sebesar Rp12.190.261.163,00.

**Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp117.325.551,00**

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp117.325.551,00 dan Rp1.629.306.089,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 168
Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/ Turun (%)
526112	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	5.145.000,00	(100,00)



526115	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	700.616.061,00	(100,00)
526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	923.545.028,00	(100,00)
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	117.325.551,00	0,00	-
Total		117.325.551,00	1.629.306.089,00	(92,80)

Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 169
Rincian Selisih Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat –LO	Blj. Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat -LRA	Selisih
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	117.325.551,00	0,00	117.325.551,00
Total	117.325.551,00	0,00	117.325.551,00

Penjelasan selisih antara Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 170
Penjelasan Selisih Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LO dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	117.325.551,00	Beban terbentuk karena dicatat pada Aplikasi Persediaan dalam kategori untuk diserahkan kepada Masyarakat, maka terbentuk sebagai Beban diserahkan kepada Masyarakat-LO pada saat barang dikeluarkan/diserahkan, walaupun dalam pembelanjannya tidak menggunakan Akun 526xxx (Belanja Barang untuk Diserahkan Ke Masyarakat)
		Beban senilai Rp8.200.000,00 terdapat pada Cabang Rumah Tahanan Negara Labuhan Bilik, berupa
		Beban senilai Rp10.100.000,00 terdapat pada Rutan Masohi, berupa
		Beban senilai Rp27.690.000,00 terdapat pada Rutan Tamiyang Layang, berupa
		Beban senilai Rp71.335.551,00 terdapat pada Ditjen PP berupa Buku-Buku Peraturan Perundang-Undangan yang dibagikan kepada masyarakat.
Total	117.325.551,00	



Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.456.312.580.320,00

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.456.312.580.320,00 dan Rp1.126.350.293.138,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 171
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/ Turun (%)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	952.698.314.968,00	852.310.922.146,00	11,78
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	441.951.337.623,00	239.114.136.815,00	84,83
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7.665.224.207,00	2.216.713.050,00	245,79
591312	Beban Penyusutan Irigasi	1.758.713.137,00	596.504.406,00	194,84
591313	Beban Penyusutan Jaringan	966.527.194,00	658.611.349,00	46,75
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	558.877.581,00	532.475.289,00	4,96
592115	Beban Amortisasi Software	37.190.239.461,00	17.917.856.120,00	107,56
592116	Beban Amortisasi Lisensi	6.939.396.051,00	6.811.553.863,00	1,88
592117	Beban Aset Tak Berwujud Lainnya	1.337.335.000,00	2.609.225.500,00	
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	16.270.833,00	19.166.667,00	(15,11)
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Opr. Pemerintah	5.230.344.265,00	3.563.127.933,00	46,79
	Total	1.456.312.580.320,00	1.126.350.293.138,00	29,29

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 172
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO
dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pd Neraca	Selisih
1.456.312.580.320,00	(425.741.603.239,00)	1.882.054.183.559,00

Rincian selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 173
Rincian Selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO
dengan Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban Penyusutan dan Amortisasi LO	1.456.312.580.320
Akumulasi Penyusutan Awal	(7.397.577.516.014)
Akumulasi Penyusutan Akhir	(6.971.835.912.775)
Faktor Yang Mempengaruhi / Selisih	1.882.054.183.559
Saldo Awal	(5.940.702.163)
Transfer Masuk	(101.188.799.777)
Hibah (Masuk)	(58.269.909)
Reklasifikasi Masuk	(93.723.512.820)
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	(675.654.887)
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(1.670.828.709)
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	(511.765.380)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(7.000.822.068)
Transaksi Normalisasi BMN	(203.395.583)
Koreksi Penyusutan Karena 225	(37.007.638.617)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(2.181.139.197)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(668.657.292)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(721.163)
Reklasifikasi Keluar	(1.289.750)
Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	(37.332.778)
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	(91.908.623)
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	(132.120.968)
Koreksi Penyusutan Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Revaluasi	(1.804.666)
Koreksi Penyusutan Transfer Masuk Akibat Koreksi Revaluasi	(23.908.836)
Akum. Penyusutan Transaksional (Masuk)	(251.120.273.186)
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	325.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	4.091.251.249
Transaksi Normalisasi BMN	4.734.312.949
Koreksi Penilaian Kembali BMN	865.213.572
Koreksi Penyusutan Karena 225	134.569.739.667
Koreksi BMN ditemukan Kembali	715.147.515
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	198.207.958
Penghapusan	7.619.296.001
Transfer Keluar	101.979.415.506
Hibah (Keluar)	9.636.040
Reklasifikasi Keluar	37.294.359.287
Koreksi Pencatatan	12.695.879.676
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	39.115.484



Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	839.591.210
Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	1.899.912.330
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	33.413.049
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	770.141.369
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	159.177.347.760
Koreksi Penyusutan Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Revaluasi	166.881
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	5.525.608
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	537.880.168
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	4.832.374.220
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	2.350.000
Koreksi Penyusutan Transfer Masuk Akibat Koreksi Revaluasi	43.188.304
Akum. Penyusutan Transaksional (Keluar)	472.953.790.803
Jurnal Manual Koreksi Non Revaluasi Aset pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	(42.622.827.279)
Jurnal Manual Beban Kerugian Pelepasan Aset pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	(233.505.547)
Jurnal Manual Transfer Keluar pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	(15.978.028.158)
Jurnal Manual Transfer Masuk pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	15.978.028.158
Jurnal Manual Koreksi Non Revaluasi Aset pada Beban Penyusutan di Satker Konsolidasi	(282.455.212.197)
Jurnal Manual Penyusutan	1.660.220.665.942
Beban Penyusutan Total (b - c + d + e + f)	1.456.312.580.320
Selisih (a - u)	0

**Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
(Rp45.525.753.772,00)**

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp45.525.753.772,00) dan (Rp10.594.819.272,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 174
Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/Turun (%)
594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	(45.509.936.151,00)	(10.724.701.691,00)	324,35
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(6.284.379,00)	140.479.445,00	(104,47)
594411	Beban Penyisihan – Bagian Lancar TP/TGR	405.785,00	(340.420,00)	(219,20)
594931	Beban Penyisihan – Piutang TP/TGR	(1.113.027,00)	(1.742.106,00)	(36,11)
594991	Beban Penyisihan – Piutang Jk. Pjg Lainnya	(8.826.000,00)	(8.514.500,00)	3,66
	Total	(45.525.753.772,00)	(10.594.819.272,00)	329,70



Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 175
Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO
Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO	Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca	Selisih
(45.525.753.772,00)	45.520.331.354,00	(5.422.418,00)

Rincian selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 176
Rincian Selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO
Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO	Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca	Selisih
Beban Penyisihan Piutang PNB	(45.509.936.151,00)	(45.504.509.233,00)	(5.426.918,00)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(6.284.379,00)	(6.284.379,00)	0,00
Beban Penyisihan – Bagian Lancar TP/TGR	405.785,00	451.702,00	(45.917,00)
Beban Penyisihan – Piutang TP/TGR	(1.113.027,00)	(1.163.444,00)	50.417,00
Beban Penyisihan – Piutang Jangka Panjang Lainnya	(8.826.000,00)	(8.826.000,00)	0,00
Total	(45.525.753.772,00)	(45.520.331.354,00)	(5.422.418,00)

Penjelasan selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 177
Penjelasan Selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO
Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

A	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO	45.525.753.772,00
a	Penyisihan Piutang Akhir	(302.597.514.130,00)
b	Penyisihan Piutang Awal	(348.117.845.484,00)
B	Selisih (a - b - A)	(5.422.418,00)
	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
c	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Penyisihan Piutang	(5.422.418,00)
C	TOTAL	(5.422.418,00)
	Selisih (B - C)	0,00



Dari tabel diatas dapat disimpulkan selisih antara Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca sebesar **(Rp5.422.418,00)** disebabkan karena adanya koreksi lainnya karena salah perhitungan Penyisihan Piutang PNPB sebesar **(Rp5.426.918,00)**, Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR sebesar **(Rp45.917,00)** dan Penyisihan Piutang Jangka Panjang TP/TGR sebesar Rp50.417,00.

D.10 Kegiatan Non Operasional

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp3.287.418.718,00

D.10.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pendapatan hasil Penjualan/Lelang Barang Persediaan, Aset Tanah/Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin yang dihapuskan. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.287.418.718,00 dan Rp4.344.573.336,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 178
Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/Turun (%)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	243.583.887,00	37.766.000,00	544,98
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.367.228.830,00	793.888.793,00	72,22
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.676.606.001,00	3.512.918.543,00	(52,27)
	Total	3.287.418.718,00	4.344.573.336,00	(24,33)

Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 179
Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA	Selisih
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	243.583.887,00	243.583.887,00	0,00



Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.367.228.830,00	1.367.228.830,00	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.676.606.001,00	1.676.606.001,00	0,00
	3.287.418.718,00	3.287.418.718,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO dan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Rp91.615.434.880,00

D.10.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp91.615.434.880,00 dan Rp14.852.439.484,00.

Beban ini terbentuk dari Jurnal kirim SIMAK-BMN akibat kerugian pelepasan aset non lancar.

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 180
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Kerugian Pelepasan Aset	91.615.434.880,00	Merupakan Beban Kerugian yang timbul dari transaksi penghapusan barang persediaan, Aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan.
Total	91.615.434.880,00	

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp207.623.854.210,00

D.10.3 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Kelompok pendapatan yang masuk dalam kategori Pendapatan Non Operasional Lainnya-LO adalah pendapatan yang tidak membentuk pendapatan operasional tahun berjalan karena bukan merupakan pendapatan operasional dari menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti pendapatan dari Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara, Tuntutan Perbendaharaan, Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu, Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi, Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan lain-lain.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp207.623.854.210,00 dan Rp798.343.795.611,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 181
Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/Turun (%)



425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	157.673,00	0,00	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Non Bendahara	1.039.373.501,00	413.730.000,00	151,22
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	4.499.682,00	0,00	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	569.807.711,00	1.558.828.392,00	(63,45)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	47.688.484.502,00	3.577.810.127,00	1.232,90
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.631.578.204,00	9.873.973.885,00	(63,22)
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	792.132.522,00	601.442.347,00	31,71
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	3.055.191.428,00	1.101.118.364,00	177,46
491311	Pendapatan Penyesuaian Lainnya	0,00	672.266,00	(100,00)
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	0,00	4.057.929,00	(100,00)
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	13.685.648.809,00	10.819.490.258,00	26,49
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	137.156.980.178,00	770.392.672.043,00	(82,20)
Total		207.623.854.210,00	798.343.795.611,00	(73,99)

Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 182
Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LRA	Selisih
207.623.854.210,00	79.150.380.153,00	128.473.474.057,00

Rincian selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 183
Rincian Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	LO	LRA	Selisih
Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	157.673,00	157.673,00	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Non Bendahara	1.039.373.501,00	244.409.564,00	794.963.937,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0,00	38.295.000,00	(38.295.000,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	4.499.682,00	8.699.682,00	(4.200.000,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	569.807.711,00	596.424.892,00	(26.617.181,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	47.688.484.502,00	48.850.775.705,00	(1.162.291.203,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.631.578.204,00	28.619.485.115,00	(24.987.906.911,00)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	792.132.522,00	792.132.522,00	0,00
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	3.055.191.428,00	0,00	3.055.191.428,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	13.685.648.809,00	0,00	13.685.648.809,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	137.156.980.178,00	0,00	137.156.980.178,00
Total	207.623.854.210,00	79.150.380.153,00	128.473.474.057,00

Selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 184
Penjelasan Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	Selisih	Keterangan
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Non Bendahara	794.963.937,00	- Pencatatan Baru Piutang TP/TGR sebesar Rp1.039.373.501,00 - Pendapatan Piutang TP/TGR Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp244.409.564,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	(38.295.000,00)	Pendapatan Piutang TP/TGR Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp38.295.000,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	(4.200.000,00)	- Pencatatan Baru Piutang TP/TGR Tahun Anggaran Berjalan sebesar Rp4.499.682,00 - Pendapatan Piutang TP/TGR Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp8.699.682,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(26.617.181,00)	- Penyetoran atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp26.247.181,00) - Pendapatan Piutang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp370.000,00)



Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(1.162.291.203,00)	- Pencatatan Baru Piutang Tahun Anggaran Berjalan sebesar Rp1.043.000,00 - Pendapatan Piutang PNPB Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp1.163.334.203,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(24.987.906.911,00)	- Pencatatan baru Piutang Tahun Anggaran Berjalan sebesar Rp507.241.000,00 - Pendapatan Piutang PNPB Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp25.495.147.911,00)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	3.055.191.428,00	Pendapatan yang terbentuk atas selisih Kas di Bendahara Pengeluaran Satker Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri karena adanya perbedaan kurs
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	13.685.648.809,00	Pendapatan yang terbentuk atas perolehan aset lainnya
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	137.156.980.178,00	Pendapatan yang terbentuk dari selisih harga pembelian barang persediaan
Total	128.473.474.057,00	

Penjelasan Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA berdasarkan Metode Perhitungan Analisa Hubungan antar Laporan terdapat pada Lampiran CaLK Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp108.900.728.783,00

D.10.4 Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp108.900.728.783,00 dan Rp689.182.033.242,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 185
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Naik/Turun (%)
521214	Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase	87.884.996,00	141.214.293,00	(37,76)
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	96.922.694.051,00	685.280.365.506,00	(85,86)
596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	8.834.958.308,00	2.615.188.918,00	237,83
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	3.055.191.428,00	1.101.118.364,00	177,46
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	0,00	44.146.161,00	(100,00)
	Total	108.900.728.783,00	689.182.033.242,00	(84,20)

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 186
Penjelasan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019	Keterangan
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase	87.884.996,00	Beban Kerugian yang terbentuk atas selisih saldo Uang Persediaan (UP) Satker Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri karena adanya perbedaan kurs
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	96.922.694.051,00	Beban Penyesuaian yang terbentuk dari selisih harga pembelian barang persediaan
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	8.834.958.308,00	Beban Kerugian yang terbentuk dari persediaan dengan kondisi rusak/usang
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	3.055.191.428,00	Beban Kerugian yang terbentuk atas selisih Kas di Bendahara Pengeluaran Satker Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri karena adanya perbedaan kurs
Total	108.900.728.783,00	



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**PENJELASAN ATAS
POS-POS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp24.224.492.209.998,00

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp24.224.492.209.998,00 dan Rp24.482.912.484.963,00 .

Surplus (Defisit) LO

(Rp9.597.101.584.793,00)

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp9.597.101.584.793,00) dan (Rp8.397.865.557.758,00).

Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

Rp44.349.855.779.083,00

E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp44.349.855.779.083,00 dan (Rp988.246.429.629,00).

Koreksi Nilai Persediaan

Rp1.658.251.434,00

E.3.1. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.658.251.434,00 dan Rp21.090.031.820,00 .

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran.



*Koreksi Atas
Reklasifikasi*

Rp112.326.144.764,00

E.3.2 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Koreksi aset reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp112.326.144.764,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran.

Selisih Revaluasi Aset
Rp44.458.917.830.958,00

E.3.3 SELISIH REVALUASI ASET

Selisih revaluasi aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp44.458.917.830.958,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi*
(Rp223.422.745.158,00)

E.3.4. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi nilai aset non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp223.422.745.158,00) dan (Rp1.021.157.279.315,00).

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Koreksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran.

Koreksi Lain-Lain
Rp376.297.085,00

E.3.5. KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp376.297.085,00 dan Rp11.820.817.866,00.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, beban, hibah, piutang, dan utang.

Koreksi dilakukan untuk mutasi tambah atau mutasi kurang suatu transaksi karena kesalahan pencatatan transaksi di tahun-tahun sebelumnya. Koreksi utang/piutang maupun pendapatan hasil suatu proses validasi atau penilaian ulang dari Inspektorat Jenderal, BPKP, atau BPK.

Rincian Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran.



Transaksi Antar Entitas
Rp9.297.471.943.938,00

E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.297.471.943.938,00 dan Rp9.127.691.712.422,00 .

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun antara K/L dengan BUN.

Perhitungan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 187
Perhitungan Transaksi Antar Entitas LPE
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NO	TRANSAKSI	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Ditagikan Kepada Entitas Lain	Rp13.772.593.807.839,00	Rp12.640.163.039.531,00
2	Diterima Dari Entitas Lain	Rp4.415.573.984.076,00	Rp3.563.546.496.086,00
3	Transfer Keluar	Rp2.672.741.179.477,00	Rp1.640.530.373.151,00
4	Transfer Masuk	Rp2.305.741.571.879,00	Rp1.603.177.212.936,00
5	Pengesahan Hibah Langsung	Rp307.076.488.796,00	Rp84.897.416.216,00
6	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	Rp15.499.477,00	Rp20.004,00
7	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	Rp390.738.454,00	Rp3.530.932.980,00
TOTAL (1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 + 7)		Rp9.297.471.943.938,00	Rp9.127.691.712.422,00

E.4.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019. DDEL sebesar Rp4.415.573.984.076,00 sedangkan DKEL sebesar Rp13.772.593.807.839,00 .

E.4.2. TRANSFER KELUAR / TRANSFER MASUK

Transfer Keluar /Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA-BUN.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Transfer Keluar sebesar Rp2.672.741.179.477,00 dan Transfer Masuk sebesar Rp2.305.741.571.879,00.

Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp366.999.607.598,00, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 188
Rincian Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk
Per 31 Desember 2019

Uraian		Akun	JUMLAH
A	JUMLAH SELISIH TRANSFER (jumlah selisih yang terdapat pada e-rekon)		59.499.542.372,00
	Selisih Transfer pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Di Medan, selisih disebabkan dari koreksi hasil revaluasi atas trn 331 (koreksi transfer keluar akibat koreksi reval) dimana terbentuk untuk mengeliminir nilai koreksian yang telah direkam sebelumnya pada BMN obyek transfer. Selisih merupakan nilai aset atas transfer tersebut, dimana tidak terbentuk isian pada kode satker intraco.. Tujuan transfer ke Lapas Narkotika Langkat.	Gedung dan Bangunan	62.263.614.033,00
	Selisih Transfer pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Di Medan, selisih disebabkan dari koreksi hasil revaluasi atas trn 331 (koreksi transfer keluar akibat koreksi reval) dimana terbentuk untuk mengeliminir nilai koreksian yang telah direkam sebelumnya pada BMN obyek transfer. Selisih merupakan nilai penyusutan transfer tersebut, dimana tidak terbentuk isian pada kode satker intraco. Tujuan transfer ke Lapas Narkotika Langkat.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.899.912.330,00)
	Transfer dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Medan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita Medan, selisih disebabkan dari koreksi hasil revaluasi atas trn 331 (koreksi transfer keluar akibat koreksi reval) dimana terbentuk untuk mengeliminir nilai koreksian yang telah direkam sebelumnya pada BMN obyek transfer. Selisih merupakan nilai aset atas transfer tersebut, dimana tidak terbentuk isian pada kode satker intraco..Perolehan transfer dari LPKA Medan.	Gedung dan Bangunan	(93.174.000,00)
	Transfer dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, selisih disebabkan adanya perubahan nilai wajar pada satker pengirim barang, sehingga perlu dilakukan koreksi manual pada satker penerima untuk menyesuaikan nilai BMN obyek transfer tersebut. Namun dalam koreksi yang telah dilakukan sesuai S-58 DJPB, terdapat ketidaksinkronan antara bentukan jurnal nilai aset (trn 232) koreksi transfer tahun berjalan, dengan koreksi nilai penyusutannya (trn 248), dimana pada koreksi susut tidak terdapat satker intraco, sehingga menimbulkan selisih sebesar nilai penyusutannya.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.286.190,00



Selisih Transfer di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Medan, selisih disebabkan dari koreksi hasil revaluasi atas trn 331 (koreksi transfer keluar akibat koreksi reval) dimana terbentuk untuk mengeliminir nilai koreksian yang telah direkam sebelumnya pada BMN obyek transfer. Selisih merupakan nilai penyusutan transfer tersebut, dimana tidak terbentuk isian pada kode satker intraco. Perolehan transfer dari LPKA Medan.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.072.864,00
Selisih Transfer di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, selisih disebabkan adanya perubahan nilai wajar pada satker pengirim barang, sehingga perlu dilakukan koreksi manual pada satker penerima untuk menyesuaikan nilai BMN obyek transfer tersebut. Namun dalam koreksi yang telah dilakukan sesuai S-58 DJPB, terdapat ketidaksinkronan antara bentukan jurnal nilai aset (trn 232) koreksi transfer tahun berjalan, dengan koreksi nilai penyusutannya (trn 248), dimana pada koreksi susut tidak terdapat satker intraco, sehingga menimbulkan selisih sebesar nilai penyusutannya. Perolehan transfer dari LPKA Pekanbaru.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(37.286.190,00)
Selisih Transfer di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, selisih disebabkan adanya perubahan nilai wajar pada satker pengirim barang, sehingga perlu dilakukan koreksi manual pada satker penerima untuk menyesuaikan nilai BMN obyek transfer tersebut. Namun dalam koreksi yang telah dilakukan sesuai S-58 DJPB, terdapat ketidaksinkronan antara bentukan jurnal nilai aset (trn 247) koreksi transfer TAYL, dengan koreksi nilai penyusutannya (trn 248), dimana pada koreksi susut bentukan jurnalnya terhadap transfer masuk dimana seharusnya adalah koreksi aset tetap non revaluasi, sehingga menimbulkan selisih sebesar nilai penyusutannya. Perolehan transfer dari Kanim Batam.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.933.262,00)
Selisih Transfer di Rumah Tahanan Negara Bandar Lampung, selisih disebabkan adanya perubahan nilai wajar pada satker pengirim barang, sehingga perlu dilakukan koreksi manual pada satker penerima untuk menyesuaikan nilai BMN obyek transfer tersebut. Namun dalam koreksi yang telah dilakukan sesuai S-58 DJPB, terdapat ketidaksinkronan antara bentukan jurnal nilai aset (trn 247) koreksi transfer TAYL, dengan koreksi nilai penyusutannya (trn 248), dimana pada koreksi susut bentukan jurnalnya terhadap transfer masuk dimana seharusnya adalah koreksi aset tetap non revaluasi, sehingga menimbulkan selisih	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.694.375,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	sebesar nilai penyusutannya. Perolehan transfer dari LPP Bandar Lampung.		
	Selisih Transfer di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Purwokerto, selisih disebabkan adanya perubahan nilai wajar pada satker pengirim barang, sehingga perlu dilakukan koreksi manual pada satker penerima untuk menyesuaikan nilai BMN obyek transfer tersebut. Namun dalam koreksi yang telah dilakukan sesuai S-58 DJPB, terdapat ketidaksinkronan antara bentukan jurnal nilai aset (trn 247) koreksi transfer TAYL, dengan koreksi nilai penyusutannya (trn 248), dimana pada koreksi susut bentukan jurnalnya terhadap transfer masuk dimana seharusnya adalah koreksi aset tetap non revaluasi, sehingga menimbulkan selisih sebesar nilai penyusutannya. Perolehan transfer dari Lapas Purwokerto.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.134.641,00
	Selisih Transfer di Kantor Imigrasi Kelas III Palopo, selisih disebabkan adanya perubahan nilai wajar pada satker pengirim barang, sehingga perlu dilakukan koreksi manual pada satker penerima untuk menyesuaikan nilai BMN obyek transfer tersebut. Namun dalam koreksi yang telah dilakukan sesuai S-58 DJPB, terdapat ketidaksinkronan antara bentukan jurnal nilai aset (trn 247) koreksi transfer TAYL, dengan koreksi nilai penyusutannya (trn 248), dimana pada koreksi susut bentukan jurnalnya terhadap transfer masuk dimana seharusnya adalah koreksi aset tetap non revaluasi, sehingga menimbulkan selisih sebesar nilai penyusutannya. Perolehan transfer dari Kanim Pare-Pare.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(101.458,00)
	Selisih Transfer di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, selisih disebabkan adanya perubahan nilai wajar pada satker pengirim barang, sehingga perlu dilakukan koreksi manual pada satker penerima untuk menyesuaikan nilai BMN obyek transfer tersebut. Namun dalam koreksi yang telah dilakukan sesuai S-58 DJPB, terdapat ketidaksinkronan antara bentukan jurnal nilai aset (trn 247) koreksi transfer TAYL, dengan koreksi nilai penyusutannya (trn 248), dimana pada koreksi susut bentukan jurnalnya terhadap transfer masuk dimana seharusnya adalah koreksi aset tetap non revaluasi, sehingga menimbulkan selisih sebesar nilai penyusutannya. Perolehan transfer dari Kanwil Kepri.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.956,00
	Selisih Transfer di Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, selisih disebabkan adanya perubahan nilai wajar pada satker pengirim barang, sehingga perlu dilakukan koreksi manual pada satker penerima untuk	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(867.394,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	menyesuaikan nilai BMN obyek transfer tersebut. Namun dalam koreksi yang telah dilakukan sesuai S-58 DJPB, terdapat ketidaksinkronan antara bentukan jurnal nilai aset (trn 247) koreksi transfer TAYL, dengan koreksi nilai penyusutannya (trn 248), dimana pada koreksi susut bentukan jurnalnya terhadap transfer masuk dimana seharusnya adalah koreksi aset tetap non revaluasi, sehingga menimbulkan selisih sebesar nilai penyusutannya. Perolehan transfer dari Kanim Dumai.		
	Selisih transfer dari DJKI ke Ditjen Imigrasi dikarenakan proses transfer ATR dilakukan secara manual, dan akumulasi penyusutan terbentuk pada satker pengirim (DJKI) sedangkan satker penerima (Ditjen Imigrasi) tidak terbentuk	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(788.992.053,00)
B	TRANSFER KELUAR KE ENTITAS PELAPORAN LAIN (NON BA 013)		343.915.544.568,00
	Transfer keluar dari Sekretariat Jenderal (Pusat) ke SLOG POLRI	Tanah	309.389.184.000,00
	Transfer keluar dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai ke Pengadilan Tinggi Denpasar	Gedung dan Bangunan	305.240.000,00
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(17.955.296,00)
	Transfer keluar dari Direktorat Jenderal Imigrasi ke Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri	Barang Konsumsi	34.239.075.864,00
C	TRANSFER MASUK DARI ENTITAS PELAPORAN LAIN (NON BA 013)		36.415.479.342,00
	Transfer masuk dari Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU) Ke Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat	Tanah	13.613.700.000,00
	Transfer masuk dari Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Banten ke Lembaga Masyarakatan Wanita Tangerang	Aset Tetap Renovasi	1.609.325.600,00
	Transfer masuk dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke Lembaga Masyarakatan Narkotika Yogyakarta	Peralatan dan Mesin	9.358.975,00
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.189.104,00)
	Transfer masuk dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Ke Lembaga Masyarakatan Narkotika Jayapura	Peralatan dan Mesin	9.358.975,00
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.189.104,00)
	Transfer masuk dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke Lapas Batam	Tanah	21.190.114.000,00
	TOTAL SELISIH = A+(B-C) (terdapat pada neraca percobaan dan transaksi antar entitas di LPE)		366.999.607.598,00



Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran.

E.4.3. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp307.076.488.796,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp15.499.477,00.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung dapat dilihat dapat dilihat pada lampiran.

E.4.4. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAHUN ANGGARAN YANG LALU

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-1815/PB/2018 Tanggal 28 Nopember 2019 perihal Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu yang menyatakan bahwa masih terdapat Hibah Langsung Yang Belum Disahkan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK-K/L) Tahun 2018 *Audited* yang disebabkan adanya hibah langsung bentuk uang/barang/jasa/surat berharga yang telah diterima Satuan Kerja namun belum dilakukan pengajuan register dan/atau proses pengesahan hibah langsung.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp390.738.454,00 dan Rp3.530.932.980,00 . Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL dapat dilihat dapat dilihat pada lampiran.

Ekuitas Akhir
Rp68.274.718.348.226,00

E.5. EKUITAS AKHIR

Nilai ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp68.274.718.348.226,00 dan Rp24.224.492.209.998,00 .



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**PENGUNGKAPAN
PENTING LAINNYA**



F. PENGUNGKAPAN - PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyusun Kebijakan Akuntansi Akrua yang memuat transaksi-transaksi spesifik, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang didahului dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

F.2. PENYAJIAN KOREKSI NILAI HASIL REVALUASI

1. Penilaian Kembali di Kementerian Hukum dan HAM

Rincian rekapitulasi hasil Penilaian Kembali BMN sebagaimana terlampir.

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMBALI BMN

Kementerian Hukum dan HAM

Per 31 Desember 2019

No	Uraian Barang	Jumlah NUP	Nilai Revaluasi (Brutto)
1	Tanah	2.348	42.680.634.464.332,00
2	Gedung dan Bangunan	17.601	(204.914.784.971,00)
3	Jalan, Jembatan	151	488.537.307,00
	Bangunan Air		(1.553.161.273,00)
Jumlah		20.100	42.474.655.055.395,00

Sumber data: erekon (menu revaluasi) tgl 14 April 2020

Ket: Nilai Brutto (belum dikurangi Akumulasi Penyusutan)

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara



Tahun 2017-2018, guna menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Pengguna Barang telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan perbaikan;
2. Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian kembali BMN; dan
3. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, telah dilakukan perbaikan penilaian kembali terhadap objek yang menjadi temuan pemeriksaan. Selain itu, juga dilakukan pengujian dan perbaikan atas hasil penilaian kembali di luar objek temuan BPK yang telah dilakukan sebagai dampak dari adanya temuan pemeriksaan pada Pengelola Barang.

Rincian rekapitulasi hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN sebagaimana terlampir.

**REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Pada Kementerian Hukum dan HAM
Per 31 Desember 2019**

No.	Uraian Barang	Jumlah NUP	Nilai BMN		Kenaikan/ Penurunan
			Nilai Wajar Sebelum Perbaikan	Nilai Wajar Setelah Perbaikan	
1	Tanah	1.709	44.427.246.259.466,00	53.120.653.345.900,00	8.693.407.086.434,00
2	Gedung dan Bangunan	11.213	8.346.110.741.015,00	6.475.537.534.900,00	(1.870.573.206.115,00)
3	JJBA	78	24.184.987.000,00	22.539.978.000,00	(1.645.009.000,00)
	Total	13.000	52.797.541.987.481,00	59.618.730.858.800,00	6.821.188.871.319,00

2. Permasalahan Penilaian Kembali BMN

Beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaan dan pelaporan serta tindak lanjut revaluasi:

Dari sisi kebijakan:

- Aturan dan kebijakan terkait pelaksanaan dan koreksi hasil revaluasi belum sepenuhnya dipahami baik di tingkat satuan kerja maupun pada mitra kerja selaku Tim Penilai dari KPKNL.
- Pemahaman yang beragam atau bervariasi atas suatu kasus revaluasi yang serupa. Hal ini berdampak pada perbedaan perlakuan pencatatan dalam aplikasi SIMAK BMN, dan indikasi ini juga menjadi bagian dalam pemeriksaan BPK tahun 2019 dimana terdapat ketidak konsistenan perlakuan atas pelaksanaan dan tindak lanjut revaluasi.
- Jangka waktu pelaksanaan yang serempak pada seluruh kementerian/lembaga, sedikit banyaknya mempengaruhi validitas data revaluasi, dimana sumber awal dari pelaksanaan ini adalah pada pelaksanaan inventarisasi yang seharusnya dilakukan di tiap satuan kerja yang memiliki BMN obyek revaluasi. Sehingga meminimalisir adanya ketidaksesuaian data.

Dari sisi teknis:

- Masih ditemukan adanya selisih nilai wajar antara nilai wajar pada SIP Reval dengan SIMAN. Hal ini diidentifikasi pada saat BPK melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian nilai wajar antara LPK dengan data pada SIMAK BMN, dan ditemukan bahwa masih terdapat perbedaan nilai tersebut. Atas temuan itu, telah ditindaklanjuti dengan melakukan dan memastikan kembali proses sinkronisasi terhadap nilai wajar di aplikasi.
- Ditemukan adanya ketidaksesuaian data pada saat pengambilan ADK CSV, antara nilai yang tampak pada SIMAN sebelum pengambilan ADK dengan nilai yang ada pada ADK CSV tersebut, yang berdampak pada ketidaksesuaian nilai koreksi yang seharusnya direkam satuan kerja.
- Masih ditemukan terkait perbedaan luasan BMN obyek reval pada saat dilakukan koreksi revaluasi dalam aplikasi SIMAK BMN, dan koreksi reval juga harus ditindaklanjuti dengan *updating* data pada KIB satuan kerja.

Masih ditemukan permasalahan teknis pada aplikasi SIMAK BMN pada bentukan jurnal BMN atas koreksi data hasil revaluasi, misal koreksi manual atas transfer TAYL dimana masih berdampak pada TKTM tahun berjalan, selisih pada nilai penyusutannya, serta beberapa jenis transaksi lainnya yang mengalami transfer keluar, hibah keluar ataupun penghapusan BMN.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 hal: Rilis *Update* Aplikasi SIMAK-BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN dan SAIBA agar Satker Konsolidasi melakukan jurnal untuk memasukkan kembali (*take in*) hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang telah dikeluarkan (*take out*) dari LKKL tahun 2018 dan semester I tahun 2019 menggunakan aplikasi SAIBA.

Menindaklanjuti surat tersebut Satker Konsolidasi Kementerian Hukum dan HAM (kode satker 555013) sudah melakukan penjurnalan atas transaksi *take in* tersebut dan telah dilakukan upload pada e-Rekon&LK.

Berdasarkan hasil Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada Laporan Keuangan *Audited* atas koreksi revaluasi Aset Tetap Tahun 2019 sebesar Rp44.458.917.830.958,00, terdapat satuan kerja Lapas Indramayu yang tidak melakukan koreksi rerevaluasi yang mengalami transaksi lanjutan berupa hibah keluar (penghapusan). Dimana atas transaksi lanjutan tersebut mempengaruhi nilai beban kerugian pelepasan aset dan revaluasi aset.

3. INFORMASI BMN DALAM CaLK BMN

a. Kanim Jakarta Pusat

- Terdapat perolehan transfer masuk berupa tanah kantor pada Kanim Jakarta Pusat perolehan dari satker Pusat Pengelola Kemayoran (Setneg). Serah terima dilakukan pada bulan Mei 2019 dengan nilai Rp.67.186.569.000. Nilai tersebut merupakan nilai wajar hasil penilaian dari Tim Penilai KPKNL Jakarta IV di tahun 2018.
- Pada akhir tahun 2019 dalam pelaksanaan rerevaluasi, atas tanah tersebut menjadi obyek rerevaluasi di Setneg dan dalam LHIP 2019 tersebut atas tanah itu menjadi Barang Tidak Ditemukan, sehingga nilai tanah menjadi kembali ke nilai perolehan yaitu sebesar Rp.13.613.700.000 (mengeliminir kenaikan atas hasil penilaian sebelumnya).
- Atas kondisi tersebut, Kanim Jakarta Pusat sesuai dengan hasil kesepakatan dengan Kemenkeu, dalam rangka menjaga selisih TKTM di LKPP agar dapat menyesuaikan nilai transfer masuk yang

semula dibukukan Rp.67.186.569.000 menjadi Rp.13.613.700.000, atau berkurang Rp.53.572.869.000.

- Dalam pelaksanaan audit laporan dari BPK tahun 2019, disampaikan bahwa nilai tanah tersebut tidak menggambarkan nilai wajar yang sebenarnya, sehingga atas kesepakatan bersama Tim BPK dengan pembina di Kemenkeu menyepakati agar Kanim Jakarta Pusat untuk dapat melakukan koreksi atas nilai tanah tersebut menjadi seperti semula yaitu sebesar Rp. 67.186.569.000.

b. Lapas Indramayu

- Pada Lapas Indramayu di tahun 2019 ini terdapat pengelolaan atas BMN berupa tanah dan bangunan yang dihibahkan kepada Pemkab Indramayu. Hibah ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sesuai ketentuan, dimana usulan hibah dari Pemkab dimaksudkan dengan tujuan pengoptimalan aset sekaligus merupakan bagian dalam penataan tata ruang kota di Kabupaten Indramayu.
- Dalam prosesnya, terdapat perbedaan penyajian nilai antara dokumen usulan serta administrasi dengan nilai mutasi keluar akibat hibah tersebut yang disebabkan oleh:
 - a) obyek hibah merupakan obyek revaluasi BMN di tahun 2017/2018
 - b) telah terbit nilai wajar atas BMN obyek hibah tersebut.
 - c) BPK belum dapat menerima atau belum meyakini nilai wajar tersebut sampai dengan periode Semester I tahun 2019.
- Atas dasar kondisi tersebut diatas, usulan pengelolaan BMN yang diajukan di awal tahun 2019, seluruh proses usulan dan administrasi hibah dilakukan dengan menggunakan nilai perolehan (bukan nilai wajar) karena secara legalitas nilai tersebut belum dapat digunakan.
- Administrasi hibah dan SK Penghapusan telah terbit, sehingga dari sisi pencatatan di Lapas Indramayu perlu dilakukan penghapusan atas BMN obyek hibah tersebut.
- Perlakuan dalam aplikasi SIMAK BMN yang ada, bahwa untuk pembukuan penghapusan aset nilai mutasi keluar akan sebesar dengan nilai buku atau nilai tercatat yang ada. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan nilai antara dokumen dan administrasi hibah dengan nilai mutasi keluar yang terjadi. Namun secara substansi dan teknis hal ini dapat dijelaskan secara memadai.

c. Kanim dan Lapas Labuan Bajo

- Terdapat hibah tanah dari Pemkab Manggai Barat dengan rincian:
 - a) dasar BAST Tahun 2010 serah terima tanah seluas 33.113 m2 dari Bupati Manggarai Barat Kepada Kepala Kantor Wilayah

NTT, untuk pembangunan Lapas di Kab Manggarai Barat. (dilengkapi sertifikat tanah).

- b) dasar Akta Hibah Tahun 2017 yang berisi kesepkatan hibah tanah seluas 4.999 m2 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kepala Kantor Imigrasi Labuan Bajo. (dilengkapi sertifikat tanah).
- c) Atas hibah tanah tersebut sampai dengan pelaporan tahun 2019 belum dilakukan pencatatan, dan akan dibukukan pada tahun 2020.

F.3. PERMASALAHAN PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2019

A. E-REKON&LK

1. MONITORING KEUANGAN

Selisih yang terjadi karena perbedaan data antara SIAP dan SAI adalah sebagai berikut:

a. Transaksi Dalam Konfirmasi Segmen CoA

Selisih terjadi karena perbedaan data antara SIAP dan SAI pada program/kegiatan/output yang sama dengan akun yang berbeda atau sebaliknya.

Berikut rincian Transaksi Dalam Konfirmasi:

Tabel 185
DAFTAR TRANSAKSI DALAM KONFIRMASI COA - KAS DI
BENDAHARA PENGELUARAN
S.D 31 DESEMBER 2019 (Unduh Data per Tanggal 19 April 2020)

No	Kode Satker	Uraian	Kode Akun	SIAP	SAI	TDK
DITJEN IMIGRASI						
1	408293	PERWAKILAN IMIGRASI DI SINGAPURA	111611	220.166.817,00	219.706.817,00	460.000,00
2	408293	PERWAKILAN IMIGRASI DI SINGAPURA	111613	0,00	460.000,00	(460.000,00)

3	408341	PERWAKILAN IMIGRASI DI TOKYO	111611	33.033.919,00	32.976.899,00	57.020,00
4	408341	PERWAKILAN IMIGRASI DI TOKYO	111613	0,00	57.020,00	(57.020,00)
5	408401	PERWAKILAN IMIGRASI DI TAWAO	111613	0,00	758.409,00	(758.409,00)
6	408401	PERWAKILAN IMIGRASI DI TAWAO	111611	53.976.054,00	53.217.645,00	758.409,00

Selisih TDK CoA Kas di Bendahara Pengeluaran pada Satker Perwakilan Imigrasi tersebut disebabkan karena kesalahan potongan awal UP tahun 2019 dan akan diselesaikan pada semester I Tahun 2020.

2. MONITORING BMN

a. Rekon SP2D BMN Akun 53

Monitoring BMN – Rekon SP2D Akun 53 merupakan monitoring terhadap pencatatan dokumen SP2D untuk akun 53 antara aplikasi SAIBA dengan SIMAK-BMN. Selisih rekon SP2D BMN 53 antara lain karena kesalahan input nomor dokumen, tanggal, dan kode akun. Penjelasan Selisih Rekonsiliasi SP2D Akun 53 berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran Pengungkapan Lainnya.

b. Selisih Reklasifikasi Keluar Dengan Rekalsifikasi Masuk

Tabel 186
SELISIH REKLASIFIKASI KELUAR DAN MASUK ASET
S.D 31 DESEMBER 2019
(Unduh Data per Tanggal 24 Februari 2019)

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	REKLAS KELUAR	REKLAS MASUK	SELISIH
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM					
1	409257	DIREKTORAT JENDERAL	292.224.600,00	307.569.600,00	15.345.000,00

		ADMINISTRASI HUKUM UMUM			
DITJEN PEMASYARAKATAN					
1	407613	LEMBAGA PEMASYARAK ATAN MATARAM	13.524.822.750,00	13.910.118.750,00	385.296.000,00
2	418364	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	0,00	13.486.346.715,00	13.486.346.715,00
DITJEN IMIGRASI					
1	684006	KANTOR IMIGRASI KELAS III PONOROGO	0,00	4.647.522.146,00	4.647.522.146,00
2	408463	KANTOR IMIGRASI KELAS I BOGOR	24.915.000,00	5.666.334.242,00	5.641.419.242,00

Penjelasan Selisih Reklasifikasi Aset yaitu sebagai berikut:

1. Ditjen AHU sebesar Rp15.345.000,00 disebabkan karena pencatatan koreksi tidak didahului dengan reklas keluar melainkan koreksi perubahan nilai/kuantitas, dilanjutkan dengan reklas masuk (sehingga nilai reklas masuk menjadi lebih besar).
2. Lapas Mataram sebesar Rp385.296.000,00 disebabkan karena pencatatan koreksi tidak didahului dengan reklas keluar melainkan koreksi perubahan nilai/kuantitas, dilanjutkan dengan reklas masuk (sehingga nilai reklas masuk menjadi lebih besar).
3. Rutan Perempuan Surabaya sebesar Rp13.486.346.715,00 disebabkan karena pencatatan pembangunan gedung dan bangunan yang disesuaikan dengan riil bangunannya.
4. Kanim Ponorogo sebesar Rp4.647.522.146,00 disebabkan karena pencatatan pembangunan gedung dan bangunan yang disesuaikan dengan riil bangunannya.
5. Kanim Bogor sebesar Rp5.641.419.242,00 disebabkan adanya temuan pemeriksaan BPK atas belanja gedung

bangunan yang terdapat pembelian peralatan dan mesin, sehingga dilakukan pencatatan koreksi yang tidak didahului dengan reklas keluar melainkan koreksi perubahan nilai/kuantitas, dilanjutkan dengan reklas masuk (sehingga nilai reklas masuk menjadi lebih besar).

3. DAFTAR

a. Jurnal Tidak Lazim

Jurnal Tidak Lazim merupakan penjurnalan terkait aset yang dilakukan secara manual di aplikasi SAIBA. Jurnal tidak lazim yang terdapat pada e-Rekon&LK sampai dengan data tanggal 31 Desember 2019 yang diunduh per tanggal 19 April 2020 sebanyak 312 (Tiga ratus dua belas) jurnal yang disebabkan antara lain karena:

- 1) Jurnal Take In/Take Out Reval yang dibuat di Satker Konsolidasi berjumlah 69 (enam puluh sembilan) jurnal;
- 2) Jurnal Pencatatan Hibah berjumlah 158 (seratus lima puluh delapan) jurnal;
- 3) Jurnal Koreksi atas Pengembalian Belanja Modal berjumlah 3 (tiga) jurnal;
- 4) Jurnal atas Beban Aset Ekstrakomptabel terkait belanja modal dibawah kapitalisasi berjumlah 47 (empat puluh tujuh) jurnal;
- 5) Jurnal atas Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 1 (satu) jurnal;
- 6) Jurnal atas Pengembalian Belanja yang Mengoreksi Nilai KDP berjumlah 1 (satu) jurnal;
- 7) Jurnal atas Pembulatan Belanja Dokumen Keimigrasian berjumlah 1 (satu) jurnal;
- 8) Jurnal atas Koreksi Nilai Persediaan berjumlah 4 (empat) jurnal; dan
- 9) Jurnal atas kesalahan akun belanja berjumlah 28 (dua puluh delapan) jurnal.

Penjelasan atas jurnal tidak lazim berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran Pengungkapan Lainnya.

4. DAFTAR BMN

a. Nilai Buku Minus

Nilai buku minus terjadi ketika nilai akumulasi penyusutan aset (rupiah yang tercatat melebihi nilai perolehan aset tersebut. Per 31 Desember 2019 terdapat nilai buku minus senilai Rp1.506.467.718,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 187
Rincian Nilai Buku Minus per 31 Desember 2019

NO	SATUAN KERJA	NILAI BUKU	KETERANGAN
1	Bapas Medan	(12.837.210,00)	Di history BMN tidak terdapat nilai buku minus
2	Kanim Makassar	(13.200.000,00)	Di history BMN tidak terdapat nilai buku minus
3	LPP Pontianak	(3.742.680,00)	Di history BMN tidak terdapat nilai buku minus
4	Lapas Anak Pekanbaru	(23.504.602,00)	Di history BMN terdapat nilai buku minus sesuai data yang tercantum di E-Rekon
5	Lapas Fakfak	(4.578.856,00)	Di history BMN terdapat nilai buku minus sesuai data yang tercantum di E-Rekon
6	Lapas Tebing Tinggi Deli	(363.264.000,00)	Di history BMN terdapat nilai buku minus sesuai data yang tercantum di E-Rekon
7	Lapas Semarang	(377.231.742,00)	Di history BMN terdapat nilai buku minus sesuai data yang tercantum di E-Rekon
8	Rupbasan Medan	(3.032.550,00)	Di history BMN terdapat nilai buku minus sesuai data yang tercantum di E-Rekon
9	LPKA Martapura	(557.941.992,00)	Di history BMN terdapat nilai buku minus sesuai data yang tercantum di E-Rekon
10	Rutan Pinrang	(81.179.186,00)	Di history BMN tidak terdapat BMN berupa Rumah Negara Golongan II

			seperti yang tercantum di E-Rekon
11	Rutan Sigli	(65.868.000,00)	Di history BMN tidak terdapat nilai buku minus
12	Kanwil DKI Jakarta	(86.900,00)	Di history BMN tidak terdapat nilai buku minus
TOTAL		(1.506.467.718,00)	

B. PENGGUNAAN AKUN YANG KURANG TEPAT DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-211/PB/2018 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, terdapat penggunaan segmen akun kas yang kurang tepat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Akun yang kurang tepat dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, antara lain:

1. Akun 533115 (Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Gedung Dan Bangunan)

Tabel 188

DAFTAR SALDO 533115 - BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN GEDUNG DAN BANGUNAN S.D 31 DESEMBER 2019 (Unduh Data per Tanggal 19 April 2020)

KODE	NAMA SATKER	ALLOTMENT	REALISASI	PENGEMBALI AN
DITJEN PEMASYARAKATAN				
352612	LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	(676.549.000,00)	86.550.000,00	0,00
418345	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	(1.459.100.000,00)	1.459.100.000,00	0,00
418346	Lapas Perempuan Kelas III Ambon	(1.655.417.000,00)	1.648.939.257,00	0,00

418361	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	(2.083.427.000,00)	2.083.349.600,00	(2.606.800,00)
DITJEN IMIGRASI				
109160	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG PANDAN	(160.000.000,00)	159.665.000,00	0,00
409026	KANTOR IMIGRASI KELAS II LANGSA	(55.317.000,00)	55.015.125,00	0,00
409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	(670.000.000,00)	648.400.000,00	0,00
Jumlah		(6.759.810.000,00)	6.141.018.982,00	(2.606.800,00)

Penjelasan atas akun 533115 (Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Gedung Dan Bangunan) berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran Pengungkapan Lainnya.

2. Akun 534131 (Belanja Modal Jaringan)

Tabel 189

**DAFTAR SALDO 534131 - BELANJA MODAL JARINGAN
S.D 31 DESEMBER 2019 (Unduh Data per Tanggal 19 April 2020)**

KODE	NAMA SATKER	ALLOTMENT	REALISASI
JAWA BARAT			
683039	KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI	(152.406.000,00)	152.406.000,00
Jumlah		(152.406.000,00)	152.406.000,00

Akun 534131 (Belanja Modal Jaringan) pada Kanim Bekasi diperuntukkan untuk belanja jaringan LAN dan internet di gedung Kantor Imigrasi yang baru.

3. Akun 425764 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))

Tabel 190

DAFTAR SALDO 425764 - PENDAPATAN JASA LEMBAGA KEUANGAN (JASA GIRO)

S.D 31 DESEMBER 2019 (Unduh Data per Tanggal 19 April 2020)

KODE	NAMA SATKER	ESTIMASI	REALISASI
SEKRETARIAT JENDERAL			
404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	0,00	(115.386,00)
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM			
099297	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	0,00	(118.624.289,00)
099298	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	72.000.000,00	(50.474.800,00)
409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	25.000,00	0,00
DITJEN PEMASYARAKATAN			
404611	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	0,00	(11.955,00)
404987	RUMAH TAHANAN NEGARA BANYUMAS	0,00	(7.907,00)
Jumlah		72.025.000,00	(169.234.337,00)

Penjelasan atas akun 425764 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)) berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran Pengungkapan Lainnya.

4. Beban Aset Ekstrakomtabel

Masih terdapat Beban Aset Ekstrakomtabel, terkait belanja modal dengan nilai dibawah kapitalisasi

Tabel 191

BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL

S.D 31 DESEMBER 2019 (Unduh Data per Tanggal 19 April 2020)

NO	KODE	NAMA SATKER	BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL	JUMLAH
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM				
1	099297	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	Gedung dan Bangunan	18.860.000,00
DITJEN PEMASYARAKATAN				
1	352606	LPKA Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Peralatan dan Mesin	41.421.600,00
2	404271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG	Peralatan dan Mesin	350.000,00
3	404466	BALAI PEMASYARAKATAN BOGOR	Peralatan dan Mesin	1.900.000,00
4	404497	LAPAS CIANJUR	Peralatan dan Mesin	7.600.000,00
5	404724	BALAI PEMASYARAKATAN PEKALONGAN	Peralatan dan Mesin	2.227.000,00
6	404821	RUMAH TAHANAN NEGARA PURWOREJO	Peralatan dan Mesin	795.000,00



7	404950	LAPAS KLATEN	Peralatan dan Mesin	10.500.000,00
8	405311	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMPANG	Peralatan dan Mesin	15.500.000,00
9	409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Peralatan dan Mesin	3.237.792.755,00
10	418334	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	Peralatan dan Mesin	1.970.000,00
11	418340	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	Peralatan dan Mesin	36.220.000,00
12	652983	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	Peralatan dan Mesin	19.450.000,00
13	653133	BALAI PEMASYARAKATAN WONOSARI	Peralatan dan Mesin	6.975.000,00
14	683512	RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG KELAS D	Peralatan dan Mesin	4.680.000,00
15	683643	LAPAS KELAS III BONTANG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	Peralatan dan Mesin	23.760.000,00
16	684000	Rutan Kelas II B Depok	Peralatan dan Mesin	52.874.000,00
17	405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	Gedung dan Bangunan	12.500.000,00
18	406174	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	Gedung dan Bangunan	14.810.000,00



19	406984	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	Gedung dan Bangunan	15.000.000,00
20	407230	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	Gedung dan Bangunan	20.205.000,00
21	408454	RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	Gedung dan Bangunan	33.260.000,00
22	653442	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI	Gedung dan Bangunan	22.000.000,00
DITJEN IMIGRASI				
1	407973	KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG	Peralatan dan Mesin	51.602.000,00
2	407989	KANTOR IMIGRASI KELAS II CILACAP	Peralatan dan Mesin	33.000.000,00
3	408009	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SURABAYA	Peralatan dan Mesin	11.988.000,00
4	408083	KANTOR IMIGRASI KELAS II DUMAI	Peralatan dan Mesin	9.741.000,00
5	408128	KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAKANG PADANG	Peralatan dan Mesin	2.970.000,00
6	408134	KANTOR IMIGRASI KELAS I JAMBI	Peralatan dan Mesin	93.864.700,00
7	408222	KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR	Peralatan dan Mesin	27.365.400,00



8	408448	KANTOR IMIGRASI KELAS I PALANGKARAYA	Peralatan dan Mesin	14.850.000,00
9	408573	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDA ACEH	Peralatan dan Mesin	2.996.400,00
10	408875	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	Peralatan dan Mesin	9.570.000,00
11	408953	KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNG PERAK	Peralatan dan Mesin	32.500.600,00
12	408981	KANTOR IMIGRASI KELAS II SIBOLGA	Peralatan dan Mesin	15.600.000,00
13	409108	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NGURAH RAI	Peralatan dan Mesin	99.395.600,00
14	409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	Peralatan dan Mesin	2.085.000,00
15	664612	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	Peralatan dan Mesin	36.289.000,00
16	664629	RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG	Peralatan dan Mesin	46.570.000,00
17	664654	RUMAH DETENSI IMIGRASI BALIKPAPAN	Peralatan dan Mesin	990.000,00
18	664675	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	Peralatan dan Mesin	41.250.000,00
19	683039	KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI	Peralatan dan Mesin	62.370.000,00

20	683533	KANTOR IMIGRASI KELAS III TAKENGON	Peralatan dan Mesin	23.250.000,00
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL				
1	097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peralatan dan Mesin	124.533.769,00

Penjelasan atas akun Beban Aset Ekstrakomptabel berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran Pengungkapan Lainnya.

F.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Nilai Uang Pihak Ketiga Pada BHP Tidak Terdapat Pada Neraca

Terdapat Uang Pihak Ketiga yang tidak dicatat dalam Neraca, berupa *Onbeeherde*, *Perwalian* dan *Boedel Afwezigheid* yang ditempatkan pada rekening giro masing-masing BHP dengan jumlah Rp92.100.077.858,00.

Rincian uang pihak ketiga (UPK) yang tidak dicatat di Laporan Keuangan Neraca disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 192

Rincian uang pihak ketiga per 31 Desember 2019

Nama BHP	Tunai	Rekening	Total
Balai Harta Peninggalan Medan	0,00	1.404.540.927,00	1.404.540.927,00
Balai Harta Peninggalan Semarang	0,00	1.952.199.309,00	1.952.199.309,00
Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang	0,00	268.345.815,00	268.345.815,00
Balai Harta Peninggalan Jakarta	0,00	63.623.700.799,00	63.623.700.799,00
Balai Harta Peninggalan Surabaya	0,00	24.851.291.008,00	24.851.291.008,00
Total	0,00	92.100.077.858,00	92.100.077.858,00

Menurut Konsep Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan No. 82/LK-Kumham/04/2017, disampaikan bahwa Uang Pihak Ketiga tidak seluruhnya memenuhi syarat untuk diakui sebagai kas setara kas lainnya

karena baru dapat disetorkan ke kas negara setelah dikelola selama 1/3 abad. Seharusnya yang dicatat sebagai Kas Setara Kas Lainnya hanya uang pihak ketiga yang berasal dari proses Kepailitan karena uang tersebut diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu 12 bulan sejak dilaporkan. Hal tersebut diperkuat dengan peraturan sebagai berikut;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran 1 PSAP 01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada paragraf 67 Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 219/pmk.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan 224/PMK.05/2016 pada lampiran Bab III Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas huruf B poin 2.d Kas dan Setara kas lainnya yang dikelola Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah merupakan saldo kas pada KL selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU, yang dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga dan kas dari hibah langsung KL.

B. Hibah United States Agency for International Development (USAID)

Pada tahun anggaran 2019, Kementerian Hukum dan HAM c.q. satuan kerja Sekretariat Jenderal telah melakukan proses registrasi hibah jasa dari luar negeri yang diterima Kementerian Hukum dan HAM dari *United States Agency for International Development* (USAID). Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, proses registrasi hibah luar negeri diajukan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran satker penerima hibah, dalam hal ini Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Biro Keuangan baru mendapat informasi terkait penyelesaian kegiatan hibah dimaksud pada bulan Mei 2019. Selanjutnya, Kepala Biro Keuangan mendapat Nota Dinas dari Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama nomor SEK.5-KU.03.02-2 tanggal 12 Juli 2019 hal Permohonan Registrasi Hibah USAID ke Kemenkeu, dan telah ditindaklanjuti hingga terbitnya surat dari Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen DJPPR nomor S-

468/PR.8/2019 tanggal 8 Agustus 2019 hal Penerbitan Nomor Register Hibah untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (surat terlampir). Sesuai lampiran surat tersebut, hibah dimaksud mendapatkan nomor register 2DS44SFA. Nilai yang diajukan pada proses pengajuan registrasi adalah \$67,046,176 dan menjadi Pendapatan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Registrasi hibah tersebut tidak memiliki dampak pada Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019.

Adapun latar belakang hibah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia mendapatkan hibah dari pemerintah Amerika Serikat melalui *The United States Agency for International Development* (USAID). Perjanjian hibah tersebut dituangkan dalam *Assistance Agreement (AA) Between the United States of America and the Republic of Indonesia for the Achievement of a Stronger Indonesia Advancing National and Global Development*. Perjanjian dengan kode *USAID Assistance Agreement* nomor 497-AA-030 ditandatangani pada tanggal 29 September 2014 oleh Derrick S. Brown selaku *Acting* (Pelaksana Tugas) *Mission Director* USAID mewakili pemerintah Amerika Serikat dan Robert Pakpahan selaku *Director General of Debt Management* atau Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (sekarang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan) mewakili pemerintah Indonesia. Hibah diperkirakan selesai dilaksanakan hingga tanggal 30 September 2019;
2. Hibah tersebut diimplementasikan ke dalam 4 (empat) *Development Objective (DO) and Results*. Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional (sekarang Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama), Sekretariat Jenderal ditunjuk selaku *Executing Agency DO 1 : Democratic Governance Strengthened*. Hal tersebut tertuang dalam *Implementation Arrangement for USAID Assistance in Indonesia Assistance Agreement No. 497-AA-030 (Assistance Agreement) Implementation Letter (IL) No. 2 – Designation of the Ministry of Law and Human Rights as Executing Agency for DO 1*, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto pada tanggal 26 Maret 2015;
3. *Individual Arrangement (IA)* dengan USAID ditandatangani oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Efendy Peranginangin pada bulan Agustus 2016. IA diamandemen untuk pertama kali pada bulan April 2018, ditandatangani oleh Karo Humas Ajub Suratman; amandemen kedua pada bulan Februari 2019, ditandatangani oleh

Karo Humas Bambang Wiyono. Nilai akhir hibah berdasar amandemen kedua adalah \$67,046,176;

4. Kegiatan DO 1 dilaksanakan pada satuan kerja di 29 Kementerian/Lembaga dan 2 lembaga non satuan kerja Kementerian/Lembaga selaku *Technical Counterpart Agencies*. Di Kementerian Hukum dan HAM, kegiatan telah dilaksanakan di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen HAM, BPHN, dan Balitbang HAM.
5. Penjelasan atas daftar satuan kerja penerima manfaat Hibah Usaid dapat dilihat pada Lampiran Pengungkapan Lainnya.

C. Kronologi Penanganan dan Penggantian Biaya Perkara yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia atas Kemenangan kasus Churchill Mining Plc Dan Planet Mining Pty.Ltd

1. Pada tanggal 18 Maret 2019 Komite ICSID menegaskan kembali kemenangan Indonesia melalui sebuah putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap. Komite ICSID dengan tegas menolak request for annulment Para Penggugat. Selain itu Komite ICSID juga memutuskan untuk mencabut/mengakhiri stay of enforcement of the award dan terkait biaya proses pemeriksaan request for annulment di ICSID dibebankan kepada Para Pengugat namun Indonesia tidak mendapatkan penggantian biaya legal fees.
2. Melalui kemenangan ini, Indonesia terhindar dari klaim sebesar USD 1.3 Milyar (sekitar Rp 17,8 Triliun) dan dengan dicabutnya stay of enforcement of the award, maka Putusan Tribunal ICSID pada tanggal 6 Desember Tahun 2016 dapat dieksekusi termasuk putusan Tribunal ICSID yang memerintahkan Para Penggugat untuk mengganti biaya berpekerja Pemerintah Indonesia sebesar USD 9,446,528.
3. Pada tanggal 5 April 2019, Planet Mining Pty.Ltd menunjuk Likuidator di Australia yaitu RSM Australia Partners dan Churchill Mining Plc menunjuk administrator di Inggris yaitu RSM Restructuring Advisory LLP. Lebih lanjut pada tanggal 9 April 2019 Churchill Mining Plc menyampaikan notifikasi penunjukan joint administrators (Notice of appointment of joint Administrators) ke pengadilan Inggris. Melalui penunjukan administrator tersebut Churchill Mining Plc menyatakan insolven/pailit di Court of England dan proses insolvensi/kepailitan dimulai di Inggris. Melalui penunjukan Likuidator, Planet Mining Pty.Ltd menyatakan pailit melalui creditors' voluntary liquidation (CVL).
4. Berdasarkan laporan dari Administrator UK, Churchill Mining Plc hanya memiliki asset sebesar GBP 231,866 dan laporan dari Likuidator

Australia, Planet Mining Pty.Ltd memiliki asset senilai AUD 0. Jumlah asset senilai GBP 231.866 akan digunakan untuk biaya proses kepailitan sebesar GBP 160.000, biaya administrasi sebesar GBP 40.000, untuk unsecured creditors sebagaimana ketentuan statute sebesar GBP 5000 dan sisanya sebesar GBP 26.309,31 akan dibayarkan kepada secured creditor. Dalam hal ini terdapat secured creditor, yakni Pala sementara Pemerintah RI bukan termasuk dalam secured creditor, sehingga Pala akan mendapatkan prioritas untuk mengambil value asset senilai GBP 26.309,31 tersebut dan jika ditemukan aset lainnya.

5. Pada tanggal 28 Februari 2020, Grup Mintz memulai penyelidikan selama dua minggu terhadap aset yang di miliki oleh Churchill Mining Plc dan anak perusahaan yang terkait untuk memastikan bahwa tidak ada aset yang bernilai signifikan yang dihilangkan oleh Churchill sebelum kebangkrutannya.
6. Setelah dua minggu melakukan penyelidikan, Grup Mintz mengirimkan sebuah memorandum laporan yang merangkum temuan-temuan investigasi kepada Curtis. Laporan tersebut kepada Administrator Churchill Mining Plc di Inggris dan Planet Mining Plc di Australia.
7. Pada tanggal 20 Maret 2020, para Administrator untuk Churchill Mining Plc menulis surat kepada Curtis, dari laporan yang mereka kirimkan bahwa ada aset yang dapat direalisasikan untuk Administrasi Churchill Mining Plc.
8. Pada tanggal 1 April 2020, Administrator Churchill Mining Plc, mengumumkan deklarasi dividen dimana kreditor tanpa jaminan dengan tingkat dividen yaitu 0,28 pence dalam pound. Jumlah total pembayaran GBP 20.980,61 dan GBP 221,96 telah digunakan untuk biaya klaim. Pembayaran dilakukan melalui Bank RSM sebesar GBP 20.797,91 ke nomor rekening 11779481 (BNINIDJA).
9. Pada tanggal 14 April 2020 Pemerintah Indonesia menerima Biaya perkara tersebut melalui Bank Negara Indonesia sebesar Rp408.268.788 dengan nomor rekening 11779481 (DITJEN ADM HUKUM UMUM DEP HUKUM DAN HAM RI) dan uang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 14 April 2020 dengan NTPN: 3DAD58N3DEAL840.

F.5. PENGUNGKAPAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Semenjak pertama kali diumumkan adanya penyebaran *Coronavirus* (Covid-19) oleh China di pengujung tahun 2019, yang mana penyebaran virus tersebut berawal dari kasus lokal, Covid-19 telah menyebar dengan cepat

keseluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal ataupun melalui transmisi lokal antar penduduk.

Konfirmasi telah menyebarnya Covid-19 di Indonesia, diawali dengan pengumuman oleh Pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020, bahwa telah terdapat temuan 2 (dua) kasus positif Covid-19. Semenjak itu pertumbuhan kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia terus meningkat.

Dengan melihat data penyebaran Covid-19 yang sangat luas keseluruh dunia, maka pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO), mengumumkan bahwa dunia telah mengalami Pandemi Covid-19, dan mengarahkan agar negara-negara terjangkau mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menangani Pandemi Covid-19 tersebut.

Pemerintah Pusat telah memerintahkan kepada Menteri, Kepala Pemerintah Daerah dan Aparatur Negara lainnya untuk menyusun langkah-langkah penanganan Pandemi Covid-19, tak terkecuali dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan beberapa Surat Edaran terkait penanganan Pandemi Covid-19 untuk diterapkan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik yang akan berdampak langsung maupun tidak terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020, antara lain:

1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SEK-KU.01.02-68 tanggal 17 Maret 2020, Hal: Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja dan *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang menyampaikan antara lain:
 - a. Agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran belanja sesuai RPD yang tercantum dalam Halaman III DIPA khususnya belanja barang dan belanja modal melalui:
 - Percepatan pelaksanaan lelang pada akhir Maret 2020;
 - Penandatanganan kontrak untuk seluruh pekerjaan yang telah selesai lelang dan percepatan pelaksanaan kegiatannya;
 - Percepatan proses pembayaran kontrak untuk pekerjaan yang telah jatuh tempo.
 - b. Dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-6/MK.02/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dengan mekanisme revisi sebagai berikut:



- Mengutamakan revisi pergeseran anggaran pada output Layanan Perkantoran pada komponen (994.002) Operasional dan Pemeliharaan Kantor atau Layanan Dukungan Manajemen Satker pada komponen (970.055) Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan dengan menambahkan subkomponen baru yaitu **Penanganan Covid-19** yang berisikan kebutuhan satuan kerja dalam pencegahan penularan Covid-19 seperti pembelian masker, *hand sanitizer*, disinfektan, *thermometer infrared non-contact* dan lain sebagainya;
 - Dalam hal revisi pergeseran sebagaimana pada poin (a) tidak dapat terpenuhi, maka revisi dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran antar Ouput dalam 1 (satu) Kegiatan atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program yang sama.
 - Dalam hal penyesuaian pagu belanja Kementerian Hukum dan HAM TA 2020 yang dilakukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, di antaranya dilakukan pengurangan anggaran belanja modal pada beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang akan berdampak pada pekerjaan fisik yang terhambat dan akan berpotensi meningkatkan nilai KDP. Namun demikian, atas pengurangan anggaran belanja modal tersebut, agar dapat dialokasikan kembali pada pagu belanja Tahun Anggaran 2021. Satuan kerja yang mengalami pengurangan anggaran belanja modal tersebut di antaranya adalah :
 - a) Lapas Kelas I merupakan alokasi anggaran Pembangunan Baru Rumah Tahanan Negara Kelas I Semarang
 - b) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan yang merupakan Pembangunan Baru Relokasi
 - c) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang yang merupakan Pembangunan Baru Lanjutan
 - d) Rumah Tahanan Negara Donggala yang merupakan Pembangunan Baru Pasca Pembakaran dan Gempa Tahun 2018.Khususnya pada satuan kerja Pemasyarakatan, kegiatan pembangunan dimaksud dilakukan dalam rangka penanganan *overcrowding* pada Lapas atau Rutan.
2. Surat Kepala Biro Keuangan Nomor: SEK.3.KU.01.02-13 tanggal 24 Maret 2020, Hal: Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020, yang antara lain menyampaikan hal-hal berikut:
- a. Memperhatikan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan

Realokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dimana disampaikan Satuan Kerja agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19 dengan melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran yang cepat, sederhana, dan akuntabel.

- b. Sebagai bentuk relaksasi kebijakan penilaian IKPA belanja K/L tahun 2020 dalam rangka mendukung kebijakan pada poin diatas, maka penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang akan diatur lebih lanjut.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga akan berdampak pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, di antaranya terdapat perubahan kebijakan PNBP TA 2020 terkait dampak Covid-19 pada Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan surat Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1-KU.01.03-2152 tanggal 20 April 2020, antara lain:

- 1) Kebijakan Saudi Arabia per tanggal 2 Februari 2020
- 2) Kebijakan untuk Warga Negara Tiongkok per tanggal 5 Februari 2020
- 3) Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Direktorat Jenderal Imigrasi per tanggal 06 Maret 2020
- 4) Kebijakan Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa per tanggal 20 Maret 2020
- 5) Kebijakan Tentang Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) terhadap Awak Alat Angkut Pasca Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) per tanggal 20 Maret 2020
- 6) Kebijakan Tentang Penghentian Sementara Pelayanan Pemberian Paspor dan Keberangkatan PMI ke Luar negeri per tanggal 23 Maret 2020
- 7) Kebijakan tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Kantor Imigrasi per tanggal 23 Maret 2020
- 8) Kebijakan tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia per tanggal 02 April 2020

Penjelasan mengenai kebijakan tersebut terdapat dalam lampiran

Berdasarkan kebijakan-kebijakan baru pelayanan Keimigrasian selama wabah virus corona, akan mempengaruhi pada realisasi PNBP

Keimigrasian. Beberapa kebijakan tersebut dimulai sejak bulan Maret 2020 hal tersebut berakibat realisasi PNBP dari bulan Maret 2020 sampai dengan pandemic corona selesai akan mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi PNBP tahun 2019. Berikut perhitungan Kembali prognosis realisasi PNBP s.d. Desember 2020 akibat wabah virus corona:

PROGNOSIS PNBP KEIMIGRASIAN TA 2020

BULAN	TOTAL	KETERANGAN
JANUARI	246,944,785,750	Realisasi PNBP Keimigrasian
FEBRUARI	202,921,561,750	
MARET	130,502,687,600	
APRIL	12,026,512,000	Prognosis Realisasi PNBP selama wabah corona
MEI	10,000,000,000	
JUNI	10,000,000,000	
JULI	10,000,000,000	
AGUSTUS	100,000,000,000	Prognosis Realisasi PNBP setelah wabah corona
SEPTEMBER	150,000,000,000	
OKTOBER	200,000,000,000	
NOVEMBER	200,000,000,000	
DESEMBER	200,000,000,000	
TOTAL	1,472,395,547,100	

Catatan : *Estimasi pandemic corona berakhir di bulan Juli 2020 dan layanan keimigrasian dimulai bulan Agustus dan berangsur normal pada bulan Oktober 2020*



Prognosis realisasi PNBPN s.d. Desember 2020 per Kode Akun

BULAN	425211	425212	425213	425214	TOTAL
	PASPOR	VISA	IZIN KIM	LAINNYA	
JANUARI	145,714,300,000	31,723,385,750	57,401,400,000	12,105,700,000	246,944,785,750
FEBRUARI	116,005,500,000	23,292,761,750	53,683,900,000	9,939,400,000	202,921,561,750
MARET	51,612,400,000	15,789,337,600	54,636,150,000	8,464,800,000	130,502,687,600
APRIL	378,000,000	502,612,000	10,329,000,000	816,900,000	12,026,512,000
MEI	5,900,000,000	1,300,000,000	2,300,000,000	500,000,000	10,000,000,000
JUNI	5,900,000,000	1,300,000,000	2,300,000,000	500,000,000	10,000,000,000
JULI	5,900,000,000	1,300,000,000	2,300,000,000	500,000,000	10,000,000,000
AGUSTUS	59,000,000,000	13,000,000,000	23,200,000,000	4,800,000,000	100,000,000,000
SEPTEMBER	88,500,000,000	20,000,000,000	34,500,000,000	7,000,000,000	150,000,000,000
OKTOBER	118,000,000,000	25,700,000,000	46,000,000,000	10,300,000,000	200,000,000,000
NOVEMBER	118,000,000,000	25,700,000,000	46,000,000,000	10,300,000,000	200,000,000,000
DESEMBER	118,000,000,000	25,700,000,000	46,000,000,000	10,300,000,000	200,000,000,000
TOTAL	832,910,200,000	185,308,097,100	378,650,450,000	75,526,800,000	1,472,395,547,100

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 519/KMK.02/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat menggunakan kembali sebagian dana yang sudah masuk ke kas negara sebesar 79,18%.

Target PNBPN 2020 sebesar Rp. 2.103.677.100.000,-, sehingga besaran maksimal pagu belanja (79.18% dari target PNBPN 2020) sebesar Rp.1.665.691.527.780,-. Pagu belanja *existing* sebesar Rp. 1.419.790.900.000,-. Apabila Realisasi PNBPN Keimigrasian TA 2020 akibat wabah corona sebesar Rp.1.472.395.547.100,-, maka maksimal

penggunaan pagu belanja atas anggaran yang bersumber dari PNBPN menjadi Rp. 1.165.842.794.19,-, atau pagu yang tidak dapat digunakan dalam DIPA TA 2020 sebesar Rp.253,948,105,806,-.

Dengan adanya kebijakan *Work From Home* serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN akan sulit untuk terserap. Ada beberapa kegiatan baik Kantor Pusat maupun Satker yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic ini, diantaranya kegiatan sosialisasi, kegiatan bimbingan teknis dan kegiatan *capacity building*. Pengadaan paspor, pengembangan sistem dll akan tetap berjalan.

Kebijakan-kebijakan Kementerian Hukum dan HAM selama masa wabah corona akan berakibat pada penurunan realisasi PNBPN Kementerian Hukum dan HAM TA 2020 dan target PNBPN TA 2020 tidak dapat tercapai. Maka dari itu perlunya perhitungan kembali besaran target PNBPN TA 2020.

Terjadi penurunan Realisasi PNBPN 2020 akibat wabah corona sebesar 30%, dengan asumsi bahwa kebijakan sementara selama wabah corona akan berakhir pada bulan Juli 2020. Serta bulan juli sampai dengan desember akan mengalami kenaikan realisasi PNBPN secara bertahap. Beberapa hal yang membuat penurunan realisasi diantaranya:

- 1) Penurunan Realisasi PNBPN Keimigrasian untuk Jenis Penerimaan Paspor karena penutupan akses masuk bagi Orang Asing ke Saudi Arabia untuk keperluan Umroh serta penghentian sementara pelayanan paspor, paspor tetap dapat dilayani dalam keadaan darurat.
- 2) Dengan adanya pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Republik Indonesia, sehingga berpengaruh pada menurunnya penerimaan dari layanan visa maupun perpanjangan izin keimigrasian.
- 3) Akibat dari wabah corona, serta kebijakan pemerintah untuk pencegahan penyebaran virus corona berpotensi besar penurunan Realisasi PNBPN Keimigrasian dari semua jenis layanan baik itu paspor, visa, izin keimigrasian serta layanan keimigrasian lainnya

Selain surat-surat diatas, terdapat pula surat-surat lainnya dari Biro Perencanaan maupun Unit Eselon I Pemasarakatan dan Imigrasi, yang isinya kurang lebih mengatur hal yang sama tentang revisi anggaran dalam rangka *refocussing* kegiatan yang mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Dampak Penanganan Pandemi Covid-19 terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat disimpulkan dari Surat-surat Edaran diatas maupun kemungkinan-kemungkinan lainnya yaitu:

- a. Akan ada revisi anggaran belanja dalam rangka *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- b. Akan ada relaksasi penilaian IKPA selama masa Penetapan Pandemi Covid-19;
- c. Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, dikhawatirkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran belanja, khususnya belanja barang dan modal tidak dapat terealisasi secara maksimal, karena banyaknya hambatan dilapangan;
- d. Realisasi Penerimaan PNBP juga diperkirakan akan mengalami penurunan, karena menurunnya pengajuan dari masyarakat atas pelayanan umum dari Unit Eselon I seperti Ditjen Kekayaan Intelektual, Ditjen Administrasi Hukum Umum maupun Ditjen Imigrasi;
- e. Penerimaan Hibah Langsung baik berupa Hibah Uang maupun Hibah Barang/Jasa juga diperkirakan akan mengalami penurunan, seiring dengan kondisi yang memprihatinkan bagi semua pihak;
- f. Pekerjaan Fisik Baru maupun lanjutan KDP tahun sebelumnya juga diperkirakan akan mengalami kendala, mengingat kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam proses revisi, lelang maupun dalam pelaksanaan pekerjaan fisiknya sendiri, yang berpotensi tidak selesainya pekerjaan fisik dan meningkatnya nilai KDP dalam Laporan;
- g. Kondisi Ekonomi yang terpuruk akibat pembatasan operasional perusahaan dan bisnis, juga berpotensi meningkatkan piutang tak tertagih, baik Piutang PNBP, Piutang Lainnya dan Piutang TP/TGR;
- h. Dan lain-lain.

F.6. TINDAK LANJUT PENYELESAIAN TEMUAN BPK

F.6.1. Progres Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Bmn Kemenkumham Berupa Tanah Di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang

A. Penyelesaian permasalahan tanah Kemenkumham yang digunakan oleh Pemkot Tangerang

1. Pemerintah Kota Tangerang memanfaatkan beberapa bidang tanah Kemenkumham yang berlokasi di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang untuk:

- a. Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang;
 - b. Jalan Satria Sudirman;
 - c. Pedestrian Jalan Jenderal Sudirman;
 - d. Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Gedung SD Negeri Sukasari 4 dan SD Negeri Sukasari 5.
2. Dalam rangka penertiban pemanfaatan BMN, Kemenkumham dan Pemerintah Kota Tangerang telah menyusun Nota Kesepakatan Nomor SEK-PB.04.02-262 tanggal 23 Juli 2019, dengan kesepakatan ^{591/185-Kesamomi/2019} bahwa Kemenkumham dan Pemerintah Kota Tangerang akan menyelesaikan penatausahaan atas bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut diatas.
 3. Menindaklanjuti Nota Kesepakatan, Pemkot Tangerang mengajukan permohonan hibah kepada Kemenkumham atas bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud kepada Kemenkumham.
 4. Selanjutnya, Kemenkumham dan Pemkot Tangerang serta Kantor Pertanahan Kota Tangerang secara bersama-sama melakukan pengukuran atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan untuk dihibahkan.
 5. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh informasi sebagai berikut:

No.	Pemanfaatan Bidang Tanah	Luas (m ²)
1	Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang	3.364
2	Jalan Satria Sudirman	41.964
3	Pedestrian Jalan Jenderal Sudirman	13.408
4	Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.551
5	Gedung SD Negeri Sukasari 4 dan SD Negeri Sukasari 5	4.996
Total		68.283

6. Dengan telah diperolehnya data luasan bidang-bidang tanah Kemenkumham yang telah dimanfaatkan oleh Pemkot

Tangerang tersebut, Kemenkumham segera mengajukan usul persetujuan hibah kepada Pengelola Barang pada tahun 2020.

B. Penyelesaian permasalahan tanah Kemenkumham yang digunakan oleh Pihak Ketiga tanpa izin

1. Tanah Kemenkumham yang dimanfaatkan untuk Pasar Pujasera

Kemenkumham telah melakukan penertiban dengan mengaihkan status penggunaan BMN berupa tanah seluas 16.659 m² yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga untuk Pasar Pujasera kepada Polri guna pembangunan Kantor Polres Metro Kota Tangerang.

Pengalihan status penggunaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-107/MK.6/WKN.7/2019 tanggal 9 September 2019, dan telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dari Kemenkumham kepada Polri melalui BAST Nomor BA/5/IX/LOG.9/2019/SLOG tanggal 26 September 2019.
SEK-PB.04.01-381

2. Tanah Kemenkumham yang dimanfaatkan untuk Parkir Pool Alat Berat

Kemenkumham telah mengenakan mekanisme sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pemanfaatan tanah oleh Pihak Ketiga seluas 2.000 m² untuk Parkir Pool Alat Berat.

- a. Pemanfaatan dalam bentuk sewa tanah untuk Parkir Pool Alat Berat telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang melalui surat Menteri Keuangan Nomor Nomor S-199/MK.06/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 2 Desember 2019 dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun;
- b. Persetujuan sewa tersebut telah ditetapkan pelaksanaannya melalui SK Menkumham Nomor SEK-10.PB.04.02 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan nilai sewa sebesar Rp213.955.000,00.
- c. Pihak Ketiga telah melakukan pembayaran sewa ke Kas Negara pada tanggal 18 Februari 2020.
- d. Saat ini pelaksanaan sewa tersebut sedang dalam proses penandatanganan perjanjian sewa.

3. Tanah Kemenkumham yang dimanfaatkan untuk SPBU

Kemenkumham telah mengenakan mekanisme sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pemanfaatan tanah oleh KPPDK seluas 2.306,5 m² untuk SPBU.

- a. Pemanfaatan dalam bentuk sewa tanah untuk SPBU telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang melalui surat Menteri Keuangan Nomor Nomor S-26/MK.6/WKN.07/2019 tanggal 4 Maret 2019 dengan jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun.
 - b. Persetujuan sewa tersebut telah ditetapkan pelaksanaannya melalui SK Menkumham Nomor Keputusan Menkumham Nomor SEK-25.PB.04.02 Tahun 2019 dengan nilai sewa sebesar Rp1.208.000.000,00.
 - c. KPPDK telah melakukan pembayaran sewa ke Kas Negara pada tanggal 4 April 2019.
 - d. Kemenkumham dan KPPDK telah menandatangani perjanjian sewa Nomor SEK.6-PB.04.02-12 tanggal 13 April 2019.
4. Kemenkumham juga telah mengenakan mekanisme sewa terhadap pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga pada beberapa lokasi tanah Kemenkumham di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, sebagai berikut:

No	Nama Penyewa	SK Penetapan Pelaksanaan Sewa		PNBP (Rp)
		Nomor	Tanggal	
1	Herry Sutrisno	SEK-33.PB.04.02 TAHUN 2019	26-03-19	79.546.000,00
2	Mumuh Darmawan	SEK-59.PB.04.02 TAHUN 2019	14-06-19	45.980.000,00
3	Rita Kusuma sari	SEK-57.PB.04.02 TAHUN 2019	20-05-19	191.585.000,00
4	M. Luthfi	SEK-80.PB.04.02 TAHUN 2019	23-08-19	195.515.000,00
6	Sri Eddy Muhammad	SEK-07.PB.04.02 TAHUN 2020	15-01-20	120.015.000,00
7	Djunaidi Salim	SEK-10.PB.04.02 TAHUN 2020	10-02-20	213.955.000,00
8	Nofli	SEK-29.PB.04.02 TAHUN 2020	19-02-20	137.265.000,00

Total	983.861.000,00

C. Penyelesaian permasalahan tanah Kemenkumham yang digunakan untuk rumah mandiri

Sekretaris Jenderal telah menyampaikan surat kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan inventarisasi atas rumah dinas mandiri baik yang telah maupun yang belum tercatat dalam daftar barang Kemenkumham melalui surat Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Nomor SEK.4-PB.04.04-685 tanggal 28 Mei 2019.

Sekretaris Jenderal juga segera menginstruksikan Satuan Kerja Kemenkumham di Kota Tangerang untuk melakukan inventarisasi rumah mandiri mengingat sebagian rumah mandiri juga tercatat dalam daftar barang Satuan Kerja.

Di samping upaya-upaya penertiban diatas, khususnya terkait penertiban tanah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga baik untuk kegiatan bisnis maupun rumah mandiri, Kemenkumham d.h.i Sekretaris Jenderal juga telah menyusun Surat Edaran Nomor SEK-03.PB.04.03 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 pada Satuan Kerja/UPT Kemenkumham di Kota Tangerang.

F.6.2.

Aset Tetap Tanah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Di Pulau Nusakambangan Tidak Menggambarkan Kondisi Yang Sebenarnya

Hasil penelusuran secara uji petik terhadap dokumen administrasi serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Aset Tetap Tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Ditjenpas di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah diketahui kondisi sebagai berikut:

- Pengelolaan Pulau Nusakambangan oleh Ditjenpas Bersinggungan dengan Kewenangan Pengelolaan Pihak Lain;
- Penyajian Luas dan Nilai Aset Tetap Tanah Ditjenpas di Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap Tidak Menggambarkan Kondisi Yang Sebenarnya;
- Ditjenpas belum melakukan peningkatan legalitas bukti kepemilikan berupa sertifikat atas tanah Pulau Nusakambangan;
- Tanah Ditjenpas di Pulau Nusakambangan berpotensi sengketa dan dikuasai oleh Penduduk di Wilayah Kecamatan Kampung Laut;

Atas temuan ini, penjelasan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait progress tindak lanjut temuan beserta dokumen dukung terdapat pada lampiran Pengungkapan Lainnya.

F.6.3.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Belum Menindaklanjuti Rekomendasi atas Permasalahan Tanah Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah.

Berdasarkan progres penyelesaian tindak lanjut terkait penyelesaian permasalahan BMN, diketahui bahwa rekomendasi BPK masih dalam proses tindak lanjut dengan penjelasan dan dokumen dukung dari Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana terdapat pada lampiran Pengungkapan Lainnya.



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK:
NERACA**

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 3:09 AM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,937,351,678	2,473,362,985	(536,011,307)	(21.67)
Kas Lainnya dan Setara Kas	52,788,944,267	32,906,472,664	19,882,471,603	60.42
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	9,853,310,665	11,586,621,509	(1,733,310,844)	(14.96)
Uang Muka Belanja (prepayment)	5,558,458,273	0	5,558,458,273	0.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	51,754,279	6,258,866	45,495,413	726.90
Piutang Bukan Pajak	322,805,448,526	386,127,641,921	(63,322,193,395)	(16.40)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(302,472,521,625)	(347,983,315,237)	45,510,793,612	(13.08)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	20,332,926,901	38,144,326,684	(17,811,399,783)	(46.69)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	427,956,678	337,616,858	90,339,820	26.76
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(2,139,784)	(1,688,082)	(451,702)	26.76
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	425,816,894	335,928,776	89,888,118	26.76
Persediaan	539,879,870,427	411,488,366,832	128,391,503,595	31.20
JUMLAH ASET LANCAR	630,828,433,384	496,941,338,316	133,887,095,068	26.94
ASET TETAP				
Tanah	54,456,131,211,590	12,625,444,631,053	41,830,686,580,537	331.32
Peralatan dan Mesin	7,398,289,284,727	6,680,447,076,850	717,842,207,877	10.75
Gedung dan Bangunan	11,958,064,335,324	10,457,963,798,623	1,500,100,536,701	14.34
Jalan, Irigasi dan Jaringan	99,520,892,828	74,628,773,346	24,892,119,482	33.35
Aset Tetap Lainnya	29,342,783,620	68,218,739,768	(38,875,956,148)	(56.99)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	217,154,025,040	722,754,577,352	(505,600,552,312)	(69.95)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,273,137,327,181)	(6,786,047,821,180)	512,910,493,999	(7.56)
JUMLAH ASET TETAP	67,885,365,205,948	23,843,409,775,812	44,041,955,430,136	184.71
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1,757,871,682	1,097,460,531	660,411,151	60.18
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(84,433,721)	(85,597,165)	1,163,444	(1.36)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	1,673,437,961	1,011,863,366	661,574,595	65.38
Piutang Jangka Panjang lainnya	7,683,800,000	9,449,000,000	(1,765,200,000)	(18.68)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(38,419,000)	(47,245,000)	8,826,000	(18.68)
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	7,645,381,000	9,401,755,000	(1,756,374,000)	(18.68)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	9,318,818,961	10,413,618,366	(1,094,799,405)	(10.51)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	625,234,698,857	526,019,128,257	99,215,570,600	18.86
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	13,924,560,000	14,478,828,000	(554,268,000)	(3.83)
Aset Lain-lain	326,651,278,466	349,586,548,982	(22,935,270,516)	(6.56)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(698,698,585,594)	(611,529,694,834)	(87,168,890,760)	14.25
JUMLAH ASET LAINNYA	267,111,951,729	278,554,810,405	(11,442,858,676)	(4.11)
JUMLAH ASET	68,792,624,410,022	24,629,319,542,899	44,163,304,867,123	179.31

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 3:09 AM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	64,435,234,760	105,218,621,484	(40,783,386,724)	(38.76)
Hibah Yang Belum Disahkan	20,870,993,354	57,545,454	20,813,447,900	36,168.71
Pendapatan Diterima Dimuka	430,662,482,004	297,076,909,128	133,585,572,876	44.97
Uang Muka dari KPPN	1,937,351,678	2,473,362,985	(536,011,307)	(21.67)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	893,850	(893,850)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	517,906,061,796	404,827,332,901	113,078,728,895	27.93
JUMLAH KEWAJIBAN	517,906,061,796	404,827,332,901	113,078,728,895	27.93
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	68,274,718,348,226	24,224,492,209,998	44,050,226,138,228	181.84
JUMLAH EKUITAS	68,274,718,348,226	24,224,492,209,998	44,050,226,138,228	181.84
JUMLAH EKUITAS	68,274,718,348,226	24,224,492,209,998	44,050,226,138,228	181.84
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	68,792,624,410,022	24,629,319,542,899	44,163,304,867,123	179.31



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK:
NERACA PERCOBAAN SALDO AWAL**

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2019 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,086,022,988	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	387,339,997	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	323,577,765	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	12,700,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	32,570,194,899	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	11,586,621,509	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	6,258,866	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	362,189,910,210	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	23,937,731,711	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	81,925,008	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	255,691,850	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0	347,842,204,698
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	141,110,539
0.0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	563,375
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	1,124,707
0.0	117111	Barang Konsumsi	364,667,077,931	0
0.0	117112	Amunisi	34,570,912,054	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,936,457,724	0
0.0	117114	Suku Cadang	359,369,392	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	911,500,000	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	41,584,625	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	742,218,657	0
0.0	117131	Bahan Baku	562,444,277	0
0.0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1,690,402,429	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	5,006,399,743	0
0.0	131111	Tanah	12,625,444,631,053	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,680,447,076,850	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,457,963,798,623	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	27,053,244,336	0
0.0	134112	Irigasi	14,712,398,057	0
0.0	134113	Jaringan	32,863,130,953	0
0.0	134213	Jaringan Belum Diregister	0	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	45,188,314,404	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	23,030,425,364	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	722,754,577,352	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,407,498,695,412

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2019 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,323,816,547,094
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	19,922,444,800
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	4,215,213,219
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	24,551,206,938
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	6,043,713,717
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	1,097,460,531	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	9,449,000,000	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	85,597,165
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	47,245,000
0.0	162151	Software	365,999,789,149	0
0.0	162161	Lisensi	69,961,715,122	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	92,950,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	89,964,673,986	0
0.0	163119	Dana Lainnya	14,478,828,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	318,379,510,023	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	31,207,038,959	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	256,677,527,937
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	299,196,496,040
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	21,898,296,731
0.0	169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	2,609,225,500
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	31,148,148,626
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	12,919,440,645
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	77,374,781,805
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	379,186,966
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	138,616,469
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	14,406,595,599
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	57,545,454
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	1,875,541,229
0.0	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	0	295,201,367,899
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	2,473,362,985
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	893,850
0.0	391111	Ekuitas	0	24,224,492,209,998
JUMLAH			32,375,014,904,397	32,375,014,904,397



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK:
NERACA PERCOBAAN KAS**

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 2:19 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	318,122,744,638	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	1,014,522,171,076	0
2.0	425119	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	63,056,000	0
2.0	425122	Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Yang	90,079,000	0
2.0	425129	Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1,060,000	0
2.0	425131	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5,908,730,000	0
2.0	425132	Estimasi Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin Yang	221,000,000	0
2.0	425139	Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya Yang	923,800,000	0
2.0	425211	Estimasi Pendapatan Paspor Yang Dialokasikan	927,202,500,000	0
2.0	425212	Estimasi Pendapatan Visa Yang Dialokasikan	132,785,750,000	0
2.0	425213	Estimasi Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk	708,418,750,000	0
2.0	425214	Estimasi Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya Yang	235,095,000,000	0
2.0	425215	Estimasi Pendapatan Pelayanan Fidusia Yang Dialokasikan	521,839,850,000	0
2.0	425216	Estimasi Pendapatan Pelayanan Badan Hukum Yang	194,021,000,000	0
2.0	425217	Estimasi Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya Yang	171,805,175,000	0
2.0	425218	Estimasi Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual Yang	500,000,000,000	0
2.0	425219	Estimasi Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	28,148,000	0
2.0	425421	Estimasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2,449,000,000	0
2.0	425699	Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya Yang Dialokasikan	31,596,000	0
2.0	425764	Estimasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Yang	72,025,000	0
2.0	425791	Estimasi Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	2,126,000	0
2.0	425911	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun	9,382,000	0
2.0	425912	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran	70,122,000	0
2.0	425913	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran	13,200,000	0
2.0	425991	Estimasi Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Yang	464,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	2,422,851,892,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	53,591,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	152,006,871,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	43,144,555,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	70,758,256,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	152,403,146,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	4,193,792,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	122,946,750,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	545,249,068,000
2.0	511135	Allotment Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil	0	473,942,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	7,258,527,000
2.0	511142	Allotment Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)	0	45,000,000
2.0	511145	Allotment Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home	0	999,000,000
2.0	511147	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	111,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	47,303,968,000
2.0	511153	Allotment Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	0
2.0	511192	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	3,692,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 2:19 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	34,776,891,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	3,304,270,793,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	215,871,429,000
2.0	521112	Allotment Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	1,917,921,636,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	35,635,995,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	8,425,374,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	77,680,475,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	69,547,507,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	203,059,650,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	55,076,744,000
2.0	521214	Allotment Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker	0	181,841,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	266,486,572,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	579,309,007,000
2.0	521813	Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan	0	0
2.0	521821	Allotment Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	194,846,000
2.0	521822	Allotment Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	63,750,000
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	167,074,000,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	173,431,599,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	7,382,083,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	17,700,061,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	65,723,611,000
2.0	522121	Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro	0	0
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	25,195,576,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	271,592,487,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	65,700,113,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	114,553,791,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	158,241,880,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung	0	4,193,653,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1,457,495,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	227,176,927,000
2.0	523122	Allotment Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan	0	0
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan	0	2,193,241,000
2.0	523124	Allotment Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara	0	83,000,000
2.0	523129	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	254,703,000
2.0	523133	Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	54,244,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	1,016,423,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	389,730,104,000
2.0	524112	Allotment Belanja Perjalanan Tetap	0	0
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	58,061,489,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	72,773,328,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	119,694,756,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	85,893,936,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 2:19 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	31,209,037,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	897,162,362,000
2.0	532121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	5,317,882,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	572,384,651,000
2.0	533113	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	0	0
2.0	533115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	6,759,810,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	106,011,638,000
2.0	534131	Allotment Belanja Modal Jaringan	0	152,406,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	63,268,530,000
2.0	536121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0	42,879,266,000
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	277,851,441
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	243,583,887
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,367,228,830
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,676,606,001
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,638,667,409
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	518,230	0
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	10,900,000
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	234,230,816
3.0	425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara	0	9,600,000
3.0	425211	Pendapatan Paspor	0	1,253,341,710,000
3.0	425212	Pendapatan Visa	0	406,729,695,455
3.1	425212	Pengembalian Pendapatan Visa	100,000	0
3.0	425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-	0	716,949,900,000
3.1	425213	Pengembalian Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk	25,700,000	0
3.0	425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	182,272,796,707
3.1	425214	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	75,275,000	0
3.0	425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	0	750,038,450,000
3.1	425215	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Fidusia	1,100,000	0
3.0	425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	0	238,961,567,249
3.1	425216	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	68,700,000	0
3.0	425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	0	40,498,033,955
3.1	425217	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	29,600,000	0
3.0	425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	0	714,619,064,505
3.1	425218	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	292,470,000	0
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	409,509,374
3.0	425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	0	62,795,023
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	23,138,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	2,449,000,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	304,448,721
3.0	425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	0	157,673
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	201,126,738
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	244,417,564

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 2:19 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	425791	Pengembalian Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian	8,000	0
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	38,295,000
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	8,699,682
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	9,262,197,485
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	596,424,892
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	48,850,775,705
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,619,485,115
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	792,132,522
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	40,235,807
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	317,433,950
3.1	425999	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain	22,704,200	0
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,419,571,792,786	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	271,146,483
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	48,121,382	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	4,830,250
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	151,707,380,000	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	50,033,622
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	42,951,155,517	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	4,543,732
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	70,447,245,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	128,551,430
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	151,666,916,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	502,004,291
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,652,696,497	0
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	1,581,006
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	122,555,838,938	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	13,684,923
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	539,128,550,369	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	21,228,980
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	471,725,000	0
3.1	511135	Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat	0	100,000
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	7,213,265,000	0
3.1	511138	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	4,900,000
3.0	511142	Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)	23,954,085	0
3.0	511145	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS	999,000,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	46,389,315,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	4,760,326,068
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	31,521,024,150	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	28,939,050
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,304,216,471,721	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	932,473,743
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	212,235,545,739	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 2:19 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	8,511,008
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	1,893,225,680,090	0
3.1	521112	Pengembalian Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	1,193,274,046
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	34,626,776,715	0
3.1	521113	Pengembalian Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	49,000
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,537,278,510	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	76,817,519,671	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	16,238,500
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	67,737,281,902	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	18,062,265
3.0	521211	Belanja Bahan	187,595,796,941	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	14,252,493
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	47,356,438,608	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	190,568,500
3.0	521214	Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	87,884,996	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	248,423,305,896	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	280,591,854
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	556,946,799,227	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	35,817,800
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	194,251,390	0
3.0	521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	63,668,000	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	164,016,175,573	0
3.1	521832	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	31,963,500
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	168,405,022,799	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	33,645,179
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	6,395,086,389	0
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	613,260
3.0	522113	Belanja Langganan Air	16,173,851,351	0
3.1	522113	Pengembalian Belanja Langganan Air	0	2,102,600
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	64,885,599,488	0
3.1	522119	Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	13,762,149
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	19,221,482,670	0
3.0	522141	Belanja Sewa	264,607,292,715	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	15,537,631
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	59,763,430,765	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	381,163,850
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	104,232,425,852	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	750,000
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	157,245,817,105	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	36,539,950
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	3,945,602,796	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,456,375,372	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 2:19 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216,762,838,065	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	12,680,564
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,820,268,406	0
3.0	523124	Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	73,181,319	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249,014,260	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	54,104,000	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,015,407,472	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	366,037,712,800	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	5,081,811,865
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52,755,323,731	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	38,845,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66,167,054,114	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	484,734,924
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	112,426,349,897	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	4,727,149,439
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	76,256,137,916	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	11,304,094,026
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	28,938,157,106	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	214,310,670
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	865,371,844,864	0
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	16,620,000
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	5,261,711,400	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	555,326,768,006	0
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	138,459,379
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	6,141,018,982	0
3.1	533115	Pengembalian Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	2,606,800
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	98,746,048,018	0
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	0	12,579,485
3.0	534131	Belanja Modal Jaringan	152,406,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	57,340,596,161	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	38,770,903,155	0
JUMLAH			18,539,640,591,821	18,539,640,591,821



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK: NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 3:09 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,435,660,559	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	501,691,119	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	86,350,048	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	52,702,594,219	0
0.0	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	9,853,310,665	0
0.0	114213	Uang Muka Belanja Modal (prepayment)	5,558,458,273	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	51,754,279	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	320,957,758,705	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,847,689,821	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	44,400,000	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	383,556,678	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	302,337,695,465
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	134,826,160
0.0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	0	222,000
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	0	1,917,784
0.0	117111	Barang Konsumsi	499,217,618,038	0
0.0	117112	Amunisi	36,620,981,310	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,866,938,621	0
0.0	117114	Suku Cadang	39,411,688	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	902,500,000	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	41,584,625	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	593,706,580	0
0.0	117131	Bahan Baku	0	0
0.0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	597,129,565	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	54,456,131,211,590	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,398,289,284,727	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	11,958,064,335,324	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	47,418,640,374	0
0.0	134112	Irigasi	14,260,346,819	0
0.0	134113	Jaringan	37,841,905,635	0
0.0	134213	Jaringan Belum Diregister	0	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	6,272,593,665	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	23,070,189,955	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 3:09 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	217,154,025,040	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,208,649,428,511
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,010,882,340,912
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	16,713,596,026
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	4,982,515,101
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	26,441,559,386
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	5,467,887,245
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti	1,757,871,682	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	7,683,800,000	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan	0	84,433,721
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	38,419,000
0.0	162151	Software	542,367,402,109	0
0.0	162161	Lisensi	78,738,882,748	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	4,128,414,000	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
0.0	163119	Dana Lainnya	13,924,560,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	325,067,001,477	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	1,584,276,989	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	254,689,878,321
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	411,517,619,374
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	27,053,200,410
0.0	169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	3,946,560,500
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	1,491,326,989
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	6,539,852,465
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	46,404,315,668
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	80,886,169
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	11,410,180,458
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	20,870,993,354
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	4,335,768,155
0.0	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	0	426,326,713,849
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,937,351,678
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	13,772,593,807,839
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,415,573,984,076	0
0.0	313211	Transfer Keluar	2,672,741,179,477	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,305,741,571,879
0.0	391111	Ekuitas	0	24,224,492,209,998
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	1,658,251,434

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 3:09 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	44,458,917,830,958
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	221,236,146,085	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	2,186,599,073	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	376,297,085
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	307,076,488,796
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	15,499,477	0
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	390,738,454
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset	0	112,326,144,764
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	277,851,441
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	243,583,887
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,367,228,830
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,676,606,001
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,209,809,290
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	518,230	0
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	10,900,000
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	234,165,191
3.0	425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara	0	9,600,000
3.0	425211	Pendapatan Paspor	0	1,253,341,710,000
3.0	425212	Pendapatan Visa	0	406,729,695,455
3.1	425212	Pengembalian Pendapatan Visa	100,000	0
3.0	425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-	0	716,949,900,000
3.1	425213	Pengembalian Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk	25,700,000	0
3.0	425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	185,072,796,707
3.1	425214	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	75,275,000	0
3.0	425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	0	750,025,950,000
3.1	425215	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Fidusia	1,100,000	0
3.0	425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	0	238,416,070,511
3.1	425216	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	68,700,000	0
3.0	425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	0	45,815,379,630
3.1	425217	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	29,600,000	0
3.0	425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	0	556,119,117,519
3.1	425218	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	292,470,000	0
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	409,509,374
3.0	425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	0	62,795,023
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	23,138,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	2,449,000,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	304,448,721
3.0	425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	0	157,673
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	224,052,819
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	1,039,373,501
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	4,499,682
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	9,262,197,485

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 3:09 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	569,807,711
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	47,688,484,502
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	3,631,578,204
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	792,132,522
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	40,235,807
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	296,393,302
3.1	425999	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain	22,704,200	0
3.0	491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	3,055,191,428
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	13,685,648,809
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	137,156,980,178
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,419,375,800,794	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	271,146,483
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	48,132,931	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	4,830,250
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	151,708,232,142	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	50,033,622
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	42,951,204,455	0
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	4,543,732
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	70,447,150,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	128,551,430
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	151,833,360,700	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	502,004,291
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,652,363,771	0
3.1	511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	0	1,581,006
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	122,555,838,938	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	13,684,923
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	532,940,871,669	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	21,228,980
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	471,725,000	0
3.1	511135	Pengembalian Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat	0	100,000
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	7,213,265,000	0
3.1	511138	Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	0	4,900,000
3.0	511142	Beban Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)	23,954,085	0
3.0	511145	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff	999,000,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	46,390,324,390	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	4,760,326,068
3.0	512211	Beban Uang Lembur	31,521,024,150	0
3.1	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	28,939,050
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,304,212,830,617	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	932,473,743
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	212,214,723,218	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	8,511,008

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 3:09 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	1,858,416,936,269	0
3.1	521112	Pengembalian Beban Pengadaan Bahan Makanan	0	1,193,274,046
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	34,626,776,715	0
3.1	521113	Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	49,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,822,936,780	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	76,817,519,671	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	16,238,500
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	67,741,074,902	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	18,062,265
3.0	521211	Beban Bahan	186,062,178,194	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	14,252,493
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	47,354,638,608	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	190,568,500
3.0	521214	Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	87,884,996	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	248,332,560,626	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	280,591,854
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	169,280,353,484	0
3.1	522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	0	33,645,179
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	6,403,032,730	0
3.1	522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	0	613,260
3.0	522113	Beban Langganan Air	16,421,031,071	0
3.1	522113	Pengembalian Beban Langganan Air	0	2,102,600
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	64,996,088,269	0
3.1	522119	Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	13,762,149
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	1,221,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	19,221,482,670	0
3.0	522141	Beban Sewa	266,959,488,178	0
3.1	522141	Pengembalian Beban Sewa	0	15,537,631
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	59,763,430,765	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	381,163,850
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	348,460,098,642	0
3.1	522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0	750,000
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	156,518,227,008	0
3.1	523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	36,539,950
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,456,375,372	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216,756,938,065	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	12,680,564
3.0	523124	Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	73,181,319	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249,014,260	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	54,104,000	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1,015,407,472	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	368,247,224,615	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 3:09 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	5,081,811,865
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	52,733,453,731	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	38,845,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66,150,904,114	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	484,734,924
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	112,426,349,897	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	4,727,149,439
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	76,256,137,916	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	11,304,094,026
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	28,938,157,106	0
3.1	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	214,310,670
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	952,698,314,968	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	441,951,337,623	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7,665,224,207	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,758,713,137	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	966,527,194	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	558,877,581	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	37,190,239,461	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	6,939,396,051	0
3.0	592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	1,337,335,000	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	16,270,833	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	5,230,344,265	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	559,764,509,498	0
3.0	593112	Beban Persediaan amunisi	1,570,058,368	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	18,820,012,236	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	6,869,277,418	0
3.0	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	56,800,500	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	117,325,551	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	146,344,744,092	0
3.0	593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	611,069,660	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	11,658,694,250	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	96,922,694,051	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	0	45,509,936,151
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	6,284,379
3.0	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	405,785	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	0	1,113,027
3.0	594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	0	8,826,000
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	4,206,796,824	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	136,635,000	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	91,615,434,880	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	8,834,958,308	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	3,055,191,428	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tgl. Cetak 14/09/2020 3:09 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

JUMLAH	97,444,428,611,019	97,444,428,611,019



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK : LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 14/09/20 2:19 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lo_kl --

Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,180,768,548,845	3,528,582,438,941	652,186,109,904	18.483
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4,180,768,548,845	3,528,582,438,941	652,186,109,904	18.483
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	4,180,768,548,845	3,528,582,438,941	652,186,109,904	18.483
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,879,620,735,064	6,304,961,550,122	574,659,184,942	9.114
Beban Persediaan	720,005,876,368	636,996,764,306	83,009,112,062	13.031
Beban Barang dan Jasa	3,692,933,246,281	2,929,889,611,316	763,043,634,965	26.043
Beban Pemeliharaan	401,899,951,636	410,670,100,817	(8,770,149,181)	(2.136)
Beban Perjalanan Dinas	682,901,281,455	625,199,086,404	57,702,195,051	9.229
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	117,325,551	1,629,306,089	(1,511,980,538)	(92.799)
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 14/09/20 2:19 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lo_kl --

Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,456,312,580,320	1,126,350,293,138	329,962,287,182	29.295
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(45,525,753,772)	(10,594,819,272)	(34,930,934,500)	329.698
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	13,788,265,242,903	12,025,101,892,920	1,763,163,349,983	14.662
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,607,496,694,058)	(8,496,519,453,979)	(1,110,977,240,079)	13.076
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(88,328,016,162)	(10,507,866,148)	(77,820,150,014)	740.589
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3,287,418,718	4,344,573,336	(1,057,154,618)	(24.333)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	91,615,434,880	14,852,439,484	76,762,995,396	516.838
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	98,723,125,427	109,161,762,369	(10,438,636,942)	(9.563)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	207,623,854,210	798,343,795,611	(590,719,941,401)	(73.993)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	108,900,728,783	689,182,033,242	(580,281,304,459)	(84.199)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	10,395,109,265	98,653,896,221	(88,258,786,956)	(89.463)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,597,101,584,793)	(8,397,865,557,758)	(1,199,236,027,035)	14.28
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,597,101,584,793)	(8,397,865,557,758)	(1,199,236,027,035)	14.28



LAMPIRAN

PRINTOUT E-REKON-LK : LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 14/09/20 3:09 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	24,224,492,209,998	24,482,912,484,963	(258,420,274,965)	(1.056)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,597,101,584,793)	(8,397,865,557,758)	(1,199,236,027,035)	14.28
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	44,349,855,779,083	(988,246,429,629)	45,338,102,208,712	(4,587.7 32)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1,658,251,434	21,090,031,820	(19,431,780,386)	(92.137)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	112,326,144,764	0	112,326,144,764	
SELISIH REVALUASI ASET	44,458,917,830,958	0	44,458,917,830,958	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(223,422,745,158)	(1,021,157,279,315)	797,734,534,157	(78.121)
LAIN-LAIN	376,297,085	11,820,817,866	(11,444,520,781)	(96.817)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	9,297,471,943,938	9,127,691,712,422	169,780,231,516	1.86
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	44,050,226,138,228	(258,420,274,965)	44,308,646,413,193	(17,145. 964)
EKUITAS AKHIR	68,274,718,348,226	24,224,492,209,998	44,050,226,138,228	181.842



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK :
LRA**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 14/09/20 3:09 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	3,401,051,813,000	4,415,573,984,076	(1,014,522,171,076)	130	3,250,308,730,000	3,563,546,496,086	(313,237,766,086)	110
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	3,401,051,813,000	4,415,573,984,076	(1,014,522,171,076)	130	3,250,308,730,000	3,563,546,496,086	(313,237,766,086)	110
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	6,908,739,845,000	6,885,840,107,867	22,899,737,133	100	6,424,058,555,000	6,306,574,297,290	117,484,257,710	98
	BELANJA BARANG	5,489,842,363,000	5,261,614,869,573	228,227,493,427	96	4,761,221,741,000	4,489,360,521,766	271,861,219,234	94
	BELANJA MODAL	1,693,936,545,000	1,626,941,030,922	66,995,514,078	96	1,915,936,626,000	1,845,754,684,471	70,181,941,529	96
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	14,092,518,753,000	13,774,396,008,362	318,122,744,638	98	13,101,216,922,000	12,641,689,503,527	459,527,418,473	96
C	PEMBIAYAAN				0				0



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK :
LRA-BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA/AKUN**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 14/09/20 3:10 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,079,749,627,000	2,422,851,892,000	2,419,571,792,786	271,146,483	2,419,300,646,303	99.86	3,551,245,697
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	83,822,000	53,591,000	48,121,382	4,830,250	43,291,132	89.79	10,299,868
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	126,075,909,000	152,006,871,000	151,707,380,000	50,033,622	151,657,346,378	99.8	349,524,622
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	37,062,182,000	43,144,555,000	42,951,155,517	4,543,732	42,946,611,785	99.55	197,943,215
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	67,197,941,000	70,758,256,000	70,447,245,000	128,551,430	70,318,693,570	99.56	439,562,430
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	91,996,051,000	152,403,146,000	151,666,916,000	502,004,291	151,164,911,709	99.52	1,238,234,291
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,420,658,000	4,193,792,000	3,652,696,497	1,581,006	3,651,115,491	87.1	542,676,509
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	125,254,122,000	122,946,750,000	122,555,838,938	13,684,923	122,542,154,015	99.68	404,595,985
511129	Belanja Uang Makan PNS	592,870,926,000	545,249,068,000	539,128,550,369	21,228,980	539,107,321,389	98.88	6,141,746,611
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	460,850,000	473,942,000	471,725,000	100,000	471,625,000	99.53	2,317,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	7,030,490,000	7,258,527,000	7,213,265,000	4,900,000	7,208,365,000	99.38	50,162,000
511142	Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)	350,000,000	45,000,000	23,954,085	0	23,954,085	53.23	21,045,915
511145	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS	1,080,000,000	999,000,000	999,000,000	0	999,000,000	100	0
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan	132,500,000	111,000	0	0	0	0	111,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	187,259,356,000	47,303,968,000	46,389,315,000	4,760,326,068	41,628,988,932	98.07	5,674,979,068
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	30,000,000	0	0	0	0	0	0
511192	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	3,692,000	3,692,000	0	0	0	0	3,692,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,327,058,126,000	3,569,692,161,000	3,556,826,955,574	5,762,930,785	3,551,064,024,789	99.64	18,628,136,211
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	38,818,624,000	34,776,891,000	31,521,024,150	28,939,050	31,492,085,100	90.64	3,284,805,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	38,818,624,000	34,776,891,000	31,521,024,150	28,939,050	31,492,085,100	90.64	3,284,805,900
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,086,091,727,000	3,304,270,793,000	3,304,216,471,721	932,473,743	3,303,283,997,978	100	986,795,022
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	3,086,091,727,000	3,304,270,793,000	3,304,216,471,721	932,473,743	3,303,283,997,978	100	986,795,022
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	6,451,968,477,000	6,908,739,845,000	6,892,564,451,445	6,724,343,578	6,885,840,107,867	99.77	22,899,737,133
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	222,077,507,000	215,871,429,000	212,235,545,739	8,511,008	212,227,034,731	98.32	3,644,394,269
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	1,801,853,239,000	1,917,921,636,000	1,893,225,680,090	1,193,274,046	1,892,032,406,044	98.71	25,889,229,956
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	36,859,008,000	35,635,995,000	34,626,776,715	49,000	34,626,727,715	97.17	1,009,267,285
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,452,899,000	8,425,374,000	7,537,278,510	0	7,537,278,510	89.46	888,095,490
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	78,003,613,000	77,680,475,000	76,817,519,671	16,238,500	76,801,281,171	98.89	879,193,829
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	71,245,849,000	69,547,507,000	67,737,281,902	18,062,265	67,719,219,637	97.4	1,828,287,363

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 14/09/20 3:10 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,219,492,115,000	2,325,082,416,000	2,292,180,082,627	1,236,134,819	2,290,943,947,808	98.58	34,138,468,192
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	179,023,029,000	203,059,650,000	187,595,796,941	14,252,493	187,581,544,448	92.38	15,478,105,552
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	58,397,422,000	55,076,744,000	47,356,438,608	190,568,500	47,165,870,108	85.98	7,910,873,892
521214	Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	310,261,000	181,841,000	87,884,996	0	87,884,996	48.33	93,956,004
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	266,628,233,000	266,486,572,000	248,423,305,896	280,591,854	248,142,714,042	93.22	18,343,857,958
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	504,358,945,000	524,804,807,000	483,463,426,441	485,412,847	482,978,013,594	92.12	41,826,793,406
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	455,341,703,000	579,309,007,000	556,946,799,227	35,817,800	556,910,981,427	96.14	22,398,025,573
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	26,315,000	0	0	0	0		0
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	201,976,000	194,846,000	194,251,390	0	194,251,390	99.69	594,610
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	63,750,000	63,750,000	63,668,000	0	63,668,000	99.87	82,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	167,093,858,000	167,074,000,000	164,016,175,573	31,963,500	163,984,212,073	98.17	3,089,787,927
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	622,727,602,000	746,641,603,000	721,220,894,190	67,781,300	721,153,112,890	96.6	25,488,490,110
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	165,673,937,000	173,431,599,000	168,405,022,799	33,645,179	168,371,377,620	97.1	5,060,221,380
522112	Belanja Langganan Telepon	9,271,558,000	7,382,083,000	6,395,086,389	613,260	6,394,473,129	86.63	987,609,871
522113	Belanja Langganan Air	17,354,522,000	17,700,061,000	16,173,851,351	2,102,600	16,171,748,751	91.38	1,528,312,249
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	81,902,816,000	65,723,611,000	64,885,599,488	13,762,149	64,871,837,339	98.72	851,773,661
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	53,750,000	0	0	0	0		0
522131	Belanja Jasa Konsultan	64,193,538,000	25,195,576,000	19,221,482,670	0	19,221,482,670	76.29	5,974,093,330
522141	Belanja Sewa	285,248,496,000	271,592,487,000	264,607,292,715	15,537,631	264,591,755,084	97.43	7,000,731,916
522151	Belanja Jasa Profesi	60,404,538,000	65,700,113,000	59,763,430,765	381,163,850	59,382,266,915	90.96	6,317,846,085
522191	Belanja Jasa Lainnya	106,408,219,000	114,553,791,000	104,232,425,852	750,000	104,231,675,852	90.99	10,322,115,148
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	790,511,374,000	741,279,321,000	703,684,192,029	447,574,669	703,236,617,360	94.93	38,042,703,640
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	152,907,930,000	158,241,880,000	157,245,817,105	36,539,950	157,209,277,155	99.37	1,032,602,845
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	3,897,186,000	4,193,653,000	3,945,602,796	0	3,945,602,796	94.09	248,050,204
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,545,091,000	1,457,495,000	1,456,375,372	0	1,456,375,372	99.92	1,119,628
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	232,727,791,000	227,176,927,000	216,762,838,065	12,680,564	216,750,157,501	95.42	10,426,769,499
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	17,915,000	0	0	0	0		0
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,853,245,000	2,193,241,000	1,820,268,406	0	1,820,268,406	82.99	372,972,594
523124	Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	0	83,000,000	73,181,319	0	73,181,319	88.17	9,818,681
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350,023,000	254,703,000	249,014,260	0	249,014,260	97.77	5,688,740
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	54,000,000	54,244,000	54,104,000	0	54,104,000	99.74	140,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 14/09/20 3:10 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	554,786,000	1,016,423,000	1,015,407,472	0	1,015,407,472	99.9	1,015,528
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	394,907,967,000	394,671,566,000	382,622,608,795	49,220,514	382,573,388,281	96.95	12,098,177,719
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	361,446,132,000	389,730,104,000	366,037,712,800	5,081,811,865	360,955,900,935	93.92	28,774,203,065
524112	Belanja Perjalanan Tetap	128,800,000	0	0	0	0		0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62,771,597,000	58,061,489,000	52,755,323,731	38,845,000	52,716,478,731	90.86	5,345,010,269
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	71,434,193,000	72,773,328,000	66,167,054,114	484,734,924	65,682,319,190	90.92	7,091,008,810
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	100,141,897,000	119,694,756,000	112,426,349,897	4,727,149,439	107,699,200,458	93.93	11,995,555,542
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	595,922,619,000	640,259,677,000	597,386,440,542	10,332,541,228	587,053,899,314	93.3	53,205,777,686
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	81,556,006,000	85,893,936,000	76,256,137,916	11,304,094,026	64,952,043,890	88.78	20,941,892,110
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	28,482,663,000	31,209,037,000	28,938,157,106	214,310,670	28,723,846,436	92.72	2,485,190,564
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	110,038,669,000	117,102,973,000	105,194,295,022	11,518,404,696	93,675,890,326	89.83	23,427,082,674
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,237,959,291,000	5,489,842,363,000	5,285,751,939,646	24,137,070,073	5,261,614,869,573	96.28	228,227,493,427
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	885,496,583,000	897,162,362,000	865,371,844,864	16,620,000	865,355,224,864	96.46	31,807,137,136
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	33,440,000,000	5,317,882,000	5,261,711,400	0	5,261,711,400	98.94	56,170,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	918,936,583,000	902,480,244,000	870,633,556,264	16,620,000	870,616,936,264	96.47	31,863,307,736
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	564,852,035,000	572,384,651,000	555,326,768,006	138,459,379	555,188,308,627	97.02	17,196,342,373
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	155,020,000	0	0	0	0		0
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	6,520,265,000	6,759,810,000	6,141,018,982	2,606,800	6,138,412,182	90.85	621,397,818
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	90,384,173,000	106,011,638,000	98,746,048,018	12,579,485	98,733,468,533	93.15	7,278,169,467
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	661,911,493,000	685,156,099,000	660,213,835,006	153,645,664	660,060,189,342	96.36	25,095,909,658
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534131	Belanja Modal Jaringan	320,032,000	152,406,000	152,406,000	0	152,406,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	320,032,000	152,406,000	152,406,000	0	152,406,000	100	0
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	26,408,866,000	63,268,530,000	57,340,596,161	0	57,340,596,161	90.63	5,927,933,839
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	8,831,892,000	42,879,266,000	38,770,903,155	0	38,770,903,155	90.42	4,108,362,845
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	35,240,758,000	106,147,796,000	96,111,499,316	0	96,111,499,316	90.54	10,036,296,684
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,616,408,866,000	1,693,936,545,000	1,627,111,296,586	170,265,664	1,626,941,030,922	96.06	66,995,514,078

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 14/09/20 3:10 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	13,306,336,634,000	14,092,518,753,000	13,805,427,687,677	31,031,679,315	13,774,396,008,362	97.96	318,122,744,638



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK :
LRA-BELANJA
MENURUT
ESELON I/JENIS BELANJA**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 14/09/20 3:10 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	3,380,412,989,000	3,673,719,879,000	3,668,168,107,012	1,164,750,934	3,667,003,356,078	99.82	6,716,522,922
52	BELANJA BARANG	253,366,553,000	253,199,831,000	250,049,435,872	263,708,162	249,785,727,710	98.65	3,414,103,290
53	BELANJA MODAL	0	644,644,000	644,644,000	0	644,644,000	100	0
	JUMLAH BELANJA (01) SEKRETARIAT JENDERAL	3,633,779,542,000	3,927,564,354,000	3,918,862,186,884	1,428,459,096	3,917,433,727,788	99.78	10,130,626,212
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	14,440,948,000	15,897,571,000	15,710,899,038	7,690,746	15,703,208,292	98.78	194,362,708
52	BELANJA BARANG	19,846,566,000	19,846,566,000	19,578,269,735	217,092,360	19,361,177,375	97.55	485,388,625
	JUMLAH BELANJA (02) INSPEKTORAT JENDERAL	34,287,514,000	35,744,137,000	35,289,168,773	224,783,106	35,064,385,667	98.73	679,751,333
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM							
51	BELANJA PEGAWAI	35,966,948,000	37,326,475,000	36,791,635,850	40,302,862	36,751,332,988	98.46	575,142,012
52	BELANJA BARANG	529,708,481,000	513,249,017,000	455,593,382,142	17,422,754,057	438,170,628,085	85.37	75,078,388,915
53	BELANJA MODAL	168,749,251,000	185,084,404,000	161,452,292,761	0	161,452,292,761	87.23	23,632,111,239
	JUMLAH BELANJA (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	734,424,680,000	735,659,896,000	653,837,310,753	17,463,056,919	636,374,253,834	88.88	99,285,642,166
05	DITJEN PEMASYARAKATAN							
51	BELANJA PEGAWAI	2,384,436,299,000	2,475,144,101,000	2,473,482,687,933	5,002,313,310	2,468,480,374,623	99.73	6,663,726,377
52	BELANJA BARANG	2,666,048,356,000	2,791,215,772,000	2,752,376,675,428	1,669,551,574	2,750,707,123,854	98.55	40,508,648,146
53	BELANJA MODAL	830,082,412,000	844,665,172,000	834,010,891,560	99,933,450	833,910,958,110	98.73	10,754,213,890
	JUMLAH BELANJA (05) DITJEN PEMASYARAKATAN	5,880,567,067,000	6,111,025,045,000	6,059,870,254,921	6,771,798,334	6,053,098,456,587	99.16	57,926,588,413
06	DITJEN IMIGRASI							
51	BELANJA PEGAWAI	518,095,531,000	567,736,784,000	560,471,429,674	407,472,645	560,063,957,029	98.65	7,672,826,971
52	BELANJA BARANG	1,338,005,170,000	1,456,400,239,000	1,372,969,308,352	3,800,621,964	1,369,168,686,388	94.01	87,231,552,612
53	BELANJA MODAL	566,157,676,000	607,802,440,000	584,808,410,076	70,332,214	584,738,077,862	96.21	23,064,362,138
	JUMLAH BELANJA (06) DITJEN IMIGRASI	2,422,258,377,000	2,631,939,463,000	2,518,249,148,102	4,278,426,823	2,513,970,721,279	95.68	117,968,741,721
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL							
51	BELANJA PEGAWAI	38,261,701,000	44,897,001,000	44,607,115,977	40,139	44,607,075,838	99.35	289,925,162
52	BELANJA BARANG	186,175,755,000	183,704,108,000	174,633,738,286	153,663,434	174,480,074,852	94.98	9,224,033,148
53	BELANJA MODAL	50,168,996,000	52,640,643,000	43,115,145,863	0	43,115,145,863	81.9	9,525,497,137
	JUMLAH BELANJA (07) DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	274,606,452,000	281,241,752,000	262,356,000,126	153,703,573	262,202,296,553	93.28	19,039,455,447
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							
51	BELANJA PEGAWAI	14,922,089,000	17,268,701,000	17,176,774,674	63,434,031	17,113,340,643	99.1	155,360,357
52	BELANJA BARANG	26,577,280,000	26,720,605,000	25,756,932,702	23,585,973	25,733,346,729	96.31	987,258,271
53	BELANJA MODAL	300,000,000	332,175,000	329,475,000	0	329,475,000	99.19	2,700,000
	JUMLAH BELANJA (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-	41,799,369,000	44,321,481,000	43,263,182,376	87,020,004	43,176,162,372	97.61	1,145,318,628

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 14/09/20 3:10 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA							
51	BELANJA PEGAWAI	12,783,070,000	14,785,070,000	14,532,673,531	6,121,709	14,526,551,822	98.25	258,518,178
52	BELANJA BARANG	22,423,984,000	22,423,984,000	22,046,479,905	66,030,819	21,980,449,086	98.02	443,534,914
	JUMLAH BELANJA (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA	35,207,054,000	37,209,054,000	36,579,153,436	72,152,528	36,507,000,908	98.31	702,053,092
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL							
51	BELANJA PEGAWAI	15,392,514,000	17,023,758,000	16,836,958,929	14,516,693	16,822,442,236	98.82	201,315,764
52	BELANJA BARANG	86,846,182,000	86,962,417,000	85,090,394,446	48,224,224	85,042,170,222	97.79	1,920,246,778
53	BELANJA MODAL	379,856,000	671,671,000	668,447,326	0	668,447,326	99.52	3,223,674
	JUMLAH BELANJA (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	102,618,552,000	104,657,846,000	102,595,800,701	62,740,917	102,533,059,784	98.03	2,124,786,216
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM							
51	BELANJA PEGAWAI	14,657,292,000	16,431,898,000	16,409,429,900	9,957,403	16,399,472,497	99.8	32,425,503
52	BELANJA BARANG	14,476,035,000	14,476,035,000	14,230,997,381	15,428,943	14,215,568,438	98.2	260,466,562
53	BELANJA MODAL	570,675,000	570,675,000	559,972,000	0	559,972,000	98.12	10,703,000
	JUMLAH BELANJA (11) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	29,704,002,000	31,478,608,000	31,200,399,281	25,386,346	31,175,012,935	99.12	303,595,065
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN							
51	BELANJA PEGAWAI	22,599,096,000	28,508,607,000	28,376,738,927	7,743,106	28,368,995,821	99.51	139,611,179
52	BELANJA BARANG	94,484,929,000	121,643,789,000	113,426,325,397	456,408,563	112,969,916,834	92.87	8,673,872,166
53	BELANJA MODAL	0	1,524,721,000	1,522,018,000	0	1,522,018,000	99.82	2,703,000
	JUMLAH BELANJA (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	117,084,025,000	151,677,117,000	143,325,082,324	464,151,669	142,860,930,655	94.49	8,816,186,345
	JUMLAH BELANJA	13,306,336,634,000	14,092,518,753,000	13,805,427,687,677	31,031,679,315	13,774,396,008,362	97.96	318,122,744,638



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK :
LRA-PENDAPATAN
MENURUT
KELOMPOK PENDAPATAN/AKUN**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 14/09/20 3:10 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	63,056,000	277,851,441	0	277,851,441	440.64
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	243,583,887	0	243,583,887	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	90,079,000	1,367,228,830	0	1,367,228,830	1,517.81
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1,060,000	1,676,606,001	0	1,676,606,001	158,170.38
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5,908,730,000	16,638,667,409	518,230	16,638,149,179	281.59
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	221,000,000	10,900,000	0	10,900,000	4.93
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	923,800,000	234,230,816	0	234,230,816	25.36
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya	0	9,600,000	0	9,600,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	7,207,725,000	20,458,668,384	518,230	20,458,150,154	283.84
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425211	Pendapatan Paspor	927,202,500,000	1,253,341,710,000	0	1,253,341,710,000	135.17
425212	Pendapatan Visa	132,785,750,000	406,729,695,455	100,000	406,729,595,455	306.31
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry	708,418,750,000	716,949,900,000	25,700,000	716,924,200,000	101.2
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	235,095,000,000	182,272,796,707	75,275,000	182,197,521,707	77.5
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	521,839,850,000	750,038,450,000	1,100,000	750,037,350,000	143.73
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	194,021,000,000	238,961,567,249	68,700,000	238,892,867,249	123.13
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	171,805,175,000	40,498,033,955	29,600,000	40,468,433,955	23.55
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	500,000,000,000	714,619,064,505	292,470,000	714,326,594,505	142.87
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	28,148,000	409,509,374	0	409,509,374	1,454.84
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	3,391,196,173,000	4,303,820,727,245	492,945,000	4,303,327,782,245	126.9
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	0	62,795,023	0	62,795,023	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 14/09/20 3:10 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	23,138,000	0	23,138,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	0	85,933,023	0	85,933,023	0
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2,449,000,000	2,449,000,000	0	2,449,000,000	100
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	2,449,000,000	2,449,000,000	0	2,449,000,000	100
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	31,596,000	304,448,721	0	304,448,721	963.57
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	31,596,000	304,448,721	0	304,448,721	963.57
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	0	157,673	0	157,673	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	72,025,000	201,126,738	0	201,126,738	279.25
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	2,126,000	244,417,564	8,000	244,409,564	11,496.22
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	38,295,000	0	38,295,000	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	8,699,682	0	8,699,682	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	74,151,000	492,696,657	8,000	492,688,657	664.44
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	9,262,197,485	0	9,262,197,485	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	9,262,197,485	0	9,262,197,485	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	9,382,000	596,424,892	0	596,424,892	6,357.12
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	70,122,000	48,850,775,705	0	48,850,775,705	69,665.41
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	13,200,000	28,619,485,115	0	28,619,485,115	216,814.28
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	792,132,522	0	792,132,522	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	464,000	40,235,807	0	40,235,807	8,671.51

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 14/09/20 3:10 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	317,433,950	22,704,200	294,729,750	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	93,168,000	79,216,487,991	22,704,200	79,193,783,791	85,001.06
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,401,051,813,000	4,416,090,159,506	516,175,430	4,415,573,984,076	129.83
	JUMLAH PENDAPATAN	3,401,051,813,000	4,416,090,159,506	516,175,430	4,415,573,984,076	129.83



LAMPIRAN

**PRINTOUT E-REKON-LK :
LRA-PENDAPATAN
MENURUT
ESELON I/AKUN**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 14/09/20 2:20 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	55,000,000	341,689,510	0	341,689,510	621.25
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	228,409,997	0	228,409,997	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,498,077,000	5,935,435,746	278,802	5,935,156,944	169.67
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	209,000,000	550,000	0	550,000	0.26
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	847,000,000	0	0	0	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	115,386	0	115,386	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	43,489,584	0	43,489,584	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	794,722,465	0	794,722,465	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	97,959,020	0	97,959,020	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,558,787,552	0	1,558,787,552	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	19,043,160	0	19,043,160	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	788,878,722	0	788,878,722	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	2,936,000	0	2,936,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	21,185,303	0	21,185,303	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	4,609,077,000	9,833,202,445	278,802	9,832,923,643	213.34
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,000,000	9,682,718	0	9,682,718	322.76
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,301,352	0	5,301,352	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	865,200	0	865,200	0
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	3,000,000	15,849,270	0	15,849,270	528.31
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	38,383,888	0	38,383,888	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	24,378,777	0	24,378,777	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 14/09/20 2:20 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	26,038,888	0	26,038,888	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	200,000	20,445,324	0	20,445,324	10222.66
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	521,839,850,000	750,038,450,000	1,100,000	750,037,350,000	143.73
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	194,021,000,000	238,961,567,249	68,700,000	238,892,867,249	123.13
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	171,805,175,000	40,498,033,955	29,600,000	40,468,433,955	23.55
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	72,025,000	200,880,540	0	200,880,540	278.9
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	24,262,504	0	24,262,504	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	629,142,500	0	629,142,500	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	108,045,283	0	108,045,283	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,608,392,071	0	2,608,392,071	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20,263,984,086	0	20,263,984,086	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,408,900	3,845,200	563,700	0
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	887,738,250,000	1,053,446,413,965	103,245,200	1,053,343,168,765	118.67
05	DITJEN PEMASYARAKATAN					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	63,056,000	277,851,441	0	277,851,441	440.64
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	37,600,000	0	37,600,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	35,079,000	597,706,736	0	597,706,736	1703.89
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1,060,000	525,356,764	0	525,356,764	49561.96
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,356,232,000	6,746,332,466	239,428	6,746,093,038	286.31
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	12,000,000	10,350,000	0	10,350,000	86.25
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	76,800,000	180,089,116	0	180,089,116	234.49
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya	0	9,600,000	0	9,600,000	0
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	28,148,000	409,509,374	0	409,509,374	1454.84
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	0	62,795,023	0	62,795,023	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 14/09/20 2:20 PM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	23,138,000	0	23,138,000	0
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	31,596,000	304,448,721	0	304,448,721	963.57
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	121,486	0	121,486	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	2,126,000	92,654,475	8,000	92,646,475	4357.78
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	500,000	0	500,000	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	4,199,682	0	4,199,682	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3,435,794,965	0	3,435,794,965	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	9,382,000	238,330,495	0	238,330,495	2540.3
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	70,122,000	16,300,192,928	0	16,300,192,928	23245.48
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	13,200,000	4,183,344,568	0	4,183,344,568	31692
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	3,253,800	0	3,253,800	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	464,000	19,181,106	0	19,181,106	4133.86
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	82,341,428	18,859,000	63,482,428	0
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN PEMASYARAKATAN	2,699,265,000	33,544,692,574	19,106,428	33,525,586,146	1,242.73
06	DITJEN IMIGRASI					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	167,599,999	0	167,599,999	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	363,645,030	0	363,645,030	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	670,858,920	0	670,858,920	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,515,796,349	0	3,515,796,349	0
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	37,604,200	0	37,604,200	0
425211	Pendapatan Paspor	927,202,500,000	1,253,341,710,000	0	1,253,341,710,000	135.17
425212	Pendapatan Visa	132,785,750,000	406,729,695,455	100,000	406,729,595,455	306.31
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry	708,418,750,000	716,949,900,000	25,700,000	716,924,200,000	101.2
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	235,095,000,000	182,272,796,707	75,275,000	182,197,521,707	77.5

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 14/09/20 2:20 PM

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	0	157,673	0	157,673	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	5,159	0	5,159	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	59,417,001	0	59,417,001	0
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	37,795,000	0	37,795,000	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	4,500,000	0	4,500,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3,259,403,444	0	3,259,403,444	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	107,976,804	0	107,976,804	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,058,429,278	0	28,058,429,278	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	702,248,391	0	702,248,391	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	18,118,701	0	18,118,701	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	40,738,930	0	40,738,930	0
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DITJEN IMIGRASI	2,003,502,000,000	2,596,338,397,041	101,075,000	2,596,237,322,041	129.59
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	153,678,900	0	153,678,900	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	313,468,000	0	313,468,000	0
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	500,000,000,000	714,619,064,505	292,470,000	714,326,594,505	142.87
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	228,403,845	0	228,403,845	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	25,947,163	0	25,947,163	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	293,680,212	0	293,680,212	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,450,864,910	0	3,450,864,910	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	168,752,889	0	168,752,889	0
	JUMLAH PENDAPATAN 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN	500,000,000,000	719,253,860,424	292,470,000	718,961,390,424	143.85
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	54,262,532	0	54,262,532	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 14/09/20 2:20 PM

Halaman : 5

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7,321,000	0	0	0	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,281	0	1,281	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20,193,464	0	20,193,464	0
	JUMLAH PENDAPATAN 08 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-	7,321,000	74,457,277	0	74,457,277	1,017.04
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	18,778,777	0	18,778,777	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	422,112	0	422,112	0
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	16,537,500	0	16,537,500	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	4,167	0	4,167	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	24,594,000	0	24,594,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,374,665	0	4,374,665	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,385,000	0	2,385,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 09 DITJEN HAK ASASI MANUSIA	0	67,096,221	0	67,096,221	
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	21,030,000	0	21,030,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	18,000,000	0	18,000,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9,400,000	28,000,000	0	28,000,000	297.87
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,341,900	0	1,341,900	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,840,199	0	3,840,199	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,050,000	0	6,050,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	9,400,000	78,262,099	0	78,262,099	832.58
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,500,000	0	0	0	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	172,833	0	172,833	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 14/09/20 2:20 PM

Halaman : 6

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,500,000	0	1,500,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN PENELITIAN DAN	4,500,000	1,672,833	0	1,672,833	37.17
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30,000,000	69,084,694	0	69,084,694	230.28
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2,449,000,000	2,449,000,000	0	2,449,000,000	100
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	913,388,366	0	913,388,366	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,475,797	0	4,475,797	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	300,000	0	300,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	6,500	0	6,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	2,479,000,000	3,436,255,357	0	3,436,255,357	138.61
	JUMLAH PENDAPATAN	3,401,051,813,000	4,416,090,159,506	516,175,430	4,415,573,984,076	129.84



**LAMPIRAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**PENJELASAN ATAS
POS-POS NERACA**



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Mutasi Kas Lainnya dan Setara Kas Berupa Dana Pihak Ketiga
pada Ditjen Administrasi Hukum Umum per 31 Desember 2019

NO	NAMA SATUAN KERJA	SALDO AWAL	MUTASI KURANG			MUTASI TAMBAH			SALDO AKHIR
			BIAYA OPERASIONAL	KLAIM	LAIN-LAIN	UANG PAJIT YANG MASUK	JASA GIRO	LAIN-LAIN	
1	Balai Harta Peninggalan Surabaya	3.735.859.902,00	204.987.969,60	10.880.739.438,00	1.192.763.748,00	11.905.876.319,60	10.484.753	-	3.373.729.819,00
2	Balai Harta Peninggalan Medan	1.591.940.833,00	10.420.000,00	1.410.371.281,00	105.500.000,00	1.571.930.283,00	-	-	1.637.579.835,00
3	Balai Harta Peninggalan Semarang	2.960.523.073,83	2.212.872.374,00	-	41.222.000	1.468.737.973,17	2.800.200	-	2.177.966.873,00
4	Balai Harta Peninggalan Jakarta	6.118.271.791,00	16.138.724.132,00	-	-	13.233.028.618,00	9.733.739,00	991.962.171,00	4.214.272.187,00
5	Balai Harta Peninggalan Makassar	-	-	-	-	29.650.436,00	-	-	29.650.436,00
TOTAL		14.406.595.599,83	18.567.004.475,60	12.291.110.719,00	1.339.485.748,00	28.209.223.629,77	23.018.692,00	991.962.171,00	11.433.199.150,00

Rincian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
Sekretariat Jenderal			
1	Sekretariat Jenderal (Pusat)	5.238.541.400,00	Piutang PNBPN berupa sewa tanah oleh PT Paramitha beserta dengan denda keterlambatan pembayaran piutang sebesar Rp1.179.841.400,00
		28.340.750,00	Tansfer masuk piutang pegawai pensiun dari Kanwil Jambi. Yang bersangkutan sudah pensiun dan potongannya dipotong oleh taspen pusat
2	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bandung	104.756.610,00	Piutang PNBPN berupa pengembalian belanja PT Amethys Utama dan PT Daya Persana
3	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bengkulu	104.689.276,00	Piutang PNBPN berupa pengembalian belanja PT Sinatria Inti Surya
4	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Papua Barat	21.529.529,00	Piutang PNBPN berupa pengembalian belanja CV Tabyol
SUBTOTAL		5.497.857.565,00	
Ditjen AHU			
1	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	334.280.520,00	Piutang yang berasal dari temuan BPK atas kewajiban PNBPN pesan nama perseroan yang berasal dari 156 Notaris. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah melakukan penetapan piutang pada 29 April 2016 dan telah dilakukan pelimpahan ke DJKN. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah mengirim surat kepada Kepala KPKNL Jakarta II dengan Nomor AHU.1.UM.01.01-1821 Tanggal 3 September 2018 Hal Permohonan Penetapan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Selanjutnya, Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta atau KPKNL Jakarta II menerbitkan surat PSBDT sebanyak 151 surat dengan Nomor PSBDT-28/PUPNC.10.02/2018 sampai dengan PSBDT-179/PUPNC.10.02/2018 Tanggal 18 September 2018 Hal Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih. Piutang yang telah diterbitkan PSBDT perlu menunggu 2 (dua) tahun untuk diajukan usulan penghapusan piutang dalam Neraca Laporan Keuangan.
SUBTOTAL		334.280.520,00	
Ditjen Pemasarakatan			



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

1	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	708.596.500,00	Temuan Team Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada pengadaan screening HIV tahun 2012 an. PT Utama Radofa Sejahtera
2	Lembaga Pemasyarakatan Karawang	16.946.400,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
3	Lembaga Pemasyarakatan Bekasi	3.495.248,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
4	Rumah Tahanan Negara Medan	33.554.903,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
5	Rumah Tahanan Negara Yogyakarta	331.700,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
6	Rutan Kelas I Pondok Bambu	12.780.914,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
7	Lapas Sumedang	2.993.735,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
8	Lapas Indramayu	2.513.000,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
9	Lembaga Pemasyarakatan Bogor	283.577,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
10	Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta	2.101.345,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
11	Rumah Tahanan Negara Wates	5.522.000,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
12	Rumah Tahan Negara Wonosari	2.430.000,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
13	Lembaga Pemasyarakatan Magelang	16.797.090,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
14	Rumah Tahanan Negara Boyolali	1.525.000,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
15	Lapas Cilacap	1.507.532,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
16	Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok	33.966.692,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
17	Rumah Tahanan Negara Situbondo	240.050,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
18	Rumah Tahanan Negara Bangil	10.134.840,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
19	Cabang Rumah Tahanan Negara Lhok Sukon	2.194.813,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
20	Lembaga Pemasyarakatan Langsa	20.227.079,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
21	Lembaga Pemasyarakatan Kuala Simpang	16.180.682,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
22	Lapas Tanjung Balai Asahan	18.967.875,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
23	Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat	27.759.105,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
24	Lapas Lubuk Pakam	82.458.704,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
25	Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru	4.444.760,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
26	Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pinang	4.711.000,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
27	Lembaga Pemasyarakatan Muara Bungo	2.904.040,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
28	Lembaga Pemasyarakatan Sintang	8.826.923,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
29	Lembaga Pemasyarakatan Samarinda	3.901.275,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30	Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo	5.850.746,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
31	Lembaga Pemasyarakatan Polewali	15.022.707,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
32	Cabang Rumah Tahanan Negara Mamasa	3.839.597,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
33	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Kerobokan	63.474.981,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
34	Rumah Tahanan Negara Negara	3.115.023,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
35	Rumah Tahanan Negara Klungkung	1.871.171,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
36	Lembaga Pemasyarakatan Kupang	3.513.274,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
37	Rumah Tahanan Negara Kefamenanu	3.672.791,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
38	Cabang Rumah Tahanan Negara Kupang Di Ba'A	3.270.117,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
39	Lembaga Pemasyarakatan Waingapu	164.311,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
40	Rumah Tahanan Negara Bajawa	5.972.835,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
41	Rumah Tahanan Negara Larantuka	57.189.205,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
42	Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo	1.197.789,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
43	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	3.413.847,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
44	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	7.291.865,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
45	Lapas Perempuan Kelas IIB Batam	5.597.400,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
46	Lpka Jogjakarta, Provinsi D.I Yogyakarta	1.048.048,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
47	Lembaga Pemasyarakatan Cibinong	32.910.489,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
48	Lembaga Pemasyarakatan Slawi	5.763.065,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
49	Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan	147.537.714,00	Kelebihan pembayaran atas pembangunan Gedung dan Bangunan berdasarkan atas temuan Itjen / BPK Tahun 2015
50	Rumah Tahanan Negara Manado	94.310.000,00	Tindak lanjut atas temuan inspektorat Jenderal Kemenkumham Nomor ITJ.PW.03.01.III-08 tanggal 25 Januari 2016 kepada PT. Pentagon Terang Asli atas sewa Direksi Kit Rp. 15.000.000,- dan Jasa Air dan Listrik Kerja Rp. 4.500.000,-
51	Lembaga Pemasyarakatan Boalemo	1.769.337,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
52	Rumah Tahanan Negara Batam	7.805.381,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
53	Rumah Tahanan Negara Serang	11.768.099,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
54	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jayapura	18.795.000,00	Kelebihan pembayaran atas pembangunan Gedung dan Bangunan Tahun 2008 berdasarkan atas temuan Itjen / BPK



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

55	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Di Cirebon	3.194.861,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
56	Rumah Tahanan Negara Samarinda	11.076.175,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
57	Lembaga Pemasyarakatan Sleman	3.691.265,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
58	Lembaga Pemasyarakatan Bitung	51.409.982,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
59	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung	303.615.678,00	Kelebihan pembayaran atas pembangunan Gedung dan Bangunan berdasarkan atas temuan Itjen / BPK Tahun 2015
60	Balai Pemasyarakatan Sibolga	900.000,00	Reklasifikasi Piutang dari Piutang TGR ke Piutang PNBK
61	Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjung Pinang	1.539.250,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
62	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Samarinda	507.000,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
63	Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang	8.157.735,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
64	Lapas Kelas III Bekasi Propinsi Jawa Barat	9.696.137,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
65	Lapas Kelas III Banjar Propinsi Jawa Barat	902.363,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
66	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung	148.798.880,00	Kelebihan pembayaran atas pembangunan Gedung dan Bangunan berdasarkan atas temuan Itjen / BPK Tahun 2015
67	Rutan Kelas IIB Pekan Baru Propinsi Riau	3.395.752,00	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA
SUBTOTAL		2.101.346.652,00	
Ditjen Imigrasi			
1	Direktorat Jenderal Imigrasi	1.799.161.590,00	Piutang pekerjaan yang tidak selesai atas Pengadaan sarana dan prasarana komunikasi
2	Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru	11.000.000,00	Piutang atas pekerjaan yang belum selesai
3	Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Pinang	50.000.000,00	Temuan BPK terkait beban alat angkut untuk orang asing yang tidak memiliki dokumen Tahun 2017
4	Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan	484.390.306,00	Piutang Pengembalian Belanja Modal Hasil Pemeriksaan BPK atas Pekerjaan Tahun 2017
5	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam	1.200.000.000,00	Temuan BPK terkait beban alat angkut untuk orang asing yang tidak memiliki dokumen Tahun 2017
6	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta	3.400.000.000,00	Temuan BPK terkait beban alat angkut untuk orang asing yang tidak memiliki dokumen
7	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai	4.240.000.000,00	Temuan BPK terkait beban alat angkut untuk orang asing yang tidak memiliki dokumen Tahun 2014, 2017, 2018, dan 2019
SUBTOTAL		11.184.551.896,00	
Ditjen KI			



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	Ditjen Kekayaan Intelektual	303.599.188.478,00	a) Piutang Paten BDH (Batal Demi Hukum) senilai Rp270.586.979.332,00 b) Piutang Paten Pembatalan Atas Permintaan Sendiri (PAPS) senilai Rp31.283.235.516,00 c) Piutang koperasi senilai Rp7.502.614,00 d) Piutang atas kekurangan sisa pekerjaan renovasi tata ruang gedung DJKI sebesar 12% dari PT Rancang Bangun Mandiri senilai Rp1.721.471.016,00.
SUBTOTAL		303.599.188.478,00	
Ditjen PP			
1	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	33.223.415,00	a) CV. Prospera Empat sebesar Rp14.634.755,00 merupakan temuan atas pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan di lingkungan Ditjen PP TA 2014 yang tidak sesuai dokumen kontrak; b) CV. Niaga Lestari sebesar Rp18.588.660,00 merupakan temuan atas kelebihan pembayaran ATK.
SUBTOTAL		33.223.415,00	
BPSDM			
1	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	55.000.000,00	Piutang Poltekip penyewaan gedung ALTRI (Akademi Litigasi Republik Indonesia)
SUBTOTAL		55.000.000,00	
Grand Total		322.805.448.526,00	

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2019

No	Nama Satker	Jumlah Piutang Lancar	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan	Keterangan
	Sekretariat Jenderal				
1	Sekretariat Jenderal (Pusat)	5.286.457.150,00	0,50%	26.432.286,00	Lancar
2	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bandung	104.756.610,00	0,50%	523.783,00	Lancar
3	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara Di Medan	10.508.316,00	0,50%	52.542,00	Lancar
4	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Pekanbaru	5.220.000,00	0,50%	26.100,00	Lancar
5	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Tanjung Karang	5.700.000,00	0,50%	28.500,00	Lancar
6	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Banjarmasin	5.447.496,00	0,50%	27.237,00	Lancar
7	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bengkulu	104.689.276,00	100,00%	104.689.276,00	Macet
8	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua Barat	21.529.529,00	100,00%	21.529.529,00	Macet
	SUBTOTAL	5.544.308.377,00		153.309.253,00	
	Ditjen AHU				
1	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	20.400.000,00	0,50%	102.000,00	Lancar
		334.280.520,00	100,00%	334.280.520,00	Macet
	SUBTOTAL	354.680.520,00		334.382.520,00	
	Ditjen Pemasarakatan				
1	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	708.596.500,00	0,50%	3.542.983,00	Lancar
2	Lembaga Pemasarakatan Karawang	16.946.400,00	0,50%	84.732,00	Lancar



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3	Lembaga Pemasyarakatan Bekasi	3.495.248,00	0,50%	17.476,00	Lancar
4	Rumah Tahanan Negara Medan	33.554.903,00	0,50%	167.775,00	Lancar
5	Rumah Tahanan Negara Yogyakarta	331.700,00	0,50%	1.659,00	Lancar
6	Rutan Kelas I Pondok Bambu	12.780.914,00	0,50%	63.905,00	Lancar
7	Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung	18.000.000,00	0,50%	90.000,00	Lancar
8	Lapas Sumedang	2.993.735,00	0,50%	14.969,00	Lancar
9	Lapas Indramayu	2.513.000,00	0,50%	12.565,00	Lancar
10	Lembaga Pemasyarakatan Bogor	283.577,00	0,50%	1.418,00	Lancar
11	Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta	2.101.345,00	0,50%	10.507,00	Lancar
12	Rumah Tahanan Negara Wates	5.522.000,00	0,50%	27.610,00	Lancar
13	Rumah Tahan Negara Wonosari	2.430.000,00	0,50%	12.150,00	Lancar
14	Lembaga Pemasyarakatan Magelang	16.797.090,00	0,50%	83.985,00	Lancar
15	Rumah Tahanan Negara Boyolali	1.525.000,00	0,50%	7.625,00	Lancar
16	Lapas Cilacap	1.507.532,00	0,50%	7.538,00	Lancar
17	Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok	33.966.692,00	0,50%	169.833,00	Lancar
18	Rumah Tahanan Negara Situbondo	240.050,00	0,50%	1.200,00	Lancar
19	Rumah Tahanan Negara Bangil	10.134.840,00	0,50%	50.674,00	Lancar
20	Cabang Rumah Tahanan Negara Lhok Sukon	2.194.813,00	0,50%	10.974,00	Lancar
21	Lembaga Pemasyarakatan Langsa	20.227.079,00	0,50%	101.135,00	Lancar
22	Lembaga Pemasyarakatan Kuala Simpang	16.180.682,00	0,50%	80.903,00	Lancar
23	Lapas Tanjung Balai Asahan	18.967.875,00	0,50%	94.840,00	Lancar
24	Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat	27.759.105,00	0,50%	138.796,00	Lancar
25	Lapas Lubuk Pakam	82.458.704,00	0,50%	412.294,00	Lancar
26	Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru	4.444.760,00	0,50%	22.224,00	Lancar
27	Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pinang	4.711.000,00	0,50%	23.555,00	Lancar
28	Lembaga Pemasyarakatan Muara Bungo	2.904.040,00	0,50%	14.520,00	Lancar
29	Lembaga Pemasyarakatan Sintang	8.826.923,00	0,50%	44.134,00	Lancar
30	Lembaga Pemasyarakatan Samarinda	3.901.275,00	0,50%	19.506,00	Lancar
31	Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo	5.850.746,00	0,50%	29.254,00	Lancar
32	Lembaga Pemasyarakatan Polewali	15.022.707,00	0,50%	75.115,00	Lancar
33	Cabang Rumah Tahanan Negara Mamasa	3.839.597,00	0,50%	19.198,00	Lancar
34	Lembaga Pemasyarakatan Ambon	24.000.000,00	0,50%	120.000,00	Lancar
35	Cabang Rumah Tahanan Negara Namlea	18.000.000,00	0,50%	90.000,00	Lancar
36	Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Kerobokan	63.474.981,00	0,50%	317.375,00	Lancar
37	Rumah Tahanan Negara Negara	3.115.023,00	0,50%	15.575,00	Lancar
38	Rumah Tahanan Negara Klungkung	1.871.171,00	0,50%	9.356,00	Lancar
39	Lembaga Pemasyarakatan Kupang	3.513.274,00	0,50%	17.566,00	Lancar
40	Rumah Tahanan Negara Kefamenanu	3.672.791,00	0,50%	18.364,00	Lancar
41	Cabang Rumah Tahanan Negara Kupang Di Ba'A	3.270.117,00	0,50%	16.351,00	Lancar
42	Lembaga Pemasyarakatan Waingapu	164.311,00	0,50%	822,00	Lancar
43	Rumah Tahanan Negara Bajawa	5.972.835,00	0,50%	29.864,00	Lancar
44	Rumah Tahanan Negara Larantuka	57.189.205,00	0,50%	285.946,00	Lancar
45	Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo	1.197.789,00	0,50%	5.989,00	Lancar
46	Lapas Perempuan Kelas Ila Denpasar	3.413.847,00	0,50%	17.069,00	Lancar
47	Lapas Perempuan Kelas Iib	7.291.865,00	0,50%	36.460,00	Lancar



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Yogyakarta				
48	Lapas Perempuan Kelas IIB Batam	5.597.400,00	0,50%	27.987,00	Lancar
49	Lpka Jogjakarta, Provinsi D.I Yogyakarta	1.048.048,00	0,50%	5.240,00	Lancar
50	Lembaga Pemasyarakatan Cibinong	32.910.489,00	0,50%	164.552,00	Lancar
51	Lembaga Pemasyarakatan Slawi	5.763.065,00	0,50%	28.815,00	Lancar
52	Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan	147.537.714,00	0,50%	737.689,00	Lancar
53	Rumah Tahanan Negara Manado	94.310.000,00	0,50%	471.550,00	Lancar
54	Lembaga Pemasyarakatan Boalemo	1.769.337,00	0,50%	8.847,00	Lancar
55	Rumah Tahanan Negara Batam	7.805.381,00	0,50%	39.027,00	Lancar
56	Rumah Tahanan Negara Bandung	50.257.500,00	0,50%	251.288,00	Lancar
57	Rumah Tahanan Negara Serang	11.768.099,00	0,50%	58.840,00	Lancar
58	Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan	6.549.996,00	0,50%	32.750,00	Lancar
59	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Bandung, Kot. Bandung, Jawa Barat	12.000.000,00	0,50%	60.000,00	Lancar
60	Balai Pemasyarakatan Ternate, Maluku Utara	22.438.370,00	0,50%	112.192,00	Lancar
61	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jayapura	18.795.000,00	0,50%	93.975,00	Lancar
62	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Di Cirebon	3.194.861,00	0,50%	15.974,00	Lancar
63	Rumah Tahanan Negara Samarinda	11.076.175,00	0,50%	55.381,00	Lancar
64	Lembaga Pemasyarakatan Sleman	3.691.265,00	0,50%	18.456,00	Lancar
65	Lembaga Pemasyarakatan Bitung	51.409.982,00	0,50%	257.050,00	Lancar
66	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung	303.615.678,00	0,50%	1.518.079,00	Lancar
67	Balai Pemasyarakatan Sibolga	900.000,00	0,50%	4.500,00	Lancar
68	Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjung Pinang	1.539.250,00	0,50%	7.696,00	Lancar
69	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Samarinda	507.000,00	0,50%	2.535,00	Lancar
70	Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang	8.157.735,00	0,50%	40.789,00	Lancar
71	Lapas Kelas III Bekasi Propinsi Jawa Barat	10.598.500,00	0,50%	52.993,00	Lancar
72	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung	148.798.880,00	0,50%	743.994,00	Lancar
73	Rutan Kelas IIB Pekanbaru Propinsi Riau	3.395.752,00	0,50%	16.979,00	Lancar
	SUBTOTAL	2.252.592.518,00		11.262.967,00	
	Ditjen Imigrasi				
1	Direktorat Jenderal Imigrasi	1.799.161.590,00	10,00%	179.916.159,00	Kurang Lancar
2	Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru	11.000.000,00	0,50%	55.000,00	Lancar
3	Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Pinang	50.000.000,00	0,50%	250.000,00	Lancar
4	Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan	484.390.306,00	0,50%	2.421.952,00	Lancar
5	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam	1.200.000.000,00	0,50%	6.000.000,00	Lancar
6	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta	3.350.000.000,00	0,50%	16.750.000,00	Lancar
7		50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	Macet
8	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai	4.100.000.000,00	0,50%	20.500.000,00	Lancar
9		140.000.000,00	100,00%	140.000.000,00	Macet
10	Kantor Imigrasi Kelas I Ternate	24.000.000,00	0,50%	120.000,00	Lancar
11	Kantor Imigrasi Kelas II Madiun	85.000.000,00	0,50%	425.000,00	Lancar



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua Barat	75.600.000,00	0,50%	378.000,00	Lancar
	SUBTOTAL	11.369.151.896,00		416.816.111,00	
	Ditjen KI				
1	Ditjen Kekayaan Intelektual	2.038.658.630,00	0,50%	10.193.293,00	Lancar
		24.800.000,00	50,00%	12.400.000,00	Diragukan
		301.535.729.848,00	100,00%	301.535.729.848,00	Macet
	SUBTOTAL	303.599.188.478,00		301.558.323.141,00	
	Ditjen PP				
1	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	48.955.415,00	0,50%	244.777,00	Lancar
	SUBTOTAL	48.955.415,00		244.777,00	
	Ditjen HAM				
1	Direktorat Jenderal HAM	9.528.000,00	0,50%	47.640,00	Lancar
	SUBTOTAL	9.528.000,00		47.640,00	
	BPSDM				
1	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	55.000.000,00	0,50%	275.000,00	Lancar
	SUBTOTAL	55.000.000,00		275.000,00	
	TOTAL	323.233.405.204,00		302.474.661.409,00	

**Rincian Utang Pihak Ketiga Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2019**

NO	KODE SATKER	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																			JUMLAH UTANG		
			Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar					Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar										Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya			Dana Pihak Ketiga	
			Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpun (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lamp Pank)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Keterangan (misal: sisa tukar yang belum dikembalikan ke Setjen)	Rp	Keterangan			
					Rp	Keterangan								Rp	Keterangan									
SEKRETARIAT JENDERAL																								
1	404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)						383.700.777							12.000.000.000	Utang atas biaya mutasi pegawai yang belum dibayarkan							12.383.700.777	
2	408892	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	2.347.516																				2.347.516	
3	409226	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM		1.330.000																			1.330.000	
4	532413	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI		11.009.000																			11.009.000	
5	649018	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO		3.110.000			1.161.350																4.271.350	
6	667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT		57.584.000				20.536.196															78.120.196	
7	408742	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH						37.654.108	419.857														38.074.045	
8	408751	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA					220.800	51.380.072	59.285	944.510	1.229.500												53.834.167	
9	408798	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG						27.564.596		11.006.000				29.340.000	Biaya perjalanan dinas pindah mutasi pegawai								67.910.596	
10	408824	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG						32.389.437															32.389.437	
11	408830	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK						24.825.041															24.825.041	
12	408849	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN						1.389.258															1.389.258	
13	408855	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA					28.824	19.709.610	57.500		1.672.800												21.468.734	
14	408861	KANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM MANADO						18.813.595															18.813.595	
15	408870	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR					2.338.550	23.174.809	430.813														25.944.172	
16	408906	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA						21.850.865															21.850.865	
17	409169	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI					2.207.000	17.530.967	100.580														19.838.547	
18	409190	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA						37.265.977															37.265.977	
19	409210	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALLU						52.245.439															52.245.439	
20	409226	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM					2.132.010																2.132.010	
21	667786	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU						21.140.664															21.140.664	
22	408720	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA						71.036.568	187.679														71.224.247	
TOTAL			2.347.516	73.833.000	0		8.088.534	862.288.859	1.255.714	11.950.510	2.902.300	0	0	12.029.340.000		0		0		0			12.991.125.633	
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM																								
1	099297	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA																			4.204.538.448	UANG PAJIT	4.204.538.448	
2	099298	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG						17.214.200													2.175.166.673	UANG PAJIT	2.192.380.961	
3	099299	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA						205.200													3.363.245.066	UANG PAJIT	3.363.450.266	
4	099300	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN																			1.637.579.835	UANG PAJIT	1.637.579.835	
5	408432	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG																			29.650.436	UANG PAJIT	29.650.436	

NO	KODE SATKER	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																				JUMLAH UTANG	
			Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar					Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar										Belanja Hibah Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya		Dana Pihak Ketiga		
			Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telekom (Telkom)	Langganan Daya Jasa Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lamp Pask)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Keterangan	Rp	Keterangan (misal: sisa transfer yang belum dikembalikan ke Setra)	Rp		Keterangan
					Rp	Keterangan								Rp	Keterangan									
TOTAL			0	0	0		0	17.419.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.418.180.458		11.427.599.946	
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN																								
1	404243	Bapas Jakarta Pusat		37.479.000																			37.479.000	
2	497651	Lapas Salemba									39.206.135												39.206.135	
3	550879	Bapas Jakarta Selatan								1.769.330													1.769.330	
4	632531	Rupahan Klas I Jakarta Pusat						2.516.461	812.625														3.329.086	
5	632548	Rupahan Jakarta Utara					2.725.133	6.774.973	106.083														9.606.189	
6	020562	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sent	502.070																				502.070	
7	109104	Lapas Klas II A Karawang		109.467.000																			109.467.000	
8	404322	Lapas Bancay Klas II A Bandung										178.092.000											178.092.000	
9	404347	Lapas Klas II B Garut										561.087.759											561.087.759	
10	404353	Lapas Klas II B Ciamis		2.017.014			120.310.000																122.327.014	
11	404362	Lapas Klas II B Tasikmalaya										5.881.668											5.881.668	
12	404393	Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon		32.112.000																			32.112.000	
13	404429	Rumah Tahanan Negara Klas I Cirebon					44.246.505																44.246.505	
14	404441	Lapas Klas II B Majalengka		51.718.000					6.473.836														61.907.316	
15	404460	Lapas Klas II B Indramayu					52.403.250																52.403.250	
16	404472	Lapas Klas IIA Bogor					64.784.700																64.784.700	
17	404497	Lapas Klas IIB Cianjur					9.932.100					20.568.960											30.501.060	
18	404501	Lapas Klas IIB Purwakarta					2.500.000				427.000					jasa sampai DPKP							2.927.000	
19	626072	Rupahan Klas I Bandung		30.120.000																			30.120.000	
20	652983	Lapas Narkotika Klas IIA Bandung										101.470.010											101.470.010	
21	083615	Lapas Klas IIB Bekasi		92.144.000																			92.144.000	
22	083622	Lapas Klas IIB Banjar							20.721.939		775.500												21.497.439	
23	084000	Rutan Klas II B Depok											877.590.001										877.590.001	
24	107170	Balai Pemasyarakatan Kelas I Klaten					162.050	1.792.962	503.256														2.478.268	
25	109107	Lembaga Pemasyarakatan Batu						49.331.642	1.129.190		996.520	21.346.964											72.804.316	
26	109108	Lembaga Pemasyarakatan Basi						18.995.656				4.630.769											23.626.425	
27	109109	Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning						14.501.774	520.781														15.022.555	
28	109110	Rumah Tahanan Negara Pekalongan					1.675.800	9.803.029	88.220														53.877.049	
29	404636	Balai Pemasyarakatan Semarang					1.045.000	7.659.202	60.500					2.123.000	interne								10.887.702	
30	404642	Lembaga Pemasyarakatan Semarang					197.000	91.837.773	783.640			439.522.700											532.341.113	
31	404679	Rumah Tahanan Negara Salatiga					6.330.950	3.118.101	68.140														93.285.191	
32	404682	Lembaga Pemasyarakatan Kendal						11.182.335	100.974			6.843.291											18.126.600	
33	404702	Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa					2.814.480	8.077.468	31.570			84.207.312											95.130.830	
34	404718	Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang					1.064.500	17.350.717	249.063														19.264.880	
35	404724	Balai Pemasyarakatan Pekalongan		14.112.000			527.800	2.224.593	55.234					759.300	interne								17.678.927	
36	404733	Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan					1.496.600	6.206.725	144.862			196.633.915											204.482.106	
37	404752	Rumah Tahanan Negara Pemalang					1.228.400	3.090.968	1.437.000														5.756.368	
38	404761	Lapas Tegal										17.299.327											17.299.327	
39	404786	Balai Pemasyarakatan Magelang		27.905.000			418.165	604.256	198.222					1.486.000	interne								30.611.643	
40	404792	Lembaga Pemasyarakatan Magelang					859.650	13.281.194	49.807														14.382.389	
41	404896	Rumah Tahanan Negara Tembung					100.000	3.000.000	150.000														3.250.000	
42	404812	Rumah Tahanan Negara Wonorebo					1.253.602		1.169.081														2.422.683	
43	404821	Rumah Tahanan Negara Ponorogo					725.600	7.165.300	60.300														7.951.400	
44	404837	Rumah Tahanan Negara Kebumen					2.562.500	1.478.816	34.570														4.075.886	
45	404843	Balai Pemasyarakatan Pati						1.339.620	679.522														2.019.142	
46	404852	Lembaga Pemasyarakatan Pati		329.994				15.365.261	123.536			527.000				382.679	interne						16.478.470	
47	404868	Rumah Tahanan Negara Rembang					554.300	3.865.912	51.157							572.000	interne						5.063.369	
48	404874	Rumah Tahanan Negara Jepara										126.210.400											126.210.400	
49	404883	Rumah Tahanan Negara Kudus		1.569.976			31.302.638	5.629.083	707.000							31.570	interne						39.240.867	
50	404919	Rumah Tahanan Negara Sukarta					1.186.550	18.523.074	1.522.650			25.059.400											46.291.674	
51	404931	Rumah Tahanan Negara Boyolali					450.000	3.000.000	680.000														4.930.000	
52	404950	Lapas Klaten					4.807.850	6.803.508	1.531.170			898.000				113.895.527							127.846.055	
53	404956	Rumah Tahanan Negara Wonogiri		999.390			51.984.600	7.019.598	31.570			809.025											60.844.183	
54	404962	Balai Pemasyarakatan Purwokerto					22.500	57.548	142.427							1.391.000	interne						1.613.475	
55	404971	Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto		48.001.219				30.999.537								2.860.000	interne						81.860.756	
56	404987	Rumah Tahanan Negara Banyumas					1.377.400	6.831.787	871.054			92.024.700											101.104.941	
57	404993	Rumah Tahanan Negara Purbalingga					16.500	4.240.136	91.570			765.900				57.965.900							63.080.102	
58	405007	Rumah Tahanan Negara Banjarnegara					50.000	4.200.000	100.000							1.000.000	interne						5.350.000	
59	405022	Lapas Cilacap					50.320.000	1.385.300	32.570														51.737.870	
60	405038	Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantan		302.800					1.315.492														1.618.292	
61	408655	Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo					45.626.000	1.826.820	3.290.591	68.009						544.500	interne						51.355.920	
62	497691	Rumah Tahanan Negara Batang						98.750	11.835.211	447.663													12.381.624	
63	497711	Lembaga Pemasyarakatan Slawi						2.417.500	10.965.114	1.426.340													14.808.954	

NO	KODE SATKER	SATKER	RUTANG PIHAK KETIGA																				Jumlah Utang
			Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar										Belanja Mutasi Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya		Dana Pihak Ketiga		
			Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpom (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BANKA (Bank Pank)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Keterangan (misal: sisa transfer yang belum dibebankan ke Setjen)	Rp	Keterangan		
					Rp	Keterangan								Rp	Keterangan								
64	626089	Ruphasan Semarang, Kot.Semarang					2.837.622	58.710						560.590	internet							3.456.927	
65	632057	Lapas Karanganyar Nuskambangan					70.637.661				28.919.077											99.556.738	
66	652351	Ruphasan Wonorejo				104.200	750.592	90.065	366.000													1.310.857	
67	652902	Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal					12.800.000				4.410.300											17.210.300	
68	652916	Lapas Terbuka Nuskambangan					8.325.674				24.397.418											32.723.092	
69	653000	Lapas Narkotika Nuskambangan					19.738.047	497.399			1.106.153											21.341.599	
70	653307	Ruphasan Purwokerto					23.950	1.575.859	70.599					869.000	internet							2.539.498	
71	653311	Ruphasan Surakarta		610.000			280.200	2.120.112	692.300													3.702.612	
72	653328	Ruphasan Pekalongan					125.400	2.768.888	54.945					660.000	internet							3.609.233	
73	653340	Ruphasan Purbalingga					300.000	1.500.000	800.000													2.600.000	
74	653353	Ruphasan Cilacap		15.681.000			610.000	2.215.000	2.910.000					229.900	tv berlangganan							21.645.900	
75	199111	Batas Bantul		66.905.000																		66.905.000	
76	484591	Lapas Yogyakarta	2.375.760				396.500															2.772.260	
77	410340	LPP Yogyakarta	1.048.160																			1.048.160	
78	419140	LPKA Yogyakarta				32.586.000																32.586.000	
79	487727	Lapas Narkotika									26.135.500											26.135.500	
80	652852	Lapas Sleman		838.230																		838.230	
81	653442	Ruphasan Wonorejo		490.110	1.225.000																	1.715.110	
82	405043	LAPAS SURABAYA			161.210.000																	161.210.000	
83	405333	LAPAS MALANG	3.456.180				4.947.450	47.525.934	118.777	2.430.700												58.479.041	
84	405421	LAPAS MADILIN					29.500	46.077.027	39.446	853.000												48.998.973	
85	653002	LAPAS N MADILIN			53.476.000				31.570	2.347.000												55.854.570	
86	405270	LAPAS PAMEKASAN					25.335.655	62.120	1.233.000													26.630.975	
87	653019	LAPAS N PAMEKASAN					32.435.823	1.679.175			256.000											34.370.998	
88	405120	LAPAS BOJONEGORO					50.000	10.802.575	31.160	2.181.500												13.065.235	
89	405075	LAPAS SIDOARJO					2.036.300	44.332.529	132.005	826.000												47.326.834	
90	405409	LAPAS WANTA MALANG		64.099.000			28.911.800	8.673.791	124.130	773.757							79.387.180					181.969.660	
91	405157	LAPAS KEDIRI					959.400	27.712.712	1.753.870	586.300												31.012.282	
92	405214	LAPAS JEMBER					4.718.121	15.988.848	169.521	1.224.500												22.100.990	
93	405483	LAPAS ANAK BLITAR					302.550	3.976.200	1.348.145		1.118.000											6.744.695	
94	405081	LAPAS MOJOKERTO					131.265	17.444.623	90.640	2.084.500												19.751.028	
95	405101	LAPAS JOMBANG		2.625.000			157.500	11.191.075	1.206.381						98.304.264							113.484.828	
96	405132	LAPAS LAMONGAN					1.970.240	14.602.124	1.942.300		903.000											19.417.664	
97	405126	LAPAS TUBAN						13.105.441	104.660	1.695.100												14.905.201	
98	405462	LAPAS NGAWI		59.371.000			1.675.100	6.218.100														67.264.200	
99	405108	LAPAS BLITAR		1.502.000			5.200.650	9.924.878	103.966	1.359.593	859.000	94.966.000										113.996.027	
100	405163	LAPAS TULLUNGAGUNG						11.808.800	8.000	1.250.000	489.500											13.556.300	
101	405358	LAPAS PROBOLINGGO			20.846.000		32.000	7.829.537	131.070	2.634.000												31.472.607	
102	405389	LAPAS PASURUAN						14.944.378	207.094	924.498												16.076.470	
103	405372	LAPAS LUMAJANG																				0	
104	405223	LAPAS BONDOWOSO						8.427.243	90.140	1.633.750	655.000											10.806.133	
105	405239	LAPAS BANYUWANGI					1.306.100	27.970.955	123.052	742.500												30.142.607	
106	405302	LAPAS ARJASA		77.700.000			1.135.320															78.835.320	
107	405461	RUTAN PONOROGO		44.829.000			119.500	8.183.348	83.347	1.200.000	261.501											54.676.696	
108	405477	RUTAN PACITAN		157.349.000			154.660	5.109.265	73.846	874.500												163.561.271	
109	405446	RUTAN MAGETAN					7.384.500	5.188.498	404.376	1.063.700												14.041.074	
110	199112	RUTAN SURABAYA						85.692.217	216.120			28.881.823										114.790.360	
111	405364	RUTAN KRAKSAAN		40.626.000			420.500	10.322.900	73.120	2.412.750					88.717.317							142.572.787	
112	405395	RUTAN BANGIL						14.484.684	77.605	1.356.300												15.918.639	
113	405245	RUTAN SITUBONDO						3.035.430	7.422.970	58.570	1.768.095											51.364.065	
114	405194	RUTAN TRENGGALEK					1.400.500	7.951.944	80.140	523.000					892.963.000							892.018.584	
115	405172	RUTAN NGANURUK					33.000	10.013.900	1.263.600													11.310.500	
116	405291	RUTAN BANGKALAN		46.085.000											51.084.515							97.169.515	
117	405311	RUTAN SAMPANG					48.700	3.931.248			847.500											4.827.448	
118	405282	RUTAN SUMENEP					368.560	7.533.471		1.286.300					35.836.000							45.024.331	
119	567869	RUTAN GRESIK					14.662.500	13.345.042	107.800	793.915					112.348.392							141.257.669	
120	626093	RUPBASAN SURABAYA					278.400	2.611.955	628.100													3.518.455	
121	652386	RUPBASAN BLITAR		15.167.000			41.000	3.200.334	84.780	1.037.000												19.530.114	
122	653174	RUPBASAN JOMBANG		3.666.000			157.500	922.980	679.860													5.426.340	
123	653370	RUPBASAN MOJOKERTO		7.302.650				1.772.605		872.000												9.947.255	
124	653381	RUPBASAN PASURUAN		2.130.000				818.380	59.965	432.000												3.440.345	
125	662945	RUPBASAN PROBOLINGGO		2.532.000			731.500	1.419.864	135.127	1.040.500												5.858.991	
126	405043	BAPAS SURABAYA																				0	
127	405251	BAPAS PAMEKASAN						4.275.430	2.735.600											</			

NO	KODE SATKER	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																		JUMLAH UTANG	
			Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar					Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar								Belanja Hiburan Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya		Dana Pihak Ketiga		
			Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpun (Telkom)	Langganan Daya Jasa Internet	Langganan Jasa Pos	BAMA (Tanak Pank)	Beras Bolog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Keterangan (misal: sisa tukrer yang belum dikembalikan ke Seijin)	Rp		Keterangan
					Rp	Keterangan								Rp	Keterangan							
134	405492	Lembaga Penyayarakatan Banda Aceh																			328.344.094	
135	405560	Rumah Tahunan Negara Sabang		36.972.000			15.500.000		4.275.000	6.485.000											63.232.000	
136	405512	Rumah Tahunan Negara Sigi																			113.988.165	
137	405528	Lembaga Penyayarakatan Lhok Seumawe																			6.650.000	
138	405534	Cabang Rumah Tahun Negara Lhok Nias																			78.660.650	
139	405543	Cabang Rumah Tahunan Negara Lhok Sukon		36.374.000			73.560.835														109.934.835	
140	405559	Cabang Rumah Tahunan Negara Breureux		31.531.000																	31.531.000	
141	405565	Rumah Tahunan Negara Takengon					14.857.219														14.857.219	
142	405571	Cabang Rumah Tahunan Negara Kota Bakki		33.428.000																	55.660.320	
143	405590	Lembaga Penyayarakatan Langsa		58.452.000																	58.452.000	
144	405610	Rumah Tahunan Negara Idi					32.503.000														155.821.892	
145	405622	Cabang Rumah Tahunan Negara Blangkejeren		16.904.000																	16.904.000	
146	405678	Cabang Rumah Tahunan Negara Sinobang																			3.929.000	
147	418376	Rutan Kelas IIB Bener Meriah Provinsi Aceh																			324.572.000	
148	683402	Rumah Tahunan Kelas IB Banda Aceh																			209.767.523	
149	683657	Lapas Narkotika Kelas II Langsa Propinsi Aceh		39.442.000					50.647.761												150.419.154	
150	683992	Lapas Wanita Kelas III Sigi																			96.637.398	
151	178114	Ig Wanita Kelas IIA Medan																			213.856.439	
152	178116	Rutan Kelas I Medan					28.227.590														554.974.581	
153	405693	Lapas Kelas I Midan																			16.638.828	
154	405704	Cab. Rutan Pancur Batu																			487.922.444	
155	405772	Cab Rutan Labuhan Bilik																			38.084.428	
156	405797	Rutan Kelas IB Labuhan Deli																			891.648.574	
157	405801	Rutan Klan IB Pangkalan Branden					46.573.256														46.573.256	
158	405817	Ig Kelas IB Tebing Tinggi																			801.085.724	
159	405823	Ig Kelas IB Labuk Pakam																			832.063.323	
160	405848	Ig Kelas IIA P. Siantar																			145.218.951	
161	418363	Rutan Perempuan Medan																			88.219.201	
162	652941	Ig Narkotika Siantar		48.228.000																	102.183.429	
163	683725	Rutan Humbahas																			391.569.287	
164	406055	Lembaga Penyayarakatan Bukittinggi																			19.051.077	
165	406061	Cabang Rumah Tahunan Negara Tala		18.124.000																	114.714.931	
166	406092	Rumah Tahunan Negara Labuk Sikaping																			15.772.979	
167	406143	Lembaga Penyayarakatan Sijunjung																			823.738	
168	624232	Lembaga Penyayarakatan Anak Tanjung Pati					39.836.540														39.836.540	
169	683993	Lapas Narkotika Kelas III Samah Lunto																			70.897.300	
170	683995	Rutan Kelas II B Padang					29.446.000														29.446.000	
171	406174	Lapas Klan IIA Pekanbaru		97.082.000																	97.082.000	
172	406225	Lapas Klan IIA Terbilang		63.145.000																	63.145.000	
173	406231	GABRUT Tahuk Naton											4.038.409								4.038.409	
174	406256	Lapas Klan IIB Bangkinang		72.977.000			24.464.787														97.441.787	
175	406262	Lapas Klan IIB Paur Pangrayan		7.486.276																	7.486.276	
176	408454	RUTAN Klan IB Dornai		55.811.000																	55.811.000	
177	409151	Lapas Anak Pekanbaru		41.741.000																	41.741.000	
178	418335	Lapas Perempuan Pekanbaru		51.170.000																	20.459.936	
179	632602	RUPBASAN Klas I Pekanbaru		19.675.000																	19.675.000	
180	683999	Lapas Terbuka Klan III Rumbai		24.907.000																	24.907.000	
181	109117	Bapas Jambi		31.341.950																	31.341.950	
182	406293	Lapas Jambi		112.015.000										50.449.172							162.464.172	
183	406313	Lapas Ma.Bungo		62.301.000																	62.301.000	
184	406322	Lapas Muara Tebo		51.565.000																	51.565.000	
185	418338	Lapas Perempuan Jambi		5.857.777			49.374.000							152.931.000							208.164.777	
186	653112	Bapas Muara Bungo		14.905.000																	14.905.000	
187	683678	Lapas Narkotika Muara Sabak																			512.318.033	
188	406381	Lapas Kelas IIA Tanjung Raja																			116.730.643	
189	406420	Lapas Kelas IIB Muarawin					10.959.250														3.168.746	
190	406441	Lapas Kelas IIB Empat Lawang		25.291.000																	14.127.996	
191	406457	Lapas Kelas IIA Labuk Linggis		26.480.587																	25.291.000	
192	406463	Lapas Kelas IIB Suralangun Rawas																			26.480.587	
193	652958	Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti																			17.362.136	
194	683589	Lapas Rutan IIA Banyuwani		65.313.000																	61.418.240	
195	683593	Lapas Rutan IIB Kayugang																			91.286.791	
196	683996	Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuwani																			494.088.023	
197	109137	Bapas Bandar Lampung		112.294.059																	494.088.023	
198	406282	Lembaga Penyayarakatan Kelas IIA Metro																			783.737.051	
199	406545	Lembaga Penyayarakatan Kelas I Bandar Lampung																			117.897.382	
200	406551	Lembaga Penyayarakatan Rutan Kelas IIB Karanganyar																			34.700	
201	406570	Rutan Menggala																			159.250	
202	406576	Rutan Sukadana		239.700																	9.155.958	
203	406591	Rutan Krui																			1.032.570	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					10.347.778	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	
																					82.735.134	

NO	KODE SATKER	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																			JUMLAH UTANG		
			Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar										Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya		Dana Pihak Ketiga			
			Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpun (Telkom)	Langganan Daya Jasa Internet	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lank Pask)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Keterangan	Rp	Keterangan (misal: sisa tunjuk yang belum dikehutangkan ke Setjen)		Rp	Keterangan
					Rp	Keterangan								Rp	Keterangan									
274	652869	LAPAS KLAS II B BITUNG					14.932.600																14.932.600	
275	109143	Bapas Pulu							873.484														873.484	
276	352609	LPKA Pulu							2.703.000														2.703.000	
277	406993	Lapas Pulu							32.412.346														32.412.346	
278	407004	Rutan Donggala							236.720														236.720	
279	407013	Cabang Rutan Parigi							7.252.896														7.252.896	
280	407029	Lapas Tolitoli		42.085.000					4.897.828														46.982.828	
281	407035	Cabang Rutan Leok							5.029.500				10.113.461										15.142.961	
282	407041	Lapas Luwuk							12.922.022				16.219.659										29.141.681	
283	407060	Cabang Rutan Kolonedale							4.813.842				96.981.788										101.795.630	
284	407066	Rutan Poso					15.633.300						78.230.536										93.863.836	
285	408567	Lapas Ampuna										51.408.892											51.408.892	
286	418348	LPP							10.141.970				43.828.604										53.970.574	
287	567890	Rutan Pulu							13.949.562				192.431.731										206.381.293	
288	626143	Bapas Luwuk							1.120.940														1.120.940	
289	082683	Ruplatan Pulu																					0	
290	407072	Bapas Makassar		57.731.000																			57.731.000	
291	407081	LP Makassar						242.738.306				49.734.084											292.472.390	
292	407097	Rutan Pangkajene	356.451	41.769.000			5.533.000																47.658.451	
293	407101	LP Maros		68.732.256								936.858.137											1.005.590.433	
294	407117	LP Takalar										33.715.442											33.715.442	
295	407123	Rutan Jenepono						9.811.500				29.207.845											39.018.545	
296	407132	Rutan Selayar		32.885.000																			32.885.000	
297	407148	Rutan Bantareng		29.789.000				40.100				27.222.873											57.051.173	
298	407179	Rutan Sinjai										66.718.055											66.718.055	
299	407185	LP Palopo						87.542.500				37.362.130											124.904.630	
300	407191	Rutan Makale					414.500	1.580.000	34.000	1.711.688		17.542.226											21.282.414	
301	407211	LP Anak Pare-Pare						13.119.136				48.936.593											61.955.729	
302	407230	Rutan Pinrang						11.457.990				46.956.029											58.414.019	
303	407242	Rutan Enrekang		30.624.000								83.677.229											114.301.229	
304	407318	Rutan Sengkang	715.738				5.832.000					38.817.643											45.365.381	
305	407324	Rutan Watampong										16.840.670											16.840.670	
306	497821	LP Wanita Sungguminasa										2.850.939											2.850.939	
307	526793	Rutan Makassar										676.552.705											676.552.705	
308	626122	Ruplatan Makassar		25.429.565																			25.429.565	
309	653044	LP Narofika Sungguminasa										120.525.060											120.525.060	
310	653154	Bapas Palopo						2.742.870															2.742.870	
311	407333	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari										223.761.000											223.761.000	
312	407349	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Raha										31.293.175											31.293.175	
313	407361	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kolaka										230.270.373											230.270.373	
314	497815	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Unaha										282.153.288											282.153.288	
315	653161	Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau							846.000														846.000	
316	109146	BAPAS AMBON		25.440.000				1.157.202															26.597.202	
317	632705	RUPBASAN AMBON						1.408.720															1.408.720	
318	407380	LAPAS AMBON						8.805.278		130.782													8.936.060	
319	407386	LAPAS KELAS IIB PIRU						5.320.000			429.000		100.473.150										106.222.150	
320	407474	LAPAS KELAS IIB TUAL					3.235.000	3.158.000	138.000	1.972.000													8.503.000	
321	632527	RUTAN KELAS IIA AMBON		54.087.150				7.867.686		2.017.773													63.972.609	
322	407392	CABANG RUTAN SAPARUA		16.900.000																			16.900.000	
323	407468	CABANG RUTAN DOBO		7.302.000									40.848.000										48.150.000	
324	407412	CABANG RUTAN NAMLEA						2.799.570					56.493.746										59.293.316	
325	407421	CABANG RUTAN BANDA NAIRA					335.000	863.572															1.198.572	
326	407443	CABANG RUTAN WAHAI						284.912					40.403.863										40.688.775	
327	407437	CABANG RUTAN CEMER						192.376															192.376	
328	407483	CABANG RUTAN SAUMLAKI										146.127.576											146.127.576	
329	407452	CABANG RUTAN WONRELI		15.282.000																			15.282.000	
330	419146	LPKA AMBON																					0	
331	418346	LPP Ambon		153.320.000																			153.320.000	
332	109147	Lapas Khmas Anak Andapura, Ganyar						840.050			754.176		17.168.758										18.762.984	
333	407519	Balai Pemasyarakatan depasar						376.260	4.089.506	671.990													5.137.756	
334	407525	Lapas Kelas II A Kereboken						828.700	109.473.892	176.699			170.900.800	Hutang Biaya Rawat Inap WBP di RSUP Sanglah									281.380.691	
335	407531	Lapas Kelas II B Singajaya						23.225.480	4.282.937	1.211.570			52.097.941										80.817.928	
336	407550	Rutan Negara						1.114.900	7.173.011	43.013	1.063.500												9.394.424	
337	407556	Rutan Khlongueng						3.756.400	3.711.600	171.743	1.862.000												9.501.743	
338	407562	Lapas Kelas II B Tahuna						2.486.453	3.545.000	428.791	508.800		100.017.510										106.986.562	
339	407571	Rutan Ganyar						140.500	4.863.720	91.711	752.400		47.330.676										53.179.026	
340	407587	Rutan Bangli						40.796.660	2.081.376				61.187.148										104.065.184	
341	407593	Lapas Kelas II B Karangasem						3.086.000	2.624.256	34.070	1.216.300		57.244.752	6.090.910	Biaya Rawat Inap TA 2019								70.296.288	

NO	KODE SATKER	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																			JUMLAH UTANG				
			Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar			Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar											Belanja Hibah Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya		Dana Pihak Ketiga					
			Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpun (Telkom)	Langganan Daya Jasa Internet	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lamp Pank)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Keterangan	Rp	Keterangan					
					Rp	Keterangan								Rp	Keterangan											
342	418334	Lapas Perempuan Denpasar													21.493.900	Hutang kepada Rumah Sakit rawat inap bagi WBP										21.493.900
343	032726	Rupahan Denpasar					67.700			138.424	2.102.913															2.309.037
344	053040	Lapas Narkotika Bangli						34.787.872	34.070					261.191.097												296.013.039
345	053175	Balai Pemasyarakatan Karangasem					47.050	470.494		1.718.997																2.236.541
346	407607	Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram					61.000																			61.000
347	407613	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram	1.381.080	106.239.000										184.893.599												292.513.679
348	407622	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Selong					2.429.090						45.000													2.474.090
349	407638	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya					9.346.180	7.079.039		1.723.750																18.148.969
350	032734	Rupahan Kelas I Mataram	4.090.740	23.051.000			593.500																			28.335.240
351	052923	Lapas Terbuka Kelas IIB Mataram					13.142.100							198.020												13.338.120
352	053182	Bapas Kelas II Sumbawa Besar					35.000	1.806.389	68.140	951.488																2.861.027
353	083373	LPKA Kelas II Mataram		47.707.000			525.700							4.455.199												52.687.899
354	407701	Cab. Rutan Kupang Di Bala																								0
355	407732	Lapas Wailubuk												17.232.561												17.232.561
356	407741	Lapas Ende												22.723.651												22.723.651
357	021797	Lapas Anak Kupang												7.582.198												7.582.198
358	109149	BAPAS JAYAPURA		12.146.000						891.276																13.037.276
359	407794	Lembaga Pemasyarakatan Ahepara					48.780.150		12.332.320																	61.112.470
360	407808	Lembaga Pemasyarakatan Wamena		11.477.000																						11.477.000
361	407814	Lembaga Pemasyarakatan Nabire						4.777.595																		4.777.595
362	407823	LAPAS BIAK						3.719.440																		3.719.440
363	407839	Lembaga Pemasyarakatan Serui												179.172.000												179.172.000
364	409233	Cabang Rumah Tahanan Tanah Merah		59.921.000																						59.921.000
365	032751	RUPBASAN JAYAPURA							3.253.156																	3.253.156
366	052873	LAPAS TIMIKA						5.578.599						51.671.000												57.249.599
367	053051	Lp Narkotika JPR						10.147.839						525.662.000												535.809.839
368	051201	Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke		10.142.000					2.493.398																	12.635.398
369	407927	LAPAS CURUP		73.073.000																						73.073.000
370	418342	LAPAS PEREMPUAN												10.343.142												10.343.142
371	053421	RUPBASAN ARGAMAMUR		10.518.000			1.050.000	1.200.000		1.650.000																14.418.000
372	109152	LAPAS TORBLO												8.928.854												8.928.854
373	407499	BUTAN TERNATE												287.220.678												287.220.678
374	418350	LPP TERNATE												11.924.324												11.924.324
375	497840	LAPAS JALOLO												2.630.000												2.630.000
376	031891	BUTAN SOASIO		133.838.000										84.252.560												218.090.560
377	052827	LAPAS TERNATE						17.363.684		3.793.000																21.156.684
378	084003	BUTAN WEDA												11.619.075												11.619.075
379	107150	Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang		83.898.000					7.485.210																	91.383.210
380	404523	Lembaga Pemasyarakatan Serang												21.422.870												21.422.870
381	404548	Rumah Tahanan Negara Rangkas Bitung						5.604.822		79.140	2.143.534															7.903.496
382	404554	Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang					12.589.500	184.127.887		73.860				37.946.542												234.377.789
383	404563	Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang					3.275.375	16.177.487		38.360																19.491.222
384	404579	Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang												188.464.643												188.464.643
385	400661	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang						24.296.527		85.710	2.061.250															26.443.487
386	408706	Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang						153.428.405						59.236.575												212.665.040
387	417852	Rumah Tahanan Negara Pandeglang												38.978.808												38.978.808
388	497846	Rumah Tahanan Negara Tangerang						55.723.170		4.045.689																59.768.859
389	520815	Rumah Tahanan Negara Serang		66.270.000			66.000	18.110.293		73.731																84.520.024
390	648991	Karnel Kerenkumbun Propinsi Banten		18.998.000										7.513.862												18.998.000
391	053239	Balai Pemasyarakatan Serang		64.690.000																						72.203.862
392	683636	Lapas Kelas III Cilgong Propinsi Banten						5.295.226		230.488	1.959.496			701.036.090												708.521.300
393	406514	LAPAS TANJUNGPANDAN												3.425.786												3.425.786
394	418347	LAPAS PEREMPUAN PANGKALPINANG												6.441.000												6.441.000
395	063090	RUPBASAN PANGKALPINANG		6.547.000																						6.547.000
396	083682	LAPAS NARKOTIKA PANGKALPINANG												437.676.397												437.676.397
397	400922	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO	2.411.257	87.097.000			2.803.400																			92.311.657
398	418349	LPP KELAS III GORONTALO												84.083.772												84.083.772
399	084002	LAPAS KELAS III POHUWATO		30.094.000			33.180.750							62.168.350												125.443.100
400	109154	LAPAS KELAS IIA BATAM		97.134.000			34.318.979																			131.452.979
401	406271	LAPAS KELAS IIA TANJUNGPINANG					2.236.800																			2.236.800
402	406287	PEMERINTAH KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEMASYARAKATAN					53.500	9.529.680		92.440	890.000			210.939.423												221.505.043
403	408551	CABANG RUTAN DI DABO SINGKEP						2.048.020		321.500																2.369.520
404	497861	RUTAN KELAS IIA BATAM					10.210.500	40.713.758		1.555.450						701.000	tagihan kebersihan									53.180.708
405	497877	PEMERINTAH KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEMASYARAKATAN												500.331.000												500.331.000
406	053093	BAPAS KELAS II TANJUNGPINANG		19.113.000			40.300	1.690.459		68.500	470.000															21.382.259
407	667944	BUTAN KELAS II TANJUNGPINANG		50.266.000									1.825.500													52.091.500

NO	KODE SATKER	SATKER	JUMLAH PIHAK KETIGA																			Jumlah Utang	
			Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar					Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar									Belanja Sisa yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya		Dana Pihak Ketiga		
			Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpom (Telkom)	Langganan Daya Jasa Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lank Pask)	Beras Bulat	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Keterangan	Rp	Keterangan (misal: sisa tunjkr yang belum dikembalikan ke Seja)		Rp
Rp	Keterangan	Rp			Keterangan																		
408	68.998	LPKA KELAS II BATAM					8,275,041	4,345,461				164,200,664										176,821,166	
409	407851	LP Mamukani										4,370,523										4,370,523	
410	407876	LP Serang		25,147,000								9,998,386										35,145,386	
411	407882	LP Fak (ak)		45,128,000								77,144,200										122,272,200	
412	403767	Butan Bituni		23,535,000																		23,535,000	
413	352617	LPKA Mamuju		88,318,000	Uang Makan Bulan September s.d Desember		895,500	3,798,984														93,012,484	
414	407267	Butan Kelas II B Majene					38,800	5,173,826				2,572,751										7,785,377	
415	407273	LAPAS POLEWALI	1,204,101				174,800	10,269,680	68,140													11,716,730	
416	407282	GABANG RUMAH TAHANAN NEGAR	327,000		45,949		44,000	2,587,011	1,719,922	1,206,300												5,930,182	
417	407298	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju					182,000	7,009,327	34,070	858,000												8,083,397	
418	417949	RUPBASAN						1,552,382														1,552,382	
419	418362	LAPAS Perempatan Kelas IIB Mamuju		19,005,000			3,217,100	3,261,427														25,483,527	
420	497883	BLAPAS KELAS II POLEWALI					37,500	1,855,425	746,570													2,639,495	
421	683423	RUTAN KELAS IIB PASANGKAYU						4,938,995														4,938,995	
422	497795	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Numanan						21,421,634				82,184,064										103,635,698	
423	352613	LPKA Ambon, Provinsi Maluku						7,930,680														7,930,680	
424	405044	BLAJI PEMASYARAKATAN SURABAYA						5,594,701														5,594,701	
425	405953	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALISOK										112,262,094										112,262,094	
426	405373	LAPAS LUMAJANG						12,952,776														12,952,776	
427	407702	RUMAH TAHANAN NEGARA SOE						3,578,000														3,578,000	
428	612573	RUPBASAN SERANG							351,645													351,645	
429	612683	RUPBASAN PALU						2,482,769														2,482,769	
430	650190	RUPBASAN SAMARINDA										40,662,743										40,662,743	
431	653403	RUPBASAN SANGGAU						605,500														605,500	
TOTAL			199,136,706	5,512,001,280	45,949		2,208,875,296	3,863,614,522	79,584,279	194,781,156	12,631,728	25,090,649,318	0	212,656,154	0		79,387,180	0		0		36,653,283,601	
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI																							
1	408165	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung					391,708	23,094,434	77,720	987,860												21,551,714	
2	109157	Kantor Imigrasi Kallanda						17,303,764	277,050	1,861,007												19,441,821	
3	683111	Kantor Imigrasi Kotabumi						13,184,499	47,230	687,500												13,919,237	
4	652283	Kantor Imigrasi Kelas II Serang						12,920,228	124,394				22,800,000	PPNPN Desember 2019								35,844,622	
5	408938	Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon	9,563,000				710,000	13,072,124	130,780	1,971,750	90,000											25,537,654	
6	613524	Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang		67,877,000			1,755,200	56,621,687	162,425	399,517												126,815,829	
7	652302	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang															1,498,989	Rundl (Alm) yang baru diterima di rekening berdasarkan pengfusuan (BPG) Bank BRI No. Rekening 0116.01.000387 per 31 Desember 2019 jan				1,498,989	
8	652372	Imigrasi Bitar						15,482,839	777,997	1,349,865												17,610,701	
9	408021	Imigrasi Jember					60,000	11,052,967	266,347	1,736,300	101,700											13,217,314	
10	652365	Imigrasi Madian					371,600	16,532,040	545,839	1,435,500	240,000			703,750	TV Langganan							19,828,729	
11	683462	Imigrasi Kediri						26,841,082	210,750													27,051,830	
12	408015	Imigrasi Malang		30,488,000			3,183,050	23,687,209	730,860													66,009,119	
13	683458	Imigrasi Patekutan					3,730,400	8,442,991	3,946,879													16,120,270	
14	408953	Imigrasi peruk					3,312,410	66,098,310	1,564,101	20,672,306				4,338,035	Belan Sewa							95,983,260	
15	684006	Imigrasi ponorego		15,266,000				10,267,682	551,564													26,085,166	
16	408009	Imigrasi surabaya					4,073,000	45,237,710		14,000,000	630,000											63,940,710	
17	664633	Indenim surabaya					3,406,620	10,240,670	203,540													13,850,830	
18	408922	Kantor Imigrasi Kelas I Khazan TPI Soekarno-Hatta					26,755,047	19,428,590														46,183,547	
19	652276	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara		19,570,000				4,472,990	52,230,665	347,776												76,621,439	
20	109155	Kantor imigrasi kelas I Kantor vian TPI Jakarta Selatan		113,374,000																		113,374,000	
21	407942	Kantor Imigrasi Kelas I Khazan Non TPI Jakarta Barat			19,440,000	Tunjangan Fungsional		3,816,711														23,256,711	
22	408247	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram		62,381,000				61,000	33,772,342	7,792,833												103,907,175	
23	652412	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa						65,150														65,150	
24	408171	Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak					908,000	20,455,547	99,808	1,737,183												23,140,628	
25	408190	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singka		34,124,000			167,211	21,153,000	25,660	1,233,000	1,067,000											57,769,875	
26	409145	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau						264,000		22,000	2,385,000											2,671,000	
27	230101	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong						12,150,290	2,633,260		886,025											15,669,583	
28	662967	Kantor Imigrasi Kelas II Saribas					656,025	9,538,108	88,660	2,287,953												12,570,750	
29	664650	Budelim Pontianak		30,285,000			662,250	8,223,104	340,849	1,450,600												49,971,803	
30	418936	Kantor Imigrasi Kelas IIB Non TPI Kotapang					246,500	7,717,122		2,573,602	244,420			245,000	Langganan Koran							11,026,644	
31	680574	Kantor Imigrasi Kelas IIB Putusselau		42,344,000			141,500	5,262,596	610,365													48,358,461	

NO	KODE SATKER	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																			JUMLAH UTANG			
			Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar						Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar										Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya		Dana Pihak Ketiga		
			Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpun (Telkom)	Langganan Daya Jasa Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lamp Pank)	Beras	Budidaya	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Keterangan	Rp		Keterangan		
					Rp	Keterangan									Rp	Keterangan									
12	408598	Kantor Integrasi Kelas I TPI Banjarmasin					3.794.630															3.794.630			
13	409072	Kantor Integrasi Sampit		5.585.000																		5.585.000			
14	408423	Kantor Integrasi Kelas I Palu					11.943.405															11.943.405			
15	064572	Kantor Integrasi Kelas II TPI Tahuna					4.614.792															4.614.792			
16	064661	Rudenim Manado					7.002.056															7.002.056			
17	408210	Kantor Integrasi Kelas II TPI Tarakan		12.000.000	Desember 2019		486.500	10.466.247	175.790	836.300				38.500	SMS Gateway							24.803.137			
18	409088	Kantor Integrasi Kelas II Numukan					475.600	10.697.755						32.855.035	Belanja Prejudin Kakanin							44.028.399			
19	408479	Kantor Integrasi Kelas I TPI Samarinda					851.614	20.992.554	92.780	2.622.100												24.559.040			
40	408196	Kantor Integrasi Kelas I TPI Balikpapan	869.196				838.439	22.158.507	4.090.488	2.117.500												30.074.130			
41	079991	Kantor Integrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb					125.300	6.554.536	49.500	1.252.740				740.000								8.722.076			
42	064654	Rudenim Balikpapan					1.232.472	17.442.243	119.319	3.277.000												22.071.034			
43	498418	Kantor Integrasi Kelas II Non TPI Marau						9.882.327														9.882.327			
44	408402	Kantor Integrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar						8.763.760	148.609	583.100				1.182.500	Langganan Asotim							10.677.969			
45	408222	Kantor Integrasi Kelas I Denpasar					429.373	39.568.533	1.943.359	1.732.500												43.673.765			
46	409108	Kantor Integrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai					7.985.180	40.539.364	162.451													57.666.995			
47	072498	Kantor Integrasi Kelas II TPI Singaraja					302.670	11.586.475	1.136.747	1.208.641												14.234.533			
48	064682	Rudenim Denpasar					4.393.530					1.213.000										5.606.530			
49	409602	Kantim Ambon	229.600				5.804.452	2.504.710														8.538.762			
50	062952	Kantim Tual					9.380.719	1.265.027	2.885.300													13.531.046			
51	418937	ibkon							950.000													950.000			
52	064675	RUDENIM MAKASSAR	29.663.000											97.555.000	Biaya Makan Detesi							127.218.000			
53	080553	Kantor Integrasi Kelas III Non TPI Baubau					4.167.204	1.614.199														5.781.405			
54	080549	Kantor Integrasi Kelas III Wakatobi					412.000	3.586.229		1.216.544	217.500											5.432.273			
55	064701	RUDENIM JAYAPURA					9.157.068	18.612.000														27.769.068			
56	408262	Kantor Integrasi Biak					5.461.412															5.461.412			
57	408284	Kantor Integrasi Merauke					13.920.216	148.910	1.386.500													15.455.626			
58	109159	Kantor Integrasi Kelas II Tenbagaupa	16.003.000				8.432.654	134.640	2.182.600													26.752.894			
59	408624	KANIM KELAS I KHUSUS TPI BATAM					61.469.727	10.045.128	52.019.999													123.534.854			
60	409103	KANIM KELAS I TPI TG.PINANG																				0			
61	408112	KANIM KELAS II TPI TG.BALAI KARIMUN					17.455.307	1.481.621	2.997.500													21.934.428			
62	408128	KANIM KELAS II TPI BELAKANG PADANG					5.933.221	124.565	273.900	1.047.000	27.500											7.406.186			
63	109161	KANIM KELAS II NON TPI DABO SINGKEP					3.419.221	34.070														3.453.291			
64	407989	Kantim Cilacap					22.237.541	231.230	3.759.500													26.228.271			
65	052344	Kantim Pati					21.575.375	231.326	3.438.570													25.245.271			
66	052323	Kantim Pemalang					18.707.071															18.707.071			
67	407973	Kantim Semarang	47.664.000				36.958.991	420.419														85.043.410			
68	052340	Kantim Wonorebo					14.197.941	1.541.520	1.963.904													17.703.365			
69	064629	Rudenim Semarang					13.580.541	807.372														14.387.913			
70	408052	Kantor Integrasi Kelas II Penatang Santar		26.558.000																		26.558.000			
71	408061	Kantor Integrasi Kelas I Pokanbaru																				0			
72	408253	Kantor Integrasi Kelas I Jayapura	63.771.000																			63.771.000			
73	409041	Kantor Integrasi Kelas II Tanjung Uban	27.584.000					10.796.139	105.100	1.609.587												40.094.826			
74	077181	Rudenim Tanjung Pinang	53.603.000				55.300	25.151.625	784.103	2.118.000				500.000	Angkut sampah							82.212.028			
75	408511	Kantor Integrasi Kelas II Selat Panjang						8.554.439	42.370	705.250												9.302.059			
76	409020	Kantor Integrasi Kelas II Tarempa						3.552.481	863.500													4.415.981			
77	409057	Kantor Integrasi Kelas II Ranai						12.925.791														12.925.791			
78	408103	Kantim Kelas I Tanjung Pinang						18.842.267														18.842.267			
TOTAL			358.958.796	375.351.880	18.448.000		352.451.651	912.819.768	182.148.772	78.045.285	3.584.145	1.213.800	0	168.955.828		0		1.498.980		0		2.358.971.146			
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL																									
1	097102	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual					10.970.711	433.912.616	4.015.500		282.765.496			12.569.001	Langganan Air Minum							744.233.324			
TOTAL			0	0	0		18.978.711	433.912.616	4.015.500	0	282.765.496	0		12.569.001		0		0		0		744.233.324			
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL																									
1	409288	BPHN						102.686.569	2.264.341													104.950.910			
2	409277	Kanwil Nusa Tenggara Barat												122.124.000	Hutang Pembayaran Runtan Hukum Litigasi dan Non Litigasi							122.124.000			
3	409207	Kanwil Sulawesi Tenggara												26.000.000	Hutang Pembayaran Runtan Hukum Litigasi							26.000.000			
TOTAL			0	0	0	0	0	102.686.569	2.264.341	0	0	0	0	148.124.000		0		0		0		253.074.910			
BPSDM HUKUM DAN HAM																									
1	409159	Badikat Sulawesi Utara		6.946.200																		6.946.200			

NO	KODE SATKER	SATKER	HUTANG PIHAK KETIGA																	JUMLAH UTANG		
			Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar								Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya		Dana Pihak Ketiga			
			Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpom (Telkom)	Langganan Daya Jasa (Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Keterangan (misal: sisa tunker yang belum dikembalikan ke Setjen)		Rp	Keterangan
					Rp	Keterangan								Rp	Keterangan							
TOTAL			0	6.946.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.946.200		
GRAND TOTAL			552.435.010	5.967.931.490	19.485.949	2.580.386.186	5.392.661.822	189.180.606	284.776.871	301.803.669	25.091.862.339	0	12.563.644.975	0		80.886.169		11.410.180.458		64.435.234.760		



**LAMPIRAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**PENJELASAN ATAS
POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

ANALISA POS-POS LO dan LPE

1 PENDAPATAN PNPB LO

Pendapatan PNPB LO = Pendapatan PNPB LRA + ((Pendapatan YMHD Akhir - Pendapatan YMHD Awal) + (Piutang PNPB Akhir - Piutang PNPB Awal) + (Kas di Bendahara Penerimaan Akhir - Kas di Bendahara Penerimaan Awal)) - (Pendapatan Diterima Dimuka Akhir - Pendapatan Diterima Dimuka Awal) - Pendapatan TP/TGR - Pendapatan Pelepasan Aset - Pendapatan Pengembalian Belanja

a	Pendapatan PNPB LO	4.180.768.548.845	
b	Pendapatan PNPB LRA	4.415.573.984.076	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	(234.805.435.231)	
	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Akhir	51.754.279	
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Awal	6.258.866	
d	Kenaikan/Penurunan Pendapatan YMHD	45.495.413	
	Piutang PNPB Akhir	322.805.448.526	
	Piutang PNPB Awal	386.127.641.921	
e	Kenaikan/Penurunan Piutang PNPB	(63.322.193.395)	
	Kas Di Bendahara Penerimaan Akhir	0	
	Kas Di Bendahara Penerimaan Awal	0	
f	Kenaikan/Penurunan Kas di Bend. Penerima	0	
	Pendapatan Diterima Dimuka Akhir	430.662.482.004	
	Pendapatan Diterima Dimuka Awal	297.076.909.128	
g	Kenaikan/Penurunan Pend. Ditrn Dimuka	133.585.572.876	
	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan (425752)	157.673	
	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (425931)	792.132.522	
	Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL (42591x)	78.066.685.712	
h	PNBP yang membentuk Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO (o + p)	78.858.975.907	
	Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN (42512x)	3.287.418.718	
i	PNBP yang membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO (r)	3.287.418.718	
j	Jumlah Faktor Yang Mempengaruhi (d + e + f - g - h - i)	(279.008.665.483)	
	Faktor Lain Yang Mempengaruhi		
	Pendapatan Ganti Rugi Negara (42579x)	(291.404.246)	
	Jurnal Pencatatan Piutang PNPB atas Aset Belum Register	(1.721.471.016)	
	Jurnal Pembayaran Piutang PNPB dengan menggunakan Akun 42591x	26.646.577.146	
	Jurnal Pencatatan Piutang PNPB dengan menggunakan Akun 42591x	(507.241.000)	
	Jurnal Pembayaran Piutang PNPB dengan menggunakan Akun Beban	0	
	Jurnal Pencatatan Piutang PNPB atas Transaksi Kelebihan Belanja	(675.884.153)	
	Jurnal Pencatatan Piutang Jangka Panjang Lainnya terhadap PNPB LO	0	
	Jurnal Pelunasan Piutang Jangka Panjang Lainnya terhadap PNPB LO	(1.765.200.000)	
	Jurnal Manual Reklasifikasi Piutang PNPB	300.000	
	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Transaksi Piutang PNPB	(1.423.657.528)	
	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Transaksi Pendapatan Diterima Dimuka	812.529.847	
	Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan atas Pendapatan	23.128.814.461	
	Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas Pendapatan	(133.259)	
	Jurnal Transfer Masuk Piutang PNPB	(4.050.000.000)	
	Jurnal Transfer Keluar Piutang PNPB	4.050.000.000	
k	Total Faktor Lain Yang Mempengaruhi	44.203.230.252	
l	Pendapatan PNPB LO (b + j + k)	4.180.768.548.845	
	Selisih (a - l)	0	

Penjelasan Selisih :

No	Uraian	Nilai	
	Jumlah Selisih	0 0	

2 BEBAN PEGAWAI LO

Beban Pegawai LO = Belanja Pegawai LRA - Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu + Utang Belanja Pegawai di Tahun Anggaran Berjalan

a	Beban Pegawai LO	6.879.620.735.064	
b	Belanja Pegawai LRA	6.885.840.107.867	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	(6.219.372.803)	
	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL	(12.778.147.164)	
	Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Berjalan	6.562.415.465	
d	Total Faktor Yang Mempengaruhi	(6.215.731.699)	
	Faktor Lain Yang Mempengaruhi		
	Jurnal Pencatatan Piutang PNPB atas Transaksi Pengembalian Belanja Pegawai	0	
	Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas Pengembalian Belanja Pegawai Yang Belum Disetor Ke Kas Negara	(3.641.104)	
	Jurnal Pencatatan Piutang PNPB atas Transaksi Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai TAB (51xxxx)	0	
e	Total Faktor Lain Yang Mempengaruhi	(3.641.104)	
f	Beban Pegawai Total (b + d + e)	6.879.620.735.064	
	Selisih (a - f)	0	

Penjelasan Selisih :			
No	Uraian	Nilai	
	Jumlah Selisih	0	0

3 BEBAN PERSEDIAAN LO

Beban Persediaan LO = Belanja Barang Persediaan LRA + Persediaan Awal - Persediaan Akhir			
a	Beban Persediaan LO	720.005.876.368	
b	Belanja Barang Persediaan LRA (Akun 5218xx)	721.153.112.890	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	(1.147.236.522)	
	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Persediaan Awal	411.488.366.832	
	Persediaan Akhir	539.879.870.427	
	Persediaan Belum diregister	0	
d	Kenaikan/Penurunan Persediaan	(128.391.503.595)	
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	3.945.602.796	
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	1.820.268.406	
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi	0	
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	
e	Blnj Brg Persediaan Akun 523xxx	5.765.871.202	
	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	18.820.012.236	
	Beban Persediaan Suku Cadang	6.869.277.418	
f	Beban Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO	25.689.289.654	
	Beban Peralatan dan Mesin Utk Diserahkan Kpd Masy.	0	
	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Utk Diserahkan Kpd Masy.	0	
	Beban Barang Fisik Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	0	
	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kpd Masy.	0	
	Beban Persediaan ATL Untuk Diserahkan Kpd Masy.	0	
	Beban Brg Persed. Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	117.325.551	
g	Beban Yang Membentuk Beban untuk Diserahkan Kepada Masyarakat LO	117.325.551	
	Faktor Lain Yang Mempengaruhi		
	Transfer Keluar Barang Persediaan	(505.537.195.152)	
	Koreksi Persediaan yang bernilai negative	(96.922.694.051)	
	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(8.834.958.308)	
	Penghapusan Barang Persediaan	(50.958.144)	
	Barang Persediaan xxxxx --- Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	
	Reklas Keluar	(309.768.101.021)	
	Persediaan Kurang	(921.113.906.676)	
	Transfer Masuk Barang Persediaan	471.298.119.288	
	Saldo Awal Persediaan Hasil Reklasifikasi Aset	1.657.537.734	
	Koreksi Persediaan yang bernilai positive	137.156.980.178	
	Persediaan yang didapat dari Perolehan Lainnya	362.494.646	
	Reklas Masuk	452.180.412.751	
	Hibah Masuk	173.796.000	
	Persediaan Tambah	1.062.829.340.597	
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Persediaan	0	
	Jurnal Manual Koreksi Nilai Persediaan	713.700	
	Jurnal Manual atas Hibah persediaan	0	
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun tidak menggunakan Akun Persediaan	1.571.623.175	
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Menggunakan Akun Persediaan (5218xx), namun digunakan untuk Belanja Barang Non Persediaan	0	
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun tidak menggunakan Akun Persediaan (53)	3.997.240.280	
	Jurnal Manual Persediaan Belum Diregister pada Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	
	Jurnal Persediaan Belum Diregister pada Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	0	
	Jurnal Persediaan Belum Diregister pada Beban Penyesuaian Selisih Kurs	0	
	Jurnal Penyesuaian/Umum	5.569.577.155	
h	Total Faktor Lain Yang Mempengaruhi	147.285.011.076	
i	Beban Persediaan Total	720.005.876.368	
	Selisih (a - i)	0	

Penjelasan Selisih :			
No	Uraian	Nilai	
			0
			0

4 BEBAN BARANG DAN JASA LO

Beban Barang dan Jasa LO = Belanja Barang dan Jasa LRA - Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran Yang Lalu + Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran Berjalan			
a	Beban Barang dan Jasa LO	3.692.933.246.281	
b	Belanja Barang dan Jasa LRA	3.477.158.578.762	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	215.774.667.519	
Faktor Yang Mempengaruhi			
	Beban Rugi selisih Kurs Uang Persediaan Satker perwakilan RI/Atase Teknis	(87.884.996)	
	Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa TAYL	(80.226.345.738)	
	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan	47.200.323.614	
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Menggunakan Akun Persediaan (5218xx), namun digunakan untuk Belanja Barang Non Persediaan	(1.571.623.175)	
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun menggunakan Akun Non Persediaan	0	
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx) yang membentuk Aset	(83.219.545)	
	Jurnal Manual Peralatan dan Mesin Belum Diregister karena Belanja menggunakan akun 53, namun digunakan untuk Belanja Barang	982.418.200	
	Jurnal Pencatatan Baru Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	(9.236.953.689)	
	Jurnal Pencatatan Atas Kadaluaarsa atau Habis Masa Manfaat Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	10.955.851.437	
	Jurnal Pencatatan Piutang PNPB atas Transaksi Pengembalian Belanja Barang	0	
	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	0	
	Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas Beban Honor yang belum diserahkan	(1.800.000)	
	Beban Ekstrakomptabel	4.206.796.824	
	Jurnal Manual atas Hibah Jasa	244.312.988.740	
	Jurnal Transfer Masuk Utang Belanja Barang	(13.080.460.606)	
	Jurnal Transfer Keluar Utang Belanja Barang	13.080.460.606	
	Jurnal Pencatatan Piutang PNPB atas Transaksi Kelebihan Pembayaran Belanja BAMA (52xxxx)	(675.884.153)	
d	Total Faktor Yang Mempengaruhi	215.774.667.519	
	Selisih (c - d)	0	
Penjelasan Selisih :			
No	Uraian	Nilai	
	Jumlah Selisih	0	0

5 BEBAN PEMELIHARAAN LO

Beban Pemeliharaan LO = Belanja Pemeliharaan LRA			
a	Beban Pemeliharaan LO	401.899.951.636	
b	Belanja Pemeliharaan LRA (Akun 523xxx)	382.573.388.281	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	19.326.563.355	
Faktor Yang Mempengaruhi			
	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	18.820.012.236	
	Beban Persediaan Suku Cadang	6.869.277.418	
d	Beban Barang Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO	25.689.289.654	
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	3.945.602.796	
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	1.820.268.406	
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi	0	
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	
e	Belanja Akun 523xxx yang membentuk Barang Persediaan	5.765.871.202	
Faktor Lain Yang Mempengaruhi			
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Aset	(773.841.012)	
	Jurnal Manual Belum Register atas Belanja Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan (536xxx) dengan nilai dibawah kapitalisasi	40.350.915	
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Persediaan	0	
	Jurnal Manual Belanja Barang yang masih harus dibayar dengan menggunakan Akun 523	0	
	Jurnal Pencatatan Baru Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Pemeliharaan (Akun 523xxx)	0	
	Jurnal Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan TAYL	0	
	Beban Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	136.635.000	
f	Total Faktor Lain Yang Mempengaruhi	(596.855.097)	
g	Beban Pemeliharaan Total (b + d - e + f)	401.899.951.636	
	Selisih (a - g)	0	

Penjelasan Selisih :		
No	Uraian	Nilai
	Jumlah Selisih	0 0

6 BEBAN PERJALANAN DINAS LO

Beban Perjalanan Dinas LO = Belanja Perjalanan Dinas LRA - Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran Yang Lalu + Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran Berjalan

a	Beban Perjalanan Dinas LO	682.901.281.455	
b	Belanja Perjalanan Dinas LRA	680.729.789.640	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	2.171.491.815	
d	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Pembayaran Utang Blj. Perjadin TAYL	(10.002.619.348)	
	Utang Belanja Perjadin Tahun Anggaran Berjalan	12.032.855.035	
e	Faktor Lain Yang Mempengaruhi		
	Jurnal Pencatatan Piutang PNPB atas Transaksi Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	0	
	Jurnal Belum Diregister karena Belanja Perjalanan Dinas yang membentuk Aset	157.406.128	
	Jurnal Belum Diregister karena Belanja Aset menggunakan akun Belanja Perjalanan Dinas	(16.150.000)	
f	Beban Perjalanan Dinas Total (b + c + d + e)	682.901.281.455	
	Selisih (a - f)	0	

Penjelasan Selisih :		
No	Uraian	Nilai
	Jumlah Selisih	0 0

7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT LO

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat LO = Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

a	Beban Barang Utk Diserahkan ke Masy. LO	117.325.551	
b	Belanja Barang Utk Diserahkan ke Masy. LRA	0	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	117.325.551	
	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Beban Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	
	Beban Peralatan dan Mesin Utk Diserahkan Kpd Masy.	0	
	Beban Jalan, Irigasi, Jaringan Utk Diserahkan Kpd Masy.	0	
	Beban Barang Fisik Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	0	
	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kpd Masy.	0	
	Beban Persediaan ATL Untuk Diserahkan Kpd Masy.	0	
	Beban Brg Persed. Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	117.325.551	
d	Beban Yang Membentuk Beban untuk Diserahkan Kepada Masyarakat LO	117.325.551	
e	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (d - b)	117.325.551	
	Selisih (c - e)	0	

Penjelasan Selisih :		
No	Uraian	Nilai
	Jumlah Selisih	0 0

8 BEBAN BANTUAN SOSIAL LO

	Beban Bantuan Sosial LO	0	
BEBAN INI TIDAK SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENKUMHAM			

9 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi LO = Akumulasi Penyusutan Awal - Akumulasi Penyusutan Akhir + Akumulasi Penyusutan Transaksional Transfer Masuk - Akumulasi Penyusutan Transaksional Transfer Keluar + Akumulasi Penyusutan Penghapusan Aset

a	Beban Penyusutan dan Amortisasi LO	1.456.312.580.320	
b	Akumulasi Penyusutan Awal	(7.397.577.516.014)	
c	Akumulasi Penyusutan Akhir	(6.971.835.912.775)	
	Faktor Yang Mempengaruhi	1.882.054.183.559	
	Saldo Awal	(5.940.702.163)	
	Transfer Masuk	(101.188.799.777)	
	Hibah (Masuk)	(58.269.909)	
	Reklasifikasi Masuk	(93.723.512.820)	
	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	(675.654.887)	
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(1.670.828.709)	
	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	(511.765.380)	
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(7.000.822.068)	
	Transaksi Normalisasi BMN	(203.395.583)	

	Koreksi Penilaian Kembali BMN	0	
	Koreksi Penyusutan Karena 225	(37.007.638.617)	
	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(2.181.139.197)	
	Koreksi BMN ditemukan Kembali	0	
	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(668.657.292)	
	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(721.163)	
	Penghapusan	0	
	Transfer Keluar	0	
	Hibah (Keluar)	0	
	Reklasifikasi Keluar	(1.289.750)	
	Koreksi Pencatatan	0	
	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	0	
	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0	
	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	(37.332.778)	
	Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	(91.908.623)	
	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	(132.120.968)	
	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0	
	Koreksi Penyusutan Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Revaluasi	(1.804.666)	
	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	0	
	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	0	
	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0	
	Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0	
	Koreksi Penyusutan Transfer Masuk Akibat Koreksi Revaluasi	(23.908.836)	
d	Akum. Penyusutan Transaksional (Masuk)	(251.120.273.186)	
	Saldo Awal	0	
	Transfer Masuk	0	
	Hibah (Masuk)	0	
	Reklasifikasi Masuk	0	
	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	0	
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	325.000	
	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	0	
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	4.091.251.249	
	Transaksi Normalisasi BMN	4.734.312.949	
	Koreksi Penilaian Kembali BMN	865.213.572	
	Koreksi Penyusutan Karena 225	134.569.739.667	
	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	0	
	Koreksi BMN ditemukan Kembali	715.147.515	
	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0	
	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	198.207.958	
	Penghapusan	7.619.296.001	
	Transfer Keluar	101.979.415.506	
	Hibah (Keluar)	9.636.040	
	Reklasifikasi Keluar	37.294.359.287	
	Koreksi Pencatatan	12.695.879.676	
	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	39.115.484	
	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	839.591.210	
	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	1.899.912.330	
	Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	33.413.049	
	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	770.141.369	
	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	159.177.347.760	
	Koreksi Penyusutan Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Revaluasi	166.881	
	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	5.525.608	
	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	537.880.168	
	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	4.832.374.220	
	Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	2.350.000	
	Koreksi Penyusutan Transfer Masuk Akibat Koreksi Revaluasi	43.188.304	
e	Akum. Penyusutan Transaksional (Keluar)	472.953.790.803	
f	Jurnal Manual Penyusutan	1.660.220.665.942	
	Jurnal Manual Koreksi Reklasifikasi Aset pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	0	
	Jurnal Manual Koreksi Revaluasi Aset pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	1.985.532.210.965	
	Jurnal Manual Koreksi Non Revaluasi Aset pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	(42.622.827.279)	
	Jurnal Manual Beban Kerugian Pelepasan Aset pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	(233.505.547)	
	Jurnal Manual Transfer Keluar pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	(15.978.028.158)	
	Jurnal Manual Transfer Masuk pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	15.978.028.158	
	Jurnal Manual Koreksi Non Revaluasi Aset pada Beban Penyusutan di Satker Konsolidasi	(282.455.212.197)	
g	Beban Penyusutan Total (b - c + d + e + f)	1.456.312.580.320	
	Selisih (a - u)	0	
Penjelasan Selisih :			
No	Uraian	Nilai	
	Jumlah Selisih	0	0

10 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG LO

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO = Penyisihan Piutang Akhir - Penyisihan Piutang Awal - Penghapusan Piutang

a	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO	45.525.753.772	
	Penyisihan Piutang Akhir	(302.597.514.130)	
	Penyisihan Piutang Awal	(348.117.845.484)	
	Penghapusan Piutang	0	
	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Penyisihan Piutang	(5.422.418)	
	Jurnal Transfer Masuk atas Penyisihan Piutang	(20.250.000)	
	Jurnal Transfer Keluar atas Penyisihan Piutang	20.250.000	
b	Beban Penyisihan Piutang Total	45.525.753.772	
	Selisih (a - b)	0	

Penjelasan Selisih :

No	Uraian	Nilai	
	Jumlah Selisih	0	0

11 BEBAN LAIN-LAIN LO

Beban Lain- Lain LO	0	
BEBAN INI TIDAK SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENKUMHAM		

12 PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR LO

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO = Pendapatan Pelepasan Aset LRA

a	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO	3.287.418.718	
b	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN LRA	3.287.418.718	
	Selisih (a - b)	0	

Penjelasan Selisih :

No	Uraian	Nilai	
	Jumlah Selisih	0	0

13 BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR LO

Beban Pelepasan Aset Non lancar LO = Beban Kerugian Pelepasan Aset Neraca Percobaan Akrua

a	Beban Pelepasan Aset Non Lancar LO	91.615.434.880	
b	Beban Kerugian Pelepasan Aset	91.615.434.880	
	Selisih (a - b)	0	

Penjelasan Selisih :

No	Uraian	Nilai	
	Jumlah Selisih	0	0

14 PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA LO

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO = Pendapatan TP/TGR LRA + Pendapatan Pengembalian Belanja LRA + Pendapatan Selisih Kurs + Pendapatan Perolehan Aset Lainnya

a	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional LO	207.623.854.210	
	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan (425752)	157.673	
	Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL (42591x)	78.066.685.712	
	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (425931)	792.132.522	
b	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional LRA	78.858.975.907	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	128.764.878.303	
	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	3.055.191.428	
	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	0	
	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	13.685.648.809	
	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	137.156.980.178	
	Jurnal (Pencatatan Baru) Piutang Jangka Panjang TP/TGR	1.043.881.183	
	Jurnal (Balik) Piutang Jangka Panjang TP/TGR	(8.000)	
	Jurnal Pengakuan Piutang PNPB yang menggunakan akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591X)	(26.646.577.146)	
	Jurnal Balik atas Pembayaran Piutang PNPB yang menggunakan akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591X)	507.241.000	
	Jurnal Pengakuan Piutang TP/TGR yang menggunakan akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591X)	1.043.000	
	Jurnal Balik atas Pembayaran Piutang TP/TGR yang menggunakan akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591X)	(12.274.968)	
	Jurnal manual atas penyetoran kelebihan belanja TAYL yang terdapat pada BP dengan menggunakan akun 42591x	0	
	Jurnal balik atas penyetoran kelebihan belanja TAYL yang terdapat pada BP dengan menggunakan akun 42591x	(26.247.181)	
d	Total Faktor Yang Mempengaruhi	128.764.878.303	
	Selisih (c - d)	0	

Penjelasan Selisih :			
No	Uraian	Nilai	
	Jumlah Selisih	0 0	

15 BEBAN DARI KEGIATAN OPERASIONAL LAINNYA LO

a	Beban dari Kegiatan Operasional Lainnya LO	108.900.728.783	
	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Beban Rugi Selisih Kurs UP Satker Perwakilan	87.884.996	
	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	96.922.694.051	
	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	8.834.958.308	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	3.055.191.428	
	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	0	
b	Total Faktor Yang Mempengaruhi	108.900.728.783	
	Selisih (a - b)	0	

Penjelasan Selisih :

No	Uraian	Nilai	
	Jumlah Selisih	0 0	

16 SURPLUS/DEFISIT

Surplus/Defisit LO = Surplus/Defisit LPE			
a	Surplus/Defisit LO	(9.597.101.584.793)	
b	Surplus/Defisit LPE	(9.597.101.584.793)	
	Selisih (a - b)	0	

17 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal LPE = Ekuitas Awal Neraca			
a	Ekuitas Awal LPE	24.224.492.209.998	
b	Ekuitas Awal Neraca	24.224.492.209.998	
	Selisih (a - b)	0	

18 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir LPE = Ekuitas Akhir Neraca			
a	Ekuitas Akhir LPE	68.274.718.348.226	
b	Ekuitas Akhir Neraca	68.274.718.348.226	
	Selisih (a - b)	0	

19 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS LPE

Transaksi Antar Entitas = Belanja - Pendapatan + Transfer Masuk - Transfer Keluar + Pengesahan Hibah-Pengembalian Pengesahan Hibah			
a	Transaksi Antar Entitas LPE	9.297.471.943.938	
	Belanja LRA	13.774.396.008.362	
	Pendapatan LRA	(4.415.573.984.076)	
	Transfer Masuk	2.305.741.571.879	
	Transfer Keluar	(2.672.741.179.477)	
	Pengesahan Hibah Langsung	307.076.488.796	
	Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	(15.499.477)	
	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	390.738.454	
	Penerimaan Hibah Uang	(1.835.000.000)	
	Pengesahan Hibah Uang TAYL	30.000.000	LP Kota Agung
	Pengembalian Pengesahan Hibah Uang	2.799.477	LP Tulungagung
b	Total Transaksi Antar Entitas	9.297.471.943.938	
	Selisih (a - b)	0	

Penjelasan Selisih :

No	Uraian	Nilai	
	Jumlah Selisih	0 0	



**LAMPIRAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**PENJELASAN ATAS
POS-POS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2019

JENIS KOREKSI	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
AMUNISI	297.259.340,00	
LAPAS INDRAMAYU	71.750.000,00	
LAPAS KELAS III CILEGON PROPINSI BANTEN	15.525.972,00	
LAPAS SUKABUMI	12.776.500,00	
LAPAS TASIKMALAYA	3.043.656,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKALIS	103.950.000,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN POLEWALI	99.792,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WATAMPONE	4.244.900,00	Koreksi atas temuan dari Inspektorat Jenderal terkait kondisi amunisi berbeda antara aplikasi dan di lapangan
RUTAN KELAS IIB PEKAN BARU PROPINSI RIAU	85.868.520,00	
BAHAN BAKU	17.449.200,00	
LAPAS KELAS III BONTANG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	17.449.200,00	
BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN	66.952.096,00	
BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	10.446.113,00	Koreksi pencatatan saldo awal dimaksudkan karena barang-barang berupa karpet, gordyn, dan lain-lain dikategorikan sebagai aset lancar



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BALAI PEMASYARAKATAN KARANGASEM	50.000,00	
LAPAS KELAS III BONTANG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	11.230.300,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	41.840.000,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	12.683,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGARAJA	2.833.000,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA BANDAR LAMPUNG	540.000,00	
BARANG KONSUMSI	1.216.961.520,00	
BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	4,00	Koreksi atas pembulatan persediaan
BALAI PEMASYARAKATAN KARANGASEM	93.000,00	
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	62.735.030,00	
LAPAS KELAS III BONTANG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	513.219.850,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	159.838.188,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	190.717.500,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	199.720.974,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	35.100.000,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA BANDAR LAMPUNG	37.607.100,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WATAMPONE	13.884.766,00	
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SINGKAWANG	600.000,00	
RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	909.608,00	
RUMAH TAHANAN NEGARA SUMENEP	2.176.750,00	Koreksi atas barang berlebih digudang dan dicatat menggunakan koreksi saldo awal
KANTOR IMIGRASI SAMARINDA	358.750,00	
BARANG PERSEDIAAN LAINNYA UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KE MASYARAKAT	20.000.001,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1,00	Koreksi atas pembulatan persediaan
RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG REDEP	20.000.000,00	
PERALATAN DAN MESIN UNTUK DIJUAL ATAU DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	55.000,00	
LAPAS KELAS III BONTANG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	55.000,00	
PERSEDIAAN LAINNYA	38.360.578,00	
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	38.360.578,00	
PERSEDIAAN YANG BELUM DIREGISTER	713.699,00	
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	704.512,00	
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEK TUAL	10.131,00	Koreksi atas pembulatan persediaan
KANTOR IMIGRASI NGURAH RAI	(944,00)	
SUKU CADANG	500.000,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KOTABUMI	500.000,00	
Grand Total	1.658.251.434,00	



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

RINCIAN KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI PER 31 DESEMBER 2019

ESELON I	Reklasifikasi Keluar	Reklasifikasi Masuk	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	Koreksi Penyusutan Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Revaluasi	Grand Total
SEKRETARIAT JENDERAL	(1.207.700.019.276,00)	1.226.510.519.692,00		444.355.624,00		19.254.856.040,00
AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE		(12.375.000,00)				(12.375.000,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	240.392.718,00	(1.062.436.536,00)		(28.363.126,00)		(850.406.944,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN		(1.314.563.213,00)				(1.314.563.213,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	24.692.134.521,00	(3.732.652.074,00)				20.959.482.447,00
ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	(49.500.000,00)					(49.500.000,00)
BAHAN BAKU	(2.954.500,00)					(2.954.500,00)
BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN		880.400,00				880.400,00
BARANG KONSUMSI	(440.000,00)	77.597.671,00				77.157.671,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	(1.800.826.000,00)	1.950.126.000,00		472.718.750,00		622.018.750,00
JARINGAN		5.535.003.000,00				5.535.003.000,00
PERALATAN DAN MESIN	(121.880.702.444,00)	93.200.399.444,00				(28.680.303.000,00)
PERSEDIAAN LAINNYA	(74.883.571,00)					(74.883.571,00)
SOFTWARE		23.045.500.000,00				23.045.500.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUKU CADANG	(200.000,00)					(200.000,00)
TANAH	(1.108.823.040.000,00)	1.108.823.040.000,00				0,00
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	(17.852.496.802,00)	17.613.939.308,00			(1.804.666,00)	(240.362.160,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	42.323.659,00	(307.843.040,00)			(1.804.666,00)	(267.324.047,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	291.960.588,00	(268.434.252,00)				23.526.336,00
BARANG KONSUMSI	(204.000,00)	204.000,00				0,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	(1.338.448.000,00)	1.338.448.000,00				0,00
PERALATAN DAN MESIN	(448.048.049,00)	451.483.600,00				3.435.551,00
TANAH	(16.400.081.000,00)	16.400.081.000,00				0,00
DITJEN PEMASYARAKATAN	(115.330.256.460,00)	128.943.216.356,00	(93.291.240,00)	1.772.323.417,00	166.881,00	15.292.158.954,00
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA		(15.000.000,00)				(15.000.000,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	1.560.384.549,00	(1.786.269.581,00)	17.769.760,00	(619.165.445,00)	166.881,00	(827.113.836,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI		(26.170.800,00)		(28.126.316,00)		(54.297.116,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	2.160.816.557,00	(2.232.079.921,00)				(71.263.364,00)
AMUNISI	(42.000.000,00)	23.908.160,00				(18.091.840,00)
ASET TETAP LAINNYA	(1.793.228,00)	32.000.000,00				30.206.772,00
BAHAN BAKU	(288.261.520,00)	21.769.000,00				(266.492.520,00)
BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN	(504.798.988,00)	476.754.955,00				(28.044.033,00)
BARANG KONSUMSI	(721.153.394,00)	3.337.372.984,00				2.616.219.590,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

BARANG PERSEDIAAN LAINNYA UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KE MASYARAKAT	(13.275.000,00)					(13.275.000,00)
GEDUNG DAN BANGUNAN	(108.611.491.586,00)	120.829.608.106,00	(111.061.000,00)	2.218.234.898,00		14.325.290.418,00
HEWAN DAN TANAMAN UNTUK DIJUAL ATAU DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	(9.000.000,00)					(9.000.000,00)
IRIGASI	(559.093.885,00)	523.416.000,00		159.480.280,00		123.802.395,00
JALAN DAN JEMBATAN		1.211.310.195,00				1.211.310.195,00
PERALATAN DAN MESIN	(3.937.376.698,00)	4.464.070.458,00				526.693.760,00
PERSEDIAAN LAINNYA	(1.389.988.214,00)	9.803.800,00				(1.380.184.414,00)
PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	(847.219.885,00)					(847.219.885,00)
PITA CUKAI, MATERAI DAN LEGES	(198.000,00)					(198.000,00)
SUKU CADANG	(53.084.168,00)					(53.084.168,00)
TANAH	(2.072.723.000,00)	2.072.723.000,00		41.900.000,00		41.900.000,00
DITJEN IMIGRASI	(481.217.556.385,00)	566.089.810.903,00				84.872.254.518,00
AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE		(65.533.189.959,00)				(65.533.189.959,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI	54.184.600,00					54.184.600,00
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	7.941.669.665,00	(10.270.533.176,00)				(2.328.863.511,00)
ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	(65.542.367.209,00)					(65.542.367.209,00)
ASET TETAP RENOVASI	(59.372.000,00)					(59.372.000,00)
BAHAN BAKU	(300.955.635.497,00)					(300.955.635.497,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN	(7.533.460,00)	2.337.100,00				(5.196.360,00)
BARANG KONSUMSI	(3.332.198.501,00)	447.785.158.325,00				444.452.959.824,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	(1.700.014.703,00)	6.835.908.210,00				5.135.893.507,00
IRIGASI	(270.923.000,00)					(270.923.000,00)
JALAN DAN JEMBATAN		270.923.000,00				270.923.000,00
PERALATAN DAN MESIN	(12.251.795.313,00)	17.446.736.194,00				5.194.940.881,00
PERSEDIAAN LAINNYA	(758.761.667,00)	125.000,00				(758.636.667,00)
PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	(313.422.000,00)					(313.422.000,00)
PITA CUKAI, MATERAI DAN LEGES	(7.500.000,00)					(7.500.000,00)
SOFTWARE		65.539.346.209,00				65.539.346.209,00
SUKU CADANG	(887.300,00)					(887.300,00)
TANAH	(104.013.000.000,00)	104.013.000.000,00				0,00
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	(16.789.353.784,00)	9.936.591.196,00				(6.852.762.588,00)
AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE		(6.847.137.588,00)				(6.847.137.588,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	309.202.680,00	(314.827.680,00)				(5.625.000,00)
ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	(16.542.965.777,00)					(16.542.965.777,00)
BARANG KONSUMSI		145.163.887,00				145.163.887,00
PERALATAN DAN MESIN	(410.426.800,00)	410.426.800,00				0,00
PERSEDIAAN LAINNYA	(145.163.887,00)					(145.163.887,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SOFTWARE		16.542.965.777,00				16.542.965.777,00
DITJEN HAK ASASI MANUSIA	(66.229.000,00)	66.229.000,00				0,00
BARANG KONSUMSI		66.229.000,00				66.229.000,00
PERSEDIAAN LAINNYA	(66.229.000,00)					(66.229.000,00)
BADAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL	(161.086.569,00)	161.086.569,00				0,00
ASET TETAP LAINNYA	(10.000.000,00)	10.000.000,00				0,00
BARANG KONSUMSI		151.086.569,00				151.086.569,00
PERSEDIAAN LAINNYA	(151.086.569,00)					(151.086.569,00)
BALITBANG HUKUM DAN HAM	(63.997.900,00)	63.997.900,00				0,00
BARANG KONSUMSI		63.997.900,00				63.997.900,00
PERSEDIAAN LAINNYA	(63.997.900,00)					(63.997.900,00)
BPSDM HUKUM DAN HAM	(40.942.560.350,00)	40.942.560.350,00				0,00
BAHAN BAKU	(17.516.000,00)					(17.516.000,00)
BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN		17.516.000,00				17.516.000,00
BARANG KONSUMSI	(258.000,00)	508.000,00				250.000,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	(40.924.536.350,00)	35.231.270.657,00				(5.693.265.693,00)
JALAN DAN JEMBATAN		5.693.265.693,00				5.693.265.693,00
SUKU CADANG	(250.000,00)					(250.000,00)
Grand Total	(1.880.123.556.526,00)	1.990.327.951.274,00	(93.291.240,00)	2.216.679.041,00	(1.637.785,00)	112.326.144.764,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

RINCIAN SELISIH REVALUASI ASET PER 31 DESEMBER 2019

ESELON I	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	GEDUNG DAN BANGUNAN	IRIGASI	JALAN DAN JEMBATAN	TANAH	Grand Total
SEKRETARIAT JENDERAL	21.493.265,00			146.334.573.309,00		(19.737.000,00)	8.543.188.356.000,00	8.689.524.685.574,00
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(28.363.125,00)			151.431.625,00				123.068.500,00
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(6.224.960,00)			124.554.853.752,00				124.548.628.792,00
Koreksi Kesalahan input IP				5.665.615.600,00		(19.737.000,00)	8.542.929.517.000,00	8.548.575.395.600,00
Koreksi Penilaian Kembali BMN	56.081.350,00			1.175.266.600,00			258.839.000,00	1.490.186.950,00
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi				(56.081.350,00)				(56.081.350,00)
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali				14.843.487.082,00				14.843.487.082,00
INSPEKTORAT JENDERAL				(84.434.000,00)				(84.434.000,00)
Koreksi Kesalahan input IP				(84.434.000,00)				(84.434.000,00)
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM				432.464.000,00			(64.637.000,00)	367.827.000,00
Koreksi Kesalahan input IP				432.464.000,00			(64.637.000,00)	367.827.000,00
DITJEN PEMASYARAKATAN	(615.563.039,00)	28.126.316,00		(276.490.189.986,00)	(3.107.280,00)	4.813.815.000,00	1.027.270.332.200,00	755.003.413.211,00
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi							241.366.000,00	241.366.000,00
Koreksi BMN ditemukan Kembali	434.746.586,00			(1.869.708.817,00)				(1.434.962.231,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(640.294.167,00)			(99.889.449,00)			(199.466.000,00)	(939.649.616,00)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(1.029.180.903,00)			(14.995.948.799,00)			(9.883.358.800,00)	(25.908.488.502,00)
Koreksi Kesalahan input IP				(259.936.540.737,00)	36.496.000,00	4.813.815.000,00	1.036.912.325.000,00	781.826.095.263,00
Koreksi Penilaian Kembali BMN	619.165.445,00	28.126.316,00		(653.091.453,00)	(11.476.964,00)		199.466.000,00	182.189.344,00
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi				(1.053.912.031,00)	(28.126.316,00)			(1.082.038.347,00)
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali				2.118.901.300,00				2.118.901.300,00
DITJEN IMIGRASI	(759.162.819,00)			(28.707.116.889,00)		(18.515.000,00)	(220.079.802.993,00)	(249.564.597.701,00)
Koreksi BMN ditemukan Kembali	280.400.929,00			666.873.929,00				947.274.858,00
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(1.145.733.334,00)			(357.770.799,00)				(1.503.504.133,00)
Koreksi Kesalahan input IP				(38.825.198.320,00)		(18.515.000,00)	(220.079.802.993,00)	(258.923.516.313,00)
Koreksi Penilaian Kembali BMN	106.169.586,00			6.704.571.025,00				6.810.740.611,00
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi				(386.570.515,00)				(386.570.515,00)
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali				3.490.977.791,00				3.490.977.791,00
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL				27.585.937.000,00				27.585.937.000,00
Koreksi Kesalahan input IP				27.585.937.000,00				27.585.937.000,00
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL				7.082.680.870,00			144.424.900.000,00	151.507.580.870,00
Koreksi Kesalahan input IP				7.082.680.870,00			144.424.900.000,00	151.507.580.870,00
BPSDM HUKUM DAN HAM	55.670.875,00			(69.048.243.000,00)	659.922.000,00	(8.714.000,00)	10.491.900.000,00	(57.849.464.125,00)



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Koreksi Kesalahan input IP				(69.079.366.000,00)	659.922.000,00	(8.714.000,00)	10.491.900.000,00	(57.936.258.000,00)
Koreksi Penilaian Kembali BMN	55.670.875,00			86.793.875,00				142.464.750,00
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi				(55.670.875,00)				(55.670.875,00)
SATKER KONSOLIDASI	1.965.006.586.191,00	2.786.871.206,00	17.738.753.568,00	(12.020.456.275,00)	(2.209.975.993,00)	(4.278.311.693,00)	33.175.403.416.125,00	35.142.426.883.129,00
Take in/Out Satkon	1.965.006.586.191,00	2.786.871.206,00	17.738.753.568,00	(12.020.456.275,00)	(2.209.975.993,00)	(4.278.311.693,00)	33.175.403.416.125,00	35.142.426.883.129,00
Grand Total	1.963.709.024.473,00	2.814.997.522,00	17.738.753.568,00	(204.914.784.971,00)	(1.553.161.273,00)	488.537.307,00	42.680.634.464.332,00	44.458.917.830.958,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI PER 31 DESEMBER 2019

URAIAN	KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA NON REVALUASI	TOTAL
SEKRETARIAT JENDERAL	(959.660.216.359,00)	(5.860.000,00)	(959.666.076.359,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	286.077.000,00		286.077.000,00
Koreksi Pencatatan	286.077.000,00		286.077.000,00
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI	32.342.593,00	5.860.000,00	38.202.593,00
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	32.342.593,00		32.342.593,00
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		5.860.000,00	5.860.000,00
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	12.041.867.658,00		12.041.867.658,00
Koreksi Pencatatan	2.528.425.547,00		2.528.425.547,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(227.023.113,00)		(227.023.113,00)
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	747.794.051,00		747.794.051,00
Koreksi Penyusutan Karena 225	9.929.617.402,00		9.929.617.402,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(1.025.438.672,00)		(1.025.438.672,00)
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	(407.223.455,00)		(407.223.455,00)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	34.595.551,00		34.595.551,00
Transaksi Normalisasi BMN	461.120.347,00		461.120.347,00
AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI	727.682.158,00		727.682.158,00
Koreksi Pencatatan	727.682.158,00		727.682.158,00
AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	455.891.786,00		455.891.786,00
Koreksi Penyusutan Karena 225	455.891.786,00		455.891.786,00
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	763.380.500,00		763.380.500,00
Koreksi Pencatatan	2.147.486.800,00		2.147.486.800,00
Saldo Awal	(1.382.934.300,00)		(1.382.934.300,00)
Transaksi Normalisasi BMN	(1.172.000,00)		(1.172.000,00)
ASET TETAP RENOVASI	(26.044.114.913,00)		(26.044.114.913,00)



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Koreksi Pencatatan	(26.044.114.913,00)		(26.044.114.913,00)
ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	(169.173.000,00)	(11.720.000,00)	(180.893.000,00)
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	(169.173.000,00)		(169.173.000,00)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		(11.720.000,00)	(11.720.000,00)
GEDUNG DAN BANGUNAN	(100.883.338.664,00)		(100.883.338.664,00)
Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	315.000,00		315.000,00
Koreksi Nilai barang Berlebih	(246.076.000,00)		(246.076.000,00)
Koreksi Pencatatan	(27.158.730.308,00)		(27.158.730.308,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	755.802.308,00		755.802.308,00
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	(77.525.524.676,00)		(77.525.524.676,00)
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	3.763.593.762,00		3.763.593.762,00
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	1.197.716.044,00		1.197.716.044,00
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(472.718.750,00)		(472.718.750,00)
Transaksi Normalisasi BMN	(1.197.716.044,00)		(1.197.716.044,00)
IRIGASI	(6.062.896.977,00)		(6.062.896.977,00)
Koreksi Pencatatan	(6.062.896.977,00)		(6.062.896.977,00)
PERALATAN DAN MESIN	(1.652.304.000,00)		(1.652.304.000,00)
Koreksi Pencatatan	(5.415.353.550,00)		(5.415.353.550,00)
Saldo Awal	3.763.049.550,00		3.763.049.550,00
TANAH	(839.155.630.500,00)		(839.155.630.500,00)
Koreksi Pencatatan	(839.155.630.500,00)		(839.155.630.500,00)
INSPEKTORAT JENDERAL	4.842.945,00		4.842.945,00
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	4.842.945,00		4.842.945,00
Koreksi Penyusutan Karena 225	4.842.945,00		4.842.945,00
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	14.494.694.621,00	(3.362.917.000,00)	11.131.777.621,00
AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE		(3.387.913.800,00)	(3.387.913.800,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas		(3.378.540.000,00)	(3.378.540.000,00)
Saldo Awal		(9.373.800,00)	(9.373.800,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI		1,00	1,00
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		1,00	1,00
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	(240.825.160,00)		(240.825.160,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	5.217.300,00		5.217.300,00
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	11.435.964,00		11.435.964,00
Koreksi Penyusutan Karena 225	(53.743.153,00)		(53.743.153,00)
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(203.735.271,00)		(203.735.271,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	(694.978.374,00)		(694.978.374,00)
Koreksi Pencatatan	4.584.984,00		4.584.984,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(14.298.000,00)		(14.298.000,00)
Saldo Awal	(685.265.357,00)		(685.265.357,00)
Transaksi Normalisasi BMN	(1,00)		(1,00)
ASET TAK BERWUJUD LAINNYA		(3.378.540.000,00)	(3.378.540.000,00)
Koreksi Pencatatan		(3.378.540.000,00)	(3.378.540.000,00)
ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		(1,00)	(1,00)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		(1,00)	(1,00)
GEDUNG DAN BANGUNAN	12.228.741.268,00		12.228.741.268,00
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	92.358.000,00		92.358.000,00
Koreksi Nilai barang Berlebih	1.940.079.000,00		1.940.079.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(15.345.000,00)		(15.345.000,00)
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	(92.038.000,00)		(92.038.000,00)
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	10.303.687.268,00		10.303.687.268,00
PERALATAN DAN MESIN	3.201.756.887,00		3.201.756.887,00
Koreksi Pencatatan	(10.446.114,00)		(10.446.114,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	14.298.000,00		14.298.000,00
Saldo Awal	3.197.905.000,00		3.197.905.000,00
Transaksi Normalisasi BMN	1,00		1,00
SOFTWARE		3.403.536.800,00	3.403.536.800,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas		3.378.540.000,00	3.378.540.000,00
Saldo Awal		24.996.800,00	24.996.800,00
DITJEN PEMASYARAKATAN	(305.143.495.601,00)	(49.311.029,00)	(305.192.806.630,00)
AKUMULASI AMORTISASI LISENSI		1.631.076,00	1.631.076,00
Koreksi Pencatatan		1.631.076,00	1.631.076,00
AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE		19.881.450,00	19.881.450,00
Koreksi Pencatatan		19.881.450,00	19.881.450,00
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI	509.063.183,00	7.246.687,00	516.309.870,00
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	505.537.575,00		505.537.575,00
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	3.525.608,00		3.525.608,00
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		7.246.687,00	7.246.687,00
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	89.995.005.682,00		89.995.005.682,00
Hibah (Masuk)	(7.542.080,00)		(7.542.080,00)
Koreksi Pencatatan	4.301.882.228,00		4.301.882.228,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.637.046.656,00		1.637.046.656,00
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	(107.698.470,00)		(107.698.470,00)
Koreksi Penyusutan Karena 225	80.324.996.726,00		80.324.996.726,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(1.829.847,00)		(1.829.847,00)
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	(104.541.925,00)		(104.541.925,00)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	787.225.899,00		787.225.899,00
Saldo Awal	(651.695.569,00)		(651.695.569,00)
Transaksi Normalisasi BMN	3.817.162.064,00		3.817.162.064,00
AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI	7.740.405,00		7.740.405,00
Koreksi Penyusutan Karena 225	7.740.405,00		7.740.405,00
AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	507.372.328,00		507.372.328,00
Koreksi Pencatatan	106.531.000,00		106.531.000,00
Koreksi Penyusutan Karena 225	400.841.328,00		400.841.328,00
AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	105.737.087,00		105.737.087,00
Koreksi Pencatatan	105.737.087,00		105.737.087,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	(779.215.994,00)		(779.215.994,00)
Hibah (Masuk)	(50.727.829,00)		(50.727.829,00)
Koreksi Pencatatan	716.068.696,00		716.068.696,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(586.254.837,00)		(586.254.837,00)
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(86.945.924,00)		(86.945.924,00)
Saldo Awal	(870.189.819,00)		(870.189.819,00)
Transaksi Normalisasi BMN	98.833.719,00		98.833.719,00
ASET TETAP LAINNYA	(70.550.800,00)		(70.550.800,00)
Koreksi Pencatatan	(70.550.800,00)		(70.550.800,00)
ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	(536.934.157,00)	(54.402.400,00)	(591.336.557,00)
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	(526.734.157,00)		(526.734.157,00)
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(10.200.000,00)		(10.200.000,00)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		(54.402.400,00)	(54.402.400,00)
GEDUNG DAN BANGUNAN	(390.608.099.806,00)		(390.608.099.806,00)
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	7.667.501.000,00		7.667.501.000,00
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	24.499.298.000,00		24.499.298.000,00
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	787.678.000,00		787.678.000,00
Koreksi Nilai barang Berlebih	(384.905.206.000,00)		(384.905.206.000,00)
Koreksi Pencatatan	(30.776.200.434,00)		(30.776.200.434,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(14.467.428.105,00)		(14.467.428.105,00)
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	7.269.449.000,00		7.269.449.000,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	72.110.720,00		72.110.720,00
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	264.955.351,00		264.955.351,00
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(2.266.654.178,00)		(2.266.654.178,00)
Saldo Awal	5.055.669.307,00		5.055.669.307,00
Transaksi Normalisasi BMN	(3.809.272.467,00)		(3.809.272.467,00)
GEDUNG DAN BANGUNAN BELUM DIREGISTER	83.783.450,00		83.783.450,00
Pengembalian Belanja	83.783.450,00		83.783.450,00
IRIGASI	568.327.000,00		568.327.000,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	143.554.000,00		143.554.000,00
Koreksi Nilai barang Berlebih	601.153.000,00		601.153.000,00
Koreksi Pencatatan	(176.380.000,00)		(176.380.000,00)
JALAN DAN JEMBATAN	10.199.446.000,00		10.199.446.000,00
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	10.289.886.000,00		10.289.886.000,00
Koreksi Nilai barang Berlebih	16.091.000,00		16.091.000,00
Koreksi Pencatatan	(106.531.000,00)		(106.531.000,00)
JARINGAN	(329.050.000,00)		(329.050.000,00)
Koreksi Pencatatan	(329.050.000,00)		(329.050.000,00)
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	(4.207.479.528,00)		(4.207.479.528,00)
Koreksi Nilai KDP	(4.207.479.528,00)		(4.207.479.528,00)
LISENSI		(3.786.392,00)	(3.786.392,00)
Koreksi Pencatatan		(3.786.392,00)	(3.786.392,00)
PERALATAN DAN MESIN	768.257.426,00		768.257.426,00
Koreksi Pencatatan	(1.793.785.136,00)		(1.793.785.136,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.136.359.796,00		1.136.359.796,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	87.345.924,00		87.345.924,00
Saldo Awal	1.425.626.792,00		1.425.626.792,00
Transaksi Normalisasi BMN	(87.289.950,00)		(87.289.950,00)
PERALATAN DAN MESIN BELUM DIREGISTER	2.275.486,00		2.275.486,00
Pengembalian Belanja	2.275.486,00		2.275.486,00
SOFTWARE		(19.881.450,00)	(19.881.450,00)
Koreksi Pencatatan		(19.881.450,00)	(19.881.450,00)
TANAH	(11.359.173.363,00)		(11.359.173.363,00)
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	5.147.381.000,00		5.147.381.000,00
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	2.210.916.000,00		2.210.916.000,00
Koreksi Nilai barang Berlebih	(16.089.621.000,00)		(16.089.621.000,00)
Koreksi Pencatatan	(5.507.803.000,00)		(5.507.803.000,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(6.791.447.613,00)		(6.791.447.613,00)
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	(3.021.111.000,00)		(3.021.111.000,00)



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(41.900.000,00)		(41.900.000,00)
Saldo Awal	12.734.412.250,00		12.734.412.250,00
DITJEN IMIGRASI	47.949.182.632,00	1.256.073.956,00	49.205.256.588,00
AKUMULASI AMORTISASI LISENSI		1.782.861.296,00	1.782.861.296,00
Penghapusan		1.913.884.500,00	1.913.884.500,00
Transaksi Normalisasi BMN		(131.023.204,00)	(131.023.204,00)
AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE		356.576.224,00	356.576.224,00
Koreksi Pencatatan		304.442.834,00	304.442.834,00
Transaksi Normalisasi BMN		52.133.390,00	52.133.390,00
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI	2.000.000,00	56.028.107,00	58.028.107,00
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	2.000.000,00		2.000.000,00
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		56.028.107,00	56.028.107,00
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	4.493.561.422,00		4.493.561.422,00
Koreksi Pencatatan	147.294.970,00		147.294.970,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(137.861.267,00)		(137.861.267,00)
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	(13.511.144,00)		(13.511.144,00)
Koreksi Penyusutan Karena 225	4.502.188.863,00		4.502.188.863,00
Saldo Awal	(4.550.000,00)		(4.550.000,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI	3.066.921,00		3.066.921,00
Koreksi Pencatatan	3.066.921,00		3.066.921,00
AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	37.420.851,00		37.420.851,00
Koreksi Penyusutan Karena 225	37.420.851,00		37.420.851,00
AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	224.853.625,00		224.853.625,00
Koreksi Pencatatan	224.853.625,00		224.853.625,00
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	(820.801.409,00)		(820.801.409,00)
Koreksi Pencatatan	111.319.000,00		111.319.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(145.769.557,00)		(145.769.557,00)
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(288.377.995,00)		(288.377.995,00)
Saldo Awal	(796.011.908,00)		(796.011.908,00)



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Transaksi Normalisasi BMN	298.039.051,00		298.039.051,00
ASET TAK BERWUJUD LAINNYA		(518.745.000,00)	(518.745.000,00)
Koreksi Pencatatan		(518.745.000,00)	(518.745.000,00)
ASET TETAP RENOVASI	(197.000.000,00)		(197.000.000,00)
Koreksi Pencatatan	(197.000.000,00)		(197.000.000,00)
ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	(2.000.000,00)	(66.703.837,00)	(68.703.837,00)
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(2.000.000,00)		(2.000.000,00)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		(66.703.837,00)	(66.703.837,00)
GEDUNG DAN BANGUNAN	(11.847.683.780,00)		(11.847.683.780,00)
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	459.149.000,00		459.149.000,00
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	456.875.000,00		456.875.000,00
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	(270.302.000,00)		(270.302.000,00)
Koreksi Nilai barang Berlebih	(350.617.000,00)		(350.617.000,00)
Koreksi Pencatatan	(726.658.000,00)		(726.658.000,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(9.340.829.781,00)		(9.340.829.781,00)
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	(2.110.300.999,00)		(2.110.300.999,00)
Saldo Awal	35.000.000,00		35.000.000,00
GEDUNG DAN BANGUNAN BELUM DIREGISTER	69.862.214,00		69.862.214,00
Pengembalian Belanja	69.862.214,00		69.862.214,00
IRIGASI	(245.353.668,00)		(245.353.668,00)
Koreksi Pencatatan	(245.353.668,00)		(245.353.668,00)
JARINGAN	(235.540.000,00)		(235.540.000,00)
Koreksi Pencatatan	(235.540.000,00)		(235.540.000,00)
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	(6.011.275.208,00)		(6.011.275.208,00)
Koreksi Nilai KDP	(6.175.491.458,00)		(6.175.491.458,00)
Saldo Awal KDP	164.216.250,00		164.216.250,00
PERALATAN DAN MESIN	865.130.141,00		865.130.141,00
Koreksi Pencatatan	(1.091.509.000,00)		(1.091.509.000,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	338.310.892,00		338.310.892,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	335.854.969,00		335.854.969,00
Saldo Awal	1.622.709.912,00		1.622.709.912,00
Transaksi Normalisasi BMN	(340.236.632,00)		(340.236.632,00)
SOFTWARE		(353.942.834,00)	(353.942.834,00)
Koreksi Pencatatan		(353.942.834,00)	(353.942.834,00)
TANAH	56.054.483.250,00		56.054.483.250,00
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	20.474.520.000,00		20.474.520.000,00
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	273.000,00		273.000,00
Koreksi Pencatatan	(21.630.685.000,00)		(21.630.685.000,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	53.572.869.000,00		53.572.869.000,00
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	(273.000,00)		(273.000,00)
Saldo Awal	3.637.779.250,00		3.637.779.250,00
UANG MUKA BELANJA MODAL (PREPAYMENT)	5.558.458.273,00		5.558.458.273,00
Pengembalian Belanja	5.558.458.273,00		5.558.458.273,00
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	(2.506.926.626,00)		(2.506.926.626,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	(2.525.405.106,00)		(2.525.405.106,00)
Koreksi Penyusutan Karena 225	(2.525.405.106,00)		(2.525.405.106,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	(1.521.520,00)		(1.521.520,00)
Saldo Awal	(1.521.520,00)		(1.521.520,00)
ASET TETAP RENOVASI	(15.215.200,00)		(15.215.200,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(15.215.200,00)		(15.215.200,00)
GEDUNG DAN BANGUNAN BELUM DIREGISTER	1.721.471.016,00		1.721.471.016,00
Pengembalian Belanja	1.721.471.016,00		1.721.471.016,00
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	(1.701.471.016,00)		(1.701.471.016,00)
Koreksi Nilai KDP	(1.701.471.016,00)		(1.701.471.016,00)
PERALATAN DAN MESIN	15.215.200,00		15.215.200,00
Saldo Awal	15.215.200,00		15.215.200,00
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		(24.585.000,00)	(24.585.000,00)
AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE		(24.585.000,00)	(24.585.000,00)
Koreksi Pencatatan		24.585.000,00	24.585.000,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas		(49.170.000,00)	(49.170.000,00)
SOFTWARE		0,00	0,00
Koreksi Pencatatan		(49.170.000,00)	(49.170.000,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas		49.170.000,00	49.170.000,00
DITJEN HAK ASASI MANUSIA	(585.927.088,00)		(585.927.088,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	(617.748.588,00)		(617.748.588,00)
Koreksi Pencatatan	934.329.300,00		934.329.300,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(12.917.998,00)		(12.917.998,00)
Saldo Awal	(1.539.159.890,00)		(1.539.159.890,00)
ASET TETAP RENOVASI	(1.435.500.000,00)		(1.435.500.000,00)
Koreksi Pencatatan	(1.435.500.000,00)		(1.435.500.000,00)
PERALATAN DAN MESIN	1.467.321.500,00		1.467.321.500,00
Koreksi Pencatatan	(3.270.152.550,00)		(3.270.152.550,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	12.917.998,00		12.917.998,00
Saldo Awal	4.724.556.052,00		4.724.556.052,00
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	136.561.373.382,00		136.561.373.382,00
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	(645.023.618,00)		(645.023.618,00)
Koreksi Penyusutan Karena 225	(645.023.618,00)		(645.023.618,00)
TANAH	137.206.397.000,00		137.206.397.000,00
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	137.206.397.000,00		137.206.397.000,00
BPSDM HUKUM DAN HAM	54.205.852.718,00	0,00	54.205.852.718,00
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI		128.352.000,00	128.352.000,00
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		128.352.000,00	128.352.000,00
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	4.719.034.012,00		4.719.034.012,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(3,00)		(3,00)
Koreksi Penyusutan Karena 225	4.719.034.015,00		4.719.034.015,00
AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI	(23.568.645,00)		(23.568.645,00)
Koreksi Penyusutan Karena 225	(23.568.645,00)		(23.568.645,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	427.267.251,00		427.267.251,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Koreksi Penyusutan Karena 225	427.267.251,00		427.267.251,00
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	(128.352.000,00)		(128.352.000,00)
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(64.176.000,00)		(64.176.000,00)
Transaksi Normalisasi BMN	(64.176.000,00)		(64.176.000,00)
ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		(128.352.000,00)	(128.352.000,00)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		(128.352.000,00)	(128.352.000,00)
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	49.083.120.100,00		49.083.120.100,00
Koreksi Nilai KDP	49.083.120.100,00		49.083.120.100,00
PERALATAN DAN MESIN	128.352.000,00		128.352.000,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	64.176.000,00		64.176.000,00
Transaksi Normalisasi BMN	64.176.000,00		64.176.000,00
SATKER KONSOLIDASI	793.444.473.291,00	0,00	793.444.473.291,00
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI	178.401.444,00	(83.758.270,00)	94.643.174,00
Jurnal Tak In/Out Satkon	178.401.444,00	(83.758.270,00)	94.643.174,00
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	(41.674.123.525,00)		(41.674.123.525,00)
Jurnal Tak In/Out Satkon	(41.674.123.525,00)		(41.674.123.525,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN IRIGASI	(258.225.717,00)		(258.225.717,00)
Jurnal Tak In/Out Satkon	(258.225.717,00)		(258.225.717,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	(785.121.211,00)		(785.121.211,00)
Jurnal Tak In/Out Satkon	(785.121.211,00)		(785.121.211,00)
BEBAN KERUGIAN PELEPASAN ASET	(59.023.958.505,00)		(59.023.958.505,00)
Jurnal Tak In/Out Satkon	(59.023.958.505,00)		(59.023.958.505,00)
BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	(272.292.149.738,00)		(272.292.149.738,00)
Jurnal Tak In/Out Satkon	(272.292.149.738,00)		(272.292.149.738,00)
BEBAN PENYUSUTAN IRIGASI	(2.280.168.873,00)		(2.280.168.873,00)
Jurnal Tak In/Out Satkon	(2.280.168.873,00)		(2.280.168.873,00)
BEBAN PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	(7.507.511.592,00)		(7.507.511.592,00)
Jurnal Tak In/Out Satkon	(7.507.511.592,00)		(7.507.511.592,00)



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

BEBAN PENYUSUTAN PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM		(375.381.994,00)	(375.381.994,00)
Jurnal Tak In/Out Satkon		(375.381.994,00)	(375.381.994,00)
GEDUNG DAN BANGUNAN	1.023.331.919.529,00		1.023.331.919.529,00
Jurnal Tak In/Out Satkon	1.023.331.919.529,00		1.023.331.919.529,00
IRIGASI	6.252.680.400,00		6.252.680.400,00
Jurnal Tak In/Out Satkon	6.252.680.400,00		6.252.680.400,00
JALAN DAN JEMBATAN	2.501.913.843,00		2.501.913.843,00
Jurnal Tak In/Out Satkon	2.501.913.843,00		2.501.913.843,00
KOREKSI NILAI ASET LAINNYA NON REVALUASI	(459.140.264,00)		(459.140.264,00)
Jurnal Tak In/Out Satkon	(459.140.264,00)		(459.140.264,00)
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		459.140.264,00	459.140.264,00
Jurnal Tak In/Out Satkon		459.140.264,00	459.140.264,00
TANAH	145.459.957.500,00		145.459.957.500,00
Jurnal Tak In/Out Satkon	145.459.957.500,00		145.459.957.500,00
TRANSFER KELUAR	(36.933.390.492,00)		(36.933.390.492,00)
Jurnal Tak In/Out Satkon	(36.933.390.492,00)		(36.933.390.492,00)
TRANSFER MASUK	36.933.390.492,00		36.933.390.492,00
Jurnal Tak In/Out Satkon	36.933.390.492,00		36.933.390.492,00
GRAND TOTAL	(221.236.146.085,00)	(2.186.599.073,00)	(223.422.745.158,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

RINCIAN KOREKSI LAIN LAIN PER 31 DESEMBER 2019

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
BELANJA MODAL YANG MASIH HARUS DIBAYAR	379.186.966,00	
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT	379.186.966,00	Koreksi atas utang belanja modal pekerjaan pembangunan Rutan Klas IIB Padang dan denda pelaksanaan pekerjaannya pada tahun 2014
BELANJA BARANG YANG DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)	(14.413.096,00)	
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	(14.413.091,00)	Jurnal koreksi atas 2 (dua) kali pembayaran listrik satker LP Balikpapan
LAPAS GUNUNG SITOLI	(5,00)	koreksi lebih catat pada TAYL
BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR	(25.320.300,00)	
KANTOR IMIGRASI PONTIANAK	(116.000,00)	koreksi lebih catat pada TAYL
LAPAS NARKOTIKA KELAS III LANGSA PROPINSI ACEH	4.791.869,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NUNUKAN	(70,00)	KOREKSI PENGKUAN HUTANG BAMA TH. 2018
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALU	744.976,00	Koreksi Hutang Bama 2018 dari Inpektorat Jenderal Kemenkumham RI dari semula Rp411.800.612 menjadi Rp411.055.636



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN	175,00	Koreksi kelebihan pengakuan utang belanja langganan air, listrik, telepon TA 2018
RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKALAN BRANDAN	(30.743.750,00)	HUTANG AIR SEPTEMBER & DESEMBER 2018
RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	2.500,00	Utang Air (Akrual PDAM) Tercatat 31 Desember 2018 Rp2.068.300,- dibayarkan sesuai tagihan pada TA 2019 sebesar Rp2.065.800,- (SP2D No. 191101301000603)
BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR	6.192.250,00	
BALAI PEMASYARAKATAN MUARA BUNGO	601.550,00	Kesalahan Pengakuan Hutang Belanja Pegawai
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SANGGAU	(70.300,00)	kekurangan uang makan pns bulan desember 2018
RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN	5.661.000,00	Koreksi kelebihan pengakuan utang belanja uang makan TA 2018
DANA LAINNYA	(554.268.000,00)	
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	(554.268.000,00)	Penyesuaian nilai kurs penempatan deposito pada DOJ Hongkong atas penanganan kasus Bank Century sebesar HKD 7.800.000 sesuai dengan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu Rp 1.785,2
KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH YANG BELUM DISAHKAN	(30.000.000,00)	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	(30.000.000,00)	koreksi atas nilai hibah
PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA	(812.529.847,00)	
KANTOR IMIGRASI BANJARMASIN	(19.686.700,00)	
KANTOR IMIGRASI KARAWANG	(19.052.994,00)	
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SOEKARNO HATTA	(3.750.000,00)	
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	199.999,00	
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	(6.396.986,00)	
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	(8.347.000,00)	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	(31.140.591,00)	Jurnal Koreksi lainnya atas pendapatan sewa koperasi dari periode 05-05-2018 s/d 04-05-2023
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL	(726.199.411,00)	koreksi nilai pendapatan diterima dimuka yang disetor pada 2018 sebesar Rp 907.625.000 untuk 5 tahun yang belum dilakukan jurnal penyesuaian pendapatan diterima dimuka pada akhir tahun 2018
RUMAH TAHANAN NEGARA SERANG	1.843.836,00	
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG PNB	(5.422.418,00)	
BALAI PEMASYARAKATAN KENDARI	(10.466,00)	koreksi nilai peny.piutang
KANTOR IMIGRASI BALIKPAPAN	(5.421.952,00)	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAMENA	10.000,00	<i>Koreksi penyisihan piutang PNB</i>
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1.423.657.528,00	
BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA SELATAN	7.965.000,00	<i>Jurnal koreksi atas belanja barang uang transport (temuan itjen) TA 2018</i>
BALAI PEMASYARAKATAN KENDARI	2.093.347,00	<i>penambahan biaya admin tgr</i>
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA BAGAN SIAPI-API	651.422,00	<i>Jurnal koreksi atas piutang pengembalian belanja bama tahun 2018</i>
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA KUPANG DI BA'A	720.970,00	
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA PARIGI	525.698,00	<i>Jurnal Koreksi pengakuan piutang kelebihan pembayaran BAMA TA 2018 yang belum dicatat</i>
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA SELAT PANJANG	2.321.236,00	<i>Jurnal koreksi atas piutang kelebihan pembayaran bama tahun 2018</i>
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TALUK KUANTAN	25.169.695,00	<i>koreksi atas pengakuan piutang kelebihan bama 2018</i>
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG BALAI KARIMUN	8.073.562,00	
KANTOR IMIGRASI BALIKPAPAN	1.084.390.306,00	
KANTOR IMIGRASI DUMAI	31.212.665,00	
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	59.377.751,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPAS KELAS III BONTANG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	63.643.664,00	Koreksi kekurangan pengakuan piutang pengembalian belanja modal TA 2018
LAPAS KLATEN	1.179.970,00	
Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda	7.492.030,00	Koreksi kekurangan pengakuan piutang pengembalian belanja modal TA 2018
LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBARAWA	67.159.200,00	koreksi piutang bama
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK GIANYAR	588.885,00	kelebihan pembayaran bama 2018 yang belum dibuat jurnal piutang
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO	2.335.097,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PALEMBANG	5.287.075,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TOMOHON	907.419,00	Pelunasan Piutang kelebihan bayar Bahan Makanan 2018
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BITUNG	10.476.385,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOALEMO	1.781.667,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAHI	3.139.207,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAHAT	934.423,00	piutang bama
LEMBAGA PEMASYARAKATAN LANGSA	5.354.485,00	pengembalian BAMA 2018
LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUWUK	10.744.884,00	Jurnal Koreksi atas piutang PNBP TA 2018 yang belum dicatat



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANADO	319.660,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN	26.769.000,00	<i>piutang bama</i>
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SAMARINDA	3.260.000,00	<i>Koreksi kekurangan pengakuan piutang sewa TA 2018</i>
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	21.087.153,00	<i>piutang bama</i>
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLAWI	2.908.727,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	1.030.000,00	<i>Kelebihan BAMA 2018 belum diakrualkan</i>
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	10.468.000,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEMBILAHAN	6.350.275,00	<i>koreksi atas pengembalian bama TA 2018</i>
LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	664.075,00	<i>piutang bama</i>
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAIKABUBAK	2.571.425,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAINGAPU	800.800,00	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAMENA	(2.000.001,00)	<i>Koreksi kelebihan piutang PNB</i>
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SUNGGUMINASA	9.013.307,00	<i>piutang bama</i>
LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	19.143.400,00	<i>Kelebihan BAMA 2018 belum diakrualkan</i>
LPKA JOGJAKARTA, PROVINIS D.I YOGYAKARTA	389.545,00	<i>Kelebihan BAMA 2018 belum diakrualkan</i>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LPKA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	7.336.048,00	Koreksi kekurangan pengakuan piutang pengembalian belanja modal TA 2018
RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG KELAS D	17.622.736,00	Jurnal koreksi atas kelebihan pembayaran Bama dan atas kelebihan uang transport (temuan itjen)TA 2018
RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	54.046.798,00	
RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN	1.826.660,00	Koreksi kekurangan pengakuan piutang sewa TA 2018
RUMAH TAHANAN NEGARA BOYOLALI	381.874,00	
RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK	2.011.800,00	koreksi piutang bama
RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA TIMUR	2.780.000,00	Jurnal pengakuan piutang atas temuan itjen (pemakaian tabung gas milik Rutan Pd Bambu) tahun anggaran 2018
RUMAH TAHANAN NEGARA KEFAMENANU	515.608,00	
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG	8.203.791,00	
RUMAH TAHANAN NEGARA KLUNGKUNG	363.617,00	kelebihan pembayaran bama 2018 yang belum dibuat jurnal piutang
RUMAH TAHANAN NEGARA MAKALE	1.000.000,00	piutang bama
RUMAH TAHANAN NEGARA PURWODADI	5.970.100,00	koreksi piutang bama
RUMAH TAHANAN NEGARA PURWOREJO	11.970,00	piutang bama



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	2.580.457,00	
RUMAH TAHANAN NEGARA SIGLI	32.312.960,00	<i>pengembalian BAMA 2018</i>
RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	3.715.000,00	<i>Kelebihan BAMA 2018 belum diakrualkan</i>
RUMAH TAHANAN NEGARA WONOGIRI	14.123.100,00	
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	(237.446.400,00)	
PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI	9.214.002,00	
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	(3.786.000,00)	
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	13.000.002,00	
Grand Total	376.297.085,00	



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

RINCIAN SELISIH TRANSFER MASUK DAN TRANSFER KELUAR PER 31 DESEMBER 2019

URAIAN	BA 013/Neraca	non BA 013	TOTAL/E-REKON
Transfer Keluar	2.672.741.179.477,00	36.415.479.342,00	2.709.156.658.819,00
Transfer Masuk	2.305.741.571.879,00	343.915.544.568,00	2.649.657.116.447,00
SELISIH	366.999.607.598,00	(307.500.065.226,00)	59.499.542.372,00

Uraian Transfer Keluar (TK)/Transfer Masuk (TM)			Jumlah Transfer Keluar	Jumlah Transfer Masuk	Selisih	Penjelasan Selisih
(TK)	SEKRETARIAT JENDERAL		897.341.056.427,00	836.977.354.724,00	60.363.701.703,00	
	(TM)	SEKRETARIAT JENDERAL	177.144.920.318,00	177.144.920.318,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(25.393.229.028,00)	(25.393.229.028,00)	0,00	
		Peralatan dan Mesin	202.538.149.346,00	202.538.149.346,00	0,00	
	(TM)	INSPEKTORAT JENDERAL	6.086.075,00	6.086.075,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(600.978.691,00)	(600.978.691,00)	0,00	
		Peralatan dan Mesin	607.064.766,00	607.064.766,00	0,00	
	(TM)	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	2.860.969.741,00	2.860.969.741,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(155.089.388,00)	(155.089.388,00)	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(87.954.172,00)	(87.954.172,00)	0,00	
		Gedung dan Bangunan	2.791.609.000,00	2.791.609.000,00	0,00	



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

		Peralatan dan Mesin	312.404.301,00	312.404.301,00	0,00	
	(TM)	DITJEN PEMASYARAKATAN	17.570.270.748,00	17.570.270.748,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(565.135.280,00)	(565.135.280,00)	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Irigasi	(235.593.840,00)	(235.593.840,00)	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.303.724.141,00)	(4.303.724.141,00)	0,00	
		Aset Tetap Lainnya	15.847.090,00	15.847.090,00	0,00	
		Gedung dan Bangunan	15.785.392.234,00	15.785.392.234,00	0,00	
		Irigasi	363.205.000,00	363.205.000,00	0,00	
		Peralatan dan Mesin	5.669.575.685,00	5.669.575.685,00	0,00	
		Tanah	840.704.000,00	840.704.000,00	0,00	
	(TM)	DITJEN IMIGRASI	66.445.000,00	66.445.000,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(148.470.000,00)	(148.470.000,00)	0,00	
		Peralatan dan Mesin	159.915.000,00	159.915.000,00	0,00	
		Tanah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
	(TM)	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	6.086.075,00	6.086.075,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.028.691,00)	(2.028.691,00)	0,00	
		Peralatan dan Mesin	8.114.766,00	8.114.766,00	0,00	
	(TM)	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.389.271,00	12.389.271,00	0,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.839.931,00)	(3.839.931,00)	0,00	
		Peralatan dan Mesin	16.229.202,00	16.229.202,00	0,00	
	(TM)	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	3.776.137.529,00	3.776.137.529,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(977.249.169,00)	(977.249.169,00)	0,00	
		Aset Tetap Renovasi	1.435.500.000,00	1.435.500.000,00	0,00	
		Peralatan dan Mesin	3.317.886.698,00	3.317.886.698,00	0,00	
	(TM)	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	2.401.601.645,00	2.401.601.645,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.985.095,00)	(3.985.095,00)	0,00	
		Aset Tetap Renovasi	2.385.299.000,00	0,00	2.385.299.000,00	disebabkan adanya perbedaan penginputan transfer masuk Aset
		Gedung dan Bangunan	0,00	2.385.299.000,00	(2.385.299.000,00)	Tetap Renovasi secara manual tanpa melalui ADK
		Peralatan dan Mesin	20.287.740,00	20.287.740,00	0,00	
	(TM)	BALITBANG HUKUM DAN HAM	3.043.161,00	3.043.161,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.014.387,00)	(1.014.387,00)	0,00	
		Peralatan dan Mesin	4.057.548,00	4.057.548,00	0,00	
	(TM)	BPSDM HUKUM DAN HAM	323.740.221.161,00	323.740.221.161,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(35.738.387,00)	(35.738.387,00)	0,00	
		Peralatan dan Mesin	38.781.548,00	38.781.548,00	0,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Tanah	323.737.178.000,00	323.737.178.000,00	0,00	
	(TM)	SATKER TIDAK ADA	60.363.701.703,00	0,00	60.363.701.703,00	
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.899.912.330,00)	0,00	(1.899.912.330,00)	Selisih Transfer pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Di Medan, selisih disebabkan dari koreksi hasil revaluasi atas trn 331 (koreksi transfer keluar akibat koreksi reval) dimana terbentuk untuk mengeliminir nilai koreksian yang telah direkam sebelumnya pada BMN obyek transfer. Selisih merupakan nilai aset dan penyusutan transfer tersebut, dimana tidak terbentuk isian pada kode satker intraco. Tujuan transfer ke Lapas Narkotika Langkat.
		Gedung dan Bangunan	62.263.614.033,00	0,00	62.263.614.033,00	
	(TM)	K/L non BA 013	309.389.184.000,00	309.389.184.000,00	0,00	
		Tanah	309.389.184.000,00	309.389.184.000,00	0,00	
(TK)		DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	26.068.500.666,00	26.068.500.666,00	0,00	
	(TM)	SEKRETARIAT JENDERAL	5.981.968.178,00	5.981.968.178,00	0,00	
		Akumulasi Amortisasi Software	(35.313.088,00)	(35.313.088,00)	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(501.823,00)	(501.823,00)	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(446.323.317,00)	(446.323.317,00)	0,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Tetap Renovasi			1.828.771.088,00	0,00	1.828.771.088,00	disebabkan adanya perbedaan penginputan transfer masuk Aset Tetap Renovasi secara manual tanpa melalui ADK
Gedung dan Bangunan			50.182.308,00	1.878.953.396,00	(1.828.771.088,00)	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi			(144.490,00)	(144.490,00)	0,00	
Peralatan dan Mesin			4.348.885.300,00	4.348.885.300,00	0,00	
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi			28.897.900,00	28.897.900,00	0,00	
Software			207.514.300,00	207.514.300,00	0,00	
	(TM)	INSPEKTORAT JENDERAL	400.991.250,00	400.991.250,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(55.398.750,00)	(55.398.750,00)	0,00	
Peralatan dan Mesin			456.390.000,00	456.390.000,00	0,00	
	(TM)	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	11.394.567.746,00	11.394.567.746,00	0,00	
Akumulasi Amortisasi Software			(22.814.688,00)	(22.814.688,00)	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(270.681.559,00)	(270.681.559,00)	0,00	
Aset Tetap Renovasi			9.426.787.558,00	0,00	9.426.787.558,00	disebabkan adanya perbedaan penginputan transfer masuk Aset Tetap Renovasi secara manual tanpa melalui ADK
Gedung dan Bangunan			0,00	9.426.787.558,00	(9.426.787.558,00)	
Peralatan dan Mesin			2.078.758.935,00	2.078.758.935,00	0,00	
Software			182.517.500,00	182.517.500,00	0,00	



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	(TM)	DITJEN PEMASYARAKATAN	108.228.000,00	108.228.000,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(453.488.500,00)	(453.488.500,00)	0,00	
		Peralatan dan Mesin	561.716.500,00	561.716.500,00	0,00	
	(TM)	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	4.160.798.307,00	4.160.798.307,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.445.130.738,00)	(4.445.130.738,00)	0,00	
		Peralatan dan Mesin	8.605.929.045,00	8.605.929.045,00	0,00	
	(TM)	BPSDM HUKUM DAN HAM	4.021.947.185,00	4.021.947.185,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(31.921.315,00)	(31.921.315,00)	0,00	
		Peralatan dan Mesin	4.053.868.500,00	4.053.868.500,00	0,00	
(TK)		DITJEN PEMASYARAKATAN	1.147.917.896.745,00	1.147.973.784.555,00	(55.887.810,00)	
	(TM)	SEKRETARIAT JENDERAL	1.539.209.215,00	1.539.209.215,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(19.555.016,00)	(19.555.016,00)	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.804.066.319,00)	(1.804.066.319,00)	0,00	
		Barang Konsumsi	139.071.350,00	139.071.350,00	0,00	
		Gedung dan Bangunan	259.104.000,00	259.104.000,00	0,00	
		Peralatan dan Mesin	2.964.655.200,00	2.964.655.200,00	0,00	
	(TM)	DITJEN PEMASYARAKATAN	1.146.226.973.330,00	1.146.282.861.140,00	(55.887.810,00)	
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(750.000.000,00)	(750.000.000,00)	0,00	



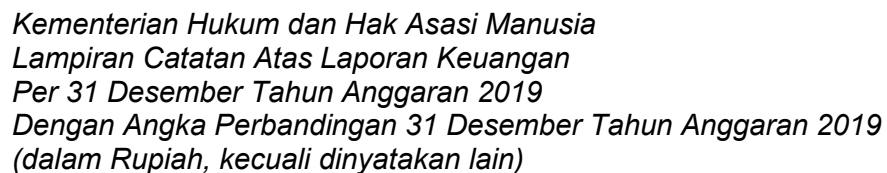
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.622.188.192,00)	(4.659.474.382,00)	37.286.190,00	Transfer dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, selisih disebabkan adanya perubahan nilai wajar pada satker pengirim barang, sehingga perlu dilakukan koreksi manual pada satker penerima untuk menyesuaikan nilai BMN obyek transfer tersebut. Namun dalam koreksi yang telah dilakukan sesuai S-58 DJPB, terdapat ketidaksinkronan antara bentuk jurnal nilai aset (trn 232) koreksi transfer tahun berjalan, dengan koreksi nilai penyusutannya (trn 248), dimana pada koreksi susut tidak terdapat satker intraco, sehingga menimbulkan selisih sebesar nilai penyusutannya.
Akumulasi Penyusutan Irigasi	(9.126.792,00)	(9.126.792,00)	0,00	
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(60.565.510,00)	(60.565.510,00)	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.768.839.973,00)	(5.768.839.973,00)	0,00	
Amunisi	592.957.200,00	592.957.200,00	0,00	
Aset Tetap Lainnya	759.375.484,00	759.375.484,00	0,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Tetap Renovasi	239.969.000,00	0,00	239.969.000,00	disebabkan adanya perbedaan penginputan transfer masuk Aset Tetap Renovasi secara manual tanpa melalui ADK
Bahan untuk Pemeliharaan	509.000,00	509.000,00	0,00	
Barang Konsumsi	118.892.387.456,00	118.892.387.456,00	0,00	
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	364.907.423,00	364.907.423,00	0,00	
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	(13.080.460.606,00)	(13.080.460.606,00)	0,00	
Gedung dan Bangunan	554.529.289.396,00	554.862.432.396,00	(333.143.000,00)	- Transfer senilai (93.174.000,00) dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Medan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita Medan, selisih disebabkan dari koreksi hasil revaluasi atas trn 331 (koreksi transfer keluar akibat koreksi reval) dimana terbentuk untuk mengeliminir nilai koreksian yang telah direkam sebelumnya pada BMN obyek transfer. Selisih merupakan nilai aset atas transfer tersebut, dimana tidak terbentuk isian pada kode satker intraco..Perolehan transfer dari LPKA Medan. - disebabkan adanya perbedaan penginputan transfer masuk Aset Tetap Renovasi secara manual



							tanpa melalui ADK senilai (239.969.000,00)
			</				



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

		Barang Konsumsi	151.714.200,00	151.714.200,00	0,00	
(TK)		DITJEN IMIGRASI	595.649.091.979,00	595.649.091.979,00	0,00	
	(TM)	SEKRETARIAT JENDERAL	3.168.545.611,00	3.168.545.611,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.313.569.635,00)	(3.313.569.635,00)	0,00	
		Barang Konsumsi	41.195.000,00	41.195.000,00	0,00	
		Peralatan dan Mesin	6.430.920.246,00	6.430.920.246,00	0,00	
		Software	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	(TM)	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	41.730.000.000,00	41.730.000.000,00	0,00	
		Tanah	41.730.000.000,00	41.730.000.000,00	0,00	
	(TM)	DITJEN PEMASYARAKATAN	3.230.382.444,00	3.230.382.444,00	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(12.062.109,00)	(12.062.109,00)	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.482.346.727,00)	(3.482.346.727,00)	0,00	
		Gedung dan Bangunan	148.766.000,00	148.766.000,00	0,00	
		Peralatan dan Mesin	4.253.305.280,00	4.253.305.280,00	0,00	
		Tanah	2.322.720.000,00	2.322.720.000,00	0,00	
	(TM)	DITJEN IMIGRASI	509.403.631.247,00	509.403.631.247,00	0,00	
		Akumulasi Amortisasi Lisensi	(65.511.602,00)	(65.511.602,00)	0,00	
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(38.857.658.071,00)	(38.857.658.071,00)	0,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Barang Konsumsi			351.480.285.082,00	351.480.285.082,00	0,00	
Aset Tetap Renovasi			356.912.000,00	0,00	356.912.000,00	disebabkan adanya perbedaan penginputan transfer masuk Aset
Gedung dan Bangunan			0,00	356.912.000,00	(356.912.000,00)	Tetap Renovasi secara manual tanpa melalui ADK
Lisensi			1.310.239.109,00	1.310.239.109,00	0,00	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB			(20.250.000,00)	(20.250.000,00)	0,00	
Peralatan dan Mesin			191.149.614.729,00	191.149.614.729,00	0,00	
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak			4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	0,00	
	(TM)	BALITBANG HUKUM DAN HAM	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(8.274.750,00)	(8.274.750,00)	0,00	
Peralatan dan Mesin			30.774.750,00	30.774.750,00	0,00	
	(TM)	BPSDM HUKUM DAN HAM	3.567.672.109,00	3.567.672.109,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(183.148.500,00)	(183.148.500,00)	0,00	
Aset Tetap Renovasi			3.370.235.609,00	0,00	3.370.235.609,00	disebabkan adanya perbedaan penginputan transfer masuk Aset
Gedung dan Bangunan			0,00	3.370.235.609,00	(3.370.235.609,00)	Tetap Renovasi secara manual tanpa melalui ADK
Peralatan dan Mesin			380.585.000,00	380.585.000,00	0,00	
	(TM)	K/L non BA 013	34.526.360.568,00	34.526.360.568,00	0,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			(17.955.296,00)	(17.955.296,00)	0,00	
Barang Konsumsi			34.239.075.864,00	34.239.075.864,00	0,00	
Gedung dan Bangunan			305.240.000,00	305.240.000,00	0,00	
(TK)	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL		5.203.918.943,00	5.992.910.996,00	(788.992.053,00)	
	(TM)	SEKRETARIAT JENDERAL	1.216.106.240,00	1.216.106.240,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(2.011.278.176,00)	(2.011.278.176,00)	0,00	
Peralatan dan Mesin			3.227.384.416,00	3.227.384.416,00	0,00	
	(TM)	DITJEN PEMASYARAKATAN	216.916.784,00	216.916.784,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(927.704.300,00)	(927.704.300,00)	0,00	
Peralatan dan Mesin			1.144.621.084,00	1.144.621.084,00	0,00	
	(TM)	DITJEN IMIGRASI	3.606.696.342,00	4.395.688.395,00	(788.992.053,00)	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya			(788.992.053,00)	0,00	(788.992.053,00)	Selisih transfer dari DJKI ke Ditjen Imigrasi dikarenakan proses transfer ATR dilakukan secara manual, dan akumulasi penyusutan terbentuk pada satker pengirim (DJKI) sedangkan satker penerima (Ditjen Imigrasi) tidak terbentuk
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(902.831,00)	(902.831,00)	0,00	
Aset Tetap Renovasi			4.391.776.130,00	0,00	4.391.776.130,00	disebabkan adanya perbedaan penginputan transfer masuk Aset



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Gedung dan Bangunan			0,00	4.391.776.130,00	(4.391.776.130,00)	Tetap Renovasi secara manual tanpa melalui ADK
Peralatan dan Mesin			4.815.096,00	4.815.096,00	0,00	
	(TM)	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.100.708,00	7.100.708,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(1.014.388,00)	(1.014.388,00)	0,00	
Peralatan dan Mesin			8.115.096,00	8.115.096,00	0,00	
	(TM)	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	0,00	0,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(29.404.400,00)	(29.404.400,00)	0,00	
Peralatan dan Mesin			29.404.400,00	29.404.400,00	0,00	
	(TM)	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	0,00	0,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(60.500.000,00)	(60.500.000,00)	0,00	
Peralatan dan Mesin			60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	
	(TM)	BALITBANG HUKUM DAN HAM	13.187.030,00	13.187.030,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(3.043.162,00)	(3.043.162,00)	0,00	
Peralatan dan Mesin			16.230.192,00	16.230.192,00	0,00	
	(TM)	BPSDM HUKUM DAN HAM	143.911.839,00	143.911.839,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(616.077.194,00)	(616.077.194,00)	0,00	
Aset Tetap Renovasi			140.361.485,00	0,00	140.361.485,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Gedung dan Bangunan			0,00	140.361.485,00	(140.361.485,00)	disebabkan adanya perbedaan penginputan transfer masuk Aset Tetap Renovasi secara manual tanpa melalui ADK
Peralatan dan Mesin			619.627.548,00	619.627.548,00	0,00	
(TK)	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL		129.484.900,00	129.484.900,00	0,00	
	(TM)	SEKRETARIAT JENDERAL	120.816.900,00	120.816.900,00	0,00	
Aset Tetap Lainnya			120.816.900,00	120.816.900,00	0,00	
	(TM)	BALITBANG HUKUM DAN HAM	8.668.000,00	8.668.000,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(72.418.794,00)	(72.418.794,00)	0,00	
Peralatan dan Mesin			81.086.794,00	81.086.794,00	0,00	
(TK)	BALITBANG HUKUM DAN HAM		14.731.067,00	14.731.067,00	0,00	
	(TM)	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	14.731.067,00	14.731.067,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(89.689.910,00)	(89.689.910,00)	0,00	
Peralatan dan Mesin			104.420.977,00	104.420.977,00	0,00	
(TK)	BPSDM HUKUM DAN HAM		416.498.750,00	416.498.750,00	0,00	
	(TM)	SEKRETARIAT JENDERAL	62.810.000,00	62.810.000,00	0,00	
Peralatan dan Mesin			62.810.000,00	62.810.000,00	0,00	
	(TM)	DITJEN IMIGRASI	0,00	0,00	0,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(22.053.800,00)	(22.053.800,00)	0,00	
Peralatan dan Mesin			22.053.800,00	22.053.800,00	0,00	
	(TM)	BPSDM HUKUM DAN HAM	353.688.750,00	353.688.750,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(68.531.250,00)	(68.531.250,00)	0,00	
Peralatan dan Mesin			422.220.000,00	422.220.000,00	0,00	
(TK)	SATKER TIDAK ADA		0,00	19.279.468,00	(19.279.468,00)	
	(TM)	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	0,00	(6.956,00)	6.956,00	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			0,00	(6.956,00)	6.956,00	Selisih Transfer di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, selisih disebabkan adanya perubahan nilai wajar pada satker pengirim barang, sehingga perlu dilakukan koreksi manual pada satker penerima untuk menyesuaikan nilai BMN obyek transfer tersebut. Namun dalam koreksi yang telah dilakukan sesuai S-58 DJPB, terdapat ketidaksinkronan antara bentukan jurnal nilai aset (trn 247) koreksi transfer TAYL, dengan koreksi nilai penyusutannya (trn 248), dimana pada koreksi susut bentukan jurnalnya terhadap transfer masuk dimana seharusnya adalah koreksi aset tetap non revaluasi, sehingga



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

						menimbulkan selisih sebesar nilai penyusutannya. Perolehan transfer dari Kanwil Kepri.
	(TM)	DITJEN PEMASYARAKATAN	0,00	13.384.310,00	(13.384.310,00)	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			0,00	13.384.310,00	(13.384.310,00)	selisih disebabkan adanya perubahan nilai wajar pada satker pengirim barang, sehingga perlu dilakukan koreksi manual pada satker penerima untuk menyesuaikan nilai BMN obyek transfer tersebut. Namun dalam koreksi yang telah dilakukan sesuai S-58 DJPB, terdapat ketidaksinkronan antara bentukan jurnal nilai aset (trn 247) koreksi transfer TAYL, dengan koreksi nilai penyusutannya (trn 248), dimana pada koreksi susut bentukan jurnalnya terhadap transfer masuk dimana seharusnya adalah koreksi aset tetap non revaluasi, sehingga menimbulkan selisih sebesar nilai penyusutannya. Selisih terjadi pada satker antara lain: LP Wanita Medan, Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Rutan Bandar Lampung, dan Rupbasan Purwokerto.
(TM)	DITJEN IMIGRASI		0,00	5.902.114,00	(5.902.114,00)	



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan						selisih disebabkan adanya perubahan nilai wajar pada satker pengirim barang, sehingga perlu dilakukan koreksi manual pada satker penerima untuk menyesuaikan nilai BMN obyek transfer tersebut. Namun dalam koreksi yang telah dilakukan sesuai S-58 DJPB, terdapat ketidaksinkronan antara bentukan jurnal nilai aset (trn 247) koreksi transfer TAYL, dengan koreksi nilai penyusutannya (trn 248), dimana pada koreksi susut bentukan jurnalnya terhadap transfer masuk dimana seharusnya adalah koreksi aset tetap non revaluasi, sehingga menimbulkan selisih sebesar nilai penyusutannya. Selisih terjadi pada satker antara lain: Rudenim Pusat Tanjung Pinang, Kanim Kelas III Palopo, dan Kanim Kelas II Bengkalis
			0,00	5.902.114,00	(5.902.114,00)	
(TM)	SATKON		0,00	0,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			0,00	15.979.481.024,00	(15.979.481.024,00)	take-out/in reval satkon
Akumulasi Penyusutan Irigasi			0,00	(1.452.866,00)	1.452.866,00	
Gedung dan Bangunan			0,00	(108.122.320.996,00)	108.122.320.996,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Irigasi		0,00	43.586.000,00	(43.586.000,00)	
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		0,00	(36.933.390.492)	36.933.390.492	
	Tanah		0,00	129.034.097.330,00	(129.034.097.330,00)	
(TK)	SATKON		0,00	0,00	0,00	
	(TM) SATKER TIDAK ADA		0,00	0,00	0,00	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		15.979.481.024,00	0,00	15.979.481.024,00	take-out/in reval satkon
	Akumulasi Penyusutan Irigasi		(1.452.866,00)	0,00	(1.452.866,00)	
	Gedung dan Bangunan		(108.122.320.996,00)	0,00	(108.122.320.996,00)	
	Irigasi		43.586.000,00	0,00	43.586.000,00	
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		(36.933.390.492,00)	0,00	(36.933.390.492,00)	
	Tanah		129.034.097.330,00	0,00	129.034.097.330,00	
(TK)	K/L non BA 013		36.415.479.342,00	36.415.479.342,00	0,00	
	(TM) DITJEN PEMASYARAKATAN		22.801.779.342,00	22.801.779.342,00	0,00	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(16.378.208,00)	(16.378.208,00)	0,00	
	Aset Tetap Renovasi		1.609.325.600,00	0,00	1.609.325.600,00	disebabkan adanya perbedaan penginputan transfer masuk Aset Tetap Renovasi secara manual tanpa melalui ADK
	Gedung dan Bangunan		0,00	1.609.325.600,00	(1.609.325.600,00)	
	Peralatan dan Mesin		18.717.950,00	18.717.950,00	0,00	



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Tanah			21.190.114.000,00	21.190.114.000,00	0,00	
	(TM)	DITJEN IMIGRASI	13.613.700.000,00	13.613.700.000,00	0,00	
Tanah			13.613.700.000,00	13.613.700.000,00	0,00	
Grand Total			2.709.156.658.819,00	2.649.657.116.447,00	59.499.542.372,00	



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

RINCIAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG PER 31 DESEMBER 2019

URAIAN	BENTUK			Grand Total
	BARANG	JASA	UANG	
SEKRETARIAT JENDERAL	7.315.275.735,00	193.324.802.614,00		200.640.078.349,00
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	449.136.000,00			449.136.000,00
Hibah Langsung Barang dari Pemprov. KepRiau	449.136.000,00			449.136.000,00
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	1.396.617.220,00			1.396.617.220,00
Hibah Langsung bentuk Barang berupa Perlengkapan Cek Passport dari Pemprov Kalimantan Selatan	1.396.617.220,00			1.396.617.220,00
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	312.500.000,00			312.500.000,00
Hibah Tanah untuk Pembangunan LPKA dari Pemerintah Kota Bengkulu	312.500.000,00			312.500.000,00
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	40.000.000,00			40.000.000,00
Hibah Langsung Barang dari Koperasi BHP Jakarta berupa bangunan seluas 84 M2	40.000.000,00			40.000.000,00
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	147.862.234,00			147.862.234,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkab Sumbawa	92.862.234,00			92.862.234,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkot Bima	55.000.000,00			55.000.000,00
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	389.160.281,00			389.160.281,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkab Lampung berupa Tanah di Kecamatan Kotabumi Selatan	389.160.281,00			389.160.281,00
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	4.580.000.000,00	193.324.802.614,00		197.904.802.614,00
Hibah Langsung Barang dari Dewan Pembina Mesjid Khusnul Khatimah	4.580.000.000,00			4.580.000.000,00
Hibah Langsung dalam bentuk Jasa dari FNS (Friendrich Naumann Stiftung) untuk Program Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia		13.553.791.948,00		13.553.791.948,00
Hibah Jasa dari United States Agency for International Development (USAID)		179.771.010.666,00		179.771.010.666,00
INSPEKTORAT JENDERAL		1.753.659.860,00		1.753.659.860,00
INSPEKTORAT JENDERAL		1.753.659.860,00		1.753.659.860,00
Hibah Jasa dari United States Agency for International Development (USAID)		1.753.659.860,00		1.753.659.860,00
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	34.655.546.316,00		505.000.000,00	35.160.546.316,00
BALAI PEMASYARAKATAN KUTACANE	36.750.000,00			36.750.000,00
Hibah langsung Barang dari BRI	36.750.000,00			36.750.000,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

BALAI PEMASYARAKATAN WONOSARI	110.400.000,00			110.400.000,00
Hibah Langsung Barang berupa Bangunan Tempat Ibadah dan AC	110.400.000,00			110.400.000,00
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA BLANGKAJEREN	195.686.000,00			195.686.000,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkab Gayo Lues	195.686.000,00			195.686.000,00
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA CALANG	54.734.000,00			54.734.000,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkab Aceh Jaya	12.950.000,00			12.950.000,00
Hibah Langsung Rehab Mushalla dari Pemkab Aceh Jaya	41.784.000,00			41.784.000,00
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA PAGAR ALAM	208.150.000,00			208.150.000,00
Hibah Berupa bangunan dari Pemkot Pagar Alam	208.150.000,00			208.150.000,00
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG BALAI KARIMUN	803.515.000,00			803.515.000,00
Hibah Langsung Barang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Karimun	497.420.000,00			497.420.000,00
Hibah Langsung Barang dari BNI	50.000.000,00			50.000.000,00
Hibah Langsung Barang dari BRI Kc Tanjung Balai Karimun	55.500.000,00			55.500.000,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkab Karimun	200.595.000,00			200.595.000,00
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	8.701.624.105,00			8.701.624.105,00
Hibah Langsung Barang dari ICITAP berupa Rigs yang digunakan dalam rangka pemenuhan sarana prasarana	161.194.498,00			547.080.210,00
Hibah Langsung Barang dari ICITAP berupa peralatan unit informasi khusus dalam rangka pemenuhan sarana prasarana	385.885.712,00			
Hibah langsung barang dari panitia pembangunan rumah ibadah pada kampus poltekip dan poltekim untuk DitjenPAS	8.154.543.895,00			8.154.543.895,00
LAPAS CIANJUR	614.350.000,00			614.350.000,00
Hibah Kendaraan dari Pemprov Jawa Barat	422.350.000,00			422.350.000,00
Hibah Langsung Bangunan dari BRI	192.000.000,00			192.000.000,00
LAPAS CILACAP	252.144.600,00			252.144.600,00
Hibah Pembangunan Bengkel Kerja	37.227.500,00			37.227.500,00
Hibah Pembangunan Gereja	173.967.100,00			173.967.100,00
Hibah Peralatan dan Mesin	40.950.000,00			40.950.000,00
LAPAS GARUT			150.000.000,00	150.000.000,00
Hibah Langsung Uang dari Pemkab Garut			150.000.000,00	150.000.000,00
LAPAS INDRAMAYU	2.246.095.000,00			2.246.095.000,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Hibah Langsung Barang dari Pemkab Indramayu (Bangunan Gedung Pertemuan dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah)	2.246.095.000,00			2.246.095.000,00
LAPAS KELAS IIB SELAT PANJANG	4.574.209.380,00			4.574.209.380,00
Hibah Langsung Barang berupa Tanah dari Pemkab Kepulauan Meranti	4.574.209.380,00			4.574.209.380,00
LAPAS KELAS III BONTANG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	824.364.821,00			824.364.821,00
Hibah Langsung Barang dari berupa Meubelair dari Pemkot Bontang	197.450.000,00			197.450.000,00
Hibah Langsung Barang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkot Bontang	626.914.821,00			626.914.821,00
LAPAS KELAS III CILEGON PROPINSI BANTEN	177.000.000,00			177.000.000,00
Hibah Langsung Bangunan dari Yayasan Betesda Ministry	177.000.000,00			177.000.000,00
LAPAS KLATEN	576.909.732,00			576.909.732,00
Hibah Langsung barang (bangunan IPAL dan jaringan) dari pemerintah kabupaten Klaten	566.409.732,00			566.409.732,00
Hibah Langsung barang (kursi susun FTR) dari pemerintah kabupaten Klaten	10.500.000,00			10.500.000,00
LAPAS LUMAJANG	385.000.000,00			385.000.000,00
Hibah Langsung Barang dari RSUD Dr, Haryoto Lumajang	385.000.000,00			385.000.000,00
LAPAS MUARA BULIAN	1.104.953.444,00			1.104.953.444,00
Hibah Langsung Barang berupa Bangunan dari Pemkab Batanghari	1.104.953.444,00			1.104.953.444,00
Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	50.336.000,00			50.336.000,00
Hibah Langsung Barang AC dari Yayasan Mercy Indonesia	12.537.000,00			12.537.000,00
Hibah langsung Barang dari ASBEST	6.200.000,00			6.200.000,00
Hibah Langsung Barang dari Jagadhita Tour and Travel	6.039.000,00			6.039.000,00
Hibah langsung Barang Mesin Air dari CV Bhoga karya	15.840.000,00			15.840.000,00
Hibah langsung Barang Oven dari Komunitas Kananditya	1.220.000,00			1.220.000,00
Hibah Langsung barang TV Dari Hotel The One Legian	8.500.000,00			8.500.000,00
Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	78.549.000,00			78.549.000,00
Hibah Langsung Barang dari BNI berupa peralatan dan mesin sumur bor	65.524.000,00			65.524.000,00
Hibah Peralatan dan Mesin dari Pertamina	13.025.000,00			13.025.000,00
Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	98.745.000,00			98.745.000,00
Hibah langsung Barang dari BRI	23.100.000,00			23.100.000,00
Hibah Langsung Barang Penunjang Kegiatan Perkantoran	75.645.000,00			75.645.000,00
LAPAS SAMPIT	497.523.334,00			497.523.334,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkab	222.008.334,00			222.008.334,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Hibah Langsung Barang dari Pemkab Kotim	275.515.000,00			275.515.000,00
LAPAS TULUNGAGUNG			100.000.000,00	100.000.000,00
Hibah Langsung Uang berupa Program Kegiatan Pemeliharaan Ruang Tahanan Blok Bima dari Pemkab Tulungagung			100.000.000,00	100.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK WANITA TANGERANG	586.719.500,00			586.719.500,00
Hibah Langsung Barang berupa 1 set gedung gereja dari Yayasan Anugerah Sejahtera Indonesia	586.719.500,00			586.719.500,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK, MUARA BULIAN, JAMBI	30.600.000,00			30.600.000,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkab Batanghari berupa Tanah	30.600.000,00			30.600.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	60.000.000,00			60.000.000,00
Hibah langsung Renovasi Guest House dari PT. Solusi Bangun Indonesia	60.000.000,00			60.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	39.655.000,00			39.655.000,00
Hibah Langsung Barang berupa Sumumur Bor dari Dinas PUPR Bengkulu	39.655.000,00			39.655.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BESI	58.000.000,00			58.000.000,00
Hibah Renovasi Guesthouse Dari PT. Solusi Bangun Indonesia	58.000.000,00			58.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	50.900.000,00			50.900.000,00
Hibah Langsung Barang dari PT. Pertamina	50.900.000,00			50.900.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG	261.473.500,00			261.473.500,00
Hibah Langsung Barang dari Koperasi Pegawai Pengayoman Kemenkumham	261.473.500,00			261.473.500,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO			75.000.000,00	75.000.000,00
Pengadaan Meubelair			75.000.000,00	75.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNG SUGIH	40.000.000,00			40.000.000,00
Hibah Tanah Dari Pemkab lampung Tengah	40.000.000,00			40.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEMBANG KUNING	193.169.000,00			193.169.000,00
Hibah Langsung Barang dari PDT. Yani Lim an. Yayasan Pelayanan Kasih Bethesda	145.005.500,00			145.005.500,00
Hibah Langsung Barang dari PT.Holcim Indonesia Tbk	48.163.500,00			48.163.500,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	2.421.551.877,00			2.421.551.877,00
Hibah langsung Rehab Hunian Dari Pemkab badung	2.421.551.877,00			2.421.551.877,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTABARU	151.178.500,00			151.178.500,00
Hibah langsung Barang dari Pemkab Tanah Bumbu	151.178.500,00			151.178.500,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	599.626.200,00			599.626.200,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Hibah Langsung dari Pemkab Tanjung Jabung Barat	599.626.200,00			599.626.200,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN LANGSA	150.000.000,00			150.000.000,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkot Langsa	150.000.000,00			150.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOK SEUMAWE	118.050.000,00			118.050.000,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkot Lhok Seumawe	118.050.000,00			118.050.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	193.010.000,00			193.010.000,00
Hibah langsung barang mesin cetak pavin block dari CV Kaizen Karya Mandiri	80.000.000,00			80.000.000,00
Hibah langsung berupa barang Kursi Lipat Chitose dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia-Jabar	19.450.000,00			19.450.000,00
Hibah langsung berupa CCTV dari Koperasi Madani	13.560.000,00			13.560.000,00
Hibah Langsung berupa gedung bangunan PAS mart dari PT Fajar Basthi	80.000.000,00			80.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN	58.300.000,00			58.300.000,00
Hibah Langsung Pembuatan Pos jaga Wasrik	58.300.000,00			58.300.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN	288.897.000,00			288.897.000,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkab Kota Waringin Barat	288.897.000,00			288.897.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PANGARAYAN	197.631.000,00			197.631.000,00
hibah langsung dalam bentuk barang dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	197.631.000,00			197.631.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN	58.000.000,00			58.000.000,00
Hibah Langsung Barang dari PT. Solusi Bangun	58.000.000,00			58.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	64.704.186,00			64.704.186,00
Hibah Pembangunan Gereja	64.704.186,00			64.704.186,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	940.524.120,00			940.524.120,00
Hibah langsung bantuan pembangunan dan renovasi dari direktur Amin Sutanto (PT Anugerah Vata Abadi)	920.524.120,00			920.524.120,00
Hibah langsung dalam bentuk barang (alat pemadam api beroda) dari Koko Syawaluddin Sitorus	20.000.000,00			20.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMATANG SIANTAR	592.223.000,00			592.223.000,00
Hibah langsung Barang dari PT. Anugerah Vata Abadi	174.545.000,00			174.545.000,00
Hibah langsung Barang dari yayasan Budhasayankita Medan	183.178.000,00			183.178.000,00
Hibah langsung Barang dari yayasan Pondok Pesantren Salafiah	234.500.000,00			234.500.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERMISAN	59.950.000,00			59.950.000,00
Hibah langsung barang dari PT. Solusi bangun Indonesia	59.950.000,00			59.950.000,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

LEMBAGA PEMASYARAKATAN SAMARINDA	164.420.000,00			164.420.000,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkot Samarinda	164.420.000,00			164.420.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	554.295.000,00			554.295.000,00
Hibah langsung Barang dari Bank BNI	87.500.000,00			87.500.000,00
Hibah Langsung Barang dari CV. ANJASA	27.795.000,00			27.795.000,00
Hibah Langsung Barang dari CV. SEMINDO	19.000.000,00			19.000.000,00
Hibah Langsung Barang dari PT. FAJAR BASTHI SEJAHTERA	400.000.000,00			400.000.000,00
Hibah Langsung Barang dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum	20.000.000,00			20.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG	35.000.000,00			35.000.000,00
Hibah Langsung Barang dari PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (Mesin Jahit, Mesin Obras, Mesin Pelubang Kancing, dan Alat Musik berupa (Keyboard, drum, dan gitar))	35.000.000,00			35.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG	286.795.543,00			286.795.543,00
Hibah Langsung Barang berupa Penambahan Ruang dari Pemkab Sintang	286.795.543,00			286.795.543,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SRAGEN	140.000.000,00		30.000.000,00	170.000.000,00
Hibah Langsung Barang Dari Pemkab Sragen	140.000.000,00			140.000.000,00
Hibah Langsung Uang dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Sragen			30.000.000,00	30.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEBINGTINGGI DELI	209.675.600,00			209.675.600,00
Hibah Vihara dari Yayasan Budha Tu Chi	209.675.600,00			209.675.600,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	59.950.000,00			59.950.000,00
Hibah Renovasi Aula Dari PT. Solusi bangun Indonesia	59.950.000,00			59.950.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	32.000.000,00			32.000.000,00
hibah langsung barang berupa bangunan vihara/cetiya dari DPD Walubi Prov Sulsel	32.000.000,00			32.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	120.000.000,00			120.000.000,00
Hibah Langsung Bangunan dari Pemkab Sitaro	120.000.000,00			120.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MALANG	119.500.000,00			119.500.000,00
Hibah Langsung Barang Berupa Bangunan seluas 70m (Penambahan Volume aula bimpas/ mushola) dari Baznas kota Malang	70.000.000,00			70.000.000,00
Hibah Langsung Barang berupa penambahan volume aula Bimpas mushola dari Koirul Hafizs Baznas	12.500.000,00			12.500.000,00
Hibah Langsung Barang berupa Peralatan Bakery dan mesin jahit dari Vincentius Amin Susanto	37.000.000,00			37.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SEMARANG	258.591.500,00			258.591.500,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Hibah Langsung Barang dari Panitia Tim Pembangunan Gereja Oikumana Abigail	258.591.500,00			258.591.500,00
LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara			100.000.000,00	100.000.000,00
Hibah Langsung uang dari Pemkot Kendari untuk Pengadaan Sarana Penunjang Pembinaan terhadap anak binaan			100.000.000,00	100.000.000,00
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI	24.500.000,00			24.500.000,00
Hibah Langsung Barang berupa Bangunan Tempat Ibadah dan AC	24.500.000,00			24.500.000,00
RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	769.460.000,00			769.460.000,00
Hibah Langsung Barang berupa Penambahan Ruang Tunggu dan Atap serta Ruang Kunjungan dari Pemkot Dumai	123.300.000,00			123.300.000,00
Hibah Langsung Barang berupa Tanah 34.784m dari Pemkot Dumai	263.670.000,00			263.670.000,00
Hibah Langsung Gedung bangunan dari PT. Anugrah Vata Abadi	382.490.000,00			382.490.000,00
RUMAH TAHANAN NEGARA KOLAKA			50.000.000,00	50.000.000,00
Hibah Langsung Uang dari Pemkab Kolaka			50.000.000,00	50.000.000,00
RUMAH TAHANAN NEGARA PALEMBANG	300.000.000,00			300.000.000,00
Hibah Pembangunan Mesjid	300.000.000,00			300.000.000,00
RUMAH TAHANAN NEGARA PELAIHARI	1.596.280.000,00			1.596.280.000,00
Hibah Langsung Pembangunan Pos dan Tembok Permanen dari Pemkab Tanah Laut	1.596.280.000,00			1.596.280.000,00
RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	47.205.000,00			47.205.000,00
hibah langsung bentuk barang berupa alat kesehatan dari PT Bank BRI kantor cabang Pinrang	27.000.000,00			27.000.000,00
hibah langsung bentuk barang berupa bangunan musholla	20.205.000,00			20.205.000,00
RUMAH TAHANAN NEGARA PURWOREJO	21.570.000,00			21.570.000,00
Hibah Langsung Barang AC dari Sapta Utama	3.500.000,00			3.500.000,00
Hibah Langsung Barang dari Koperasi Pegawai Pengayoman Kemenkumham	18.070.000,00			18.070.000,00
RUMAH TAHANAN NEGARA RANGKAS BITUNG	100.000.000,00			100.000.000,00
Hibah Langsung Bangunan dari BRI	100.000.000,00			100.000.000,00
RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	198.000.000,00			198.000.000,00
Hibah Langsung Renovasi Mesjid dari PT. Berkas Murah Rejeki	198.000.000,00			198.000.000,00
RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	68.000.000,00			68.000.000,00
Hibah Langsung Barang berupa Bangunan Pos Jaga	68.000.000,00			68.000.000,00
RUMAH TAHANAN NEGARA SELONG	18.000.000,00			18.000.000,00
Hibah Langsung Barang/Jasa dari Pemkab Lombok Timur	18.000.000,00			18.000.000,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

RUMAH TAHANAN NEGARA TANAH GROGOT	322.474.000,00			322.474.000,00
Hibah Langsung Barang dari Koperasi Pegawai Pengayoman Kemenkumham	46.574.000,00			46.574.000,00
Hibah Langsung Barang dari PT.Kideco Jaya Agung	275.900.000,00			275.900.000,00
RUMAH TAHANAN NEGARA TAPAKTUAN	12.000.000,00			12.000.000,00
Hibah Langsung Barang dari PemKAB Aceh Selatan	12.000.000,00			12.000.000,00
Rutan Kelas II B Depok	72.627.374,00			72.627.374,00
Hibah Langsung Barang dari PT. ANUGRAH VATA ABADI (Pesawat Telepon, PC Unit, Mesin Antrian, Bangku, Kipas Angin, Televisi, Dispenser)	72.627.374,00			72.627.374,00
RUTAN KELAS IIB PEKAN BARU PROPINSI RIAU	320.000.000,00			320.000.000,00
Hibah Bangunan dan Renovasi dari PT. Anugrah Vata Abadi	320.000.000,00			320.000.000,00
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	39.858.671.359,00	467.500,00	1.300.000.000,00	41.159.138.859,00
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	4.125.000.000,00			4.125.000.000,00
Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) - USA berupa Perangkat Video Spectral Comparator Series 80/I/F (VSC/80/I/FS)	4.125.000.000,00			4.125.000.000,00
KANTOR IMIGRASI BATAM	336.000.000,00			336.000.000,00
Hibah langsung barang dari PT. Sat Nusapersada Tbk	336.000.000,00			336.000.000,00
KANTOR IMIGRASI KELAS I SERANG	99.500.000,00			99.500.000,00
Hibah Langsung Barang berupa 1 Unit Genelator set Diesel Engine dari PT. Zhejiang Tenaga	99.500.000,00			99.500.000,00
KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI	31.864.962.000,00			31.864.962.000,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkot Bekasi	31.864.962.000,00			31.864.962.000,00
KANTOR IMIGRASI KELAS III KEDIRI	1.698.808.459,00		1.300.000.000,00	2.998.808.459,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkab Kediri (Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen)	1.698.808.459,00			1.698.808.459,00
Hibah Langsung Uang Pembangunan Pagar Gedung dari Pemkab Kediri			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
KANTOR IMIGRASI KELAS III PALOPO	47.652.804,00			47.652.804,00
Hibah Langsung Barang BERUPA TANAH	47.652.804,00			47.652.804,00
KANTOR IMIGRASI KLAS II MUARA ENIM	594.000.000,00			594.000.000,00
TANAH	594.000.000,00			594.000.000,00
KANTOR IMIGRASI KUALA TUNGKAL	131.450.000,00			131.450.000,00
PERALATAN DAN MESIN	6.450.000,00			6.450.000,00
TANAH	125.000.000,00			125.000.000,00
KANTOR IMIGRASI RANAI		467.500,00		467.500,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

Hibah Jasa dari Eka Ady Supratikna		467.500,00		467.500,00
KANTOR IMIGRASI SUKABUMI	561.298.096,00			561.298.096,00
Hibah Langsung Barang dari Pemerintah Kota Sukabumi untuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi (Tanah)	561.298.096,00			561.298.096,00
KANTOR IMIGRASI TANJUNG PINANG	400.000.000,00			400.000.000,00
Hibah Langsung Barang dari Bapak Noni	400.000.000,00			400.000.000,00
DIREKTORAT JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		20.870.993.354,00		20.870.993.354,00
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		20.870.993.354,00		20.870.993.354,00
Hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) berupa Proyek Perlindungan Kekayaan Intelektual & Konsistensi Hukum Untuk Meningkatkan Lingkungan Bisnis		20.870.993.354,00		20.870.993.354,00
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL		7.486.518.208,00		7.486.518.208,00
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL		7.486.518.208,00		7.486.518.208,00
Hibah Jasa dari United States Agency for International Development (USAID)		7.486.518.208,00		7.486.518.208,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM		5.553.850,00		5.553.850,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM		5.553.850,00		5.553.850,00
Hibah Jasa dari United States Agency for International Development (USAID)		5.553.850,00		5.553.850,00
Grand Total	81.829.493.410,00	223.441.995.386,00	1.805.000.000,00	307.076.488.796,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

RINCIAN PENGEMBALIAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG PER 31 DESEMBER 2019

URAIAN		NILAI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN		15.499.477,00
LAPAS TULUNGAGUNG		2.799.477,00
		2.799.477,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN		12.700.000,00
	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pembiayaan Rehabilitasi blok tahanan anak, Rehabilitasi blok tahanan khusus / teroris, Rehabilitasi Pos Jaga Blok, Rehabilitasi ruang tahanan di Blok A dan Pengadaan dan Pemasangan CCTV. Sisa dana hibah tersebut disetorkan ke kas negara dengan tanggal buku 7 Januari 2019 dengan NTPN AD61 D4TB 4V3S 6R4I	12.700.000,00
TOTAL		15.499.477,00



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

RINCIAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAHUN ANGGARAN YANG LALU PER 31 DESEMBER 2019

URAIAN	BENTUK			NILAI
	BARANG	JASA	UANG	
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	360.738.454,00		30.000.000,00	390.738.454,00
RUMAH TAHANAN NEGARA SUMENEP	44.545.454,00			44.545.454,00
Hibah Langsung Berupa Buku Agama, Al-Quran dan Rak Buku Dari Pemkab Sumenep	44.545.454,00			44.545.454,00
RUMAH TAHANAN NEGARA TAPAKTUAN	13.000.000,00			13.000.000,00
Hibah Langsung Barang dari Pemkab Aceh Selatan	13.000.000,00			13.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	76.000.000,00			76.000.000,00
Hibah Langsung Ambulan dari Bank Sulsel	76.000.000,00			76.000.000,00
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG			30.000.000,00	30.000.000,00
Hibah Langsung Uang dari Pemkab Tanggamus			30.000.000,00	30.000.000,00
RUMAH TAHANAN NEGARA PANDEGLANG	227.193.000,00			227.193.000,00
Hibah barang Pembangunan Gedung dan Kelengkapan Ruang Layanan Informasi dan Kunjungan	227.193.000,00			227.193.000,00
TOTAL	360.738.454,00	0,00	30.000.000,00	390.738.454,00



**LAMPIRAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**PENGUNGKAPAN
PENTING LAINNYA**



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

RINCIAN PENJELASAN SELISIH REKONSILIASI SP2D BMN AKUN 53 BERDASARKAN SATUAN KERJA
S.D 31 DESEMBER 2019 (Unduh Data per Tanggal 19 April 2020)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Rph Saiba	Rph Simak	Rph Selisih	Keterangan
DITJEN PEMASYARAKATAN									
1	013.05.404271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG	5331	201913940427100	20-08-2019	0	52.320.500	52.320.500	Selisih SP2D atas hibah renovasi gedung dan bangunan
2	013.05.406174	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	5331	201900840617401	31-12-2019	0	81.500.000	81.500.000	Selisih SP2D atas hibah renovasi gedung dan bangunan
3	013.05.406199	RUMAH TAHANAN NEGARA SIAK SRI INDRAPURA	5331	190081301024700	13-11-2019	18.129.998	0	(18.129.998)	Kesalahan input tanggal dokumen
4	013.05.406199	RUMAH TAHANAN NEGARA SIAK SRI INDRAPURA	5331	190081301024700	13-12-2019	0	18.129.998	18.129.998	
5	013.05.406199	RUMAH TAHANAN NEGARA SIAK SRI INDRAPURA	5331	190081301027529	05-12-2019	2.499.925	0	(2.499.925)	Kesalahan input nomor dokumen
6	013.05.406199	RUMAH TAHANAN NEGARA SIAK SRI INDRAPURA	5331	190081301027536	05-12-2019	0	2.499.925	2.499.925	
7	013.05.406199	RUMAH TAHANAN NEGARA SIAK SRI INDRAPURA	5331	190081301030628	26-12-2019	514.470.000	0	(514.470.000)	Kesalahan input nomor dokumen
8	013.05.406199	RUMAH TAHANAN NEGARA SIAK SRI INDRAPURA	5331	190081301030628	23-12-2019	0	514.470.000	514.470.000	
9	013.05.406287	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG BALAI KARIMUN	5331	201913740628701	10-09-2019	0	92.290.000	92.290.000	Selisih SP2D atas hibah renovasi berupa bangunan masjid
10	013.05.407525	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	5331	201903740752500	31-12-2019	0	2.421.551.877	2.421.551.877	Selisih SP2D atas hibah renovasi gedung dan bangunan
11	013.05.683732	RUTAN KELAS IIB PEKAN BARU PROPINSI RIAU	5331	201900868373200	31-12-2019	0	100.000.000	100.000.000	Selisih SP2D atas hibah renovasi gedung dan bangunan
12	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303049179	24-10-2019	0	38.404.624.544	38.404.624.544	Kesalahan input tanggal dokumen



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303049179	29-10-2019	38.404.624.544	0	(38.404.624.544)	
14	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302064887	18-10-2019	0	1.900.000	1.900.000	Kesalahan input nomor dokumen
15	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391301056497	18-10-2019	1.900.000	0	(1.900.000)	
16	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302097529	17-12-2019	49.968.600	0	(49.968.600)	Kesalahan penggunaan akun belanja modal
17	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302097530	17-12-2019	49.968.600	0	(49.968.600)	
18	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303069800	17-12-2019	49.500.000	0	(49.500.000)	
19	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303069801	17-12-2019	49.500.000	0	(49.500.000)	
20	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303069802	17-12-2019	49.500.000	0	(49.500.000)	
21	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303069803	17-12-2019	49.500.000	0	(49.500.000)	
22	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302052055	04-09-2019	192.912.500	0	(192.912.500)	
23	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303036109	05-09-2019	191.950.000	0	(191.950.000)	
24	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303036099	05-09-2019	190.960.000	0	(190.960.000)	
25	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302052563	05-09-2019	190.960.000	0	(190.960.000)	
26	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303036872	09-09-2019	176.110.000	0	(176.110.000)	
27	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303036110	05-09-2019	151.250.000	0	(151.250.000)	
28	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303036087	05-09-2019	92.804.800	0	(92.804.800)	
29	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391301080385	16-12-2019	64.660.000	0	(64.660.000)	
30	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391301064851	14-11-2019	49.793.000	0	(49.793.000)	
31	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303066248	12-12-2019	49.720.000	0	(49.720.000)	



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

32	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302082922	29-11-2019	48.070.000	0	(48.070.000)
33	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302097532	17-12-2019	47.493.600	0	(47.493.600)
34	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302098025	17-12-2019	47.493.600	0	(47.493.600)
35	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302097531	17-12-2019	47.493.600	0	(47.493.600)
36	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302097528	17-12-2019	47.493.600	0	(47.493.600)
37	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302097539	17-12-2019	47.493.600	0	(47.493.600)
38	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302097535	17-12-2019	47.493.600	0	(47.493.600)
39	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302097533	17-12-2019	47.493.600	0	(47.493.600)
40	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302097537	17-12-2019	47.493.600	0	(47.493.600)
41	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302097536	17-12-2019	47.493.600	0	(47.493.600)
42	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302098014	17-12-2019	47.493.600	0	(47.493.600)
43	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303059173	02-12-2019	45.375.000	0	(45.375.000)
44	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302082924	29-11-2019	40.150.000	0	(40.150.000)
45	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303059104	02-12-2019	39.600.000	0	(39.600.000)
46	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391301053790	09-10-2019	38.545.570	0	(38.545.570)
47	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303033104	20-08-2019	37.834.500	0	(37.834.500)
48	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302083144	02-12-2019	36.300.000	0	(36.300.000)
49	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302082925	29-11-2019	36.300.000	0	(36.300.000)
50	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303059174	02-12-2019	35.750.000	0	(35.750.000)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

51	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303066250	12-12-2019	35.750.000	0	(35.750.000)	
52	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302082923	29-11-2019	34.650.000	0	(34.650.000)	
53	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303059172	02-12-2019	33.000.000	0	(33.000.000)	
54	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391302083145	02-12-2019	31.350.000	0	(31.350.000)	
55	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303045170	11-10-2019	27.000.000	0	(27.000.000)	
56	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391303066263	12-12-2019	23.100.000	0	(23.100.000)	
57	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391301081409	17-12-2019	20.000.000	0	(20.000.000)	
58	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5331	191391301075773	11-12-2019	12.887.600	0	(12.887.600)	
59	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391301042634	26-08-2019	11.000.000	0	(11.000.000)	
60	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391301053834	09-10-2019	6.947.928	0	(6.947.928)	
61	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391301081408	17-12-2019	6.090.000	0	(6.090.000)	
62	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	191391301046328	10-09-2019	2.040.000	0	(2.040.000)	
DITJEN IMIGRASIB									
1	013.06.408794	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	5321	190101303010424	16-10-2019	470.000	0	(470.000)	Kesalahan penggunaan akun pada belanja barang berupa dispenser dan telah dilakukan pengembalian
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL									
1	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5361	191391303074655	26-12-2019	0	98.560.000	98.560.000	Kesalahan input tanggal dokumen
2	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5361	191391303074655	23-12-2019	98.560.000	0	(98.560.000)	
3	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5321	191391302036754	10-07-2019	0	51.865.000	51.865.000	Kesalahan input akun belanja



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5361	191391302036754	10-07-2019	51.865.000	0	(51.865.000)	
5	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5321	191391302035463	04-07-2019	0	29.705.500	29.705.500	Kesalahan input akun belanja
6	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5361	191391302035463	04-07-2019	29.705.500	0	(29.705.500)	
7	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5361	191391303017468	28-05-2019	20.999.000	0	(20.999.000)	Kesalahan penggunaan akun belanja modal berupa belanja di bawah nilai kapitalisasi gedung dan bangunan
8	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5361	191391302071984	01-11-2019	19.351.915	0	(19.351.915)	Kesalahan penggunaan akun belanja modal berupa belanja di bawah nilai kapitalisasi gedung dan bangunan

DAFTAR SALDO 533115 - BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN GEDUNG DAN BANGUNAN
S.D 31 DESEMBER 2019 (Unduh Data per Tanggal 19 April 2020)

KODE	NAMA SATKER	ALLOTMENT	REALISASI	PENGEMBALIAN	KETERANGAN
DITJEN PEMASYARAKATAN					
013.05.352612	LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	(676.549.000)	86.550.000		Kesalahan penggunaan akun dalam perencanaan karena ketidakpahaman operator rkakl dan satker akan akun yang seharusnya 533111 malah dianggarkan 533115
013.05.418345	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	(1.459.100.000)	1.459.100.000		
013.05.418346	Lapas Perempuan Kelas III Ambon	(1.655.417.000)	1.648.939.257		
013.05.418361	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	(2.083.427.000)	2.083.349.600	(2.606.800)	
DITJEN IMIGRASI					



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

013.06.109160	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG PANDAN	(160.000.000)	159.665.000		Akun 533115 digunakan oleh satker untuk renovasi gedung dan bangunan bertingkat
013.06.409026	KANTOR IMIGRASI KELAS II LANGSA	(55.317.000)	55.015.125		Akun 533115 digunakan oleh satker untuk renovasi gedung dan bangunan kantor bagian depan dan apagar keliling rumah dinas
013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	(670.000.000)	648.400.000		Jasa konsultan perencana interior renovasi ruangan jabatan fungsional tertentu dan Jasa konsultan perencana interior revitalisasi ruang serbaguna lantai 12
Jumlah		(6.759.810.000)	6.141.018.982	(2.606.800)	

DAFTAR SALDO 425764 - PENDAPATAN JASA LEMBAGA KEUANGAN (JASA GIRO)
S.D 31 DESEMBER 2019 (Unduh Data per Tanggal 19 April 2020)

KODE	NAMA SATKER	ESTIMASI	REALISASI	KETERANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL				
013.01.404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)		(115.386)	Pendapatan jasa giro atas pendapatan bunga atas uang yang disimpan di rekening bank atas nama perseorangan
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM				
013.03.099298	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	72.000.000	(61.082.600)	Pendapatan jasa giro diakibatkan BHP mengelola rekening dana titipan yang masih diperbolehkan untuk menyetorkan jasa giro ke kas negara. Selanjutnya berdasarkan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan, BHP tidak akan menyetorkan jasa giro ke kas negara yang berasal dari penatausahaan Uang Pihak Ketiga. Akan tetapi, Balai Harta Peninggalan masih dapat menyetorkan dana titipan yang berasal dari dana pailit
013.03.099297	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA		(139.797.940)	
013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	25.000		Estimasi pendapatan jasa giro disusun pada Tahun Anggaran 2018 dikarenakan BHP mengelola Uang Pihak Ketiga dan harta pailit. Penyusunan target dan estimasi PNBK dilakukan secara terpusat pada Ditjen AHU. Sesuai dengan PMK Rekening Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, rekening lainnya masih diperkenankan untuk menerima jasa giro dikarenakan dana lainnya belum sepenuhnya menjadi hak negara. Apabila estimasi pendapatan tidak diperkenankan, untuk penghapusannya perlu dilakukan melalui mekanisme revisi DIPA



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

DITJEN PEMASYARAKATAN			
013.05.352604	LPKA Banda Aceh, Provinsi Aceh		(267)
013.05.404925	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SRAGEN		(5.260)
013.05.406523	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA MUNTOK		(15.523)
013.05.406570	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA		(43.412)
013.05.406922	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO		(2.877)
013.05.407622	RUMAH TAHANAN NEGARA SELONG		(34.150)
013.05.408731	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG		(4.167)
013.05.632029	BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN		(4.628)
013.05.632057	LAPAS KHUSUS KELAS IIA KARANGANYAR NUSAKAMBANGAN		(11.202)
DITJEN IMIGRASI			
013.06.408284	KANTOR IMIGRASI KELAS II MERAUKE		(5.159)
DITJEN HAK ASASI MANUSIA			
013.09.408735	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG		(4.167)
TOTAL		72.025.000	(201.126.738)

pendapatan bunga rekening pemerintah pada satker yang diberikan oleh Bank lokal daerah, walaupun ketentuannya atas rekening pemerintah tidak diberikan bunga, tapi hal ini belum berlaku pada beberapa bank lokal daerah, satker akan melakukan konfirmasi ulang dengan Bank dimaksud.

0

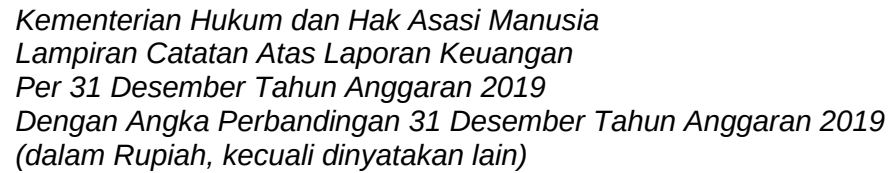
BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL
S.D 31 DESEMBER 2019 (Unduh Data per Tanggal 19 April 2020)

NO	KODE	NAMA SATKER	BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL	JUMLAH	KETERANGAN
DITJEN DMINISTRASI HUKUM UMUM					
1	013.03.099297	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	Gedung dan Bangunan	18.860.000,00	renovasi gedung bangunan dibawah nilai kapitalisasi
DITJEN PEMASYARAKATAN					
1	013.05.352606	LPKA Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Peralatan dan Mesin	41.421.600,00	Pembelian PM dibawah kapitalisasi dalam 1 kontrak
2	013.05.404271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG	Peralatan dan Mesin	350.000,00	Hibah kursi besi dibawah nilai kapitalisasi
3	013.05.404466	BALAI PEMASYARAKATAN BOGOR	Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	Pembelian PM dibawah kapitalisasi dalam 1 kontrak
4	013.05.404497	LAPAS CIANJUR	Peralatan dan Mesin	7.600.000,00	Pembelian PM dibawah kapitalisasi dalam 1 kontrak



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5	013.05.404724	BALAI PEMASYARAKATAN PEKALONGAN	Peralatan dan Mesin	2.227.000,00	Pembelian PM dalam 1 kuitansi dan 1 SPM dibawah nilai kapitalisasi
6	013.05.404821	RUMAH TAHANAN NEGARA PURWOREJO	Peralatan dan Mesin	795.000,00	Pembelian PM dibawah kapitalisasi dalam 1 kontrak
7	013.05.404950	LAPAS KLATEN	Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	Pembelian PM dibawah kapitalisasi dalam 1 kontrak
8	013.05.405311	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMPANG	Peralatan dan Mesin	15.500.000,00	Pembelian PM dibawah nilai kapitalisasi dalam 1 kontrak
9	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Peralatan dan Mesin	3.237.792.755,00	Terdapat Pembelian Peralatan dan Mesin yang harga satuannya dibawah kapitalisasi
10	013.05.418334	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	Peralatan dan Mesin	1.970.000,00	
11	013.05.418340	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	Peralatan dan Mesin	36.220.000,00	
12	013.05.652983	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	Peralatan dan Mesin	19.450.000,00	
13	013.05.653133	BALAI PEMASYARAKATAN WONOSARI	Peralatan dan Mesin	6.975.000,00	
14	013.05.683512	RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG KELAS D	Peralatan dan Mesin	4.680.000,00	
15	013.05.683643	LAPAS KELAS III BONTANG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	Peralatan dan Mesin	23.760.000,00	
16	013.05.684000	Rutan Kelas II B Depok	Peralatan dan Mesin	52.874.000,00	
17	013.05.405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	Gedung dan Bangunan	12.500.000,00	Terdapat pembangunan / renovasi gedung dan bangunan dibawah nilai kapitalisasi
18	013.05.406174	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	Gedung dan Bangunan	14.810.000,00	
19	013.05.406984	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	
20	013.05.407230	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	Gedung dan Bangunan	20.205.000,00	
21	013.05.408454	RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	Gedung dan Bangunan	33.260.000,00	
22	013.05.653442	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI	Gedung dan Bangunan	22.000.000,00	Hibah Bangunan tempat ibadah yang nilainya dibawah kapitalisasi
DITJEN IMIGRASI					
1	013.06.407973	KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG	Peralatan dan Mesin	51.602.000,00	Terdapat pembelian atas asset tetap dimana nilai harga satuannya dibawah nilai kapitalisasi sehingga satker melakukan penjumlahan pada aplikasi SAIBA untuk mengakomodir nilai tersebut
2	013.06.407989	KANTOR IMIGRASI KELAS II CILACAP	Peralatan dan Mesin	33.000.000,00	
3	013.06.408009	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SURABAYA	Peralatan dan Mesin	11.988.000,00	

[illegible]



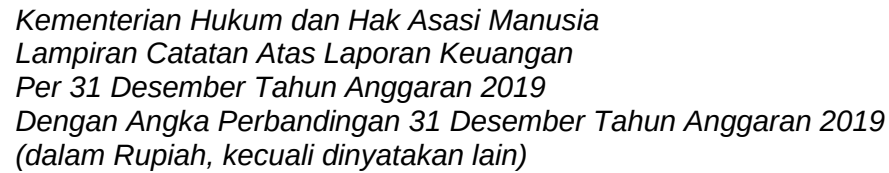
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	PENERIMA MANFAAT	NILAI HIBAH		NILAI PADA BAST		NILAI TUKAR*	KETERANGAN/ STATUS BAST	KODE SATKER	KPPN	KETERANGAN/STATUS PENGESAHAN	Ket
		USD	IDR	USD	IDR						
PROGRAM MAJU											
1	CSOs/NGOs	4.807.961,52	69.624.090.771,12	4.477.948,08	64.845.166,140	14.481	DITANDATANGANI	404233	JKT V	SUDAH PENGESAHAN OLEH SETJEN KEMENKUMHAM TGL. 02 JAN 2020 (BAST NO. 122)	Tidak memiliki kode satker sehingga bast dan pengesahannya menjadi tanggung jawab dari Kemenkumham selaku focal point.
2	Balitbang Hukum dan HAM (Kemenkumham)	217,00	3.142.377,00	383,53	5.553.850,050	14.481	DITANDATANGANI	636549	JKT V	SUDAH PENGESAHAN TGL. 06 JAN 2020 (BAST NO. 124)	
3	BPHN (Kemenkumham)	275.152,20	3.984.479.008,20	516.989	7.486.518.208	14.481	DITANDATANGANI	409288	JKT V	SUDAH PENGESAHAN TGL. 13 FEB 2020 (BAST NO. 123)	
4	Sektor swasta (Law Firms)	1.902,00	27.542.862,00								
5	Komnas HAM	57.751,00	836.292.231,00				DITANDATANGANI				
	Total	5.142.983,72	74.475.547.249,32	4.995.320,610	7.556.917.224,190						
PROGRAM CEGAH											
1	Inspektorat Jenderal (Kemenkumham)	60.232,53	872.227.247,38	121.100,74	1.753.659.860	14.481	DITANDATANGANI	409241	JKT V	SUDAH PENGESAHAN TGL. 12 FEB 2020 (BAST NO. 119)	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2	Sekretariat Jenderal (Kemenkumham)	29.494,61	427.111.495,10	125.010,94	1.810.283.440	14.481	DITANDATANGANI	404233	JKT V	SUDAH PENGESAHAN TGL. 21 JAN 2020 (BAST NO. 118)	
	Non Kemenkumham										
3	Kejaksaan Agung	147.391,00	2.134.369.071,00	262.330,15	3.798.802.962	14.481		005016	JKT V		
4	Komisi Yudisial (KY)	43.806,70	634.364.822,70								
5	Kantor Staf Presiden (KSP)	394.492,47	5.712.645.515,99	354.343,66	5.131.250.560	14.481		400847	JKT I		
6	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	1.048.719,25	15.186.503.392,64	2.094.037,30	30.323.754.098	14.481	DITANDATANGANI	626397	JKT VI	SUDAH PENGESAHAN OLEH KPK (BAST NO. 117)	
7	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	87.671,59	1.269.572.265,10	295.521,97	4.279.453.687	14.481		450491	JKT IV		
8	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	290.758,22	4.210.469.783,82	386.080,54	5.396.633.843	13.978	DITANDATANGANI	003024	JKT VII		
9	Inspektorat Jenderal (Kementerian Kesehatan)	144.339,49	2.090.180.198,13	278.894,01	4.038.664.177	14.481		415366	JKT VII		
10	Inspektorat Jenderal (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)	201.527,95	2.918.326.301,87	394.985,24	5.719.781.301	14.481		414710	JKT III		
11	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)	551.316,04	7.983.607.585,48	1.028.908,19	14.899.619.506	14.481		427950	JKT I		
12	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	173.085,28	2.506.447.939,68	553.588,39	8.016.513.516	14.481	DITANDATANGANI	015416	JKT IV		
13	Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	105.083,32	1.521.711.527,96	271.138,40	3.926.355.099	14.481	DITANDATANGANI	439624	JKT VII		
14	Komisi Informasi Publik (KIP)	173.026,29	2.505.593.705,49	329.699,26	4.774.375.032	14.481	DITANDATANGANI	677382	JKT I		
15	Mahkamah Agung (MA)	1.074.808,88	15.564.307.318,88					005.01			
	a. Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan			188.753,79	2.638.400.477	13.978		610378	023 Bogor		

[illegible]



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	Pemerintah Daerah Papua dan CSOs/NGOs			3.671.154,26	53.161.984.839	14.481	DITANDATANGANI	404233	JKT V	SUDAH PENGESAHAN OLEH SETJEN KEMENKUMHAM TGL. 02 JAN 2020 (BAST NO. 102)	Tidak memiliki kode satker sehingga bast dan pengesahannya menjadi tanggung jawab dari Kemenkumham selaku focal point.
Total		-	-	3.671.154,26	53.161.984.839,00						
PROGRAM HARMONI											
1	Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Pemerintah Daerah dan CSOs/NGOs			984.158,00	14.251.591.998	14.481	DITANDATANGANI	404233	JKT V	SUDAH PENGESAHAN OLEH SETJEN KEMENKUMHAM TGL. 02 JAN 2020 (BAST NO. 103)	

DAFTAR JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 DESEMBER 2019 (Unduh Data per Tanggal 19 April 2020)

No	Kode	Nama Satker	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL						
1	013.01.404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	133211	4.580.000.000,00	0,00	Hibah
2	013.01.408720	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	133211	40.000.000,00	0,00	Hibah
3	013.01.408824	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	131211	1.160.281,00	0,00	Hibah
4	013.01.408824	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	131211	388.000.000,00	0,00	Hibah



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5	013.01.408849	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	132211	1.396.617.220,00	0,00	Hibah
6	013.01.409175	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	131211	312.500.000,00	0,00	Hibah
7	013.01.409226	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	131211	55.000.000,00	0,00	Hibah
8	013.01.409226	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	133211	92.862.234,00	0,00	Hibah
9	013.01.667786	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	131211	449.136.000,00	0,00	Hibah
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM						
1	013.03.099297	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	133211	0,00	18.860.000,00	Beban ekstrakomptabel
2	013.03.408432	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	132211	26.851.000,00	0,00	Salah penggunaan akun belanja
3	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	132211	0,00	1.380.600.000,00	Salah penggunaan akun belanja
4	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	133211	121.216.480,00	0,00	
5	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	133211	96.250.000,00	0,00	
6	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	133211	97.498.000,00	0,00	
7	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	133211	2.802.346.906,00	0,00	
8	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	133211	2.802.346.907,00	0,00	
9	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	117911	0,00	49.775.000,00	
10	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	132211	0,00	1.459.149.995,00	
11	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	132211	49.775.000,00	0,00	
12	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	132211	0,00	2.023.000.000,00	
DITJEN PEMASYARAKATAN						
1	013.05.109106	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERMISAN	133211	59.950.000,00	0,00	Hibah
2	013.05.109107	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	133211	60.000.000,00	0,00	Hibah
3	013.05.109108	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BESI	133211	58.000.000,00	0,00	Hibah
4	013.05.109109	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEMBANG KUNING	117911	22.671.000,00	0,00	Hibah Perlengkapan sel lapas kembang kuning dan penyediaan kasur dan Kipas Angin



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

5	013.05.109109	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEMBANG KUNING	133211	25.492.500,00	0,00	Hibah
6	013.05.109109	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEMBANG KUNING	132211	145.005.500,00	0,00	Hibah Sumur Bor Artesis kedalaman 100 meter
7	013.05.109118	RUMAH TAHANAN NEGARA PALEMBANG	133211	300.000.000,00	0,00	Hibah
8	013.05.109140	RUMAH TAHANAN NEGARA TANAH GROGOT	133211	322.474.000,00	0,00	Hibah Gedung Mesjid
9	013.05.352606	LPKA Bengkulu, Provinsi Bengkulu	132211	0,00	41.421.600,00	Beban ekstrakomptabel
10	013.05.404271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG	133211	80.543.500,00	0,00	Hibah
11	013.05.404271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG	132211	180.580.000,00	0,00	Hibah dari koperasi
12	013.05.404378	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN	132211	4.630.000,00	0,00	Salah penggunaan akun belanja
13	013.05.404378	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN	117911	0,00	4.630.000,00	
14	013.05.404441	LAPAS MAJALENGKA	133211	137.671.258,00	0,00	Hibah GB
15	013.05.404460	LAPAS INDRAMAYU	131211	816.250.000,00	0,00	hibah tanah dan bangunan milik pemkab indramayu kepada kemenkumham
16	013.05.404460	LAPAS INDRAMAYU	133211	1.429.845.000,00	0,00	Hibah
17	013.05.404466	BALAI PEMASYARAKATAN BOGOR	132211	0,00	1.900.000,00	Beban ekstrakomptable dalam 1 kontrak
18	013.05.404497	LAPAS CIANJUR	132211	422.350.000,00	0,00	Hibah
19	013.05.404497	LAPAS CIANJUR	133211	130.380.000,00	0,00	Hibah
20	013.05.404497	LAPAS CIANJUR	132211	54.020.000,00	0,00	Hibah
21	013.05.404523	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG	132211	35.000.000,00	0,00	Hibah Langsung bentuk Barang berupa sarana prasarana Pembinaan WBP
22	013.05.404548	RUMAH TAHANAN NEGARA RANGKAS BITUNG	132211	100.000.000,00	0,00	Hibah bangunan Tempat Ibadah dan AC
23	013.05.404579	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK WANITA TANGERANG	133211	586.719.500,00	0,00	Hibah Langsung Dalam Bentuk Gedung Gereja
24	013.05.404642	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	132211	19.000.000,00	0,00	Hibah
25	013.05.404642	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	132211	20.000.000,00	0,00	Hibah
26	013.05.404642	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	132211	87.500.000,00	0,00	Hibah
27	013.05.404642	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	133211	400.000.000,00	0,00	Hibah



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

28	013.05.404642	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	132211	27.795.000,00	0,00	Hibah
29	013.05.404718	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG	133211	258.591.500,00	0,00	Hibah
30	013.05.404724	BALAI PEMASYARAKATAN PEKALONGAN	132211	0,00	2.227.000,00	Extra Komptable PM
31	013.05.404821	RUMAH TAHANAN NEGARA PURWOREJO	132211	8.875.000,00	0,00	Hibah
32	013.05.404852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	133211	64.704.186,00	0,00	Hibah
33	013.05.404925	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SRAGEN	132211	140.000.000,00	0,00	Hibah
34	013.05.404950	LAPAS KLATEN	133211	566.409.732,00	0,00	Hibah
35	013.05.404950	LAPAS KLATEN	132211	0,00	10.500.000,00	Hibah yang membentuk aset ekstrakomptabel
36	013.05.404950	LAPAS KLATEN	132211	10.500.000,00	0,00	
37	013.05.405022	LAPAS CILACAP	132211	40.950.000,00	0,00	Hibah
38	013.05.405022	LAPAS CILACAP	133211	173.967.100,00	0,00	Hibah
39	013.05.405022	LAPAS CILACAP	133211	37.227.500,00	0,00	Hibah
40	013.05.405311	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMPANG	132211	0,00	15.500.000,00	Pembelian PM dibawah nilai kapitalisasi dalam 1 kontrak
41	013.05.405373	LAPAS LUMAJANG	132211	385.000.000,00	0,00	Hibah
42	013.05.405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	133211	70.000.000,00	0,00	Hibah Penambahan volume aula Bimpas/ Musholla
43	013.05.405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	132211	37.000.000,00	0,00	Hibah
44	013.05.405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	133211	126.975.000,00	0,00	Belanja pemeliharaan menambah nilai aset
45	013.05.405528	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOK SEUMAWE	117911	118.050.000,00	0,00	Hibah
46	013.05.405590	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LANGSA	133211	150.000.000,00	0,00	Hibah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Lingkungan
47	013.05.405622	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA BLANGKAJEREN	133211	195.686.000,00	0,00	Hibah Pembangunan pagar pada cabrut Blangkejeren
48	013.05.405647	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA CALANG	132211	12.950.000,00	0,00	Hibah langsung barang dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
49	013.05.405647	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA CALANG	133211	41.784.000,00	0,00	Hibah



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

50	013.05.405653	RUMAH TAHANAN NEGARA TAPAKTUAN	117911	12.000.000,00	0,00	Hibah
51	013.05.405817	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEBINGTINGGI DELI	133211	209.675.600,00	0,00	Hibah
52	013.05.405848	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMATANG SIANTAR	133211	592.223.000,00	0,00	Hibah
53	013.05.406174	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	133211	0,00	14.810.000,00	Beban ekstrakomptabel
54	013.05.406174	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	133211	920.524.120,00	0,00	Hibah
55	013.05.406174	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	132211	20.000.000,00	0,00	Hibah
56	013.05.406262	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PANGARAYAN	133211	197.631.000,00	0,00	Hibah
57	013.05.406287	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG BALAI KARIMUN	133211	50.000.000,00	0,00	Hibah
58	013.05.406287	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG BALAI KARIMUN	133211	108.305.000,00	0,00	Hibah
59	013.05.406287	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG BALAI KARIMUN	133211	92.290.000,00	0,00	Hibah
60	013.05.406287	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG BALAI KARIMUN	133211	55.500.000,00	0,00	Hibah
61	013.05.406287	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG BALAI KARIMUN	133211	497.420.000,00	0,00	Hibah
62	013.05.406307	LAPAS MUARA BULIAN	133211	1.104.953.444,00	0,00	Hibah
63	013.05.406344	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	132211	424.885.200,00	0,00	Hibah
64	013.05.406344	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	133211	99.741.000,00	0,00	Hibah
65	013.05.406344	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	131211	75.000.000,00	0,00	Hibah
66	013.05.406432	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA PAGAR ALAM	131211	208.150.000,00	0,00	Hibah
67	013.05.406611	RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	133211	68.000.000,00	0,00	Hibah
68	013.05.406658	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG	133211	286.795.543,00	0,00	Hibah
69	013.05.406715	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN	133211	189.880.000,00	0,00	Hibah
70	013.05.406715	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN	132211	99.017.000,00	0,00	Hibah
71	013.05.406721	LAPAS SAMPIT	132211	222.008.334,00	0,00	Hibah langsung barang dari Pemkab Kotim



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

72	013.05.406721	LAPAS SAMPIT	133211	275.515.000,00	0,00	Hibah langsung barang dari Pemkab Kotim
73	013.05.406740	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	132211	6.098.000,00	0,00	Salah penggunaan akun belanja
74	013.05.406740	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	117911	0,00	6.098.000,00	
75	013.05.406752	RUMAH TAHANAN NEGARA PELAIHARI	133211	1.596.280.000,00	0,00	Hibah
76	013.05.406761	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTABARU	132211	151.178.500,00	0,00	Hibah
77	013.05.406761	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTABARU	133211	22.135.700,00	0,00	Hibah
78	013.05.406783	RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	133211	198.000.000,00	0,00	Hibah
79	013.05.406843	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SAMARINDA	132211	164.420.000,00	0,00	Hibah Barang (Mobil) Milik Daerah Pemerintah Kota Samarinda
80	013.05.406984	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	133211	120.000.000,00	0,00	Hibah
81	013.05.406984	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	133211	0,00	15.000.000,00	Beban ekstrakomptabel
82	013.05.407072	BALAI PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	133211	29.160.000,00	0,00	Belanja pemeliharaan menambah nilai aset
83	013.05.407081	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	132211	76.000.000,00	0,00	
84	013.05.407081	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	133211	32.000.000,00	0,00	
85	013.05.407230	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	133211	0,00	20.205.000,00	Hibah yang membentuk aset ekstrakomptabel
86	013.05.407230	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	132211	27.000.000,00	0,00	Hibah
87	013.05.407230	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	133211	20.205.000,00	0,00	Hibah yang membentuk aset ekstrakomptabel
88	013.05.407525	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	133211	2.421.551.877,00	0,00	Hibah
89	013.05.407622	RUMAH TAHANAN NEGARA SELONG	132211	18.000.000,00	0,00	Hibah
90	013.05.408454	RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	131211	263.670.000,00	0,00	hibah langsung barang berupa tanah kepada Rutan Dumai



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

91	013.05.408454	RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	133211	0,00	33.260.000,00	Beban ekstrakomptabel
92	013.05.408454	RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	133211	123.300.000,00	0,00	Hibah Penambahan Ruang Tunggu dan Atap Ruang Kunjungan Rutan Dumai
93	013.05.408454	RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	133211	382.490.000,00	0,00	Hibah
94	013.05.409151	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	132211	13.800.000,00	0,00	Hibah
95	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	132211	547.080.210,00	0,00	Hibah PM dari ICITAP
96	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	132211	16.150.000,00	0,00	Salah penggunaan akun belanja
97	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	132211	2.275.486,00	0,00	koreksi AT non revaluasi
98	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	132211	0,00	858.000,00	Salah penggunaan akun belanja
99	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	132211	0,00	4.057.743.280,00	
100	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	132211	0,00	982.418.200,00	
101	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	132211	0,00	144.518.528,00	
102	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	133211	8.154.543.895,00	0,00	
103	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	133211	0,00	12.887.600,00	
104	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	133211	0,00	239.969.000,00	Belanja Aset Lainnya menggunakan akun GB
105	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	117911	4.057.743.280,00	0,00	Salah penggunaan akun belanja
106	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	132211	0,00	3.237.792.755,00	Beban ekstrakomptabel
107	013.05.417852	RUMAH TAHANAN NEGARA PANDEGLANG	132211	38.641.000,00	0,00	Hibah
108	013.05.417852	RUMAH TAHANAN NEGARA PANDEGLANG	133211	188.552.000,00	0,00	Hibah
109	013.05.418334	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	132211	8.500.000,00	0,00	Hibah
110	013.05.418334	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	132211	6.039.000,00	0,00	Hibah



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

111	013.05.418334	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	132211	0,00	1.970.000,00	Beban ekstrakomptabel
112	013.05.418334	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	132211	1.220.000,00	0,00	Hibah
113	013.05.418334	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	132211	15.840.000,00	0,00	Hibah
114	013.05.418334	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	132211	6.200.000,00	0,00	Hibah
115	013.05.418334	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	132211	12.537.000,00	0,00	Hibah
116	013.05.418338	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	132211	2.200.000,00	0,00	Hibah
117	013.05.418338	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	132211	65.524.000,00	0,00	Hibah
118	013.05.418338	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	117911	10.825.000,00	0,00	Hibah
119	013.05.418340	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	132211	23.100.000,00	0,00	Hibah
120	013.05.418340	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	132211	0,00	36.220.000,00	Beban ekstrakomptabel
121	013.05.418340	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	133211	575.000,00	0,00	Hibah
122	013.05.418340	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	132211	75.645.000,00	0,00	Hibah
123	013.05.418361	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	133211	1.101.500,00	0,00	Pengembalian belanja perjalanan yang mengoreksi nilai KDP
124	013.05.418361	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	133211	1.505.300,00	0,00	Hibah
125	013.05.418365	Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung	133211	58.465.950,00	0,00	Hibah
126	013.05.497676	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	132211	50.900.000,00	0,00	Hibah
127	013.05.497702	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN	133211	58.000.000,00	0,00	Hibah
128	013.05.567869	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK	133211	52.981.000,00	0,00	Belanja pemeliharaan menambah nilai aset
129	013.05.626136	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK, MUARA BULIAN, JAMBI	131211	30.600.000,00	0,00	Hibah
130	013.05.652916	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	133211	59.950.000,00	0,00	Hibah
131	013.05.652983	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	132211	80.000.000,00	0,00	Hibah
132	013.05.652983	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	132211	13.560.000,00	0,00	Hibah
133	013.05.652983	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	133211	80.000.000,00	0,00	Hibah
134	013.05.653000	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN	133211	58.300.000,00	0,00	Hibah
135	013.05.653051	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	132211	5.900.000,00	0,00	Belanja pemeliharaan menambah nilai aset
136	013.05.653065	BALAI PEMASYARAKATAN KUTACANE	132211	26.500.000,00	0,00	Hibah
137	013.05.653065	BALAI PEMASYARAKATAN	117911	10.250.000,00	0,00	Hibah



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

		KUTACANE				
138	013.05.653133	BALAI PEMASYARAKATAN WONOSARI	132211	0,00	6.975.000,00	Pembelian aset dibawah nilai kapitalisasi dalam 1 kontrak
139	013.05.653133	BALAI PEMASYARAKATAN WONOSARI	133211	100.000.000,00	0,00	Hibah bangunan Tempat Ibadah dan AC
140	013.05.653133	BALAI PEMASYARAKATAN WONOSARI	132211	10.400.000,00	0,00	Hibah AC
141	013.05.653442	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI	133211	22.000.000,00	0,00	Hibah Bangunan tempat ibadah
142	013.05.653442	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI	133211	0,00	22.000.000,00	Hibah Bangunan tempat ibadah yang nilainya dibawah kapitalisasi
143	013.05.653442	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI	132211	3.596.945,00	0,00	Hibah
144	013.05.653442	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI	132211	2.500.000,00	0,00	Hibah AC
145	013.05.683313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNG SUGIH	133211	40.000.000,00	0,00	Hibah
146	013.05.683512	RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG KELAS D	132211	0,00	4.680.000,00	Beban ekstrakomptabel
147	013.05.683636	LAPAS KELAS III CILEGON PROPINSI BANTEN	133211	177.000.000,00	0,00	Hibah
148	013.05.683643	LAPAS KELAS III BONTANG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	133211	183.928.996,00	0,00	Hibah Barang kpd Lapas Klas III Bontang berupa pembangunan pagar kantor Lapas Bontang
149	013.05.683643	LAPAS KELAS III BONTANG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	133211	230.539.825,00	0,00	Hibah Barang kpd Lapas Klas III Bontang berupa pemeliharaan sarana dan prasarana kantor LAPAS
150	013.05.683643	LAPAS KELAS III BONTANG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	132211	212.446.000,00	0,00	Hibah Barang kpd Lapas Klas III Bontang berupa pembangunan Sumur Bor
151	013.05.683643	LAPAS KELAS III BONTANG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	132211	0,00	23.760.000,00	Beban ekstrakomptabel
152	013.05.683643	LAPAS KELAS III BONTANG PROPINSI	132211	197.450.000,00	0,00	Hibah



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		KALIMANTAN TIMUR				
153	013.05.683732	RUTAN KELAS IIB PEKAN BARU PROPINSI RIAU	133211	300.000.000,00	0,00	Hibah
154	013.05.683732	RUTAN KELAS IIB PEKAN BARU PROPINSI RIAU	132211	20.000.000,00	0,00	Hibah
155	013.05.684000	Rutan Kelas II B Depok	132211	0,00	52.874.000,00	Hibah PM yang nilainya dibawah kapitalisasi
156	013.05.684000	Rutan Kelas II B Depok	132211	72.627.374,00	0,00	Hibah barang berupa sarana dan prasarana pelayanan publik
157	013.05.406250	LAPAS KELAS IIB SELAT PANJANG	131111	4.574.209.380,00	0,00	Hibah berupa tanah
158	013.05.407902	LAPAS BENGKULU	132111	39.655.000,00	0,00	Hibah berupa peralatan dan mesin
DITJEN IMIGRASI						
1	013.06.109156	KANTOR IMIGRASI KELAS II KUALA TUNGKAL	132211	2.650.000,00	0,00	Hibah
2	013.06.109156	KANTOR IMIGRASI KELAS II KUALA TUNGKAL	132211	3.800.000,00	0,00	Hibah
3	013.06.109156	KANTOR IMIGRASI KELAS II KUALA TUNGKAL	131211	125.000.000,00	0,00	Hibah
4	013.06.109159	KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMBAGAPURA	133211	8.067.406,00	0,00	Hibah
5	013.06.407933	KANTOR IMIGRASI KELAS I JAKARTA PUSAT	133211	407.353.754,00	0,00	Hibah
6	013.06.407973	KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG	132211	0,00	23.750.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
7	013.06.407973	KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG	132211	0,00	27.852.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
8	013.06.407989	KANTOR IMIGRASI KELAS II CILACAP	132211	0,00	33.000.000,00	Jurnal atas belanja aset yang menimbulkan nilai beban aset ekstrakomptabel berupa peralatan dan mesin
9	013.06.408009	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SURABAYA	132211	0,00	11.988.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
10	013.06.408083	KANTOR IMIGRASI KELAS II DUMAI	132211	0,00	8.991.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel



*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

11	013.06.408083	KANTOR IMIGRASI KELAS II DUMAI	132211	0,00	750.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
12	013.06.408103	KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNG PINANG	133211	400.000.000,00	0,00	Hibah
13	013.06.408128	KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAKANG PADANG	132211	0,00	2.970.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
14	013.06.408134	KANTOR IMIGRASI KELAS I JAMBI	132211	0,00	93.864.700,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
15	013.06.408159	KANTOR IMIGRASI KELAS I PANGKAL PINANG	133211	6.552.185,00	0,00	Hibah
16	013.06.408196	KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN	133211	1.710.000,00	0,00	Hibah
17	013.06.408196	KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN	133211	660.000,00	0,00	Hibah
18	013.06.408196	KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN	133211	4.600.000,00	0,00	Hibah
19	013.06.408196	KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN	133211	339.000,00	0,00	Hibah
20	013.06.408222	KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR	132211	0,00	21.465.400,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
21	013.06.408222	KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR	132211	0,00	1.980.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
22	013.06.408222	KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR	132211	0,00	3.920.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
23	013.06.408448	KANTOR IMIGRASI KELAS I PALANGKARAYA	132211	0,00	14.850.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
24	013.06.408485	KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMBILAHAN	133211	3.172.000,00	0,00	Hibah
25	013.06.408573	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDA ACEH	132211	0,00	2.996.400,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
26	013.06.408598	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANJARMASIN	133211	10.000.000,00	0,00	Koreksi atas Pengembalian Belanja Modal
27	013.06.408598	KANTOR IMIGRASI KELAS I BANJARMASIN	133211	10.486.323,00	0,00	Hibah
28	013.06.408624	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM	132211	336.000.000,00	0,00	Hibah



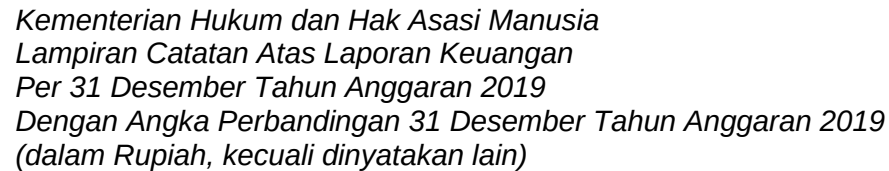
*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

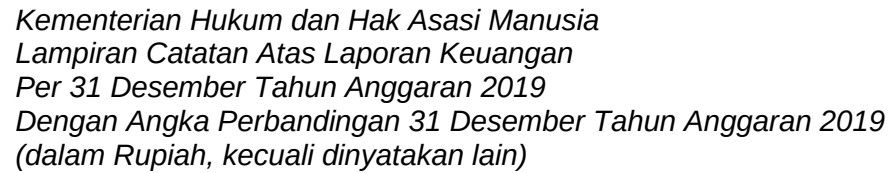
29	013.06.408875	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	132211	0,00	9.570.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
30	013.06.408953	KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNG PERAK	132211	0,00	32.500.600,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
31	013.06.408981	KANTOR IMIGRASI KELAS II SIBOLGA	132211	0,00	15.600.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
32	013.06.409108	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NGURAH RAI	117911	0,00	544,00	Koreksi Nilai Persediaan
33	013.06.409108	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NGURAH RAI	117911	0,00	400,00	Koreksi Nilai Persediaan
34	013.06.409108	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NGURAH RAI	132211	0,00	2.195.600,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
35	013.06.409108	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NGURAH RAI	132211	0,00	97.200.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
36	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	117911	0,00	1.758,00	Pembulatan belanja dokim
37	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	132211	0,00	2.085.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
38	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	132211	4.125.000.000,00	0,00	Hibah
39	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	117911	1.571.623.175,00	0,00	Hibah
40	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	117911	706.270,00	0,00	Hibah
41	013.06.418937	KANTOR IMIGRASI KELAS III PALOPO	131211	47.652.804,00	0,00	Hibah
42	013.06.652283	KANTOR IMIGRASI KELAS I SERANG	132211	99.500.000,00	0,00	Hibah
43	013.06.652297	KANTOR IMIGRASI KELAS II SUKABUMI	131211	561.298.096,00	0,00	Hibah
44	013.06.652408	KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA	133211	2.855.300,00	0,00	Hibah
45	013.06.664565	KANTOR IMIGRASI KELAS II MUARA ENIM	131211	594.000.000,00	0,00	Kesalahan Penjurnalan
46	013.06.664612	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	132211	0,00	36.289.000,00	Jurnal atas belanja aset yang menimbulkan nilai beban aset ekstrakomptabel berupa peralatan dan mesin



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

47	013.06.664629	RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG	132211	0,00	45.750.000,00	Jurnal atas belanja aset yang menimbulkan nilai beban aset ekstrakomptabel berupa peralatan dan mesin
48	013.06.664629	RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG	132211	0,00	820.000,00	Jurnal atas belanja aset yang menimbulkan nilai beban aset ekstrakomptabel berupa peralatan dan mesin
49	013.06.664654	RUMAH DETENSI IMIGRASI BALIKPAPAN	132211	0,00	990.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
50	013.06.664675	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	132211	0,00	41.250.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
51	013.06.683039	KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI	132211	0,00	62.370.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
52	013.06.683039	KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI	133211	31.864.962.000,00	0,00	Hibah
53	013.06.683462	KANTOR IMIGRASI KELAS III KEDIRI	133211	21.420.000,00	0,00	Hibah
54	013.06.683462	KANTOR IMIGRASI KELAS III KEDIRI	133211	368.808.459,00	0,00	Hibah
55	013.06.683462	KANTOR IMIGRASI KELAS III KEDIRI	131211	1.330.000.000,00	0,00	Hibah
56	013.06.683533	KANTOR IMIGRASI KELAS III TAKENGON	132211	0,00	23.250.000,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL						
1	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	132211	0,00	124.533.769,00	Beban Aset Ekstrakomptabel
2	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	132211	51.865.000,00	0,00	Salah penggunaan akun belanja
3	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	117911	10.131,00	0,00	Koreksi nilai persediaan
4	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	132211	29.705.500,00	0,00	Salah penggunaan akun belanja
5	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	132211	59.815.800,00	0,00	Salah penggunaan akun belanja
6	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	522191	20.870.993.354,00	0,00	Hibah luar negeri bentuk jasa dari JICA
7	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	133211	1.721.471.016,00	0,00	Pengembalian atas pekerjaan yang tidak selesai
8	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	133211	0,00	1.721.471.016,00	

[illegible]

[illegible]



PERUBAHAN KEBIJAKAN PNBP TA 2020 TERKAIT DAMPAK WABAH VIRUS CORONA

1. Kebijakan Saudi Arabia per tanggal 2 Februari 2020

Berdasarkan Siaran Pers KJRI Jeddah Nomor 1090/PSP/2/2020 Tentang Penangguhan Masuk Jemaah Umrah ke Arab Saudi bahwa diantaranya:

- a. Penangguhan sementara akses masuk warga asing ke wilayah Arab Saudi baik untuk tujuan umrah dan ziarah, termasuk Kawasan Masjid Nabawi di Madinah
- b. Menunda masuknya turis ke Arab Saudi yang berasal dari negara-negara dengan kasus virus corona (COVID-19) yang oleh Otoritas Kesehatan Arab Saudi dinilai berbahaya.
- c. Arab Saudi juga menangguhkan penangguhan kartu identitas nasional oleh warga negara Saudi dan warga negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk melakukan perjalanan dari dan ke Arab Saudi. Pengecualian dikhususkan bagi warga Saudi yang beradi di luar negeri dan ingin Kembali ke negaranya serta warga negara GCC yang saat ini berada di Arab Saudi dan ingin pulang ke negaranya.
- d. Sebagai Tindakan pencegahan, Pemerintah Arab Saudi memberlakukan system verifikasi terhadap para pemegang ID Nasional Arab Saudi di pintu perlintasan berdasarkan arah (negara) kedatangan mereka seblum memasuki Wilayah Arab Saudi serta memberlukan prosedur pemeriksaan Kesehatan terhadap mereka.
- e. Pemerintah Arab Saudi menegaskan, prosedur tersebut hanya bersifat sementara dan akan terus dievaluasi oleh pihak berwenang. Ketentuan ini mulai berlaku Kamis, 2 Februari 2020.
- f. Pemerintah Arab Saudi Kembali menegaskan dukungannya terhadap semua upaya dunia internasional untuk menekan penyebaran virus tersebut.
- g. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi meminta warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke negara-negara terinfeksi virus corona.

2. Kebijakan untuk Warga Negara Tiongkok per tanggal 5 Februari 2020

- a. Penghentian sementara pemberian Bebas Visa Kunjungan dan Visa diberikan bagi Warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan Orang Asing dari Negara Republik Rakyat Tiongkok yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dapat diberikan kepada setiap Orang Asing yang mengajukan permohonan Visa kepada Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan



Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memenuhi persyaratan:

- 1) keterangan sehat yang menyatakan bebas virus corona dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris;
- 2) telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah negara Republik Rakyat Tiongkok yang bebas virus corona;
- 3) pernyataan bersedia:
 - masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia; atau
 - singgah/transit 14 (empat belas) hari di negara lain yang tidak terjangkit virus corona sebelum masuk wilayah Republik Indonesia.

c. Bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok yang mengajukan permohonan Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas di perwakilan Republik Indonesia di negara lain yang tidak terjangkit virus corona dengan memenuhi persyaratan:

- 1) keterangan sehat yang menyatakan bebas virus corona dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris;
- 2) pernyataan bersedia berada 14 (empat belas) hari di wilayah yang bebas virus corona sebelum masuk wilayah Republik Indonesia; dan
- 3) pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.

d. Izin Tinggal Keadaan terpaksa

Izin Tinggal keadaan terpaksa dapat diberikan kepada:

- 1) warga negara Republik Rakyat Tiongkok;
- 2) Orang Asing pemegang izin tinggal di negara Republik Rakyat Tiongkok; atau
- 3) suami atau istri atau anak dari warga negara Republik Rakyat Tiongkok.

Izin Tinggal keadaan terpaksa tersebut diberikan dalam hal adanya wabah virus corona yang ditetapkan oleh WHO (World Health Organization); dan tidak adanya alat angkut yang membawa keluar wilayah Negara Republik Indonesia ke negara Republik Rakyat Tiongkok.

Izin Tinggal keadaan terpaksa tidak diberikan kepada pemegang Izin Tinggal kunjungan atau Izin Tinggal terbatas yang masih berlaku dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin Tinggal keadaan terpaksa diajukan oleh Penjamin atau Orang Asing melalui permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan dengan



melampirkan paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, Visa; dan/atau Izin Tinggal yang dimiliki.

Izin Tinggal Keadaan terpaksa dinyatakan tidak berlaku bagi Orang Asing yang telah memperoleh perpanjangan Izin Tinggal Terbatas.

e. Izin Masuk Kembali dalam Keadaan Terpaksa

Orang Asing dari negara Republik Rakyat Tiongkok pemegang Izin Tinggal tetap yang masa berlaku izin masuk kembalinya telah berakhir, dapat diberikan izin masuk kembali dalam keadaan terpaksa melalui permohonan kepada Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia. Permohonan dapat diajukan dengan melampirkan persyaratan:

- 1) keterangan sehat yang menyatakan bebas virus corona dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris;
- 2) pernyataan bersedia untuk:
 - masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia; atau
 - singgah/transit 14 (empat belas) hari di negara lain yang tidak terjangkit virus corona sebelum masuk wilayah Republik Indonesia.

f. Penjamin dapat mengajukan perpanjangan Izin Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap yang berada di negara Republik Rakyat Tiongkok kepada Kepala Kantor Imigrasi tanpa kehadiran yang bersangkutan dengan melampirkan rekomendasi atau notifikasi dari instansi yang berwenang. Peneraan perpanjangan Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap dilakukan setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia

g. Orang Asing Pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis APEC dan TKA serta Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan/atau Izin Tinggal Tetap yang memiliki Izin Masuk Kembali serta Orang Asing pemegang Izin Tinggal Dinas dan/atau Izin Tinggal Diplomatik yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk Wilayah Indonesia, tidak diberikan izin masuk.

3. Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Direktorat Jenderal Imigrasi per tanggal 06 Maret 2020

a. Untuk Pejabat dan Pelaksana Pelayanan

- 1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);



- 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang;
 - 4) Melakukan koordinasi kepada stakeholder dan penjamin orang asing terkait substansi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona;
 - 5) Memperhatikan surat Direktur Jenderal Protokol Dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Nomor : 00657/WN/03/2020/66/10 tanggal 05 Maret 2020 Perihal Permohonan tindak lanjut kebijakan pendatang dari Korea Selatan, Italia dan Iran.
- b. Untuk Atase/Staf Teknis Imigrasi dan Pejabat Konsuler pada Perwakilan RI:
- 1) Di RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran:
 - a) Menolak semua permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas kepada Orang Asing yang pernah berada dan/atau berkunjung di Wilayah RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari terakhir.
 - b) Memberikan Izin Masuk Kembali dalam keadaan terpaksa secara manual yang berlaku 1 (satu) kali perjalanan, kepada Orang Asing yang berkunjung ke Wilayah RRT pemegang Izin Tinggal Tetap yang Izin Masuk Kembalinya habis masa berlaku dengan melampirkan surat keterangan sehat yang menyatakan bebas Virus Corona (Covid-19) dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris; dan pernyataan bersedia untuk masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia atau singgah / transit 14 (empat belas) hari di Negara lain yang tidak terjangkit Virus Corona (Covid-19) sebelum masuk wilayah Republik Indonesia.
 - c) Memberikan catatan pengesahan penambahan masa berlaku visa pada paspor orang asing yang masa berlaku visanya telah habis.
 - d) Pemberian catatan pengesahan penambahan masa berlaku visa sebagaimana dimaksud pada huruf c) diberikan hanya bagi visa yang dikeluarkan 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal 5 Februari 2020.
 - 2) Di Luar RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran
Dalam hal Warga Negara RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran mengajukan permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas pada Perwakilan RI di luar Negara RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran, tetap dapat dilayani sepanjang



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020, dengan memperhatikan data WHO yang menyatakan sebagian besar negara telah terjangkit Virus Corona (Covid-19).

c. Untuk Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi:

- 1) Memberikan tanda masuk kepada orang asing pemegang Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan dan Izin Masuk Kembali, baik yang dikeluarkan oleh Perwakilan Indonesia di RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran atau oleh Perwakilan Indonesia di luar 4 (empat) negara tersebut setelah mendapat persetujuan dari pejabat Karantina Kesehatan.
- 2) Memberikan tanda masuk kepada orang asing Pemegang APEC Bussines Travel Card (ABTC) yang datang dari RRT, setelah:
 - a) menunjukan surat keterangan sehat yang menyatakan bebas virus corona dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris;
 - b) mendapat persetujuan dari pejabat Karantina Kesehatan.
- 3) Memberikan tanda masuk kepada Warga Negara RRT, Iran, Italia dan Korea Selatan yang datang dari luar negaranya, dengan pertimbangan yang bersangkutan telah tinggal di luar Negara RRT, Iran, Italia dan Korea Selatan yang tidak terjangkit/terpapar Virus Corona (Covid-19) untuk transit lebih dari kurun waktu 14 (empat belas) hari terakhir.
- 4) Memberikan tanda masuk kepada orang asing pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas dari RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran setelah menunjukkan surat keterangan sehat yang menyatakan bebas virus corona (Covid-19).
- 5) Memberikan tanda masuk manual (segi enam) kepada orang asing pemegang Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas dari RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran yang telah habis masa berlakunya dengan menunjukan kartu diplomatik atau kartu tanda pengenal bertugas pada Perwakilan asing di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan surat keterangan sehat yang menyatakan bebas Virus Corona (Covid-19).
- 6) Menolak masuk orang asing yang keluar dari wilayah RRT, Iran, Italia dan Korea Selatan melalui autogate dan tidak tertera cap keberangkatan pada paspor kebangsaan / dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, kecuali dapat menunjukan alat pendukung berupa: Boarding Pass saat meninggalkan wilayah



RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran, serta surat keterangan sehat yang menyatakan bebas virus corona (Covid-19) dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris.

- 7) Penolakan masuk terhadap orang asing sebagaimana dimaksud pada angka 6) tersebut diatas berlaku bagi crew yang melakukan penerbangan lanjutan dari RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran dan terbukti pernah berada dan/atau berkunjung di Wilayah RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari.
- 8) Penolakan pemberian tanda masuk bagi orang asing ke wilayah Indonesia dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

d. Untuk Kepala Kantor dan Pejabat Imigrasi yang ditunjuk:

- 1) Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa
 - a) Menerima permohonan Izin Tinggal keadaan terpaksa dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp0,00 (nol rupiah) dari warga negara RRT, orang asing pemegang Izin Tinggal di negara RRT, atau suami atau isteri atau anak dari warga negara RRT dengan melampirkan persyaratan: Surat permohonan dari penjamin, Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, Visa; dan/atau Izin Tinggal yang dimiliki.
 - b) Meneruskan permohonan Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) dan menyampaikan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia U.p. Kepala Divisi Keimigrasian.
 - c) Meneruskan permohonan Izin Tinggal keadaan terpaksa melaui surat elektronik (e-mail) dalam hal tidak dapat dilaksanakan melalui Simkim.
 - d) Memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali perpanjangan selama masih terjadi wabah Virus Corona (Covid-19).
 - e) Mengenakan biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi orang asing pemohon Izin Tinggal keadaan



terpaksa yang tinggal di Indonesia melampaui masa berlaku Izin Tinggal nya.

- f) Memastikan pemegang Izin Tinggal keadaan terpaksa tidak melakukan kegiatan bekerja.

2) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (Itas) atau Izin Tinggal Tetap (Itap) bagi orang asing yang berada di RRT

- a) Memberikan perpanjangan Itas atau Itap bagi warga Negara RRT dan orang asing pemegang Itas atau Itap yang berada di negara RRT yang telah habis masa berlakunya tanpa kehadiran yang bersangkutan di Kantor Imigrasi setempat setelah mendapatkan rekomendasi atau notifikasi dari instansi yang berwenang.
- b) Memberikan perpanjangan Itas atau Itap sebagaimana dimaksud pada huruf a), diajukan oleh penjamin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.
- c) Perekaman biometrik (foto dan sidik jari) dengan cara mengambil dari rekaman yang ada pada database Simkim.
- d) Memberikan perpanjangan Itas atau Itap sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan masa berlaku dihitung sejak berakhirnya Itas atau Itap sebelumnya.
- e) Melakukan peneraan cap Itas atau Itap pada paspor kebangsaan setelah yang bersangkutan berada di Indonesia.

4. Kebijakan Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa per tanggal 20 Maret 2020

- a. Penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan diberlakukan kepada Orang Asing penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
- b. Penghentian sementara pemberian Visa Kunjungan saat kedatangan diberlakukan kepada Orang Asing subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 01.GR.01.06 tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.



- c. Bagi Orang Asing yang merupakan subjek BVK dan VKSK dapat diberikan visa berdasarkan permohonan melalui Perwakilan RI di Luar Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan surat keterangan sehat dalam Bahasa Inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara, telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah/ negara yang bebas virus corona, pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh pemerintah RI, dan jika persyaratan tidak terpenuhi, permohonan ditolak.
- d. Bagi Orang Asing yang karena terdampak kebijakan *Lockdown* di suatu negara sehingga tidak dapat memenuhi prosedur keimigrasian, dapat diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Izin Masuk Kembali dan Tanda Masuk.
- e. Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Izin Masuk Kembali dan Tanda masuk diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona

5. Kebijakan Tentang Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) terhadap Awak Alat Angkut Pasca Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) per tanggal 20 Maret 2020

Kakanim yang membawahi TPI untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terhadap nakhoda, kapten pilot atau awak alat angkut dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- b. Bagi awak alat angkut udara (*crew*) yang datang dengan alat angkutnya (*active crew*) tetap dapat diberikan cap tanda masuk manual yang berlaku sebagai izin tinggal kunjungan
- c. Bagi *crew* yang datang sebagai penumpang (*passive crew*) yang nantinya akan berangkat sebagai *active crew*, dapat diberikan cap tanda masuk manual dengan ketentuan:
 - 1) Adanya pemberitahuan tertulis dari pihak maskapai kepada Pejabat imigrasi di TPI bahwa yang bersangkutan akan berangkat sebagai *active crew*
 - 2) Pemberitahuan dimaksud diterima paling lambat 24 jam sebelum kedatangan *Passive crew*
 - 3) Menunjukkan tanda pengenal atau *crew member certificate* saat pemeriksaan di TPI



- d. Bagi awak alat angkut laut yang datang tidak dengan alat angkutnya, wajib memiliki visa yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
- e. Dalam hal awak alat angkut laut yang akan keluar Wilayah Indonesia tidak dengan alat angkutnya dapat diberikan *Exit Permit Only* dengan memperhatikan ketersediaan alat angkut yang dapat membawanya keluar wilayah Indonesia
- f. Pelaksanaan Pemeriksaan keimigrasian terhadap penumpang dan awak alat angkut di TPI agar menyesuaikan dengan kebijakan penghentian sementara BVK dan VKSK yang mulai berlaku tanggal 20 Maret 2020 pukul. 00.00 WIB

6. Kebijakan Tentang Penghentian Sementara Pelayanan Pemberian Paspor dan Keberangkatan PMI ke Luar negeri per tanggal 23 Maret 2020

Memerintahkan kepada Kakanim untuk melaksanakan hal-hal berikut :

- a. Bahwa seluruh Kantor Imigrasi untuk sementara tidak memberikan pelayanan pemberian paspor kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Calon Pelaut Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan pada kapal berbendera asing;
- b. Bahwa seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk tidak memberangkatkan CPMI dan Calon Pelaut Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan pada kapal berbendera asing kecuali bagi yang sudah memiliki visa kerja dan tiket transportasi ke negara tujuan penempatan dapat diberangkatkan sepanjang negara tujuan penempatan tidak menutup masuknya orang asing untuk bekerja;
- c. Bahwa penghentian ini bersifat sementara sampai situasi dan kondisi di Indonesia maupun di negara penempatan terkait penyebaran Virus Corona dapat diatasi sesuai dengan keputusan pemerintah yang berlaku;
- d. Berdasarkan hal tersebut di atas, agar Kepala Kantor Imigrasi dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa penghentian sementara pemberian paspor dan keberangkatan CPMI ke luar negeri guna Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (COVID-19).

7. Kebijakan tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Kantor Imigrasi per tanggal 23 Maret 2020

- a. Kepala Kantor Imigrasi agar:
 - 1) Membatasi pelayanan paspor dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak melalui nomor helpdesk yang disediakan oleh kantor imigrasi untuk permohonan bagi:



- Orang sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya atas rujukan dokter; dan
 - Orang dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda.
- 2) Memberikan informasi kepada Orang Asing untuk tidak perlu mengajukan permohonan izin tinggal keadaan terpaksa karena apabila izin tinggal telah melewati batas waktu (overstay) akan diberikan biaya beban dengan tarif Rp0,00 (nol rupiah) merujuk kepada Pasal 5 ayat (6) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- 3) Orang Asing yang diberikan biaya beban nol rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia setelah tanggal 5 Februari 2020.
- b. Kepala Divisi Keimigrasian agar:
- 1) Menonaktifkan kuota layanan antrian paspor online;
 - 2) Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap satuan kerja yang berada di lingkungan kerjanya; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan surat edaran ini secara berkala kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

8. Kebijakan tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia per tanggal 02 April 2020

- a. Melarang sementara Orang Asing untuk memasuki/transit di Wilayah Indonesia.
- b. Pelarangan sebagaimana dimaksud dikecualikan terhadap:
- 1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
 - 2) Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
 - 3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;
 - 4) Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan;
 - 5) Awak alat angkut; dan
 - 6) Orang Asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional.
- c. Orang Asing yang dapat masuk Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan:
- 1) surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara;
 - 2) telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah/negara yang bebas virus Covid- 19;
 - 3) pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- d. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang telah berakhir dan/atau tidak



dapat diperpanjang, diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi.

- e. Pemberian izin tinggal keadaan terpaksa tidak dipungut biaya.
- f. Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian sepanjang memberikan kemanfaatan umum.

Dalam hal pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang, proses perpanjangan Izin Tinggal diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PROGRES TINDAK LANJUT
PENYELESAIAN PERMASALAHAN BMN KEMENKUMHAM BERUPA TANAH
DI KECAMATAN TANGERANG, KOTA TANGERANG

A. Penyelesaian permasalahan tanah Kemenkumham yang digunakan oleh Pemkot Tangerang

1. Pemerintah Kota Tangerang memanfaatkan beberapa bidang tanah Kemenkumham yang berlokasi di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang untuk:
 - a. Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang;
 - b. Jalan Satria Sudirman;
 - c. Pedestrian Jalan Jenderal Sudirman;
 - d. Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Gedung SD Negeri Sukasari 4 dan SD Negeri Sukasari 5.
2. Dalam rangka penertiban pemanfaatan BMN, Kemenkumham dan Pemerintah Kota Tangerang telah menyusun Nota Kesepakatan Nomor $\frac{\text{SEK-PB.04.02-262}}{591/185-Kesamomi/2019}$ tanggal 23 Juli 2019, dengan kesepakatan bahwa Kemenkumham dan Pemerintah Kota Tangerang akan menyelesaikan penatausahaan atas bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut diatas.
3. Menindaklanjuti Nota Kesepakatan, Pemkot Tangerang mengajukan permohonan hibah kepada Kemenkumham atas bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud kepada Kemenkumham.
4. Selanjutnya, Kemenkumham dan Pemkot Tangerang serta Kantor Pertanahan Kota Tangerang secara bersama-sama melakukan pengukuran atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan untuk dihibahkan.
5. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh informasi sebagai berikut:

No.	Pemanfaatan Bidang Tanah	Luas (m ²)
1	Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang	3.364
2	Jalan Satria Sudirman	41.964
3	Pedestrian Jalan Jenderal Sudirman	13.408
4	Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.551
5	Gedung SD Negeri Sukasari 4 dan SD Negeri Sukasari 5	4.996
	Total	68.283

6. Dengan telah diperolehnya data luasan bidang-bidang tanah Kemenkumham yang telah dimanfaatkan oleh Pemkot Tangerang tersebut, Kemenkumham segera mengajukan usul persetujuan hibah kepada Pengelola Barang pada tahun 2020.

B. Penyelesaian permasalahan tanah Kemenkumham yang digunakan oleh Pihak Ketiga tanpa ijin

1. Tanah Kemenkumham yang dimanfaatkan untuk Pasar Pujasera
Kemenkumham telah melakukan penertiban dengan mengaihkan status penggunaan BMN berupa tanah seluas 16.659 m² yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga untuk Pasar Pujasera kepada Polri guna pembangunan Kantor Polres Metro Kota Tangerang.
Pengalihan status penggunaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-107/MK.6/WKN.7/2019 tanggal 9 September 2019, dan telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dari Kemenkumham kepada Polri melalui BAST Nomor $\frac{\text{BA/5/IX/LOG.9/2019/SLOG}}{\text{SEK-PB.04.01-381}}$ tanggal 26 September 2019.

2. Tanah Kemenkumham yang dimanfaatkan untuk Parkir Pool Alat Berat
Kemenkumham telah mengenakan mekanisme sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pemanfaatan tanah oleh Pihak Ketiga seluas 2.000 m² untuk Parkir Pool Alat Berat.
 - a. Pemanfaatan dalam bentuk sewa tanah untuk Parkir Pool Alat Berat telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang melalui surat Menteri Keuangan Nomor Nomor S-199/MK.06/ WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 2 Desember 2019 dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun;
 - b. Persetujuan sewa tersebut telah ditetapkan pelaksanaannya melalui SK Menkumham Nomor SEK-10.PB.04.02 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan nilai sewa sebesar Rp213.955.000,00.
 - c. Pihak Ketiga telah melakukan pembayaran sewa ke Kas Negara pada tanggal 18 Februari 2020.
 - d. Saat ini pelaksanaan sewa tersebut sedang dalam proses penandatanganan perjanjian sewa.
3. Tanah Kemenkumham yang dimanfaatkan untuk SPBU
Kemenkumham telah mengenakan mekanisme sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pemanfaatan tanah oleh KPPDK seluas 2.306,5 m² untuk SPBU.
 - a. Pemanfaatan dalam bentuk sewa tanah untuk SPBU telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang melalui surat Menteri Keuangan Nomor Nomor S-26/MK.6/WKN.07/2019 tanggal 4 Maret 2019 dengan jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun.
 - b. Persetujuan sewa tersebut telah ditetapkan pelaksanaannya melalui SK Menkumham Nomor Keputusan Menkumham Nomor SEK-25.PB.04.02 Tahun 2019 dengan nilai sewa sebesar Rp1.208.000.000,00.
 - c. KPPDK telah melakukan pembayaran sewa ke Kas Negara pada tanggal 4 April 2019.
 - d. Kemenkumham dan KPPDK telah menandatangani perjanjian sewa Nomor SEK.6-PB.04.02-12 tanggal 13 April 2019.
4. Kemenkumham juga telah mengenakan mekanisme sewa terhadap pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga pada beberapa lokasi tanah Kemenkumham di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, sebagai berikut:

No	Nama Penyewa	SK Penetapan Pelaksanaan Sewa		PNBP (Rp)
		Nomor	Tanggal	
1	Herry Sutrisno	SEK-33.PB.04.02 TAHUN 2019	26-03-19	79.546.000,00
2	Mumuh Darmawan	SEK-59.PB.04.02 TAHUN 2019	14-06-19	45.980.000,00
3	Rita Kusuma sari	SEK-57.PB.04.02 TAHUN 2019	20-05-19	191.585.000,00
4	M. Luthfi	SEK-80.PB.04.02 TAHUN 2019	23-08-19	195.515.000,00
6	Sri Eddy Muhammad	SEK-07.PB.04.02 TAHUN 2020	15-01-20	120.015.000,00
7	Djunaidi Salim	SEK-10.PB.04.02 TAHUN 2020	10-02-20	213.955.000,00
8	Nofli	SEK-29.PB.04.02 TAHUN 2020	19-02-20	137.265.000,00
Total				983.861.000,00

C. Penyelesaian permasalahan tanah Kemenkumham yang digunakan untuk rumah mandiri

Sekretaris Jenderal telah menyampaikan surat kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk melakukan inventarisasi atas rumah dinas mandiri baik yang telah maupun yang belum tercatat dalam daftar barang Kemenkumham melalui surat Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Nomor SEK.4-PB.04.04-685 tanggal 28 Mei 2019.

Sekretaris Jenderal juga segera menginstruksikan Satuan Kerja Kemenkumham di Kota Tangerang untuk melakukan inventarisasi rumah mandiri mengingat sebagian rumah mandiri juga tercatat dalam daftar barang Satuan Kerja.

Di samping upaya-upaya penertiban diatas, khususnya terkait penertiban tanah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga baik untuk kegiatan bisnis maupun rumah mandiri, Kemenkumham d.h.i Sekretaris Jenderal juga telah menyusun Surat Edaran Nomor SEK-03.PB.04.03 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 pada Satuan Kerja/UPT Kemenkumham di Kota Tangerang.

**Penatausahaan Aset yang berlokasi di Pulau Nusakambangan dan Penggunaan Lahan
pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI**

Uraian		Keterangan
Identifikasi Permasalahan	: Kuantitas/luasan Pulau Nusakambangan yang tercatat pada aplikasi SIMAK BMN Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum dapat diyakini mencerminkan luasan Pulau Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah yang sesungguhnya.	Dalam aplikasi SIMAK BMN tercatat dengan kuantitas 21.000.000 M2
Kronologis Pencatatan Pulau Nusakambangan pada SIMAK BMN Ditjen Pemasyarakatan	: Terdapat Satker di Pulau Nusakambangan yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN dan belum ada satuan kerja yang mencatat aset berupa tanah di Pulau Nusakambangan.	Temuan LKPP Tahun 2010
	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat tanah yang berlokasi di Pulau Nusakambangan melalui transaksi Saldo Awal dan segera mengurus proses sertifikasinya sesuai dengan petunjuk dari surat Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.4.PL.04.01-704 tanggal 22 Desember 2011 dengan luasan 21.000.000 M2 dan Nilai Aset Rp.5.938.315.345.	Tahun 2011
	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerima surat dari Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Nomor SEK.4.PL.04.01-166 tanggal 27 Pebruari 2012 perihal penyampaian Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang diantaranya menyebutkan bahwa luasan tanah yang berlokasi di Pulau Nusakambangan adalah 210.000.000 M2, sehingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan penyesuaian kuantitas/luasan tanah melalui transaksi “koreksi perubahan nilai/kuantitas” pada aplikasi SIMAK BMN menjadi 210.000.000 M2.	Tahun 2012
	Atas perbedaan luasan tanah yang berlokasi di pulau Nusakambangan tersebut, dilaksanakan rapat bersama antara Pihak KPKNL Jakarta IV (Pengelola Barang) dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal dan didapat kesepakatan bahwa luasan tanah yang dipakai adalah mengacu pada surat Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.4.PL.04.01-704 tanggal 22 Desember 2011 dengan luasan 21.000.000 M2, sehingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan kembali penyesuaian kuantitas/luasan tanah melalui transaksi “koreksi perubahan nilai/kuantitas” pada aplikasi SIMAK BMN menjadi 21.000.000 M2 dengan nilai tanah senilai Rp.719.134.600.000 berdasarkan pada hasil penilaian tanah dari KPKNL Purwokerto.	Tahun 2013 (dokumen BA IP dan Laporan Hasil Penilaian)
	Pelaksanaan revaluasi aset berupa tanah yang berlokasi di Pulau Nusakambangan oleh Tim KPKNL Jakarta IV dengan menggunakan luasan 21.000.000 M2 dengan nilai wajar tanah Rp.2.970.540.888.000 sesuai dokumen revaluasi tahun 2019;	Tahun 2017 dan 2019 (Dokumen LPK)

Penggunaan Lahan	:	Pemanfaatan Lahan/Tanah yang berlokasi di Pulau Nusakambangan Jawa Tengah adalah sebagai berikut :				Total luasan Tanah yang sudah teridentifikasi digunakan adalah 10.721.136 M2.	
		No	Nama Satker/Instansi	Bangunan Kantor/Jalan	Pembinaan WBP		Rumah Negara
				M2	M2		M2
		1	Lapas Terbuka NK	14.714	58.054		
		2	Lapas Batu	102.107			
		3	Lapas Besi	6.924	50.000		1.405
		4	Lapas Narkotika	19.200			
		5	Lapas Kembang Kuning	5.116	2.060		802
		6	Lapas Permisan	15.529	10.700		1.232
		7	Lapas Pasir Putih	30.400			15.990
		8	Bapas Nusakambangan	1.903			
		9	Lapas Karanganyar NK	250.000			
		10	Ditjen Pas	135.000			
		11	PT Holcim (SBI)	10.000.000			
		Sub Total		10.580.893	120.814	19.429	
		Total		10.721.136			
Proses Sertipikasi	:	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengajukan pensertipikatan Tanah Pulau Nusakambangan Jawa Tengah ke BPN Cilacap, namun tidak ada kejelasan kelanjutannya.				Tahun 2012	
Rencana Tindak Lanjut	:	Berdasarkan surat dari KPKNL Jakarta IV nomor S-691/WKN.07/KNL.04/2020 tanggal 03 April 2020, bahwa aset Tanah yang berlokasi di Pulau Nusakambangan menjadi target percepatan pelaksanaan sertipikasi BMN yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan terlebih dahulu melakukan penelitian fisik dan verifikasi kembali dokumen legalitas kepemilikan aset.				Tim pra sertipikasi Tanah Nusakambangan akan melakukan penelitian fisik secara komprehensif sehingga diperoleh data luasan tanah yang berlokasi di Pulau Nusakambangan dengan valid sebagai dasar perbaikan/koreksi pada Aplikasi SIMAK BMN.	
		Telah dilaksanakan rapat antara Ditjen Pas dengan Kementerian Keuangan (KPKNL Jakarta IV, Purwokerto, Kanwi DJKN Jawa Tengah, DJKN Pusat) pada Selasa tanggal 21 april 2020 melalui Zoom dan didapat kesepakatan bahwa akan dibentuk tim pra sertipikasi Tanah Nusakambangan serta pensertipikatan dilaksanakan setelah pra sertipikasi selesai di tahun 2021.					

Dokumen Dukung sebagai berikut:

1. 1923 No.382 Terjemahan Lembaran Negara Hindia Belanda tentang batas pulau nusakambangan.
2. 1928 No.381 Berita Negara Hinda Belanda tentang Pulau Nusakambangan sebagai pulau penjara.
3. 1937 No. 369, 370 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie.
4. 1937 No.369 Terjemahan Lembaran Negara Hindia Belanda tentang Pulau Nusakambangan sebagai pulau tertutup.
5. 1975-04-24 - Surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang penunjukan Dirjen Tuna Warga.
6. 2002-03-25 – Surat Menteri Kehakiman ke BPN Permohonan Hak Pengelolaan NK sebagai tempat pembinaan napi.
7. 2002-10-01 – Surat BPN kepada Menteri Kehakiman Pengelolaan Pulau NK sebagai tempat pembinaan napi.
8. 2011-10-28 - Langkah Pengamanan dan Tertib Pengelolaan BMN di LP NK-Setjen ke PAS.
9. 2011-11-23 - TL Langkah Pengamanan dan Tertib Pengelolaan BMN NK-PAS ke Sekjen.
10. 2011-12-15 - Notulen Rapat TL IP Satker di LP NK.
11. 2011-12-15 - Temuan BPK atas LKPP th 2010.
12. 2011-12-22 - Pencatatan tanah pada LP di Nusakambangan-Setjen ke PAS.
13. 2012-01-30 - Surat Pernyataan Ditjenpas Penguasaan NK.
14. 2012-02-15 - Pernyataan Sekjen 210juta m2.
15. 2012-02-29 - Permohonan penerbitan sertifikat tanah NK-PAS ke BPN.
16. 2013-06-12 - Dokumen IP Tindak Lanjut Temuan BPK 2010 Tanah Nusakambangan.
17. 2013-08-21 - Tanggapan atas Surat Bupati Cilacap ttg NK-Menkopolhukam ke Bupati Cilacap
18. 2015-01-19 - Penertiban Kawasan NK-Mendagri.
19. 2019-03-25 - KIB NK
20. 2020-04-03 - Bidang Tanah Subordinasi Tanah NK Ditpas-KPKNL ke PAS.
21. 2020-04-14 - Surat Permohonan Penerbitan Sertiifikat Tanah NK-PAS ke KPKNL Purwokerto.
22. 2020-04-20 - Rapat Koordinasi Sertifikasi BMN dari Kanwil DJKN Jakarta.
23. 2020_NOTULEN RAPAT 21 APRIL 2020_PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH NUSAKAMBANGAN.
24. LPK-00112_1_1_WKN.07_KNL.04_01.00_2019_95712
25. Keppres RI 38 Tahun 1974
26. Kontrak PT HOLCIM 2001

**Penatausahaan Aset yang berlokasi di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Tengah
pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI**

Uraian		Keterangan
Identifikasi Permasalahan	: Luas tanah di kecamatan Katikutana Kab. Sumba Barat yang tercatat pada aplikasi Simak BMN Direktorat Jenderal Imigrasi selaku UAKPB belum dapat diyakini luasan sesungguhnya saat ini dikarenakan okupasi oleh masyarakat setempat dan instansi Pemerintah setempat.	Dalam aplikasi SIMAK BMN tercatat dengan kuantitas 5.000 Ha
Kronologis Pencatatan Tanah di Waikabubak pada SIMAK BMN Ditjen Imigrasi	: Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memiliki aset tanah seluas 5.000 Ha di Kabupaten Sumba Tengah dengan Sertifikat Tanah Nomor 1 Tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sumba Barat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria atas nama Bupati Sumba Barat.	Tahun 1986 (Sertifikat Tanah Nomor 1 Tahun 1986)
	Pada tanggal 19 Oktober 1999, Sidang Umum MPR menyetujui hasil referendum Timor Timur yang artinya Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat yang memilih untuk menjadi warga Indonesia kemudian sebagian disediakan tempat bermukim di tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Barat (sekarang telah menjadi Kabupaten Sumba Tengah setelah dilakukan pemekaran wilayah) oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur.	Tahun 1999
	Tercatat di aplikasi Simak BMN Direktorat Jenderal Imigrasi melalui mekanisme saldo awal dengan nilai Rp542.000.000,- pada tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2010 terdapat Koreksi Nilai Tim Penertiban asset sehingga nilai nya menjadi Rp550.058.000,- dan pada tahun 2017 terdapat revaluasi nilai asset sehingga nilai asset tanah Waikabubak saat ini menjadi Rp.1.156.046.667.000,- dengan luasan 5.000Ha	Tahun 2007
	Kepala Divisi Keimigrasian beserta Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan peninjauan tanah milik Kementerian Hukum dan HAM R.I c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi.	29 Maret 2010
	Peninjauan tanah milik Kementerian Hukum dan HAM R.I c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. Provinsi Nusa Tenggara. Ditemukan bahwa pemukiman masyarakat Ex. Timor Leste yang memilih NKRI pada saat referendum Timor Timur digunakan tanpa ijin lahan/tanah seluas 500 Ha dan lahan seluas ±100 Ha telah dimanfaatkan untuk perkebunan coklat.	7 April 2010 (Laporan Hasil Peninjauan)
	Menindaklanjuti hasil laporan peninjauan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi bersurat kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. perihal permintaan bantuan personil Penilai Aset tanah Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah.	7 Juli 2010
	Selanjutnya Pejabat di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I., dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang, Nusa Tenggara Timur melakukan peninjauan lokasi atas aset tanah tersebut dan ditemukan bahwa lahan seluas ±100 Ha telah digunakan tanpa ijin lahan/tanah untuk pemukiman Transmigrasi Lokal SP2 oleh 250 KK, seluas 100 Ha, dan pendirian fasilitas sosial berupa sekolah dan gereja seluas 1.250 Ha.	21 Agustus 2010 (Laporan Hasil Peninjauan)

	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT pada saat itu (Dahlan Pasaribu) melakukan peninjauan lokasi atas aset tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi dan menemukan bahwa telah ada digunakan tanpa ijin lahan/tanah lainnya di atas tanah tersebut berupa proyek perlindungan hutan seluas ±76,1 Ha, peternakan sapi ±500 Ha, perkebunan kopi, kelapa jati, dan mahoni seluas ±100 Ha, serta pendirian bangunan gedung untuk SD-SMMP, SLB & PAUD, unit kantor desa, Puskesmas dengan total luas ±1.250 Ha.	24 Desember 2014 (Laporan Hasil Peninjauan)
	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT bersurat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Sumba Tengah Hal permohonan untuk tidak diterbitkan sertifikat tanah di atas lahan milik Kementerian Hukum dan HAM R.I c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi	30 Desember 2014 (Surat Nomor W22.PL.05.06-794)
	Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pemasangan papan nama kepemilikan lahan sebanyak 90 unit sebagai langkah pengaman aset inventarisasi BMN.	Tahun 2015
	Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV kembali melakukan peninjauan lokasi atas aset tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah.	10 November 2017 (Laporan Hasil Peninjauan)
	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT melaporkan perkembangan terkait aset tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah.	16 Juli 2018 (Laporan)
	Peninjauan aset tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah dilakukan oleh Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkumham, bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan R.I.	7 s.d 10 November 2018 (Laporan Hasil Peninjauan)
	Bagian Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan bersama dengan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan R.I. melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah.	6 Februari 2019 (Laporan Pelaksanaan Kegiatan)
	Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan melakukan wawancara bersama BPK mengenai langkah pemecahan yang sudah dilakukan terkait masalah tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah.	1 Maret 2019 (Notula hasil wawancara bersama BPK)
	Direktorat Jenderal Imigrasi bersurat perihal penyampaian pengelolaan BMN berupa Aset Tanah Milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang IV.	28 Agustus 2019 (Surat Nomor)
	Bagian Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan melakukan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang R.I.	5 Februari 2020 (Laporan Kegiatan)
	Sekretaris Direktur Jenderal Imigrasi a.n. Direktur Jenderal Imigrasi bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumba Tengah perihal Permohonan Pengukuran dan Pemblokiran atas Pengajuan Sertifikat di Atas Tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah.	12 Februari 2020 (Surat Nomor IMI.1-PB.02.05-1140)
	Bagian Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan melakukan kegiatan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang R.I. terkait persiapan rencana kegiatan pengukuran ulang luasan tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah.	18 Februari 2020 (Laporan Kegiatan)

		Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah bersurat sebagai respon atas surat yang dikirimkan sebelumnya pada tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Pengukuran dan Pemblokiran atas Pengajuan Sertifikat di atas Tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah kepada Menteri Hukum dan HAM R.I.	6 Maret 2020 (Surat Nomor 98/IP.02.03-53.17/III/2020)																																				
Penggunaan Lahan	:	Telah digunakan tanpa ijin lahan/tanah yang berlokasi di atas Tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut : <table><tr><th>TANGGAL PENINJAUAN</th><th>TUJUAN PENGGUNAAN LAHAN</th><th>LUAS</th></tr><tr><td rowspan="2">7 APRIL 2010</td><td>Pemukiman masyarakat Ex. Timor Leste yang memilih NKRI pada saat referendum</td><td>500 Ha</td></tr><tr><td>Perkebunan Coklat</td><td>±100 Ha</td></tr><tr><td rowspan="3">21 AGUSTUS 2010</td><td>Pemukiman Transmigrasi Lokasi SP2 untuk 250 KK</td><td>800 Ha</td></tr><tr><td>Perkebunan Kopi & Coklat</td><td>100 Ha</td></tr><tr><td>Fasilitas Sosial berupa sekolah & gereja</td><td>1.250 Ha</td></tr><tr><td rowspan="9">24 DESEMBER 2014</td><td>Proyek perlindungan hutan</td><td>±76, 1 Ha</td></tr><tr><td>Peternakan sapi</td><td>±500Ha</td></tr><tr><td>Perkebunan Kopi, Kelapa Jati, dan Mahoni</td><td>±100 Ha</td></tr><tr><td>Proyek perlindungan hutan</td><td>±76, 1 Ha</td></tr><tr><td>Peternakan sapi</td><td>±500Ha</td></tr><tr><td>Perkebunan Kopi, Kelapa Jati, dan Mahoni</td><td>±100 Ha</td></tr><tr><td>1 unit SD-SMP</td><td rowspan="4">±1.250 Ha</td></tr><tr><td>1 unit SLB & PAUD</td></tr><tr><td>2 unit Kantor Desa</td></tr><tr><td>1 unit Puskesmas Pembantu</td></tr><tr><td>16 JULI 2018</td><td>Total Pemanfaatan</td><td>± 3.226,1 Ha</td></tr></table>	TANGGAL PENINJAUAN	TUJUAN PENGGUNAAN LAHAN	LUAS	7 APRIL 2010	Pemukiman masyarakat Ex. Timor Leste yang memilih NKRI pada saat referendum	500 Ha	Perkebunan Coklat	±100 Ha	21 AGUSTUS 2010	Pemukiman Transmigrasi Lokasi SP2 untuk 250 KK	800 Ha	Perkebunan Kopi & Coklat	100 Ha	Fasilitas Sosial berupa sekolah & gereja	1.250 Ha	24 DESEMBER 2014	Proyek perlindungan hutan	±76, 1 Ha	Peternakan sapi	±500Ha	Perkebunan Kopi, Kelapa Jati, dan Mahoni	±100 Ha	Proyek perlindungan hutan	±76, 1 Ha	Peternakan sapi	±500Ha	Perkebunan Kopi, Kelapa Jati, dan Mahoni	±100 Ha	1 unit SD-SMP	±1.250 Ha	1 unit SLB & PAUD	2 unit Kantor Desa	1 unit Puskesmas Pembantu	16 JULI 2018	Total Pemanfaatan	± 3.226,1 Ha	Total luasan Tanah yang sudah teridentifikasi digunakan adalah 3.226,1 Ha atau seluas 32.261.000 m²
TANGGAL PENINJAUAN	TUJUAN PENGGUNAAN LAHAN	LUAS																																					
7 APRIL 2010	Pemukiman masyarakat Ex. Timor Leste yang memilih NKRI pada saat referendum	500 Ha																																					
	Perkebunan Coklat	±100 Ha																																					
21 AGUSTUS 2010	Pemukiman Transmigrasi Lokasi SP2 untuk 250 KK	800 Ha																																					
	Perkebunan Kopi & Coklat	100 Ha																																					
	Fasilitas Sosial berupa sekolah & gereja	1.250 Ha																																					
24 DESEMBER 2014	Proyek perlindungan hutan	±76, 1 Ha																																					
	Peternakan sapi	±500Ha																																					
	Perkebunan Kopi, Kelapa Jati, dan Mahoni	±100 Ha																																					
	Proyek perlindungan hutan	±76, 1 Ha																																					
	Peternakan sapi	±500Ha																																					
	Perkebunan Kopi, Kelapa Jati, dan Mahoni	±100 Ha																																					
	1 unit SD-SMP	±1.250 Ha																																					
	1 unit SLB & PAUD																																						
	2 unit Kantor Desa																																						
1 unit Puskesmas Pembantu																																							
16 JULI 2018	Total Pemanfaatan	± 3.226,1 Ha																																					

Langkah-langkah yang akan dilakukan	: Berdasarkan Notulen Wawancara dengan Tim BPK RI dengan nomor : /BAW-IMIGRASI-LK/03/2019 dengan point no (12) angka 6 s/d 9 dengan uraian sebagai berikut : Tanah yang digunakan oleh eks. Pengungsi Timor Timur, fasilitas social pendukungnya dilakukan analisis dan kajian sehingga didapat solusi yang sesuai ketentuan pengelolaan BMN; Tanah yang digunakan oleh PEMDA Prov. NTT, PEMDA Sumba Tengah dipertimbangkan untuk dilakukan perikatan dengan mekanisme pinjam pakai atau balik sewa, selanjutnya PEMDA agar menyampaikan usul Pemanfaatan; Terhadap tanah yang keberadaannya jelas (tidak digunakan masyarakat atau Pemerintah Daerah) dipertimbangkan untuk memenuhi permohonan kebutuhan lahan bagi Kepolisian, TNI AD dan TNI AU; Membentuk tim Pengamanan tanah melibatkan satker Kumham terdekat (lapas Waikabubak dan lapas terbuka Waikabubak) untuk melakukan pengamanan/pemantauan secara berkala pada tanah Ditjenim termasuk pemasangan papan nama kepemilikan.	
Rencana Tindak Lanjut	: Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Imigrasi nomor IMI-PB.04.03-4342 tanggal 28 Agustus 2019 hal Penyampaian Pengelolaan BMN berupa Aset Tanah Milik Ditjneim di Kab. Sumba Barat NTT dengan tujuan surat ke Kepala KPKNL Jakarta IV, Adapun rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut : 1. Rumah Detensi Imigrasi; 2. Kantor Imigrasi; 3. Disaster Recovery Center (DRC) SIMKIM; 4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria; 5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Wanita; 6. Lapas Pemuda; 7. Lapas Pria Dewasa; 8. Lapas Wanita; 9. Lapas Khusus Koruptor; 10. Lapas Khusus Teroris; 11. Lapas Khusus Narkotika; 12. Lapas Terbuka; 13. Rupbasan; 14. Bapas;	

		15. Puslat SDM Kemenkumham Zona Timur; 16. Puslat dan Pengembangan Kemenkumham; 17. Politeknik Imigrasi Zona Timur; 18. Wisma; 19. Gedung Pertemuan; 20. Rumah Dinas Kemenkumham	

Tanah Sumba

Bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi kedepannya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembentukan SK Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah pada bulan Juni 2020 (output: SK Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Milik Ditjen Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah);
2. Pengelolaan BMN berupa tanah di Sumba Tengah melalui mekanisme pinjam pakai oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Pemerintah Provinsi NTT dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Pemerintah Provinsi NTT atas lahan yang telah dimanfaatkan oleh mereka melalui mekanisme pinjam pakai;
 - b) Melakukan pemeriksaan berkas dan mengajukan usulan pinjam pakai BMN ke Pengguna Barang;
 - c) Penandatanganan perjanjian pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Pemerintah Provinsi NTT.
3. Persiapan pengukuran ulang pengembalian batas tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi dan pemetaan penggunaan tanah tanpa izin oleh pihak-pihak terkait pada bulan Juli sampai dengan November 2020 (output: penetapan anggaran pengukuran dan pemetaan, sosialisasi rencana pengukuran ke masyarakat setempat, koordinasi dengan pihak terkait di lapangan);
4. Membuat draft Nota Kesepahaman antara Ditjen Imigrasi dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah terkait dengan pengelolaan/penatausahaan tanah Ditjen Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah pada bulan Desember 2020 (output: draft Nota Kesepahaman);
5. Melakukan pengukuran ulang terhadap Tanah Milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2021;
6. Melanjutkan upaya pengamanan aset terhadap batas-batas wilayah di Tanah Milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2021.
7. Melakukan pembaruan sertifikasi terhadap tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah hasil pengukuran ulang;

Tanah NusaKambangan

Bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM ke depannya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Pembina Pengelolaan BMN pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk menyusun action plan penertiban pencatatan dan pengelolaan BMN berupa Tanah Pulau Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah;
- b. Berkoordinasi dengan Pihak yang berkaitan dengan Pengelolaan PPKT dhi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pihak terkait lainnya melalui Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- c. Akan membentuk Tim Pra Sertifikasi aset BMN berupa Tanah Pulau Nusakambangan dengan melibatkan Pihak Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan RI dhi DJKN Pusat dan KPKNL Jakarta IV, KPKNL Purwokerto dan Badan Pertanahan Nasional;
- d. Akan menyusun RAB guna menyelesaikan permasalahan pencatatan dan pengelolaan aset BMN berupa tanah Pulau Nusakambangan.

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan						Keterangan
		Bulan						
		vii	viii	ix	x	xi	xii	
1	Penyusunan dan finalisasi rencana aksi dalam rangka tertib pengelolaan BMN berupa tanah pulau Nusakambangan							Opsi rencana aksi ini akan dilaksanakan jika kondisi sudah normal
2	Melaksanakan koordinasi dengan para pihak - Dengan Biro Pengelolaan BMN - Dengan Instansi vertikal terkait - Dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap							
3	Melaksanakan inventarisasi awal							
	- Melakukan Inventarisasi pemanfaatan lahan oleh satuan kerja pemasyarakatan							
	- Melakukan Inventarisasi pemanfaatan lahan pada dermaga sodong dan dermaga wijayapura							
4	Memasang plang tanda kepemilikan							
	- Pemasangan plang kepemilikan pada masing-masing satuan kerja							

	- Pemasangan plang kepemilikan pada dermaga sodong dan wijayapura						

Tanah Tangerang

Bahwa Kementerian Hukum dan HAM ke depannya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melanjutkan pengamanan aset Tanah di Tangerang dari pemanfaatan pihak ketiga tanpa ijin dengan melakukan pemasangan papan tanda kepemilikan tanah dan pemasangan papan nama/stiker rumah negara pada bulan Juli 2020.
- Melanjutkan inventarisasi terhadap rumah negara dan rumah mandiri pada seluruh satuan kerja di Kota Tangerang pada bulan Agustus 2020.
- Melanjutkan penertiban atas tanah yang digunakan oleh pihak ketiga tanpa ijin melalui mekanisme sewa pada bulan Juli 2020.
- Mengajukan permohonan hibah atas aset tanah Kemenkumham yang digunakan oleh Pemkot Tangerang kepada Pengelola Barang sesuai Nota Kesepakatan Nomor SEK-PB.04.02-262 tanggal 23 Juli 2019 pada bulan Juni 2020.
591/185-Kesamoni/2019
- Melakukan pengukuran ulang dan pemetaan atas tanah-tanah Kemenkumham di Kota Tangerang pada bulan Juli 2020.

PENGELOLAAN BMN BERUPA TANAH DI KABUPATEN SUMBA TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2020

[illegible]

K E M E N T E R I A N H U K U M D A N H A K A S A S I M A N U S I A
Jl.H.R Rasuna Said Kav 6–7, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940.

